

Perjanjian No: III/LPPM/2012-02/12-P

**BIROKRASI TRADISIONAL
DARI SATU KERAJAAN
DI SUMATERA
Harajaon Batak Toba**



**Disusun Oleh:
Dr. Ulber Silalahi MA**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Prahayangan
2012**

(lapangan di Sumatera Utara, Tapanuli Utara, Toba Samosir dan sekitarnya)
Kata Pengantar, ii

Bab 1 Pendahuluan, 1

1. Latarbelakang Masalah,1
2. Rumusan Masalah
3. Maksud dan Tujuan,
4. Kegunaan,7
5. Kerangka Berfikir
 1. Hakekat Birokrasi,8
 2. Tipe Birokrasi
 3. Karakteristik Birokrasi Tradisional
6. Metode Penelitian,20
 1. Rancangan Penelitian
 2. Unit Observasi
 3. Pengumpulan Data,21
 4. Analisis Data,24

Bab 2 Harajaon Batak Toba Tradisional,23

1. Asal dan Wilayah Kediaman Batak Toba
2. Penyebaran
3. Identifikasi Birokrasi Pemerintahan dalam Masyarakat Batak Toba Tradisional

Bab 3 Ideologi Birokrasi Kerajaan Tradisional

1. Kebudayaan dan Ideologi,48
2. Ideologi Kerohanian,50
3. Ideologi Kekerabatan,55

Bab 4 Struktur Teritorial

1. Pendahuluan,73
2. Birokrasi Pusat,74
3. Birokrasi Daerah, 74
 - 6.1.1 Birokrasi Huta,75
 - 6.1.2 Birokrasi Horja,83
 - 6.1.3 Birokrasi Bius,86

Bab 5 Struktur Birokrasi Kerajaan Tradisional: Dimensi Fungsional

1. Pendahuluan,99
2. Raja Huta: Tugas Pokok dan Fungsi,99
3. Raja Horja: Tugas Pokok dan Fungsi,102
4. Raja Bius: Tugas Pokok dan Fungsi,104
5. Perangkat Birokrasi: Tugas dan Fungsi,105

- 6. Perangkat Birokrasi
 - 6.1. Pande Bolon,105
 - 6.2. Ulubalang,107,
 - 6.3. Ulu Taon,108
 - 6.4. Parbaringin,109
 - 6.5. Peradilan,,111

Bab 6 Birokrasi Kerajaan Dinasti Singamangaraja
Kedudukan Raja,134

Bab 7 Kesimpulan
9.1 Kesimpulan,161
9.2 Rekomendasi, 172

DAFTAR PUSTAKA

Kata Pengantar

Penelitian tentang birokrasi dalam masyarakat tradisional didorong oleh pemikiran bahwa praktek birokrasi pemerintahan modern di tingkat lokal sangat terkait dengan nilai-nilai birokrasi dalam masyarakat tradisional terutama dalam masyarakat agraris yang masih kuat melaksanakan nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal tradisional.

Penelitian ini fokus pada birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional (birokrasi tradisional) sebagai satu etnik dominan mendiami empat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah deskripsi tentang birokrasi dalam masyarakat Toba tradisional berkenaan dengan budaya dan ideologi, struktur dan aparatur, serta aturan. Penelitian ini dilakukan untuk menjadi referensi tentang birokrasi dalam masyarakat tradisional Indonesia.

Adalah sulit untuk mengungkap dan menjelaskan segala hal yang terjadi pada masa dahulu kala (Toba, *sian narobi ni narobi*) karena *so diida mata I jala so dibege pinggol huhut* (tidak dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh kuping). Untuk mengungkap birokrasi tradisional dalam masyarakat Toba sejalan dengan ungkapan:

Ndada na hulingga umbahon na hulonggo

Ndada na huida umbahen na huboto

Na tangkas sinungkun do sian raja namamboto

Na sunurathon sian nasa parbinotoan.

Asa:

Baliga do hubaligahon,

Barita do hubaritahon

Temuan ini “*boido do hatahononhon i; alai tutu ndang boi ondolhononhon anggo hasisintong ni sudena i.*”

Oleh karena itu

Bandung, Juni 2012.

Peneliti

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari tesis yang mengatakan bahwa tanah Batak makmur tanpa satu kerajaan yang melindungi dan memerintah. Kalaupun ada “raja” dan “kerajaan” di tanah Batak, ia tidak berkedudukan dan tidak memiliki kekuasaan seperti seorang raja atau kerajaan-kerajaan di daerah lain seperti di Jawa. Tetapi sebaliknya, ada pandangan bahwa tidak pernah ada masyarakat tanpa pemerintahan. Manakala seseorang mengkaji masyarakat, ia menemukan unit politik atau pemerintahan. Pranata politik (pemerintahan) itulah yang mengontrol dan menjaga pengelompokan yang lebih besar, yakni masyarakat tadi. Semua masyarakat politik memiliki pemerintahannya dengan birokrasinya sendiri yang diperlukan untuk mengatur hidup bersama dari masyarakat, mengatur kepentingan masyarakat, meningkatkan standar kehidupan masyarakat dan mendistribusikan penghasilan secara lebih merata, atau meningkatkan pengaruh warga terhadap pemerintah mereka dan sekaligus menciptakan ketertiban sosial.

Beranjak dari pendapat terakhir, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentang masyarakat Batak Toba apakah memiliki birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional. Data yang akan dikumpulkan terkait dengan dengan pencari utama birokrasi pemerintahan kerajaan. Penelitian dilakukan dengan penelitian deskriptif-kualitatif. Data bersumber dari dongeng-dongeng suci yang hidup dalam masyarakat Batak Toba tradisional yang didapatkan dengan metode dokumenter dan wawancara mendalam. Data tersebut kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan atau diverifikasi. Juga menggunakan triangulasi analisis data yaitu *the narrative analysis* (analisis naratif) dan *the illustrative method* (metode ilustratif); *content analysis* (analisis isi), analisis wacana dan penafsiran teks serta *semiotic analysis* (analisis semiotik).

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Batak Toba telah memiliki pemerintahan kerajaan tradisional. Pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba memiliki ideologi, struktur, aparatur dan aturan hukum sebagai pencari utama dari birokrasi pemerintahan kerajaan. Ideologi dalam bentuk komunalitas; struktur dalam bentuk teritorial-fungsional, aparatur yang mengatur adat, ekonomi, pertahanan, keuangan, keadilan dan agama; dan aturan hukum sebagai pegangan dalam berpemerintahan terkait erat dengan nilai-nilai budaya kultural tradisional Batak Toba. Birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba tidak feodalistis sehingga berbeda dengan birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional dalam masyarakat lain seperti kerajaan-kerajaan di Jawa yang feodalistis. Secara kultural, setiap masyarakat tradisional memiliki karakteristik sendiri bermasyarakat dan berpemerintahan. Karena itu tata pemerintahan tradisional Batak Toba akan berbeda dengan tata pemerintahan masyarakat tradisional lainnya.

Bab 1

Pendahuluan

1. Latarbelakang Masalah

Institusi yang paling menentukan keberhasilan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah birokrasi. Karenanya birokrasi bukanlah suatu institusi yang baru dalam kehidupan manusia. Birokrasi telah menjadi suatu institusi penting bukan saja dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat tradisional. Birokrasi sangat diperlukan bagi keberadaan negara tradisional maupun negara modern. Birokrasi, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern, diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat dan mendistribusikan penghasilan secara lebih merata, atau meningkatkan pengaruh warga terhadap pemerintah mereka¹. Keunggulan birokrasi merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, tradisional maupun modern. Ini berhubungan dengan bagaimana menyelesaikan tugas-tugas administratif dengan cara mengorganisasi dan mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis dalam rangka memperbaiki, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administratif.

Birokrasi telah ada dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu dalam kehidupan masyarakat dan negara masa lalu. Birokrasi juga masih dibutuhkan kini dan yang akan datang. Hanya dalam masa lalu atau masyarakat tradisional, pada masa negara dan pemerintahan-pemerintahan primitif, ukuran birokrasi pada umumnya sangat kecil dan sederhana. Sebaliknya, masa kini dan yang akan datang masyarakat memiliki negara dan pemerintahan dengan wilayah yang luas dan administrasi yang cukup besar dengan berjuta-juta penduduk sehingga membutuhkan lingkup birokrasi yang besar dan kompleks. Negara modern memerlukan birokrasi yang besar. Bahwa birokrasi telah menjadi salah satu institusi yang paling terkemuka di dalam masyarakat modern pada umumnya, dibandingkan dengan masyarakat tradisional.

Birokrasi sudah ada dalam masyarakat tradisional. Kemudian birokrasi tradisional tersebut mengalami perubahan mendasar ketika kolonialisasi merajalela di banyak dari apa yang disebut sebagai negara-negara sedang berkembang terutama di Asia dan Afrika. Ketika dominasi kolonialisme menguasai negara-negara sedang berkembang, “bentuk-bentuk kekuasaan yang lama telah merosot dan berubah; pemerintahan-pemerintahan primitif dan negara-

negara tradisional, berikut birokrasi-birokrasinya, telah menghilang – atau mengalami transformasi-transformasi. Mutasi-mutasi politik telah mulai terjadi di banyak dari apa yang disebut sebagai negeri-negeri sedang berkembang itu, dan telah menggantikan penyesuaian-penyesuaian yang dibawa oleh dominasi kolonial”². Dengan demikian, di banyak negara-negara sedang berkembang telah ada negara-negara tradisional dan pemerintahan-pemerintahan primitif berikut birokrasinya. Namun birokrasi tradisional tersebut kemudian digantikan oleh birokrasi modern yang diperkenalkan oleh negara-negara kolonial ke negara-negara jajahan mereka. Birokrasi yang diperkenalkan itu disebut sebagai “birokrasi kolonialisme”.

Jadi, seperti di banyak negara-negara sedang berkembang, jauh sebelum pemerintahan kolonialisme Belanda menguasai Indonesia, masyarakat Indonesia tradisional telah menerapkan organisasi birokrasi yang mengatur kehidupan “berpemerintahan” setempat. Birokrasi yang dikenal dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia tradisional adalah “birokrasi kerajaan”. Tentang keberadaan sebuah birokrasi dalam masyarakat tradisional secara rinci dapat dilihat pada birokrasi kerajaan di Jawa sejak jaman Majapahit sampai pada kerajaan-kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta. Juga ditemukan pada kerajaan Padjadjaran dan Galuh di Jawa Barat, kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, Pagaruyung di Sumatera Barat.

Tiap kerajaan pasti memiliki birokrasi yang berfungsi mengatur, melindungi dan menjaga persatuan, perdamaian dan keadilan serta memberi keamanan, ketertiban, keteraturan lokal, pelayanan untuk kepentingan publik selama berabad-abad lamanya. Tidak ada pemberontakan rakyat kepada raja karena rakyat memiliki kepercayaan sangat tinggi kepada Raja selama berabad-abad lamanya dan pergantian raja dilakukan dalam suasana damai.

Dalam mengatur kehidupan berpemerintahan setempat, birokrasi kerajaan sudah memiliki budaya dan ideologi³ sebagai sistematisasi dari nilai-nilai tradisional yang merupakan pola ide yang menguraikan dan mengekalkan struktur sosial dan kebudayaan suatu kelompok masyarakat dan memberikan gambaran terhadap pola tingkah laku, sikap dan tujuan masyarakat tersebut. Memiliki struktur⁴ yang menentukan peranan dan hubungan-hubungan peranan, alokasi kegiatan, distribusi otoritas di antara posisi-posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. Memiliki aparatur⁵ dengan wewenang dan tanggungjawab melaksanakan fungsi dan tugas birokrasi. Memiliki aturan dan hukum⁶ sebagai petunjuk formal bagi perilaku seluruh aparatur dan masyarakat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuat birokrasi menjadi efektif untuk mewujudkan tujuan pemerintahan kerajaan.

Sebagai suatu kelompok masyarakat maka Batak Toba-Tua atau Batak Toba tradisional memiliki birokrasi yang mengatur kehidupan berpemerintahan dan

bermasyarakat pada masa itu. Tentu ada nilai-nilai positif dan keunggulan birokrasi tradisional ketika mengatur kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat Batak Toba tradisional pada masa itu yang dapat diakomodasi dalam praktek birokrasi pemerintahan modern sekarang ini. Sayangnya belum dilakukan studi secara intensif dan mendalam oleh para ahli dan peneliti atau penstudi birokrasi tentang nilai-nilai positif dan keunggulan birokrasi tradisional tersebut. Pada hal pengetahuan tentang nilai-nilai positif dan keunggulan dari birokrasi dalam masyarakat tradisional penting karena dapat diaplikasikan bagi efektivitas praktek birokrasi lokal modern, terutama di era otonomi daerah sekarang ini. Itu karena birokrasi pemerintahan modern, termasuk birokrasi pemerintahan lokal di Indonesia, tidak lepas dari budaya politik lokal tradisional yang primordial dan paternalistik yang bersumber dari kultur lokal setempat. Sistem nilai kultural begitu kuat, meresap, dan berakar di dalam jiwa masyarakat lokal sehingga sulit diganti dan/atau diubah dalam waktu singkat⁷. Untuk itulah dilakukan penelitian tentang Birokrasi dalam Masyarakat Tradisional dengan Etnik Batak Toba Tradisional sebagai Studi Kasus.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latarbelakang seperti penjelasan di atas mendorong perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional atau birokrasi tradisional yang terdapat dalam masyarakat Batak Toba Tua. Yang ingin dideskripsikan ialah tentang dimensi esensial atau unsur utama dari birokrasi tradisional dalam birokrasi tradisional masyarakat Batak Toba. Dengan demikian fokus penelitian berkenaan dengan:

1. Ideologi birokrasi tradisional masyarakat Batak Toba.
2. Struktur birokrasi tradisional masyarakat Batak Toba.
3. Perangkat atau aparatur birokrasi tradisional masyarakat Batak Toba.
4. Aturan dan hukum birokrasi tradisional masyarakat Batak Toba.

3. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsi ideologi, struktur, aparatur dan aturan dalam birokrasi tradisional masyarakat Batak Toba. Tujuannya adalah teridentifikasi serta terdeskripsi ideologi, struktur, aparatur dan aturan dari birokrasi pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional.

Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk menambah pengetahuan tentang birokrasi lokal tradisional di Indonesia, mengungkapkan kekayaan sosial-budaya lokal yang melatarbelakanginya dan sebagai model dalam menstudi birokrasi lokal tradisional dalam masyarakat

tradisional lain di Indonesia. Sedangkan dari segi praktis, kajian ini bermanfaat untuk mengangkat kearifan lokal dalam praktek pemerintahan dan birokrasi. Nilai-nilai budaya lokal positif dalam kehidupan birokrasi tradisional dapat dimanfaatkan oleh mereka yang terlibat dalam bidang pemerintahan lokal modern. Dengan kata lain, hasil kajian ini akan mempermudah untuk mensiasati optimasi nilai positif budaya birokrasi lokal tradisional untuk mendukung budaya birokrasi lokal modern dengan sedapat mungkin menghilangkan nilai budaya lokal negatif yang menjadi kendala dalam birokrasi lokal modern agar tercipta birokrasi pemerintah lokal modern yang efektif berbasis kearifan lokal.

4. Kerangka Konseptual⁸

4.1. Negara, Pemerintah dan Birokrasi

Terminologi birokrasi sangat inheren dengan politik, pemerintahan dan administrasi publik. Terminologi birokrasi juga sangat erat kaitannya dengan negara dan pemerintah. Sekecil apapun birokrasi dan sesederhana apapun birokrasi, ia dibutuhkan dalam suatu negara dan pemerintahan. Negara merupakan institusi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur masyarakat di mana di dalamnya juga terdiri dari bagian-bagian kecil yang menjadi objek yang diperintah. Bagian-bagian kecil itu dianggap sudah menyerahkan kekuasaannya secara sukarela maupun karena hukum untuk mengambil keputusan dan sepakat untuk mengikutinya⁹.

Disebut sebagai suatu negara jika memiliki pemerintahan yang berdaulat, rakyat yang menjadi warga dan wilayah tempat berlakunya kedaulatan pemerintahan itu¹⁰. Negara adalah rumah utama birokrasi dalam ranah publik. Begitu negara berdiri secara legal formal maka birokrasi baru bekerja. Karena itu birokrasi bekerja untuk negara termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Birokrasi adalah alat negara dan pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara dan pemerintah. Dengan demikian keberadaan dan arah birokrasi diasumsikan selalu mengikuti arah kebijakan dan politik negara dan pemerintah¹¹. Dengan demikian ada hubungan erat antara negara dan birokrasi.

Pemerintahan juga sangat dekat hubungannya dengan birokrasi. Negara memiliki pemerintahan dan pemerintah merupakan lembaga yang mengatur birokrasi. Jadi, meskipun disebut birokrasi adalah alat negara, ia juga menjadi alat pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Seperti diketahui bahwa, pemerintahan adalah keseluruhan struktur, lembaga dan unit-unit dalam negara yang bertugas untuk mengatur terlaksananya tugas-tugas pemerintah baik yang bersifat internal maupun kepada masyarakat umum¹². Dengan demikian menjadi sangat jelas keeratan hubungan antara pemerintah dan birokrasi. Tanpa birokrasi mungkin orang masih bisa menyebut nama dan keberadaan sebuah

pemerintahan secara de facto, namun bisa dipastikan tidak ada pemerintahan yang efektif tanpa birokrasi yang baik¹³. Yang melakukan seluruh tugas pengaturan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah adalah birokrasi. Tugas utama birokrasi adalah untuk menjalankan pemerintahan dan juga sebagai struktur yang menjamin kelancaran pemerintahan. Secara lebih khusus lagi, birokrasi merupakan alat pemerintah untuk mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat¹⁴.

4.2. Hakekat Birokrasi Pemerintah

Birokrasi bukanlah suatu fenomena modern. Ia telah ada sejak beribu-ribu tahun lalu dalam berbagai negara dan masyarakat tradisional dalam bentuknya yang sederhana, baik di Eropah maupun di Asia. Ketika Max Weber mengemukakan pemikirannya tentang “*ideal type*” dari sebuah organisasi yang disebut birokrasi, sebelumnya dia menemukan sistem pengaturan yang ada dalam masyarakat Mesir Kuno, Cina Kuno dan Romawi Kuno sama seperti yang ada di negara-negara eropa modern. Tetapi pada masa lalu, kebanyakan ukuran negara tradisional sangat kecil baik secara teritorial maupun institusional sehingga birokrasi juga masih sederhana. Sementara dalam negara modern masa sekarang ini ukuran negara dan pemerintahan sangat besar sehingga berimplikasi pada ukuran birokrasi menjadi sangat kompleks.

Tidak ada satupun pemerintah tanpa birokrasi¹⁵ sebab birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk melaksanakan keputusan-keputusan dan kebijakan publik baik tidak hanya dalam masyarakat modern melainkan juga masyarakat tradisional. Birokrasi, baik dalam tataran konsep maupun dinamika penerapannya di lapangan, adalah bagian penting bagi bangunan penyelenggaraan pemerintahan¹⁶. Ia merupakan satu sistem yang mengatur jalannya pemerintahan. Birokratisasi atau pembirokrasian merupakan satu fenomena yang memengaruhi semua aspek kehidupan¹⁷, karena itu birokrasi diperlukan sebagai suatu perangkat melalui mana tujuan organisasi tercapai dengan mengandalkan peran individu-individu (disebut birokrat) sebagai pelaksana fungsi dan aktivitas organisasi. Tetapi, apakah birokrasi itu?. Jawaban atas pertanyaan ini bukanlah hal yang mudah. Ini diakui oleh Martin Albrow dengan menulis:

Orang yang berharap menemukan kejelasan tentang konsep tersebut (penulis: maksudnya birokrasi) dengan cara kembali kepada ilmu sosial dan ilmu politik hanya akan kecewa. Ilmuwan politik, sosiolog dan ahli ilmu manajemen, semuanya telah mempersembahkan serpihan-serpihan teori dan riset penting tentang birokrasi. Pembagian kerja akademis ini telah mengembangkan konsep tersebut. Dalam mencari kesepakatan ketepatan istilah tentang konsep tersebut, para ahli dalam disiplin yang berdekatan ini berkuat pada suatu titik, yakni membiarkan adanya berbagai konsep birokrasi

yang sama sekali bertentangan, tanpa komentar. Tetapi, kendatipun mereka memulai karya dengan ucapan seperti “birokrasi menghindari definisi”, atau “istilah birokrasi tidak mempunyai satu pengertian pun yang bisa dibuktikan”, para penulis terus mendiskusikan birokrasi, apa pun bentuknya. Sebagian besar ilmuwan sosial dan politik bersepakat bahwa birokrasi adalah hal penting bagi pemikiran dan riset akademik, sebagaimana hal tersebut banyak diperdebatkan oleh para politisi dan rakyat¹⁸.

Jika dipertanyakan kembali apakah birokrasi itu, maka secara etimologis, birokrasi berasal dari kata “*bureaucracy*” (Inggris) dari kata *bureau* + *cracy*. Kata *bureau* (bahasa Perancis) berarti biro atau kantor, sedangkan kata *cracy* dari kata *cratein* (bahasa Latin) atau *kratein* (Yunani) berarti mengatur. Jadi birokrasi berarti mengatur biro atau kantor. Dalam *The Oxford English Dictionary*¹⁹ dikemukakan dua arti birokrasi yaitu “*Government by bureau; usually officialism*”, dan “*Government officials collectively.*” Dalam arti yang kedua, birokrasi sering diartikan sebagai *officialdom* (kerajaan pejabat atau organisasi atau kantor pejabat) yang memiliki *official duties* (kewajiban resmi) yang ada hubungannya dengan kepentingan publik. Birokrasi pemerintah adalah sentral dari penyelesaian urusan publik sebab segala urusan publik selalu membutuhkan legitimasi birokrasi pemerintah. Martin Albrow mengatakan:

Istilah ini (maksudnya *bureau*, penulis) selalu diartikan sebagai tempat para pejabat bekerja. Tambahan sisipan “*cracy*” yang diturunkan dari kata Yunani (“*kratein*”, peny.) yang berarti “mengatur” (*to rule*), menghasilkan istilah yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, menembus budaya-budaya lain. Konsep Yunani tentang pemerintahan telah lama diserap ke dalam bahasa-bahasa besar Eropa. Begitu pula dengan istilah baru ini, yang kemudian begitu mudah mengalami transliterasi, sebagaimana istilah-istilah “demokrasi” atau “aristokrasi”. Istilah baru tersebut segera menjadi bagian perbendaharaan dalam istilah politik internasional. *Bureaucratie* dalam bahasa Perancis, menjadi *bureaukratie* dalam bahasa Jerman (yang sebelumnya *burokratie*), *burocrazia* dalam bahasa Italia, dan *bureaucracy* dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, serupa dengan kata turunan “*democracy*”, maka “*bureaucracy*” pun diturunkan menjadi “*bureaucrat*”, “*bureaucratic*”, “*bureaucratism*”, “*bureaucratist*” dan “*bureaucratization*”²⁰.

Jadi, birokrasi mudah diucapkan tetapi memiliki konotasi yang sulit dipahami. Istilah birokrasi sering diberi makna lain dan simpang siur baik oleh pemakai maupun pendengar. Ia memiliki banyak wajah. Suatu ketika birokrasi memiliki makna yang menunjuk pada efisiensi, tetapi pada saat yang lain justru berarti inefisiensi. Menurut bahasa sehari-hari, istilah “birokrasi” menjadi satu julukan yang mengacu pada inefisiensi dan inefektivitas pemerintahan, tentu saja ini bukan arti birokrasi yang sesungguhnya²¹. Kadang birokrasi dimaknakan sebagai institusi pemerintah atau organisasi pemberi layanan publik. Ketika

birokrasi dipersepsikan sama dengan institusi pemerintah, maka tidak heran jika birokrasi dengan segala jenis cacatnya juga menjadi cacat pemerintah. sebagai orang yang memberi layanan publik, hampir setiap orang memiliki satu opini, biasanya negatif, tentang birokrasi. Sebagai institusi pemberi layanan publik, birokrasi dimaknakan memiliki prosedur kerja berbelit-belit, lamban, kaku, bertele-tele, dan mekanisme kerja yang tidak efisien dan tidak efektif.

Martin Albrow mencatat sekurang-kurangnya tujuh pengertian dalam istilah birokrasi yaitu: birokrasi sebagai organisasi rasional (*rational organization*), birokrasi sebagai inefisiensi organisasional (*organizational inefficiency*), birokrasi sebagai aturan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat (*rule of officials*), birokrasi sebagai administrasi publik (*public administration*), birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat-pejabat (*administration by officials*), birokrasi sebagai satu tipe organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hirarki dan peraturan-peraturan (*type of organization with specific characteristic and quality as hierarchies and rules*), birokrasi sebagai satu kualitas esensial dari masyarakat modern (*an essential quality of modern society*).²² Milakovich dan Gordon mengemukakan tiga makna birokrasi:

1. *all governments offices: "the bureaucracy" is the totality of government offices or bureaus (a French word meaning "office") that constitute the permanent government of a state.*
2. *all public official: "the bureaucracy" refers to all of the public officials of a government – both high and low, elected and appointed.*
3. *a general invective : bureaucracy is often used as a general invective to refer to any inefficient organization encumbered by red type (a symbol of excessive formality and attention to routine)*²³.

Sebenarnya, birokrasi yang secara etimologi berarti mengatur kantor merupakan istilah yang menunjuk pada tipe organisasi. Max Weber menyebut birokrasi sebagai struktur ideal dari organisasi. Bahkan model struktur yang ia katakan sebagai alat yang paling efisien bagi organisasi-organisasi untuk mencapai tujuannya²⁴. Struktur atau birokrasi tersebut sering dimaknakan sebagai organisasi yang menekankan atau dicirikan dengan adanya aturan-aturan, hirarki, pembagian kerja yang jelas dan tuntas, mengikuti prosedur-prosedur, dan titikberat pada struktur keorganisasian secara menyeluruh. Menurut Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer, tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis disebut birokrasi²⁵. Karena itu birokrasi menunjuk pada satu bentuk dari organisasi administratif yang khusus. Ia merupakan tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi²⁶.

Birokrasi adalah suatu sistem untuk mengatur jalannya pemerintahan. Oleh karena itu istilah birokrasi dapat dimaknakan sebagai suatu tipe “organisasi pemerintah”. Sebagai organisasi pemerintah²⁷, maka secara spesifik, birokrasi diartikan sebagai aparat pemerintah, sipil maupun militer, yang melakukan tugas dan fungsi dalam pemerintahan dan karena tugas dan fungsi itu mereka menerima gaji dari pemerintah; dan suatu alat atau instrumen pemerintah untuk melaksanakan keputusan-keputusan serta kebijakannya. Oleh karena itu birokrasi dianggap sebagai bentuk tunggal terbaik dari organisasi yang memperlihatkan *consistency, continuity, predictability, stability, deliberateness, efficient performance of repetitive tasks, equity, rationalism, and professionalism*²⁸.

Jadi, wajar dan dapat dimaklumi jika ada yang merasa kebingungan ketika ia mempelajari birokrasi. Itu karena konsep birokrasi bukanlah satu konsep yang mudah didefinisikan apalagi dijelaskan. Tetapi dalam studi ini birokrasi didefinisikan sebagai satu organisasi yang didasarkan atas ideologi, struktur, aparatur dan aturan untuk mencapai tujuan-tujuan. Ideologi, struktur, aparatur dan aturan dalam masyarakat tradisional selalu terkait dengan budaya tradisional, utamanya agama dan adat. Agama dan adat merupakan institusi atau instrumen pokok dan menjadi mesin penting dalam kehidupan berpemerintahan dalam masyarakat tradisional.

4.3. Tipologi Birokrasi

Ketika menjelaskan birokrasi²⁹ berdasarkan kurun waktu, umumnya dikemukakan dua tipe birokrasi³⁰, yaitu birokrasi modern dan birokrasi tradisional. Birokrasi modern disebut juga birokrasi rasional, sedangkan birokrasi tradisional disebut juga birokrasi patrimonial³¹. Yang membedakan kedua tipe birokrasi tersebut ialah asal usul atau sumber kewenangan yang dipunyai oleh pemegang kekuasaan yang menjalankan birokrasi. Dalam birokrasi modern seperti yang ada dalam birokrasi Barat, sumber kewenangan adalah rasional-legal, sementara sumber kewenangan birokrasi tradisional, seperti di Cina Kuno, adalah karisma dan tradisi³². Weber mengidentifikasi birokrasi rasional untuk birokrasi modern dan birokrasi patrimonial untuk birokrasi tradisional. Sering birokrasi modern dikontraskan dengan birokrasi tradisional, birokrasi rasional dikontraskan dengan birokrasi patrimonial, hubungan prinsipal-agensi dalam birokrasi modern dikontraskan dengan hubungan patron-klien dalam birokrasi tradisional.

4.3.1. Birokrasi Modern

Birokrasi modern merupakan birokrasi ala Max Weber yang dia sebut sebagai birokrasi rasional. Ketika menjelaskan birokrasi rasional, Max Weber, seorang sosiolog Jerman kenamaan abad ke-19, membedakan antara tindakan

sosial sebagai pranata kehidupan sosial dan tindakan terorganisasi secara rasional sebagai pranata kehidupan birokrasi³³. Bagi Weber, “birokrasi adalah suatu sarana mengubah tindakan sosial ke dalam tindakan terorganisasi secara rasional³⁴. Untuk itu birokrasi Weberian menekankan bagaimana seharusnya mesin birokrasi itu dijalankan secara profesional dan rasional.

Weber memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam proses rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial. Proses rasionalisasi ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip-prinsip memimpin organisasi sosial³⁵. Sebagai bagian dari proses rasionalisasi, birokrasi rasional juga berkecenderungan untuk memisahkan manusia dari alat-alat produksi, dan cenderung menumbuhkan formalisme dalam organisasi pada umumnya³⁶. Dengan mengambil data dari kondisi birokrasi di Jerman dan di Inggris, Weber menyusun sebuah model birokrasi “tipe ideal” (*ideal type*)³⁷ yang berisi beberapa karakteristik³⁸.

Pertama, pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian kerja adalah proses pembagian kewajiban dan tanggungjawab ke dalam bagian-bagian dan tugas yang lebih dispesialisasi untuk efisiensi kerja, membantu organisasi menggunakan personel dan sumber-sumber secara efisien. Pembagian kerja yang jelas memungkinkan birokrasi untuk menggunakan para spesialis dalam setiap posisi tertentu dan membuat setiap dari mereka bertanggungjawab atas kinerja efektif.

Kedua, hirarki (*hierarchical*). Struktur hirarki menentukan tingkatan jabatan menurut kekuasaan untuk masing-masing jabatan. Dengan demikian struktur hirarki melahirkan struktur otoritas (*authority structure*). Struktur otoritas menentukan siapa yang memiliki hak membuat keputusan menurut kepentingan pada level berbeda di dalam organisasi. Secara tipikal, otoritas meningkat pada masing-masing tingkatan yang lebih tinggi hingga ke hirarki puncak. Posisi hirarki level bawah di bawah kontrol dan pengarahan dari posisi hirarki level atas. Artinya, setiap pejabat dalam satu hirarki administratif bertanggungjawab terhadap atasan masing-masing atas keputusan-keputusan yang diambilnya dan juga atas tindakan-tindakannya sendiri. Pejabat pada hirarki level atas memiliki otoritas terhadap pejabat pada hirarki level bawahannya yang berarti mereka mempunyai hak untuk mengeluarkan petunjuk-petunjuk atau perintah dan bawahannya berkewajiban mematuhi-nya. Jadi penentuan hirarki membantu kontrol perilaku pekerja dengan membuat jelas tugas dan kewajiban untuk masing-masing secara ketat di mana mereka berada dan dalam berhubungan dengan pegawai atau unit lain.

Ketiga, aturan-aturan formal (*formal rules*). Aturan adalah petunjuk formal bagi perilaku seluruh pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Aturan ini menjadi standar yang dirancang untuk mempertahankan uniformitas yang terdapat

dalam setiap tugas tanpa memandang jumlah personalia yang terlibat di dalamnya dan koordinasi dari tugas-tugas yang berlainan. Peraturan-peraturan yang eksplisit menentukan tanggungjawab anggota organisasi dan hubungan di antara mereka.

Keempat, impersonalitas (*impersonality*). Pejabat dan aparatur birokrasi yang ideal menjalankan pekerjaan dan aturan secara impersonalitas formalistik. Bahkan aturan itu sendiri menentukan impersonalitas hubungan antara pegawai dan antara pejabat pada level yang lebih tinggi dengan pejabat pada level di bawahnya. Untuk aturan sebagai standar rasional yang mengatur operasi-operasi tanpa campurtangan dari pertimbangan-pertimbangan personal, sebuah pendekatan yang objektif harus dikembangkan dalam organisasi dan secara khusus kepada para klien. Jika seorang pegawai mengembangkan perasaan-perasaan yang kuat tentang bawahan atau kliennya, dia pasti menghadapi kesulitan besar karena harus membuang jauh-jauh perasaan-perasaan pribadinya agar tidak mempengaruhi keputusan-keputusan pekerjaannya. Jadi penyingkiran pertimbangan pribadi merupakan satu prasyarat tercapainya efisiensi. Karena itu, misalnya, semua pekerjaan pegawai harus dievaluasi menurut aturan dan data objektif, tidak ada toleransi dan tidak diskriminatif atau memberikan perlakuan khusus, termasuk kepada klien. Pejabat yang tidak menjaga jarak sosial dan terlibat secara pribadi dalam kasus-kasus para bawahan dan kliennya cenderung memperlihatkan perlakuan yang diskriminatif.

Kelima, komitmen karir seumur hidup (*lifelong career commitment*). Dalam organisasi birokratik pekerjaan dipandang sebagai satu karir seumur hidup. Karena itu pekerja harus direkrut berdasarkan kualifikasi-kualifikasi teknis dan terhindar dari tindakan pemecatan yang sewenang-wenang. Di samping itu ada sistem promosi berdasarkan senioritas atau berdasarkan prestasi atau berdasarkan keduanya. Ini akan mendorong loyalitas pegawai terhadap organisasi dan *esprit de corps* di antara anggota-anggotanya. Identifikasi pegawai dengan organisasi mendorong mereka memberi yang terbaik kepada organisasi dengan menomorduakan kepentingan sendiri.

Keenam, rasionalitas (*rationality*). Para pejabat dan karyawan secara rasional menggunakan sarana dan prasarana agar lebih efisien ketika mencapai tujuan organisasi. Bila aktivitas diarahkan kepada sasaran, organisasi menggunakan finansialnya dan sumber daya manusia secara efisien. Untuk itu kegiatan organisasi dan pemanfaatan finansial dan sumberdaya manusia dan semua keputusan dilakukan secara logis (*logically*) dan secara ilmiah (*scientifically*).

Stephen P. Robbins mengatakan bahwa karakteristik-karakteristik birokrasi menggambarkan “ideal type” mengenai organisasi yang rasional dan efisien.

Tujuan-tujuannya jelas dan eksplisit. Posisi diatur dalam suatu hirarki berbentuk piramida, dengan wewenang yang makin meningkat waktu bergerak ke atas alam organisasi. Kewenangan terletak pada posisi, bukan pada orang-orang yang menduduki posisi tersebut. Seleksi para anggota didasarkan atas kualifikasi mereka daripada “siapa yang mereka kenal”; persyaratan tentang posisi menentukan siapa yang akan dipekerjakan dan dalam posisi yang mana; dan prestasi adalah kriteria bagi promosi. Keterikatan terhadap organisasi dimaksimalkan dan konflik kepentingan dihilangkan dengan cara memberikan pekerjaan seumur hidup (*life time employment*) dan dengan memisahkan peran anggota di luar pekerjaan dari yang disyaratkan untuk memenhi tanggungjawab organisasi³⁹.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut – yang dapat dipecah menjadi tiga kelompok karakteristik: yang berhubungan dengan struktur dan fungsi dari organisasi, yang berhubungan dengan cara untuk memberi imbalan terhadap usaha, dan yang berhubungan dengan perlindungan bagi para anggota secara individual⁴⁰ – maka Weber yakin bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang paling mampu untuk mencapai tingkat rasionalitas dan efektivitas maksimal. Pembagian kerja dalam birokrasi meminimalkan adanya pengerjaan satu tugas oleh dua jabatan yang berbeda dan juga sekaligus meminimalkan perselisihan antar pejabat. Hierarki dalam birokrasi memudahkan dilakukannya perencanaan dan koordinasi secara sentralistik dan sekaligus memfasilitasi pelaksanaan kendali dan disiplin. Penetapan jabatan berdasarkan kualifikasi membuat para pejabat yang ada memiliki level pengetahuan dan kompetensi yang lebih tinggi. Aturan-aturan dalam birokrasi akan menghasilkan standardisasi yang dapat menghemat tenaga di mana tidak perlu lagi dicarikan solusi baru setiap kali menghadapi sebuah masalah dan dengan begitu hasil yang bisa didapatkan bisa diperkirakan. Sikap impersonal di dalam menjalankan tugas akan membuat para pejabat birokrasi bekerja secara objektif dan mencegah terjadinya tindakan yang tidak rasional seperti pemberian peluang-peluang istimewa terhadap individu atau kelompok tertentu atau diskriminasi⁴¹.

Jadi, birokrasi menunjukkan ada pembagian kerja dengan struktur hirarki yang didasarkan pada aturan formal secara tertulis yang diterapkan secara impersonal oleh pegawai yang bekerja secara penuh waktu dan seumur hidup dan yang menjunjung rasionalitas⁴². Birokrasi membutuhkan birokrat yang memiliki keterampilan, pengalaman dan keahlian⁴³. Birokrasi dengan karakteristik tersebut merupakan tipe ideal dari suatu organisasi. Tipe ideal merupakan satu konstruksi abstrak yang membantu memahami tindakan sosial menjadi tindakan terorganisasi secara rasional atau kehidupan sosial ke kehidupan birokrasi. Menurut Weber, tidak mungkin memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan, kecuali hanya memahami sebagian dari gejala itu. Tipe ideal bukannya mampu menghasilkan suatu deskripsi yang benar dari konsep birokrasi secara

keseluruhan. Tipe ideal itu hanyalah sebuah konstruksi yang bisa menjawab suatu masalah tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu. Tipe ideal birokrasi itu ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi memiliki suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara rasional. Dan rasional merupakan kunci dari tipe ideal birokrasi.

Keunggulan administrasi birokrasi untuk menciptakan atau menghasilkan efisiensi diharapkan berasal dari karakteristik-karakteristik birokrasi seperti dikemukakan oleh Weber. Tetapi harus disadari bahwa “tipe ideal” Weber ini tidak menyajikan suatu rataan atribut atas semua birokrasi yang ada, melainkan hanya sebagai abstraksi aspek-aspek birokrasi. Birokrasi yang sempurna tidak pernah ada dan tidak pernah bisa diwujudkan, tidak ada satupun organisasi empiris yang memiliki struktur yang sama persis dengan konstruk tipe ideal Weber.⁴⁴ Tipe ideal birokrasi yang dikembangkan oleh Weber, merupakan tipe ideal dari birokrasi modern. Dalam banyak hal, karakteristik dari birokrasi modern yang dikemukakan oleh Weber tersebut tidak ditampakkan dalam dan beberapa di antaranya bertentangan dengan birokrasi tradisional. Sebagai contoh, jika rasional merupakan kunci dari tipe ideal birokrasi modern, maka irrasional atau bersifat mistis merupakan bagian penting dari roh birokrasi tradisional.

4.3.2. Birokrasi Tradisional

Birokrasi bukan saja ditemukan dalam masyarakat modern⁴⁵, melainkan juga dalam masyarakat tradisional, seperti Mesir Kuno, Cina Kuno dan Romawi Kuno dan juga Indonesia pada era sebelum kolonialisme. Negara jajahan seperti Indonesia, umumnya sudah mengenal negara⁴⁶ dan pemerintahan dan birokrasi tradisional. Dalam perspektif kultural, birokrasi dalam masyarakat tradisional inheren dengan organisasi sosial. Birokrasi tradisional disebut juga birokrasi patrimonial. Apa yang dimaksud dengan birokrasi patrimonial?. Tentang patrimonial, Balandier menulis:

Norma-normanya adalah kebiasaan yang dianggap tak tercela, cara kewenangannya pada esensinya personal, dan organisasinya tidak sama dengan administrasi dalam pengertian modern istilah itu. Ia mempergunakan penghormatan ketimbang keberfungsian-nya; tak ada pemisahan antara wilayah privat dan publik di sini. Ini adalah sebuah bentuk dominasi tradisional⁴⁷.

Sementara Mas’ud Said mengatakan:

Patrimonialisme sendiri bisa dipahami sebagai perluasan dari kewenangan patriarkhal dalam urusan-urusan kenegaraan. Keserupaan ini bisa digambarkan dengan bagus dengan menganalogkan seorang raja yang patrimonial yang bisa memberikan perintah sesuka hatinya kepada para

pejabatnya sebagaimana seorang bapak yang patriarkhal bisa memerintah anaknya sesuka hatinya⁴⁸.

Jadi, secara institusional, birokrasi patrimonial bisa saja mengembangkan ciri-ciri birokratis yang memiliki pembagian fungsional dan rasionalitas. Tetapi dalam hal sumber kekuasaan dan selama menjalankan kekuasaannya sangat berbeda dimana dalam birokrasi patrimonial, raja tidak terikat dengan aturan-aturan legal-rasional.

Namun, pemerintahan yang sungguh-sungguh patrimonial berbeda secara sosiologis dari pemerintahan yang birokratis jika setiap tipe pemerintahan tersebut semakin dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Pemerintahan yang patrimonial terutama tidak membedakan secara birokratis antara apa yang bersifat “privat” dan “publik”, dimana pemisahan ini merupakan sebuah elemen yang esensial dari apa yang disebut madani. Di bawah patrimonialisme, pemerintahan politik diperlakukan sepenuhnya sebagai urusan yang bersifat personal dari sang penguasa, dan kekuasaan politik dianggap sebagai bagian dari hak milik pribadi sang penguasa, yang bisa dieksploitir dengan menggunakan upeti-upeti dan pemberian-pemberian⁴⁹.

Dalam birokrasi tradisional atau patrimonial, pola hubungan bersifat personal dan familier, pola hubungan atasan-bawahan bersifat paternalistik. Kedudukan dan tingkahlaku seluruh hirarki didasarkan pada hubungan yang disebut *patron-client*⁵⁰. Menurut Dorodjatun Kuntjoro Jakti birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga perkawulaan, dimana patron adalah gusti atau juragan dan klien adalah kawula⁵¹. Korps ini disebut sebagai abdi dalem yang bertugas menjadi pelayan raja, menjaga keamanan dan stabilitas kerajaan, serta mengumpulkan materi dalam bentuk upeti-upeti dari rakyat.

Pada masa feodalisme, birokrasi lebih sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan raja. Oleh karena itu, pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi lebih dititikberatkan kepada penguasa atau raja daripada kepada rakyat⁵². Pada era ini, para abdi dalem sering mendapat kesempatan untuk mewariskan kedudukannya kepada keturunannya atau anggota keluarga lainnya jika raja merasa puas atas pelayanannya. Mereka bisa merekomendasikan keluarganya untuk menduduki jabatan dalam birokrasi kerajaan⁵³. Dalam birokrasi tipe patrimonial para pejabat yang bekerja tidak sebebaskan orang-orang yang diangkat secara kontraktual seperti dalam birokrasi rasional atau modern. Contoh-contoh birokrasi seperti ini ditemukan dalam Imperium Romawi terakhir, Mesir Kuno, dan Imperium Bizantium. Hakekat sesungguhnya dari gagasan birokrasi patrimonial terletak pada keberadaan suatu badan⁵⁴.

4.4. Penciri Utama Birokrasi Tradisional

Birokrasi tradisional atau birokrasi dalam masyarakat tradisional dapat dipahami dari penciri atau unsur pokoknya. Ada beberapa penciri pokok dari birokrasi⁵⁵, tetapi untuk mendeskripsikan birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional dibatasi hanya pada ideologi, struktur, aparatur dan aturan.

4.4.1. Ideologi

Tiap kelompok masyarakat mempunyai sistem nilai kultural dasar. Sistem nilai kultural dasar yang dimiliki bersama tersebut akan menuju ke arah kesepakatan umum tentang cara berperilaku dalam masyarakat⁵⁶, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Sistem nilai merupakan dasar hubungan sosial para anggota masyarakat⁵⁷. Menurut Shiles, sistem nilai dasar mempunyai kemungkinan untuk melahirkan “ideologi”.⁵⁸ Ideologi merupakan pola ide yang menguraikan dan mengekalkan struktur sosial dan kebudayaan suatu kelompok sosial dan memberikan gambaran terhadap pola tingkah laku, sikap dan tujuan kelompok sosial tersebut⁵⁹, seperti halnya birokrasi. Ideologi birokrasi membantu membentuk hakekat dari sistem birokrasi yang biasanya secara luas dihubungkan dengan nilai-nilai atau sistem ide yang terakit dengan tradisi, kepercayaan, prinsip yang mencerminkan upaya mempertahankan kepentingan suatu kelompok sosial.

Ideologi adalah suatu sistem gagasan yang mendukung seperangkat norma-norma sosial⁶⁰ dan merupakan suatu sistem ide yang paling terakit, seperti tradisi, kepercayaan, prinsip, pandangan hidup, falsafah yang mencerminkan upaya mempertahankan kepentingan suatu kelompok atau masyarakat. Tidak mengherankan jika Parson mendefinisikan ideologi sebagai sebuah tubuh dari ide-ide yang sekaligus bersifat empiris dan evaluatif sehubungan keadaan-keadaan yang aktual dan potensial dari suatu sistem sosial.⁶¹ Ada empat kriteria ideologi (Roy C. Macridis. 1989):

1. *Comprehensiveness*: ideologi mencakup banyak hal termasuk ide besar tentang realitas kehidupan di dunia ini, antara lain bagaimana kedudukan manusia dalam kosmos, hubungan manusia dengan Tuhannya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat atau pemerintahan, sifat dasar dari manusia, dan sarana yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan utama dari kehidupan sosial dan politik. Ide-ide itu secara logis konsisten dan diperjuangkan oleh suatu kelompok untuk diwujudkan.
2. *Pervasiveness*: ideologi merupakan rangkaian ide telah membentuk keyakinan dan sikap politik dari banyak orang, mempengaruhi secara luas anggota masyarakat, merembes memasuki relung-relung kehidupan masyarakat.

3. *Extensiveness*: ideologi merupakan suatu rangkaian ide-ide yang diikuti oleh banyak orang, dan memainkan peranan yang amat menonjol dalam percaturan politik di antara mereka.
4. *Intensiveness*: ideologi adalah suatu rangkaian ide-ide yang bisa memberikan suatu komitmen yang kuat bagi pengikut setianya dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keyakinan dan tindakan politiknya.

Ideologi membenarkan metode-metode tradisional yang jarang sekali dipertanyakan dan yang cenderung dipikirkan pertama kali sebagai cara-cara terbaik dan terakhir karena tradisi-tradisi suci tidak perlu digugat, apalagi diganti dengan tradisi-tradisi baru⁶². Ideologi juga merupakan pola ide yang bukan hanya menguraikan dan mengekalkan struktur sosial dan kebudayaan suatu kelompok sosial, tetapi juga memberikan gambaran terhadap pola tingkah laku, sikap dan tujuan kelompok sosial tersebut.⁶³ Ketika komunitas menghadap-kan dirinya pada berbagai hubungan sosial dan aktivitas dan tujuan bersama maka ada satu kemungkinan yang sering muncul ialah kecenderungan untuk mengadakan sistematisasi dari nilai-nilai dasar.

Satu ideologi, karena itu, dapat dipandang sebagai satu set prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin⁶⁴ yang dapat bertindak sebagai satu bentuk perekat sosial (*social cement*), penetapan kelompok sosial, dan tentu saja keseluruhan masyarakat, dengan satu set penyatuan keyakinan dan nilai-nilai dalam tataran politik dan pemerintahan⁶⁵, tidak terkecuali birokrasi. Dari perspektif filsafat politik, nilai-nilai dan perilaku politik dan birokrasi berada pada bingkai ideologi. Jika ideologi politik membantu membentuk hakekat dari sistem politik, maka ideologi birokrasi membantu membentuk hakekat dari sistem birokrasi. Ideologi birokrasi merupakan seperangkat tujuan-tujuan yang mengilhami aktivitas birokrasi.

Sistem birokrasi dalam masyarakat tradisional biasanya secara luas dihubungkan dengan nilai-nilai atau sistem ide yang terakit dengan tradisi, kepercayaan, dan prinsip yang mencerminkan upaya mempertahankan kepentingan kelompok masyarakat tradisional. Bisa dimengerti jika masyarakat tradisional menjadikan nilai-nilai budaya (*culture values*) sebagai ideologi birokrasi. Ideologi birokrasi dalam masyarakat tradisional merupakan hasil sistematisasi dari nilai kultural dasar dari masyarakat tradisional setempat. Meminjam istilah Clifford Geertz, ini merupakan “sistem konseptual setempat” di bidang ideologi dalam kesatuan politik⁶⁶. Ideologi sebagai hasil sistematisasi dari nilai-nilai kultural kemudian dijadikan sebagai prinsip atau doktrin birokrasi dalam masyarakat tradisional. Ideologi birokrasi merupakan seperangkat tujuan-tujuan yang mengilhami aktivitas birokrasi dan membantu membentuk hakekat dari sistem birokrasi yang biasanya secara luas dihubungkan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu yang terkait dengan sistem nilai dasar dan budaya

masyarakat setempat. Jadi, ideologi birokrasi merupakan satu set kepercayaan atau keyakinan atas nilai-nilai yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku birokrasi.

Dalam masyarakat tradisional, ada nilai-nilai budaya yang dijadikan sebagai ideologi birokrasi. Nilai-nilai budaya dasar dijadikan sebagai prinsip atau doktrin birokrasi dalam masyarakat tradisional. Ia merupakan hasil sistematisasi nilai dasar dari masyarakat tradisional setempat. Dalam proses sistematisasi ini tujuan komunitas diperjelas dan corak hubungan sosial yang ideal ditentukan. Ideologi dapat dipandang sebagai satu landasan utama legitimasi kognitif bagi pola orientasi nilai-nilai birokrasi.

4.4.2 Struktur

Sering birokrasi dipahami sebagai struktur⁶⁷ yaitu struktur administratif dari setiap organisasi besar. Menurut Gortner, Nichols dan Ball, "*The term bureaucracy is used ... to identify a particular type of organization structure*"⁶⁸. Jadi, birokrasi merupakan *a specific set of structural arrangements*. Birokrasi selalu berstruktur. Struktur merupakan satu identitas atau dimensi utama dari birokrasi. Struktur merupakan karakteristik dari organisasi-organisasi birokratis formal⁶⁹; suatu rantai komando vertikal yang jelas di mana setiap unit adalah subordinasi kepada salah satu superior; satu gambaran utama dari pemerintahan dan organisasi birokratis lain seperti halnya pemerintahan kerajaan dalam masyarakat tradisional. Menurut Stephen P. Robbin, satu kelompok karakteristik dari birokrasi Weber berhubungan dengan struktur dan fungsi organisasi⁷⁰. Stephen P. Robbin mengatakan:

Model Weber memperinci suatu hierarki kedudukan, dengan setiap kedudukan berada di bawah kedudukan yang lebih tinggi. Masing-masing kedudukan didiferensiasi secara horisontal oleh pembagian kerja. Pembagian kerja tersebut menciptakan unit-unit yang menguasai bidang-bidang tertentu, menentukan daerah dimana dilakukan kegiatan yang konsisten dengan kemampuan anggota unit, memberi tanggungjawab bagi palaksanaan tindakan tersebut, dan mengalokasikan wewenang yang sebanding untuk melakukan tanggungjawab tersebut. Pada saat yang sama, peraturan tertulis mengatur prestasi tugas para anggota. Pembebanan struktur dan fungsi-fungsi tersebut memberikan keahlian tingkat tinggi, koordinasi peran, dan kontrol dari anggota melalui standarisasi⁷¹.

Struktur adalah pola-pola yang menentukan peranan dan hubungan-hubungan peranan, alokasi kegiatan untuk memisahkan subunit-subunit, distribusi otoritas di antara posisi-posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.⁷² Umumnya struktur organisasi birokrasi pemerintahan menunjukkan dua konfigurasi yaitu fungsional dan teritorial⁷³. Konfigurasi fungsional dari struktur

menunjuk pada departementalisasi berdasarkan fungsi. Dimensi fungsional dari struktur birokrasi berhubungan dengan pembagian kerja berdasarkan fungsi dengan menghimpun aktivitas tugas atau pekerjaan yang sama dalam satu unit organisasi yang sama yang tersusun secara hirarkis dari tingkat paling atas hingga ke tingkat paling bawah. Konfigurasi teritorial menunjuk pada struktur yang didepartementasi berdasarkan teritori atau wilayah karena kegiatan birokrasi tersebar secara geografis. Aktivitas dalam tiap unit birokrasi teritorial menjadi tanggungjawab dari masing-masing aparatur birokrasi teritorial.

4.4.3 Aparatur

Konsep birokrasi juga dapat merujuk bukan saja pada rutinitas administrasi melainkan juga pada sosok para pejabat⁷⁴. Aparatur sebagai pejabat merupakan dasar bagi konsep tentang birokrasi baik modern maupun tradisional⁷⁵. Aparatur atau pejabat birokrasi, juga disebut birokrat, merupakan orang yang menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dirancang dalam struktur birokrasi. Jabatan-jabatan dalam struktur harus diisi oleh aparatur atau pejabat yang melaksanakan dan bertanggungjawab atas seluruh tugas pokok dan fungsi organisasi birokrasi serta bertanggungjawab atas hasil dari setiap unit struktur. Karena itu birokrat selalu terkait dengan dan menjadi aktor penting dalam sebuah pemerintahan untuk berbagai urusan seperti urusan politik dan urusan urusan administrasi dan pembuatan keputusan kebijakan publik. Itu berlaku di semua jenis pemerintahan⁷⁶.

Jadi, birokrasi sering dimaknakan sebagai *the body of officials and administrators*, secara khusus dari satu pemerintah atau departemen pemerintah. Birokrasi sering diartikan sebagai *officialdom* (kerajaan pejabat atau organisasi atau kantor pejabat) yang memiliki *official duties* (tugas dan tanggungjawab resmi) yang ada hubungannya dengan kepentingan publik. Dan pejabat birokrasi pemerintah adalah sentral dari penyelesaian urusan publik. Segala urusan selalu membutuhkan legitimasi dari pejabat birokrasi pemerintah. Dalam struktur birokrasi tradisional, raja ditempatkan pada pusat struktur. Sementara di bawahnya ditemukan juga aparat birokrasi, seperti *abdi dalem* dalam masyarakat dan kerajaan Jawa. Raja melalui aparat birokralitasnya mengatur rakyatnya. Unsur-unsur fungsional dari birokrasi tradisional merupakan alat dan perangkat raja. Sebagai contoh, mereka diberi hak-hak atas tanah dan menarik pajak dan kemudian diserahkan kepada raja setelah mereka mengambil sekedarnya.

4.4.4 Aturan

Aturan dan hukum selalu ada dalam dan dibuat oleh birokrasi dalam masyarakat tradisional. Karena itu tepat jika Weber mengemukakan aturan

sebagai satu karakteristik utama dari birokrasi. Masyarakat dan birokrasi akan *chaos* jika tidak ada aturan dan tidak didasarkan atas aturan yang jelas. Dalam sistem hukum modern disebut sebagai *rules of laws*. Aturan dan hukum merupakan petunjuk formal bagi perilaku seluruh aparatur dan masyarakat dalam berpemerintahan. Aturan dan hukum menjadi standar yang dirancang untuk mempertahankan keadilan atau perlakuan yang sama dalam setiap tindakan aparatur dan warga tanpa memandang kedekatan kekerabatan. Aturan-aturan yang eksplisit menentukan tanggungjawab dan kewajiban dari setiap aparatur birokrasi dan masyarakat yang terkait dengannya atau dengan sesama masyarakat.

5. Metode Penelitian

5.1. Disain Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan meringkaskan secara mendalam⁷⁷ birokrasi dalam masyarakat tradisonal, utamanya yang berkaitan dengan ideologi, struktur, aparatur dan aturan birokrasi dengan studi kasus⁷⁸ birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisonal (birokrasi tradisonal). Sebagai studi kasus maka penelitian ini akan menyelidiki dan menggali birokrasi dalam masyarakat tradisonal dengan kasus dalam masyarakat Batak Toba tradisonal pada periode sebelum pemerintahan kolonialisme Belanda mengyasai Batak Toba⁷⁹. Untuk itu disain penelitian⁸⁰ yang digunakan ialah deskriptif-kualitatif⁸¹.

Disain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan secara mendalam berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas yaitu birokrasi yang ada dalam masyarakat tradisonal yang menjadi objek penelitian ini, dan kemudian berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena⁸². Dalam penelitian ini yang ingin digambarkan dan diringkaskan secara mendalam adalah tentang ideologi, struktur, aparatur dan aturan birokrasi dalam masyarakat tradisonal Batak Toba yang menjadi objek penelitian ini, dan kemudian berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran dari birokrasi tradisonal masyarakat Batak Toba tersebut⁸³.

5.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berkenaan dengan birokrasi dalam masyarakat tradisonal dengan studi kasus Etnik Batak Toba adalah data kualitatif, baik data primer maupun data sekunder⁸⁴ yang ditemukan dalam dongeng-dongeng suci yang hidup dalam masyarakat Batak Toba tradisonal. Menurut Koentjaraningrat:

Untuk mengenal satu suku bangsa dapat dicari antara lain dari dongeng-dongeng suci atau mitologi suku bangsa tersebut atau dari tulisan-tulisan

prehistoris atau laporan-laporan hasil penggalian dan penelitian para ahli prehistori.⁸⁵

Dongeng-dongeng suci dalam bahasa Batak Toba disebut *torsa-torsa* (kisah). Torsa dalam masyarakat Batak Toba terdiri dari *nahomi* (mistik) dan *turiturian* yang mencakup mitos, legenda, dan hikayat. *Torsa* dalam masyarakat Batak Toba tradisional mudah dibicarakan tetapi sulit untuk membuktikan bahwa hal itu adalah benar. Torsa-torsa atau dongeng-dongeng seperti ini biasanya merupakan peristiwa keajaiban yang jauh dari fakta sejarah⁸⁶. Oleh karena itu dongeng-dongeng suci dan ceritera-ceritera rakyat tersebut harus diinterpretasi untuk mencari artinya serta indikasi-indikasi tertentu yang dapat menunjuk ke arah fakta sejarah yang benar. Koentjaraningrat mengatakan:

Mitologi dan ceritera-ceritera rakyat yang dapat memberi indikasi ke arah fakta-fakta sejarah dari suatu suku bangsa dapat hidup secara lisan, dan jika suku bangsa yang bersangkutan mengenal tulisan tradisional, dapat juga secara tertulis dalam naskah⁸⁷.

Dongeng-dongeng suci terkait dengan birokrasi dalam masyarakat tradisional dari etnik Batak Toba yang ada pada masa lalu secara tertulis ditemukan dalam dokumen baik manuskript, artikel, surat, koran, foto prehistoris atau laporan-laporan hasil penggalian dan penelitian para ahli prehistori yang sudah disusun dalam bentuk buku. Dokumen-dokumen atau buku tersebut memuat atau mencatat segi “negara”, “pemerintahan” dan “birokrasi” kerajaan tradisional dalam masyarakat Batak Toba. Torsa yang sudah tertulis dalam buku *Pustaka* dan dijumpai dalam aneka ragam tulisan-tulisan klasik dengan berbagai kiasan dan teka-teki atau sengaja ditulis secara samar-samar dalam bahasa *datu* (orang yang memiliki pengetahuan adikodrati) tidak dapat lagi dianggap sebagai dongeng belaka, melainkan sudah termasuk salah satu sejarah yang mempunyai fakta yang dapat dipergunakan sebagai pegangan atau petunjuk.⁸⁸

Data primer juga ditemukan dalam pepatah-petitih atau ungkapan-ungkapan tradisional yang dalam bahasa Batak Toba disebut *umpama* atau perumpamaan dan *umpasa* atau peribahasa⁸⁹. Juga dalam rumah-rumah adat, upacara-upacara adat, dibalik mitos-mitos tua. Filsafat orang Indonesia termasuk nilai budaya tersimpan di balik pepatah-petitih, dibalik rumah-rumah adat, dibalik upacara-upacara adat, dibalik mitos-mitos tua. Itu semua dianggap sebagai metafor yang mengandung atau menampilkan makna budaya yang di dalamnya terkandung nilai⁹⁰. Menurut Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan:

Ungkapan tradisional mengandung nilai-nilai budaya yang disosialisasikan secara berkesinambungan. Ungkapan tradisional sekaligus juga merupakan rekaman perjalanan hidup orang Toba. Penelusuran yang teliti terhadap

ungkapan tradisional dapat membuka tabir masa lampau mereka. Sebagai rekaman perjalanan hidup, ungkapan tradisional juga member informasi tentang habitat, ekologi, menu, tantangan hidup, cita-cita dan berbagai masalah kehidupan baik kehidupan relehius maupun kehidupan sosial budaya⁹¹.

Bagi masyarakat Batak Toba, berkenaan dengan kebudayaan kekerabatan adat dan kebudayaan kerohanian agama yang menjadi sumber untuk menjelaskan birokrasi kerajaan Batak Toba tradisional dan patik dohot uhum atau aturan dan hukum yang berlaku, sangat banyak diungkapkan berbentuk umpama dan umpasa. Menggunakan metafor dalam umpama atau umpasa sebagai salah satu bentuk ekspresi *indirectness* dari masyarakat Batak Toba tradisional merupakan cara yang sangat penting untuk mengkonsep-tualisasikan pengalaman sosial dan psikologis suatu masyarakat sehingga kajian yang memadai terhadap penggunaan metafor pada suatu masyarakat dapat menjadi sumber data yang penting terhadap struktur dan konsep psikologis suatu masyarakat⁹². Oleh karena itu ungkapan-ungkapan tradisional metafor menjadi salah satu sumber data utama dalam studi ini karena menurut Basaria,

bahasa melalui ungkapan pepatah-petitihnya yang merupakan metafor dalam bahasa itu merupakan medium untuk menampilkan makna budaya yang di dalamnya terkandung nilai (values). Metafor dan peribahasa merupakan bagian dari komunikasi sistem budaya. ... Di samping itu, bahasa mengkategorisasi realitas budaya Bahasa menampakkan sistem klasifikasi yang dapat digunakan untuk menelusuri praktek-praktek budaya dalam suatu masyarakat. Model-model budaya dapat dimunculkan secara eksplisit melalui ungkapan⁹³.

Pemanfaatan ungkapan metafora⁹⁴ sebagai sumber informasi penting karena dalam retorika tradisional, metafora digolongkan sebagai sebuah kiasan, yakni sebagai sebuah gambaran yang mengklasifikasikan adanya variasi makna dalam penggunaan kata. Menurut Basaria, suku Batak Toba termasuk salah satu suku bangsa yang kaya dengan ungkapan metafora. Bahkan nilai-nilai budaya Batak Toba tercermin dari ungkapan metafor. Sifat dan ciri alam sering dimetaforakan ke sifat dan perilaku bahasa. Kecermatan suku Batak Toba mengabstraksi alam tempat tinggalnya memperkaya pengetahuan mereka sehingga melahirkan berbagai bentuk ungkapan atau metafor yang mengandung kias yang menjadi salah satu petunjuk identitas kebatakan masyarakat Batak Toba. Selanjutnya Basaria menjelaskan, pada wacana keseharian masyarakat Batak Toba ditemukan strategi berkomunikasi yang sarat simbol, yang terakomodasi dalam ekspresi ungkapan metaforis. Ungkapan metafora dalam implementasi wacananya mengandung nilai humanis dan dianggap efektif sebagai ekspresi diri yang

menyangkut kebenaran, kebaikan, keindahan (estetika), solidaritas, dan pencurahan hati bagi masyarakatnya.⁹⁵

Selain data primer maka tulisan-tulisan dari ahli-ahli histori yang telah banyak mempelajari sumber-sumber primer yang didapat dari buku atau hasil penelitian juga digunakan sebagai data sekunder

Berdasarkan sumber dan jenis data yang digunakan untuk mendeskripsikan birokrasi tradisional dalam masyarakat Batak Toba, maka pengumpulan data menggunakan metode dokumenter. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumenter memegang peranan yang amat penting pada penelitian sejarah (*historical research*)⁹⁶. Metode penelitian sejarah digunakan karena tidak ada hubungan sebab-akibat, tidak ada hubungan yang diprediksi dan bukan kondisi baru.⁹⁷

Sebagai salah satu tipe pengumpulan data dalam penelitian kualitatif⁹⁸ metode historis meliputi kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan pemahaman dan deskripsi tentang keadaan masa lalu. Kejadian masa lalu tersebut dapat dipergunakan untuk menjelaskan kejadian masa sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Itu dapat dilakukan untuk memahami ide-ide dalam kebudayaan masa lalu dari masyarakat setempat dikaitkan dengan fenomena birokrasi pada masa itu yang berkenaan dengan budaya dan ideologi birokrasi, pola struktur serta kedudukan dan kuasa tradisional-karismatis.

Metoda historis digunakan dengan jalan mengumpulkan dan mengevaluasi secara sistematis dan objektif data yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian masa lampau secara teratur.⁹⁹ Metode historis yang digunakan bukan saja deskriptif-naratif, melainkan juga kritis-analitis yang ingin mengungkapkan masalah-masalah yang ada di belakang kejadian¹⁰⁰. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, mengkonsep objek penelitian; kedua, menemukan fakta; ketiga, menilai kualitas fakta; keempat, menyusun fakta; dan kelima mensintesis dan kemudian menulis laporan¹⁰¹.

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dievaluasi melalui *external criticism* dan *internal criticism*¹⁰². *External criticism* atau kritisisme eksternal menaksir kebenaran dari data historis melalui keautentikan (*authentic*) dokumen melalui pertanyaan: kapan ditulis?, dimana di tulis?, mengapa hal itu masih survive?, dan siapa pengarang yang sesungguhnya?. Sedangkan *internal criticism* atau kritisisme internal mengevaluasi makna isi dokumen (*meaning in context*) baik nilai, harga atau manfaatnya untuk menetapkan kredibilitas melalui pertanyaan bagaimana muatan?, mengapa itu ditulis?, pemaknaan literal?, konsistensi internal?, dan konotasi?. Nilai data dalam dokumen berupa derajat sejauhmana data adalah akurat dan reliabel digunakan dan mendukung kebenaran.¹⁰³

Data historis lisan dari sumber-sumber sekunder berkenaan dengan mitologi dan ceritera-ceritera rakyat yang dapat digunakan untuk menjelaskan birokrasi tradisional dari masyarakat Batak Toba juga dibutuhkan. Koentjaraningrat mengatakan bahwa, “Dengan mitologi dan ceritera-ceritera rakyat yang hidup secara lisan, seorang peneliti antropologi harus mengumpulkan bahan tersebut dengan merekam ceritera-ceritera tersebut dari mulut tokoh-tokoh penduduk tertentu yang mengetahui dongeng itu”.¹⁰⁴

Untuk mendapatkan keterangan lisan tentang mitologi dan ceritera-ceritera rakyat yang hidup secara lisan akan digunakan metode wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah informan dari masyarakat *Toba*. Informan ideal sebagai target adalah orang yang sedcaca totalk familier dengan budaya dan diakui memiliki pengetahuan dan informasi tentang birokrasi dalam masyarakat Toba tradisional¹⁰⁵. Informan utama ialah mereka yang tinggal di Bakara sebagai pusat Dinasti Singamangaraja. Informan kunci ditentukan dengan teknik *purposive sampling* atas dasar bahwa mereka memiliki pengetahuan historis tentang birokrasi dalam masyarakat Toba tradisional, tidak terkecuali birokrasi dalam Dinasti Singamangaraja.

5.3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dalam berbentuk teks, kata-kata tertulis, frase, atau simbol yang menggambarkan birokrasi dalam masyarakat tradisional. Data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam teknik (observasi, wawancara, dokumentasi) dengan metode triangulasi lebih dahulu “diproses” kemudian digunakan dan disusun ke dalam teks yang diperluas¹⁰⁶ Analisis difokuskan pada ideologi, struktur dan kekuasaan sebagai dimensi birokrasi¹⁰⁷ dalam masyarakat Batak Toba tradisional dan Dinasti Singamangaraja.

Analisis data dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berlangsung secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi berlangsung jalin menjalin dan menunjukkan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah analisis data untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”¹⁰⁸.

Penelitian ini menggunakan triangulasi analisis data yaitu *the narrative analysis* (analisis naratif) dan *the illustrative method* (metode ilustratif); *content analysis* (analisis isi), analisis wacana dan penafsiran teks serta *semiotic analysis* (analisis semiotik).

The narrative analysis dan *the illustrative method*¹⁰⁹ digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk dokumen-dokumen dan hasil wawancara. Dokumen atau hasil wawancara yang memuat dongeng-dongeng suci dan ceritera-ceritera rakyat, termasuk perumpamaan-perumpamaan atau peribahasa

diinterpretifkan dan dinaratifkan untuk mencari makna dan indikasi-indikasi yang dapat menunjuk ke arah fakta sejarah yang benar berkenaan dengan birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional. Dongeng-dongeng ajaib diinterpretasi dan dicari artinya, serta indikasi-indikasi tertentu yang dapat menunjuk ke arah fakta sejarah yang benar.¹¹⁰

Analisis isi atau konten (*content analysis*) dan analisis wacana dan penafsiran teks juga digunakan atau dilakukan terhadap dokumen. Analisis isi dilakukan *for making reference by systematically and objectively identifying specified characteristics within text*".¹¹¹ Ini merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat kejelasan informasi atau data secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi informasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi.

Untuk mensiasati kekurangan analisis isi, maka analisis wacana dan penafsiran teks¹¹² digunakan sebagai salah satu cara mempelajari makna pesan sebagai alternatif lain. Jika analisis isi digunakan untuk membedah muatan teks yang bersifat nyata (*manifes*), maka analisis wacana berpretensi memfokuskan pada makna pesan yang tersembunyi (*laten*) yang menjadi titik perhatian. Pretensi dari analisis wacana adalah pada muatan, nuansa, dan konstruksi makna yang *laten* dalam teks.

Analisis semiotik (*semiotic analysis*) digunakan terhadap data berupa tanda yang ditemukan. Analisis semiotik mempelajari hakekat tentang keberadaan suatu tanda. Persepsi dan pandangan kita tentang realitas dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Tanda membentuk persepsi manusia lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada¹¹³. Macam semiotik yang akan dianalisis terutama adalah semiotik kultural dan semiotik naratif. Semiotik kultural ialah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat Batak Toba. Seperti telah diketahui bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya tertentu menggunakan tanda tertentu. Sementara semiotik naratif ialah menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan ceritera lisan yang memiliki nilai kultural tinggi.

Catatan Akhir

¹ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern* (terjemahan). Jakarta: Prestasi Pustakaraya, h. 4-5.

² George Balandier. 1986. *Antropologi Politik*. Jakarta: CV. Rajawali, h. 205.

- ³ Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, and Bryan S. Turner. 1984. *Dictionary of Sociology*. Middlesex: Penguin, p. 104-106. Juga Rita Smith Kipp, *The Thread of Three Colors: The ideology of kinship in Karo Batak Funerals*, dalam Edward M. Bruner and Judith O. Becker. 1979. *Art, Ritual and Society in Indonesia*, Papers in International studies Southeast Asia Series, No. 53, Ohio University Center for International studies).
- ⁴ Martin Albrow, dalam Donald P. Warwick. 1975. *A Theory of Public Bureaucracy*. Cambridge, Massachussets: Harvard University, p. 4; Harold F. Gortner., Kenneth L. Nichols dan Carolyn Ball. 2007. *Organization Theory*. Third Edition. Thomson Wadsworth: Belmont, USA, h. 6; Joko Widodo. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media Publishing, h. 14; Mas'ud Said. 2010. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press, h. 1.
- ⁵ Martin Albrow, *ibid*, h. 40; Said Mas'ud Said. 2010, *ibid*, h. 96-112.
- ⁶ Suzanne Keller, 1984, h. 19, 77; M. Mas'ud Said. 2010. h. 13-25; Martin Albrow. 1975, p. 4.
- ⁷ Ida Basaria. "Ungkapan Metafora Pada Etnis Batak Toba". Makalah Seminar Nasional Budaya Etnik III edisi 11. 01 Mei 2009. Diposkan oleh Departemen sastra Daerah - FIB USU. Diunduh dari <http://sastradaerahu.blogspot.com/2009/05/ungkapan-metafora-pada-etnis-batak-toba.html>, h.5.
- ⁸ Miles dan Huberman mengatakan bahwa suatu kerangka konseptual memaparkan, entah dalam bentuk grafik atau naratif, dimensi-dimensi kajian yang utama, yaitu faktor-faktor kunci, atau variabel-variabel, dan hubungan-hubungan antara dimensi-dimensi tersebut yang telah diperkirakan sebelumnya. Kerangka konseptual terwujud dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kerangka konseptual dapat bersifat elementer atau rumit, berlandaskan pada teori atau pikiran sehat, deskriptif atau hubungan sebab-akibat. Sedangkan Mayer dan Greenwood mengatakan bahwa suatu kerangka konseptual adalah suatu orientasi kausal terhadap studi yang direnungkan. Sebagai itu, kerangka konseptual itu merumuskan suatu model terperinci dari masalah yang dirumuskan dan pemecahannya yang diusulkan. Kerangka konseptual itu juga memberikan suatu kerangka suportif bagi model tersebut berdasarkan atas bukti empirik yang diperoleh dari riset terdahulu dan/atau pengalaman ditambah dengan asumsi-asumsi nilai yang mendasari pemecahan-pemecahan yang diusulkan. Kerangka konseptual itu menyajikan semua ini secara relatif abstrak. Kerangka konseptual itu mengidentifikasi, memberikan batasan dan menguraikan konsep-konsep yang dicerminkan dalam masalah kebijakan, pemecahan-pemecahan yang diusulkan serta kekuatan-kekuatan sosial yang beragam yang mempengaruhinya. Kerangka konseptual itu dapat difikirkan sebagai suatu diagram mental, atau peta yang menyalinghubungkan konsep-konsep ini, menunjukkan di mana, kapan dan bagaimana konsep-konsep itu saling sesuai. Oleh karena itu pernyataan tertulis dari kerangka konseptual itu adalah deskripsi dan penjelasan dari ahli analisis tentang peta konseptual ini. Lihat Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, h. 93-95.
- ⁹ Mas'ud Said, *Ibid*, h. 6.
- ¹⁰ *Ibid*, h. 8.
- ¹¹ *Ibid*, h. 7.
- ¹² *Ibid*, h. 9.
- ¹³ *Ibid*, h. 9.
- ¹⁴ *Ibid*, h. 29.
- ¹⁵ Uraian tentang kelahiran konsep birokrasi, lihat Martin Albrow. *ibid*, h. 3.
- ¹⁶ M. Mas'ud Said. *ibid*, h. v.
- ¹⁷ Larry B. Hill (editor). 1992. *The State of Public Bureaucracy*, New York: M.E. Sharpe, Inc. p. 4.
- ¹⁸ Martin Albrow. 2005. *Birokrasi* (terjemahan).Tiara Wacana: Yogyakarta, h. xvi.
- ¹⁹ Larry B. Hill, (editor), 1992, *The State of Public Bureaucracy*, New York: M.E. Sharpe, Inc, p. 1.
- ²⁰ Larry B. Hill, *Ibid*. h. 3.
- ²¹ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. *Ibid*, h.3.
- ²² Martin Albrow membahas ini dalam bab 5. Lihat Martin Albrow, *ibid*, h. 105-136. Juga lihat Martin Albrow dalam Donald P. Warwick. 1975. *A Theory of Public Bureaucracy*. Cambridge, Massachussets: Harvard University, p. 4.

- ²³ Micael E. Milakovich dan George J. Gordon. 2003. *Public Administration in America*. Eight Edition. Wadsworth Pub Co: New York, p. 232-234
- ²⁴ Stephen P. Robbins. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta: Acan, h.40.
- ²⁵ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. *Ibid*, h. 4.
- ²⁶ Mas'ud Said. 2010. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press, h. 1.
- ²⁷ Sejalan dengan istilah *governmental bureaucracy* seperti disebut oleh Almon Powel, maka "birokrasi pemerintahan adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal (*the formal role-makers*)". Birokrasi dalam pengertian ini merupakan keseluruhan pejabat negara yang diangkat (*appointed officials*), atau pejabat negara pada cabang eksekutif atau setiap organisasi yang berskala besar atau apa yang disebut sebagai orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kepadanya diberikan gaji. Ini berarti bahwa birokrasi sama dengan birokrat yaitu mereka yang menduduki jabatan, bukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan manajerial di institusi-institusi dan agensi-agensi pemerintah. Gabriel Almond and Bingham Powell. 1966. *Comparative Politics Development Approach*. Bombay, Indis: Little Brown Company, p. 95.
- ²⁸ Phillip J. Cooper. 1998. *Public Administration for the Twenty-First Century*. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, p. 201.
- ²⁹ Ketika menjelaskan birokrasi, Priyo Budi Santoso mengemukakan ada tiga model kognitif birokrasi. Model kognitif pertama bersumber pada birokrasi tradisional di dalam kerangka otoritas tradisional sebagai salah satu model kognitif birokrasi (*cognitive models of bureaucracy*) dan sering digunakan untuk menganalisis karakteristik birokrasi di Indonesia. Model kognitif kedua adalah model yang diperkenalkan oleh penguasa kolonial dalam bentuk *ambtenaar* (pangreh praja) dan *beamtenstaat* untuk menguasai tanah jajahannya. Model kognitif ketiga adalah model birokrasi tipe ideal yang dikonseptualisasikan oleh Max Weber. Pembahasan lebih lanjut lihat Priyo Budi Santoso. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: Rajawali Press, h. 22.
- ³⁰ Konsep birokrasi juga dapat bermakna "baik" atau "buruk" dan "bebas nilai". Birokrasi dalam pengertian "baik" menekankan rasionalitas dan efisiensi pencapaian tujuan (*bureau-rationality*) seperti dalam pengertian *Hegelian Bureaucracy* dan *Weberian Bureaucracy*. Birokrasi dalam pengertian "buruk" melihat birokrasi sebagai suatu penyakit (*bureau-pathology*) yang menghambat pencapaian tujuan. Dalam pengertian *bureau-pathology*, birokrasi dikaitkan dengan prosedur yang kaku dan berbelit-belit sehingga menimbulkan kelambanan dalam bekerja. Birokrasi cenderung sentralistis dan berbentuk oligarkhi di mana kekuasaan ada pada pejabat-pejabat negara yang diselenggarakan sedemikian rupa sehingga merugikan atau membahayakan warga karena prosedur dan aturan yang dibuat oleh birokrasi cenderung sewenang-wenang dan menindas. Lihat Priyo Budi Santoso. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: Rajawali Press, h. 18-19.
- ³¹ Martin Albrow, *ibid*. h. 40; Mas'ud Said, *ibid*, h. 68.
- ³² Mas'ud Said, *ibid*, h. 68.
- ³³ Menurut Hummel, ada tiga tipe tindakan dominan dalam sejarah eksistensi manusia. Ketiga tindakan tersebut adalah *community action = communal action based on mutual understanding; society action = social action: general rules mixed with discretion for exercise of understanding with the rules; dan bureaucracy action = rationally organized action: design of all action from above; shrinkage of direction*. Ralph P. Hummel. 1982. *The Bureaucratic Experience*. New York: St Martin Press, p. 33.
- ³⁴ Ralph P. Hummel. *Ibid*, p. 19.
- ³⁵ Martin Albrow. *Ibid*, h. 42.
- ³⁶ *Ibid*, h. 46.
- ³⁷ Menurut Eva Etzioni-Halevy, *ibid*, h. 44: Sebuah tipe ideal adalah sebuah konstruk teoritis yang berisi beberapa ciri dari sebuah fenomena yang dianggap sebagai bentuk yang paling murni atau ekstrim. Karenanya tipe ideal tidak pernah terwujud secara penuh dalam kenyataan karena

memang tipe ideal adalah sekedar alat konseptual yang dengan sengaja menyederhanakan dan membesar-besarkan realita agar bisa mendapatkan pemahaman konseptual yang jelas. Karena itu Stephen P Robbins mengatakan: Tapi harus diingat bahwa model birokrasi Weber lebih merupakan gambaran yang hipotetis ketimbang yang sebenarnya tentang bagaimana kebanyakan organisasi distruktur. Stephen P. Robbins. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta: Acan, h.338.

³⁸ Berdasarkan Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *ibid*, h. 23-26; Eva Etzioni-Halevy, *ibid*, h. 42-43.

³⁹ Stephen P. Robbins, *ibid*, h. 338-339.

⁴⁰ Stephen P. Robbins, *ibid*, h. 341.

⁴¹ Eva Etzioni-Halevy, *ibid*, h. 43-44.

⁴² Milakovich dan Gordon mengemukakan karakteristik birokrasi sebagai berikut: *A bureaucracy or a bureaucracy organization is characterized by an internal division of labor, specialization of work performed, a vertical hierarchy or chain of command, well-defined routines for carrying out operating tasks, reliance on precedents (previous actions) in resolving problems, and a clear set of rules regarding managerial control over organizational activities*. Micael E. Milakovich dan George J. Gordon. 2003. *Ibid*. p. 232.

⁴³ M. Mas'ud Said. *ibid*, h. 3.

⁴⁴ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. *ibid*, h. 30.

⁴⁵ Pembahasan yang mendalam tentang birokrasi dalam masyarakat modern, lihat Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern* (terjemahan), Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

⁴⁶ Pembahasan tentang Negara tradisional dibahas oleh George Balandier dalam bab VI. Lihat George Balandier. *Ibid*.

⁴⁷ George Balandier. *Ibid*. h. 58-59.

⁴⁸ Mas'ud Said, *ibid*, h. 69.

⁴⁹ Ranggalal Sen seperti dikutip oleh Mas'ud Said, *ibid*, h. 69.

⁵⁰ Lance castles. "Birokrasi dan Masyarakat di Indonesia", dalam Dalam Lance Castles; Nurhadiantomo dan Suyatno. 1986. *Birokrasi, Kepemimpinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Kumpulan Esei. Edisi Revisi. Surakarta: Hapsara, h. 6.

⁵¹ Nurhadiantomo dalam dalam Lance Castles dkk, *ibid*, h. 27.

⁵² *Ibid*, h. 203.

⁵³ M. Mas'ud Said. *Ibid*. h. 202-203.

⁵⁴ Martin Albrow, *ibid*, h. 40.

⁵⁵ Berdasarkan telaah literatur ditemukan unsur pokok atau dimensi esensial dari birokrasi dalam masyarakat tradisional yaitu ideologi (pembahasan lebih lanjut lihat Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, and Bryan S. Turner. 1984. *Dictionary of Sociology*. Middlesex: Penguin, p. 104-106. Juga Rita Smith Kipp, *The Thread of Three Colors: The ideology of kinship in Karo Batak Funerals*, dalam Edward M. Bruner and Judith O. Becker. 1979. *Art, Ritual and Society in Indonesia*, Papers in International studies Southeast Asia Series, No. 53, Ohio University Center for International studies), struktur (Martin Albrow, dalam Donald P. Warwick. 1975. *A Theory of Public Bureaucracy*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University, p. 4. Harold F. Gortner., Kenneth L. Nochols dan Carolyn Ball. 2007. *Organization Theory*. Third Edition. Thomson Wadsworth: Belmont, USA, h. 6; Joko Widodo. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media Publishing, h. 14), aparat (Mas'ud Said Mas'ud Said. 2010, *ibid*, h. 96-112; Martin Albrow, *ibid*, h. 40), peraturan-peraturan (Suzanne Keller, 1984, h. 19, 77; M. Mas'ud Said. 2010. h. 13-25; Martin Albrow. 1975, p. 4.), kekuasaan, kepemimpinan dan pembuatan keputusan (Mas'ud Said Mas'ud Said. 2010, *ibid*, h. 96-112.). Sementara itu Mas'ud Said mengemukakan ada lima unsur utama dari birokrasi, yaitu struktur organisasi birokrasi, visi dan misi organisasi birokrasi, personel atau pejabat birokrasi, fasilitas pendukung birokrasi, dan kepemimpinan birokrasi. Uraian lebih lanjut tentang kelima unsur pokok ini lihat Mas'ud Said. 2010. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press, h. 96-112.

- ⁵⁶ Vic George dan Paul Wilding. 1992. *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat* (terjemahan). Jakarta: Grafiti, h. 3.
- ⁵⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak. 2009. Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak-Toba. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 32.
- ⁵⁸ Mochtar Pabottingi, Kaum Intelektual Pemimpin dan Aliran-aliran Ideologi di Indonesia sebelum Revolusi 1945, dalam Prisma Nomor 6, Juni 1982, h. 48. Lihat juga T. Abdullah, *Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia: Tinjauan Umum*, dalam Prisma Nomor 6, Juni 1982, h. 23-24.
- ⁵⁹ Lihat Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, and Bryan S. Turner. Ibid, p. 104-106.
- ⁶⁰ Menurut Simanjuntak, ada dua tipe gagasan terkait dengan ideologi, yaitu gagasan yang berpusat pada sekitar kenyataan-kenyataan dan sasaran-sasaran material (dinamakan observational ideas), gagasan yang teramati yang juga dinamakan budaya fakta dan material. Kedua, berupa gagasan yang berpusat pada fantasi atau kayalan yang berwujud kepercayaan-kepercayaan, aspirasi-aspirasi, ketakutan-ketakutan dan emosi. Bungaran Antonius Simanjuntak. Ibid, h. 31.
- ⁶¹ Dikutip dari Mochtar Pabottingi, *op cit*.
- ⁶² Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. hlm. 69.
- ⁶³ Lihat Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, and Bryan S. Turner. 1984. *Dictionary of Sociology*. Middlesex: Penguin, p. 104-106.
- ⁶⁴ Penjelasan ini didasarkan atas pemikiran Andrew Heywood. 1998. *Political Ideologies: An Introduction*. London: MacMillan Press Ltd, p. 3-4.
- ⁶⁵ Didasarkan atas pemikiran Andrew Heywood. Ibid.
- ⁶⁶ Meminjam istilah Shelly Errington ketika Ia menggunakan istilah kesatuan politik (*polity*), daripada “negara” di Sulawesi Selatan (Bugis). Lihat Kata Pengantar Onghokham, dalam Lorraine Gesick (penyunting). 1989. *Pusat, Simbol, dan Hirarki Kekuasaan: Esei-essi tentang Negara-negara Klasik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. xv.
- ⁶⁷ Mas’ud Said, *ibid*, h. 9.
- ⁶⁸ Harold F. Gortner., Kenneth L. Nochols dan Carolyn Ball. *ibid*, h. 6.
- ⁶⁹ Harold F. Gortner., Kenneth L. Nochols dan Carolyn Ball. *ibid*, p. 6.
- ⁷⁰ Stephen P. Robbins, *ibid*, h. 341.
- ⁷¹ Stephen P. Robbins, *ibid*, h. 242-343.
- ⁷² Ulbert Silalahi. 1996. *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, h. 157-159.
- ⁷³ Bandingkan juga dengan struktur birokrasi tradisional di Bali. Lihat Anak Agung Gde Putra Agung. 2001. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 121-126.
- ⁷⁴ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000, *Ibid*. h. xvi-xvii.
- ⁷⁵ Martin Albrow, *ibid*, h. 40.
- ⁷⁶ Mas’ud Said, *ibid*, h. 9-10.
- ⁷⁷ Untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam adalah lebih tepat menggunakan format deskriptif kualitatif. Lihat Burhan Bungin, *ibid*, h. 69.
- ⁷⁸ Tentang disain dan metoda studi kasus, lihat Robert K. Yin. 1989. *Case Study Research Design and Methods*. Newbury Park, California: SAGE Publications, Inc.
- ⁷⁹ Studi kasus menyelidiki dan menggali kesatuan atau fenomena tunggal (“kasus”). Dalam studi kasus ini akan dijelaskan secara mendalam banyak ciri-ciri dari sedikit kasus atau mempelajari secara intensif dan mendalam tentang satu fenomena melalui satu durasi waktu.
- ⁸⁰ Metode penelitian berkenaan dengan disain penelitian, pengumpulan data, analisis data. Untuk pembahasan lebih lanjut lihat Uma Sekaran. 1992. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Second Edition. New York: John Wiley dan Sons, Inc, h. 5; David Silverman dalam Clive Seale (eds). 1998. *Researching Society and Culture*. London: SAGE Publications, Inc, h. 104. Sementara disain penelitian (*research design*), secara spesifik menunjuk pada tipe studi (*the type of study*) atau tipe penelitian (*the type of research*) sebagai rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Lihat Uma Sekaran. 1992. *Ibid*. Menurut Elizabethann

- O’Sullivan, dan Gary R. Rassel dalam bukunya *Research Methods for Public Administrators*. bab 2 dan 3, ada dua disain utama yaitu *design for description* dan *design for explanation*. Disain untuk deskripsi terdiri atas disain untuk menemukan hubungan dan menunjukkan kecenderungan dan disain untuk membuat secara terperinci (*case studies*), sedangkan disain untuk penjelasan terdiri atas *experimental design* dan *quasi-experimental designs*. Elizabethann O’Sullivan, dan Gary R. Rassel. 1989. *Research Methods for Public Administrators*. New York: Longman.
- ⁸¹ Ada tiga model format disain penelitian kualitatif, yaitu deskriptif-kualitatif, verifikatif-kualitatif, dan *grounded reserach*. Format deskriptif masih dipengaruhi oleh paradigma positivistik, kendati format ini dominan menggunakan paradigma fenomenologis. Format verifikatif bersifat induktif dan berparadigma fenomenologis namun perlakuannya terhadap teori masih semi terbuka pada awal penelitian. Sedangkan, format *grounded research* bersifat induktif dan berparadigma fenomenologis dan tertutup terhadap teori pada awal penelitian. Lihat Burhan Bungin. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana: Jakarta, h.67.
- ⁸² Burhan Bungin, *ibid*, h. 68.
- ⁸³ Robert K. Yin. 1989. *Case Study Research Design and Methods*. Newbury Park, California: SAGE Publications, Inc.
- ⁸⁴ W. Lawrence Neuman, *ibid*, h. 415-416.
- ⁸⁵ Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Antropologi Budaya*. cetakan ke delapan. Rineka Cipta. jakarta. h. 337.
- ⁸⁶ Koentjaraningrat, *ibid*. h. 337.
- ⁸⁷ Salah satu dokumen tertulis tentang etnik Batak Toba disebut *pustaha*. *Pustaha* merupakan karya tulis dalam bahasa dan tulisan Batak kuno peninggalan leluhur yang memuat ilmu dan pengetahuan antara lain tentang ilmu yang menyambung hidup, ilmu yang menghancurkan hidup dan ilmu nujum (Winkler. 1925); atau ceritera, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu lainnya, obat dan nujum (Liberty Manik. 1973; dan Petrus Voorhoeve. 1977) (dalam Uli Kozok. 2009: 39-62). Karya tulis yang disebut *Pustaha* tersebut ditulis di kulit kayu (*laklak*), bambu, dan tulang kerbau (biasanya tulang iga). Di antara 500 naskah Batak yang ada di berbagai koleksi di Jerman, naskah kulit kayu dan bambu yang paling banyak, yakni masing-masing sekitar 43%, sedangkan naskah tulang 12% dan naskah kertas hanya 2% (Uli Kozok, 2009: 29). Menurut Daniel Peret, *Pustaha* terdiri dari lembaran-lembaran kayu alim (*aquilaria malaccensis*) berbentuk pita panjang yang dilipat berbiku-biku. Isinya dalam bahasa daerah ditulis oleh guru atau datu. Buku ini kadangkala disebut juga *laklak* atau *lopian*. Daniel Peret. 2010. *Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Terjemahan Saraswati Wardhany. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), h. 399. Ada dua asal pustaha. Pertama, langsung berasal dari dewata; dan kedua, dibuat oleh para datu. *Pustaha* yang berasal dari dewata (toba: debata) dalam masyarakat Batak Toba ialah *Pustaha Surat Agong* dan *Pustaha Tumbaga Holing*. Kedua pustaha ini dipercaya diberikan oleh Dewata kepada Siraja Batak untuk diwariskan kepada kedua puteranya Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. *Pustaha Tumbaga Holing* diwariskan kepada Guru Tatea Bulan, sedangkan *Pustaha Surat Agong* diwariskan kepada Raja Isumbaon. Seperti diketahui dalam tarombo/silsilah bahwa Raja Sorimangaraja dan Raja Singamangaraja sebagai Maharaja *Harajaon* Toba adalah keturunan dari Raja Isumbaon. Dalam Surat Tumbaga Holing ini tertulis hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang raja yaitu yang berhubungan dengan Ruhut-ruhut ni harajaon (aturan ketataprajaan), Paruhumon (hukum dan peradilan), Parhaumaon (pertanian), Partigatigaon (bisnis), Paningaon (seni). Inilah yang dijadikan oleh Tuan Sorimangaraja dan juga diikuti oleh Tuan Singamangaraja sebagai nilai dasar untuk mengatur *Harajaon* Batak Toba. Lihat Batara Sangti, *op cit*; W.M. Hutagalung, *op cit*; Uli Kozok. 2009. *Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak*. Yakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), bab 4 dan 5.
- ⁸⁸ Biasanya, hanya *datu*, yang umumnya terdiri dari raja-raja, yang memiliki dan dapat menafsirkan isi *Pustaha* yang dijumpai dalam aneka ragam tulisan-tulisan klasik dengan berbagai kiasan dan teka-teki. Lihat Batara Sangti, *ibid*, h. 248. Juga lihat Uli Kozok. 2009. *Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- ⁸⁹ *Umpama* tidak sama dengan *umpasa*. Dalam bahasa Indonesia, *umpama* sama dengan “pepatah” atau perumpamaan, sedangkan *umpasa* sama dengan peribahasa. Hal pokok dari *umpama* ialah bahwa isi perumpamaan tidak dapat diubah-ubah atau diganti-ganti. Sebagai contoh *umpama*

adalah *Tedek songon indahan di balanga*. Umpama ini tidak bisa diganti menjadi *tedek songon juhut di balanga*. Kalaupun diganti adalah kata *tedek* menjadi *patar*, sedangkan kata yang diperumpamakan yaitu indahan atau nasi tidak dapat diganti menjadi *juhut* atau daging. Sebaliknya, *umpasa* dapat diubah-ubah berdasarkan kebutuhan atau kontek. Sebagai contoh umpasa yang mengatakan: *Sahat-sahat ni solu, sahat tu bontean, sahat ma hita mangolu, sahat tu panggabean*. Umpasa ini dapat diganti dalam kontek atau suasana yang berbeda, menjadi: *Sahat-sahat ni solu, sahat tu bontean; sahat hita mangolu, ala musunta nunga marragean*.

- ⁹⁰ Ida Basaria. "Ungkapan Metafora Pada Etnis Batak Toba". Makalah Seminar Nasional Budaya Etnik III edisi 11. 01 Mei 2009. Dipskan oleh Departemen sastra Daerah - FIB USU. Diunduh dari <http://sastradaerahu.blogspot.com/2009/05/ungkapan-metafora-pada-etnis-batak-toba.html>, h.5.
- ⁹¹ Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan. 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar, h. 135.
- ⁹² Ida Basaria. Ibid, h.5.
- ⁹³ Ida Basaria. Ibid, h.6.
- ⁹⁴ Menurut Ida Basaria, Penggunaan bahasa secara metaforis tidak saja berfungsi sekedar sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai ungkapan yang sarat nilai-nilai kognitif, budaya apresiatif dan humbleness terhadap lawan bicara yang terakumulasi dalam konsep ideal yang oleh suku Batak Toba disebut pantun. (dibaca [pattun]). Selanjutnya Ida Basaria mengemukakan, Idiom pantun atau keteladan dipergunakan masyarakat Batak Toba dalam interaksi sosial keseharian mereka sebagai apresiasi kepada seseorang yang dapat memenuhi tuntutan perilaku sosial (social behaviour) dan perilaku berbahasa (register dan style shifting) berdasarkan kondisi setting dan partisipasi dari suatu wacana. Oleh karenanya, pantun mengacu pada kualitas ideal yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam rangka mengaktualisasikan dirinya dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan egaliter sehingga mengantarkannya menjadi figure panutan. Untuk mendapatkan kualitas ini, seseorang lazimnya menampilkan perilaku dan tutur kata terbaik yang secara realistis dapat dilakukannya dalam interaksi sosial mereka. Orang disebut pantun karena ia mampu menggunakan bahasa dengan baik sesuai harapan lawan bicara (pendengarnya). Seseorang disebut pantun juga karena menampilkan pribadi terpuji serta berkata tidak pernah bohong, berjanji tidak mungkir (ingkar janji), dipercaya tidak khianat (amanah atau dapat dipercaya). Ida Basaria. Ibid. h. 2.
- ⁹⁵ Ida Basaria. Ibid, h.6.
- ⁹⁶ Burhan Bungin, ibid, h.121.
- ⁹⁷ Burhan Bungin Ibid, h. 9.
- ⁹⁸ Histori berarti kejadian masa lalu, satu laporan tentang masa lalu, atau suatu disiplin yang mempelajari masa lalu. Uraian tentang penelitian histori, lihat W. Lawrence Neuman. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Fifth Edition. Boston: Pearson Education, Inc. Chapter 14.
- ⁹⁹ Kenneth D. Bailey. 1987. *Methods of Social Research*. London: Free Press, p. 311-313.
- ¹⁰⁰ Ketika menstudi peralihan birokrasi tradisional ke birokrasi kolonial di kerajaan Klungkung, Agung menggunakan metode sejarah, baik metode sejarah deskriptif-naratif dan metode sejarah kritis-analitis, dengan pendekatan analitis-struktural. Lihat Anak Agung Gde Putra Agung. 2001. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 27-29.
- ¹⁰¹ Lawrence W. Neuman. Ibid, h. 413-415.
- ¹⁰² W. Lawrence Neuman, ibid, h. 420-421.
- ¹⁰³ L.R. Gay and P.L. Diehl. 1992. *Research Methods for Business and Management*. New York: Macmillan Publishing Company, p. 13.
- ¹⁰⁴ Koentjaraningrat. Ibid. h. 338.
- ¹⁰⁵ Menurut Newman satu karakteristik dari informan ideal ialah "*the informant is totally familier with the culture and is in position to witness significant events. He or she lives and breathes the culture and engages in routines in the setting without thinking about them*". Lihat Newman, Ibid. h. 299.

- ¹⁰⁶ Miles dan Huberman. 1992. h. 15-16.
- ¹⁰⁷ Menurut Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer, ada tiga dimensi analisis yang lazim digunakan dalam penelitian birokrasi, yaitu dimensi peran, dimensi kelompok, dan dimensi organisasi. Lihat Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern* (terjemahan), Jakarta: Prestasi Pustakaraya, h. 102-103.
- ¹⁰⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, h. 16-21.
- ¹⁰⁹ Tentang analisis data kualitatif lihat W. Lawrence Neuman, bab 15.
- ¹¹⁰ Koentjaraningrat, *ibid.* h. 337.
- ¹¹¹ Kenneth D. Bailey. *ibid.* p. 300.
- ¹¹² Burhan Bungin. *Ibid*, h. 163.
- ¹¹³ Burhan Bungin. *Ibid*, h. 163.

Bab 2

Etnik Batak Toba

Pendahuluan

Bagian besar dari masyarakat Indonesia pasti sudah kenal dengan orang Batak. Batak merupakan salah satu suku bangsa tertua di Indonesia yang menempati bagian terbesar dari wilayah Sumatera Utara, bagian dari sebuah pulau Sumatera yang terletak di paling barat pulau-pulau Indonesia dan termasuk pulau terluas kedua setelah Kalimantan. Suku Batak telah menyebar di seluruh kota di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari barat hingga ke timur. Mereka juga memiliki pekerjaan dari yang “kasar” hingga “halus”, dari “pegawai bebas” hingga “pegawai terikat”. Sebelum kolonialisme dan kemerdekaan Indonesia, masyarakat Batak telah terhimpun dalam satu bangsa atau “*bangso*”, baik dalam makna tradisional atau lama yang berarti sebagai “sekelompok orang” atau “suku” maupun dalam makna modern yaitu “kesatuan politik”. Tetapi ketika membicarakan atau mendengar kata “Batak” atau “masyarakat Batak” maka sudah menjadi kebiasaan di Indonesia bahwa yang dia pikirkan atau maksudkan ialah Toba. Jika mendengar kebudayaan Batak, maka yang dipikir adalah kebudayaan Batak Toba, mendengar “musik Batak” yang dipikir adalah musik Batak Toba, ketika mendengar lagu Batak yang didengar adalah lagu Batak Toba. Jadi Batak itu, ya Toba dan Toba itu, ya Batak.

Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Dari berbagai pustaka ditemukan bahwa yang dikategorikan sebagai suku bangsa Batak ialah Toba, Angkola-Mandailing, Simalungun, Karo, Pakpak-Dairi. Kata “Batak” menunjuk pada semua sub etnis “Batak” tersebut. Tetapi dewasa ini ada tendensi bahwa kata Batak melekat pada etnik Toba¹. Ketika orang bicara tentang budaya Batak, yang dibicarakan adalah budaya Batak Toba, ketika bicara tentang tanah atau wilayah Batak maka yang ditunjuk adalah tanah atau wilayah kediaman Toba, ketika bicara tentang lagu Batak maka yang dinyanyikan adalah lagu Batak Toba, ketika bicara tentang gondang Batak maka yang digondangkan adalah gondang Toba, ketika bicara tentang tortor Batak maka yang ditortorkan adalah tortor Toba. Dalam hal tortor, misalnya, terhadap tortor etnik lain disebut totor Simalungun, tortor Karo, tortor Pakpak-Dairi, tortor Angkola-Mandailing.

Asal Batak Toba

Salah satu persoalan yang belum terselesaikan bahkan masih tetap menjadi polemik hingga sekarang ini adalah tentang asal usul etnik Batak Toba. Belum ditemukan dokumen yang sah dan dipercaya. Para ahli dan peneliti sejarah dan antropologi serta berbagai pihak yang tertarik dengan etnik Batak, khususnya etnik Batak Toba, masih menunjukkan pendapat yang berbeda satu dengan lainnya tentang asal usul dan keberadaan etnik Batak (Toba) di Sumatera Utara. Ada banyak versi tentang asal usul etnik Batak². Tetapi, ada dua versi pendekatan yang dapat digunakan untuk menelusuri asal usul dan keberadaan etnik Batak di Sumatera Utara. Pertama adalah pendekatan mitologi dan kedua adalah pendekatan histori.

Mitologi

Dalam pendekatan mitologi, para Datu atau Guru – ahli pengobatan, sihir dan ramalan – menuliskan mitos tentang leluhur Batak. Ditemukan berbagai macam versi mitos³. Satu mitos yang sangat populer ialah mitologi “Siboru Deak Parujar”. Mitos inipun diungkapkan dengan berbagai versi. Tetapi dari aneka macam versi mitos tersebut memiliki kesamaan. Pertama, leluhur Batak datang dari langit dari tempat para dewata⁴. Kedua, Sianjur Mulamula di lereng Dolok Pusuk Bukit, salah satu puncak di barat Danau Toba⁵, adalah tempat bermukim pertama leluhur Batak Toba. Sianjur Mulamula di Pusuk Buhit dianggap sebagai *hasampean ni ompunta Singaraja Batak*. Ketiga, Sianjur Mulamula menjadi tempat suci dan sakral bagi masyarakat Batak Toba. Dalam *tonggo-tonggo* atau doa-doa masyarakat Batak Toba Sianjur Mulamula digambarkan sebagai berikut:

Sianjur mula-mula, Sianjur mula toppa.
Parsirangan ni aek, pardomuan ni hosa.
Sianjur mula-mula, Sianjur mula jadi.
Mula ni sombayang, mula ni sombauasi.
Parpansur golang-golang, partapian jabi-jabi.
Parsuapon manogot, paranggiron bodari.

Histori

Manusia Indonesia yang tertua sudah ada kira-kira satu juta tahun yang lalu. Waktu itu Asia Tenggara bagian benua dan bagian kepulauan masih bersambung menjadi satu. Manusia prehistori yang tinggal di Indonesia Timur suka makan binatang hasil buruan, sedangkan di Indonesia Barat orang suka makan binatang kerang. Sisa-sisa kulit kerangnya mereka buang di suatu tempat timbunan sampah di luar perkampungan mereka dan juga sering ikut terbuang di dalam timbunan sampah itu alat-alat yang tidak terpakai. Sekarang tempat itu berupa bukit-bukit kerang yang mengandung alat-alat dari zaman prehistori dengan suatu corak tertentu seperti kapak genggam. Contoh yang paling terkenal dari bukit-bukit

kerang serupa itu telah ditemukan di Sumatera Timur dan Utara dekat Medan, dekat Langsa di Aceh. Proses persebaran bangsa-bangsa tersebut di atas terjadi dalam satu jaman, tetapi sukar untuk memperhitungkan jaman itu dengan ukuran waktu yang eksak⁶.

Kemudian terjadi gelombang kedua persebaran manusia pembawa kebudayaan neolitik yang datang ke Indonesia dari benua Asia bagian Tenggara sekitar 3000 tahun Sebelum Masehi. Bentuk fisik mereka dapat diperkirakan mengandung banyak ciri-ciri Mongoloid. Penyebaran mulai dari daerah-daerah lembah-lembah sungai di Cina Selatan, mereka berpindah-pindah menyusur daerah lembah-lembah sungai-sungai besar ke arah barat daya, sampai hilir sungai Salween, ke selatan sampai di hilir sungai mekong, dan juga ke timur lama-lama sampai di pantai Cina Tenggara, Quemoy sekarang. Di tempat hilir sungai-sungai itu mereka mengembangkan suatu kebudayaan maritim dengan perahu bercadik dan dengan demikian mereka menyeberang ke daerah kepulauan Pasifik Selatan seperti Taiwan, Filipina, Sulawesi Utara, Halmahera, dan Maluku Selatan⁷.

Gelombang berikutnya dari persebaran bangsa-bangsa adalah suatu persebaran yang juga datang dari benua Asia Bagian Tenggara, tetapi yang masuk kepulauan Indonesia dari arah barat kira-kira 2500 tahun Sebelum Masehi. Serupa dengan Proto-Austronesia, mereka tentu memiliki ciri-ciri fisik bersifat Mongoloid. Dari tempat asalnya di daerah lembah-lembah sungai-sungai di Cina Selatan, mereka menyebar ke selatan, ke arah hilir sungai-sungai besar, terus ke Semenanjung Melayu, untuk kemudian menduduki Sumatera, Jawa dan lain-lain pulau-pulau Indonesia bagian barat, sampai Kalimantan Barat, Nusa Tenggara sampai Flores, Sulawesi dan terus ke Filipina. Tetapi mereka tidak pernah sampai ke bagian timur dari kepulauan Indonesia⁸.

Seperti halnya dengan negara-negara dan masyarakat tertua di benua Asia Tenggara sekitar abad pertama terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan Cina, kebudayaan-kebudayaan dalam negara-negara tertua dan masyarakat di Indonesia terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan yang terjadi karena campuran antara kebudayaan pribumi dan unsur-unsur Cina. Baru pada abad ke tiga dan keempat Masehi, mulailah tampak pengaruh unsur-unsur kebudayaan yang berasal dari India, ialah unsur-unsur kebudayaan yang terbawa ke Asia Tenggara dengan persebaran agama Hindu dan Budha ke daerah itu. Dengan persebaran agama Hindu dan Budha mulailah suatu babak baru dalam sejarah kebudayaan bangsa-bangsa di Asia Tenggara pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya. Dengan itu berhentilah abad-abad prahistori, dan mulailah abad-abad histori atau abad sejarah bangsa Indonesia⁹.

Bagaimana dengan etnik Batak Toba. Dari mana asalnya?. Dari perspektif histori atau sejarah juga ditemukan berbagai versi. Satu versi sejarah mengatakan bahwa pada periode sekitar 2000 SM - 2500 SM sekelompok orang datang dari

benua Asia Bagian Tenggara dari Hindia Belakang masuk dari daerah Barus. Dari Barus mereka terus memasuki pedalaman hingga tiba dan menetap di satu daerah yang disebut Sianjur Mulana di Sumatera Utara¹⁰. Kelompok ini yang kemudian menjadi etnik Batak Toba. Sianjur Mulana atau Sianjur Mulamula diakui sebagai tempat pemukiman pertama sekelompok masyarakat yang disebut Batak Toba. Masyarakat ini pun dikemudian hari ikut dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan yang berasal dari India, ialah unsur-unsur kebudayaan yang terbawa ke Asia Tenggara dengan persebaran agama Hindu dan Budha pada abad ke-3 dan ke-4 Masehi.

Kebudayaan Batak Toba sebagai kebudayaan masyarakat agraris mengandung banyak unsur yang berasal dari Hindu. Kebudayaan Hindu beserta kesusasteraan Hindu masuk dan mempengaruhi kebudayaan Batak Toba. alfabet dan banyak kosa kata seperti nama-nama hari dan bulan dalam masyarakat Batak Toba dipengaruhi oleh kesusasteraan Hindu. Sementara struktur sosial dan keagamaan dan juga sistem pemerintahan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu dalam jaman itu, dan juga kebudayaan intelektual dari agama Hindu mempengaruhi dunia Asia Tenggara jaman itu. Dalam hal negara dan pemerintahan, misalnya, semua golongan diorientasikan ke atas ialah sang raja, yang dianggap keturunan dewa, yang bersifat keramat, yang merupakan puncak dari segala hal dalam negara dan pemerintahan dan yang merupakan pusat dari alam semesta. Konsepsi tentang arti raja di Indonesia diambil oleh negara-negara dan masyarakat pedalaman yang ekonominya berdasarkan sistem pertanian padi dengan irigasi di sawah-sawah¹¹.

Versi lain mengatakan, bahwa kira-kira 1000 tahun SM sekelompok orang di Hindia Belakang meninggalkan daerah mereka ke arah selatan bahkan ke seberang lautan untuk mencari daerah baru. Mereka terdesak oleh Bangsa Mongol yang dikenal bengis dan mempunyai kemajuan teknologi yang lebih tinggi. Sebagian dari mereka datang dari utara menuju Samudra Pasai Aceh dan mendarat di Teluk Haru. Mereka terus ke arah tenggara hingga ke daerah Gayo. Sebagian dari mereka menetap disini dan menjadi suku bangsa yang disebut Gayo. Tempat mereka bermukim disebut Tanah Gayo. Sebagian lagi dari mereka terus melanjutkan perjalanan ke daerah yang lebih jauh ialah daerah Alas (Aceh Tenggara). Sebagian dari mereka menetap di sini dan menjadi suku bangsa yang disebut Alas. Daerah tempat tinggal mereka disebut tanah Alas.

Sebagian lagi dari kelompok imigran tersebut terus menuju ke pedalaman melewati perbukitan dataran tinggi Toba sekarang ini hingga ke daerah di kaki Pusuk Buhit di tepi Danau Toba. Di tempat ini mereka tinggal dan bermukim dan tempat pemukiman mereka disebut Sianjur Mulana atau Sianjur Mulamula di kaki Pusuk Buhit di tepi Danau Toba kira-kira 8 km arah barat kota Pangururan sekarang. Kelompok yang bermukim di Sianjur Mulamula ini kemudian menjadi

suku bangsa yang disebut Batak Toba. Daerah tempat tinggal mereka disebut tanah Batak. Karena itu Gayo dan Alas sering dimasukkan menjadi suku bangsa Batak yaitu Batak Gayo dan Batak Alas.

Apakah masuk dari Barus atau Teluk Haru dari Samudra Pasai Aceh, beberapa penulis Belanda maupun Batak mengemukakan bahwa sekelompok orang yang menjadi suku bangsa Batak di Sumatera berasal dari perbatasan Burma (sekarang disebut Myanmar) dan Siam (sekarang disebut Thailand). Adapun Pendapat yang mengatakan bahwa suku Batak di Tapanuli berasal dari keturunan yang sama dengan suku Batak Palawan di Pilipina kurang didukung oleh fakta. Itu terlihat dari perbedaan cara hidup dan kebiasaan sehari-hari antara orang Batak Palawan di Filipina dengan orang Batak Tapanuli di Indonesia (lihat tabel 2.1)¹².

Tabel 2.1: Perbedaanm Ciri Batak Tapanuli di Indonesia vs Batak Palawan Filipina.

Ciri-ciri	Batak Tapanuli Indonesia	Batak Palawan Filipina
Ras	Melayu Tua	Negrito
Rambut	Lurus	Keriting
Pemukiman	Menetap di satu tempat pemukiman alias tidak suka berpindah-pindah	Pengembara atau berpindah-pindah
Sumber penghidupan	Bercocok tanam	Berburu dan mengumpulkan hasil hutan
Persediaan makanan	Menyimpan persediaan dalam lumbung	Mencari makanan untuk kebutuhan setiap hari
Bentuk rumah	Mendirikan rumah di atas tiang balok kayu yang besar, kokoh, berat dan tinggi, menggunakan atap injuk, rumah melengkung seperti perahu.	Mendirikan rumah di atas tiang kayu atau bambu yang ringan, menggunakan atap rumbia, rumah lurus panjang,
Pakayan tradisional pada abad 18	Terbuat dari kulit kayu	Terbuat dari Ulos
Cara ibu-ibu membawa barang	Menggendong di punggung	Menjunjung di atas kepala

Leluhur suku bangsa Batak Tapanuli Indonesia yaitu Si Raja Batak lebih diyakini berasal dari atau setidaknya mereka memiliki rumpun yang sama dengan suku Karen yang hidup di perbatasan Burma (Myanmar) dan Siam (Thailand) yang bermigrasi hingga ke tanah Batak. Itu karena dalam banyak hal suku ini mirip dengan orang Batak Toba di Tapanuli Sumatera Indonesia (Tabel 2.2)¹³.

Tabel 2.2: Persamaan Ciri Suku Karen dan Suku Batak Toba Tapanuli

1. Menenun pakaian dengan alattenun dari kayu yang sangat sederhana
2. Pakaian dari
3. Mata Pencaharian Bertani dan beternak
4. Keluarga makan bersama dari sebuah piring besar dan menggunakan jari tangan
5. Makanan utama Nasi
6. Kebiasaan wanita dan pria makan sirih
7. Wanita mengerjakan semua jenis pekerjaan, sedangkan laki-laki tidak
8. Perkawinan menganut paham monogami
9. Mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan
10. Menggendong anak di punggung
11. Mempunyai banyak tabu atau pantangan
12. Hapal semua hukum dan larangan
13. Percaya bahwa manusia memiliki roh
14. Secara teratur mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa agar panen melimpah dan dijauhkan dari marabahaya

Bahwa etnik Batak berasal dari perbatasan antara Burma-Siam dijelaskan oleh Batara Sangti sebagai berikut:

Apakala kita perhatikan dengan seksama fakta-fakta dan data sejarah dan kebudayaan Batak Toba dari segi asal bahasa, seni ukir dan lukis, adat istiadat, sistem kekeluargaan, pengetahuan alam, ilmu pertanian, ketataprajaan, falsafah hidup, kepercayaan dan lain sebagainya yang termasuk unik dan tersendiri; tidak sangsi lagi kita mengatakan, bahwa asal suku bangsa Batak Toba umumnya, terutama puak Batak Toba-tua khususnya, pastilah datang dari tanah pegunungan Burma yang berbatasan dengan tanah Thai (Siam), di mana pada suatu ketika telah berserak dari sana ke tanah Melayu sebelah Utara, dan setelah bermukim ditengah Melayu beberapa lama, lalu menyeberang ke kawasan Sumatera Utara.¹⁴

Jadi, ada beberapa bukti yang membenarkan pendapat bahwa kakek moyang dari masyarakat Batak berasal dari salah satu suku yang hidup di perbatasan Burma dan Siam. Bukti-bukti tersebut terkait dengan persamaan dari sejumlah ciri-ciri menyolok dalam kebudayaan yang bersangkutan yang disebut *culture area* baik kebudayaan fisik, seperti: alat berburu, bertani, transpor, senjata, ornamen perhiasan, pakaian, tempat kediaman atau pola perkampungan, dan seni musik; dan juga unsur-unsur kebudayaan yang lebih abstrak dari sistem sosial atau sistem budaya, seperti halnya organisasi kemasyarakatan, sistem perekonomian, upacara keagamaan, cara berfikir dan adat istiadat.¹⁵ Beberapa di antaranya adalah:

1. Di tanah pegunungan Burma-Siam, Kuta-kuta selalu didirikan di tempat-tempat strategis, dikelilingi pagar bambu di atas benteng yang dapat ditutup di waktu malam, agar supaya mudah dipertahankan pada setiap saat dari serangan

- musuh. Tidak ada obahnya dengan Kuta-kuta masyarakat Batak Toba-tua di kawasan Sumatera Utara.¹⁶
2. Bangsa Karen yang bermukim di pegunungan antara Burma (Myanmar) dan Siam (Thailand), sama dengan rumpun suku Batak Toba; sesuai dengan ya tipenya, ikat kepalanya, ya kainnya/ulosnya yang mirip dengan ulos ragi “bolean” Batak Toba dan memakai gelang gading gajah di lengannya seperti dahulu raja-raja Batak Toba memakainya.¹⁷ Adat istiadat mereka dan aksesoris pakaian yang dimiliki seperti pernik dan warna ulos mirip dengan pakaian Batak Toba.
 3. Adanya hubungan musik Batak dengan musik Burma, yaitu gendang, umpamanya jelas tampak pada keseragamannya.¹⁸

Gambar 2.1. Peta kediaman etnik Batak Toba



Satu *culture area* merupakan suatu penggabungan atau penggolongan dari suku-suku bangsa yang dalam masing-masing kebudayaannya yang beraneka warna toh mempunyai beberapa unsur dan ciri-ciri menyolok serupa. Demikian suatu sistem penggolongan daerah kebudayaan sebenarnya merupakan suatu sistem klasifikasi yang mengklaskan beraneka warna suku bangsa yang tersebar di suatu daerah atau benua besar ke dalam golongan-golongan berdasarkan atas beberapa persamaan unsur dalam kebudayaannya. Berdasarkan apa yang disebut dalam antropologi sebagai *culture area* (wilayah kebudayaan), maka suku bangsa Batak ada kaitan dengan suku Karen yang tinggal di perbatasan antara Burma-Siam dapat dibenarkan¹⁹.

Baik mitologi maupun histori²⁰, di antara keduanya tampak ada kesamaan yaitu bahwa nenek moyang orang “Batak Toba” pertama kali bermukim di *Sianjur Mulamula* atau *Sianjur Mulana*²¹. Sianjur Mulana merupakan suatu daerah yang terletak di sebelah barat lereng *Dolok Pusuk Buhit* (Gunung Pusuk Buhit) salah satu puncak di barat pinggir Danau Toba²¹ dengan ketinggian 2005 m di atas permukaan laut, di pegunungan Bukit Barisan kira-kira 8 Km dari Kota Pangururan, Kabupaten²² Samosir Sumatera Utara. Selama beberapa abad mereka tinggal di Sianjur Mulamula dan pergaulan mereka sangat terbatas dengan suku lain. Pada waktu itu etnik Toba masih menganut agama suku dan sistem pemerintahan bersifat kerajaan yang mandiri dalam bentuk *harajaon huta*, *harajaon horja*, *harajaon bius*. Setelah mereka berdiam di daerah Sianjur Mulamula dan sekitarnya selama beberapa abad, maka masuklah pengaruh dari luar. Pengaruh luar itu datang melalui daerah Barus sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan dunia untuk kapur barus dan kemenyan yang membawa budaya Hindu. Tetapi pertanyaan yang belum terjawab ialah kapan nenek moyang orang Batak tiba di Sianjur Mulamula atau sudah berapa tahun mereka menempati Sianjur Mulamula. Menggunakan silsilah untuk menentukan generasi untuk menghitung kapan nenekmoyang orang Batak Toba tiba di Sianjur Mulana kurang tepat digunakan karena berapa generasi silsilah juga tidak dapat dipastikan.

Wilayah Kediaman Batak Toba

Ada lima etnik bangsa yang dikategorikan sebagai suku bangsa Batak yaitu Angkola-Mandailing, Karo, Pakpak-Dairi, Simalungun, dan Toba (disusun menurut abjad). Sebelum era reformasi, masing-masing etnik mendiami satu wilayah tertentu di Provinsi Sumatera Utara. Angkola-Mandailing menempati wilayah Tapanuli Selatan (sekarang berubah menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Mandailing Natal). Karo menempati wilayah atau Kabupaten Karo. Batak Pakpak-Dairi menempati wilayah Dairi (sekarang berubah menjadi Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat). Simalungun menempati wilayah dan Kabupaten Simalungun. Toba menempati wilayah Tapanuli Utara²³ (sekarang berubah menjadi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir). Jadi, susunan masyarakat Batak Angkola-Mandailing, Karo, Pakpak-Dairi Simalungun, Toba dan juga Nias di Sumatera Utara didasarkan pada geneologis teritorial, sedangkan suku Melayu berdasarkan pada teritorial.

Meskipun daerah Batak tersebar di lima wilayah, namun “wilayah” Batak Toba yang berada di tengah (*centrally located*) etnik Batak lainnya dianggap sebagai pusat Tanah Batak, dan sekaligus sebagai pusat seni dan sebagai wakil kebudayaan Batak yang paling khas.²⁴ Seringkali mereka menganggap dan

dianggap oleh berbagai kelompok lain sebagai Batak “tulen”. Jika Batak Toba dan Danau Toba dijadikan sebagai pusat maka Batak Karo ada di sebelah Utara, Batak Pakpak–Dairi di sebelah Barat, Batak Simalungun ada di sebelah Timur, Batak Angkola-Mandailing ada di sebelah Selatan. Daerah di mana Batak Toba dominan dianggap sebagai *centrale Batakland* oleh pemerintah Hindia Belanda karena letaknya tepat di tengah Provinsi Sumatera Utara. Penulis asing menamakannya sebagai *Batakland* atau tanah Batak.

Masing-masing suku memiliki budaya, agama, bahasa dan tulisan sendiri-sendiri, meskipun diantaranya mempunyai banyak persamaan terutama diantara kelompok atau rumpun selatan seperti Angkola-Mandailing dan Toba, diantara rumpun utara yaitu Pakpak dan Karo dan kelompok tengah ialah Simalungun. Sementara rumpun selatan dan rumpun tengah lebih banyak persamaannya jika dibandingkan dengan rumpun utara. Karena ada perbedaan bahasa dan tulisan maka di antara mereka sulit berkomunikasi. Mereka juga memiliki persamaan dalam struktur sosial. Dalam masyarakat Batak Toba disebut *Dalihan Na Tolu* (tungku batu yang tiga, *three hearth stones*) yang terdiri dari dongan sabutuha, hula-hula dan boru. Dalam masyarakat Karo disebut *sangkep sitelu* terdiri dari kalimbubu, seninan, anak beru. Di Simalungun disebut *Tolu Sahundulan* yang terdiri dari tondong, sanina, boru. Di Angkola dan Mandailing dinamakan *Dalihan Na Tolu* terdiri dari mora, kahaanggi dan anakboru. Sebelum kolonialisme dan kemerdekaan Indonesia, mereka juga memiliki “pemerintahan” sendiri dan bangsa tersendiri yang disebut “*Bangso Batak*”²⁵.

Berdasarkan hasil Sensus tahun 2000, populasi suku Batak Toba diperkirakan berjumlah 6.076.440 jiwa dengan sebaran di beberapa daerah signifikan seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat (Tabel 2.3)²⁶. Mayoritas suku Batak, khususnya Batak Toba, menganut agama

Kawasan	Jumlah Penduduk
Sumatera Utara	4.827.000
Riau	347.000
Sumatera Barat	188.000
Jakarta	301.000
Jawa Barat	275.000
Total	6.076.440 jiwa

Kristen dan sisanya, terutama Batak Angkola-Mandailing, beragama Islam bahkan ada minoritas sangat kecil menganut agama Malim²⁷. Juga masih ada yang

menganut kepercayaan animisme (Pelebegu, Parbegu, atau penyembah berhala), meskipun sudah sangat sulit ditemukan.

Migrasi dan Wilayah Penyebaran

Etnik Batak Toba merupakan satu etnik Batak yang mengakui bahwa mereka memiliki leluhur bernama Siraja Batak²⁸ atau Singaraja Batak²⁹. Mereka pertama kali bermukim di *Sianjur Mulana* atau *Sianjur Mula-mula* setelah mereka bermigrasi dari sekitar daerah perbatasan Burma (Myanmar)/Siam (Thailand). Sianjur Mulamula di lereng Pusuk Buhit dekat kota Pangururan di Sumatera Utara merupakan kampung induk atau *bona ni pinasa* dari etnik Batak Toba. Dari daerah kampung induk inilah masyarakat Batak Toba kemudian *marserak* atau menyebar atau bermigrasi³⁰ dan kemudian membuka *huta* yang baru. Membuka *huta* yang baru berarti mendirikan *harajaon* yang baru pula.

Mendirikan *harajaon* yang baru merupakan hal penting dalam budaya Batak Toba tradisional sebab di *huta* yang baru tersebut pendiri *huta* menjadi raja yang menguasai dan mengatur seluruh *huta*. *Huta* yang pertamakali didirikan merupakan titik awal dari berdirinya *huta-huta* berikutnya yang didirikan oleh keturunan pendiri *huta* atau kerabat yang sama. Dimanapun mereka berada dan mendirikan *huta* akan tetap terikat dengan *huta* yang pertama didirikan oleh kakek moyang mereka. Makin banyak cabang *huta* yang didirikan berarti makin banyak dan makin luas wilayah *harajaon* yang dikuasai. Jadi, jalan lain ke *harajaon* seperti dikemukakan oleh Pedersen ialah mendirikan sebuah *huta* baru dengan merintis suatu daerah yang belum didiami. Mendirikan sebuah *huta* adalah suatu cara yang diakui untuk memperoleh prestise, tujuannya bukan lah terutama untuk mendapatkan kekayaan materiel tetapi lebih banyak untuk mendapatkan kedudukan sosial³¹.

Migrasi Pertama

Dari daerah asal inilah kemudian orang Batak Toba tersebar ke *desa na ualu*, atau delapan penjuru. Pertambahan jumlah penduduk bukan saja menimbulkan permasalahan pada lahan pertanian, tetapi juga bagi perkampungan. Untuk itu warga dari satu *huta* mulai *marserak* atau bermigrasi ke daerah sekitar Toba. *Marserak* ialah menyebar keseluruh wilayah yang ada di sekitarnya yang dianggap belum ada pemiliknya dengan menjadikan daerah tersebut sebagai wilayah perkampungan dan pertanian. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan hidup, bahasa setempat disebut *padanggan ngolu*³². *Marserak* dilakukan juga untuk tujuan memiliki *harajaon* yang baru. Sebab jika sekelompok orang mendirikan *huta* maka mereka dengan

sendirinya menjadi marga sipungka huta di daerah tersebut dan mereka menjadi raja huta di huta yang didirikannya.

Marga yang pertama mendirikan huta menjadi pemilik huta dan keturunannya kelak yang akan menjadi pimpinan huta atau raja huta yang mengatur huta. Mereka berhak memerintah semua yang tinggal di huta yang didirikannya dan membuat kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan. Huta merupakan wilayah kekuasaan dari marga pendiri. Huta yang mereka dirikan disebut juga *golat* dalam hukum kepemilikan tanah. Mereka yang memiliki disebut sebagai *pargolat*. Raja huta sebagai *pargolat* berhak memberikan tanah kepada anak-anaknya laki-laki atau perempuan atau marga pendatang sebagai marga penumpang dari marga boru. Untuk yang terakhir ini, mereka, apabila sudah tinggal selama lebih dari tiga generasi di huta marga tanah, dapat mendirikan satu huta sendiri di wilayah kampung marga tanah yang menjadi hula-hulunya. Sekalipun pendiri huta atau keturunannya meninggalkan huta yang didirikannya, huta dan tanah yang didirikannya itu tetap menjadi miliknya atau milik marganya. Marga mengukuhkan hak atas tanah yang didirikannya. Ini merupakan hak penguasaan tanah yang dipegang oleh marga atau kelompok suku. Karena itu migrasi Batak Toba dilakukan tidak hanya sekedar untuk mencapai *hagabeon* dan *hamoraon* melainkan juga *hasangapon*. *Hagabeon* berkaitan dengan banyak keturunan serta panjang umur dan sehat; *hamoraon* (kekayaan) berkenaan dengan pemilikan harta benda (ternak dan panen) yang melimpah dan sejahtera, sedangkan *hasangapon* (kemuliaan) berkenaan dengan pemilikan kekuasaan dan pangkat atau jabatan.

Orang Batak Toba percaya bahwa orang *na gabe*, *na mora* dan *na sangap* adalah pertanda lahiriah bahwa orang itu memiliki *sahala*, yaitu *sahala hagabeon*, *sahala hamoraon*, dan *sahala hasangapon*. Sementara pertanda lahiriah bahwa *sahala* meninggalkan seseorang adalah menyusutnya jumlah kekuatan galur karena rendahnya angka kelahiran dan tingginya angka kematian sebagai tanda tidak memiliki *sahala hagabeon* atau meninggalkannya; panen buruk, ternak sakit dan miskin sebagai tanda tidak memiliki *sahala hamoraon* atau meninggalkannya; serta kalah perang, tidak dihormati, tanpa jabatan sebagai tanda seseorang tidak memiliki *sahala hasangapon* atau meninggalkannya.

Dari Pusuk Buhit desa Sianjur Mulamula sebagai pusat asal leluhur Batak Toba inilah leluhur etnik Batak Toba menyebar atau bermigrasi ke daerah sekitarnya. Inilah migrasi pertama. Adapun *pasogit lobu parserakan*, atau desa tempat memencar cenderung terpolakan mengikuti kelompok marga³³ Sumba dan Ilontungon dan Borbor. Marga-marga yang tergolong dalam Marga Sumba (keturunan dari Raja Isumbaon) menyebar di tiga wilayah:

1. Bius Patane Bale Onan Pangururan di daerah Samosir merupakan tempat migrasi bagi kelompok Tuan Sorba Di Julu keturunan dari Naiambaton (Bolontua, Tambatua, Saragitua, Muntetua).
2. Bius Patane Bale Onan Nagodang, di daerah Uluan tempat migrasi bagi kelompok Tuan Sorba ni Jae keturunan dari Nairasaon (Manurung, Sitorus, Sirait, Butar-butar).
3. Bius Patane Bale Onan Balige di daerah Baligeraja menjadi tempat migrasi bagi kelompok Tuan Sorba ni Banua keturunan dari Naisuanon (Bagotnipohan, Paettua, sementara Lahisabungan, Oloan dan Huta Lima kemudian meninggalkan tempat ini akibat perselisihan dengan Bagotnipohan).

Dengan demikian, Bius Patane Bale Onan Pangururan, Bius Patane Bale Onan Balige dan Bius Patane Bale Onan Nagodang menjadi *bona* atau *tano pasogit* dan sekaligus menjadi *lobu parserahan* atau daerah tempat berserak dari marga-marga keturunan kelompok Sumba yang disebut parpustaha Tumbaga Holing Torsa ni Harajaon. Sementara itu, marga-marga keturunan dari Guru Satia/Tatea Bulan atau Raja Ilontungon parpustaha laklak Raksa ni Hadatuon, sebagian tetap tinggal di Desa Sianjur Mulana dan sebagian lagi menyebar ke daerah lain. Lima anak Guru Tatea Bulan (1.Raja Biak-biak, 2.Sariburaja, 3.Limbong, 4.Sagala Raja, 5.Malau Raja) dan empat putri (1.Siboru Paromas, 2.Siboru Pareme, 3.Siboru Bidinglaut, 4.Siboru Nan Tonjo). Limbong, Sagala dan Malau tetap tinggal di Sianjur Mula-mula. Marga Limbong kemudian mendirikan desa yang baru yang dinamakan Huta Limbong sebagai *bona* atau *tano pasogit* sedangkan keturunan marga Sagala mendirikan desa yang disebut huta Sagala dan dianggap menjadi *bona* atau *tano pasogit*.

Dikemudian hari, raja Biak-biak maupun Sariburaja, keduanya pindah dari Sianjur Mula-mula. Menurut ceritera, Raja Biakbiak pergi ke daerah Aceh; sedangkan Sariburaja dan Siborupareme tinggal di Sabulan di daerah yang disebut Banuaraja. Mereka memiliki seorang anak bernama Raja Lontung Raja Lontung memiliki tujuh anak laki yaitu: Situmorang, Sinaga, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Siregar, Aritonang, dan dua anak perempuan yaitu Siboruamakpandan dan Siboru Panggabean. Mereka berserak ke banyak daerah. Situmorang dan Sinaga di daerah Palipi dan Urat, Pandiangan di daerah Onan Runggu, Nainggolan di daerah Nainggolan di Pulau Samosir. Sementara Simatupang, Siregar dan Aritonang ke daerah Muara. Jadi, semua etnik Toba pada awalnya menyebar dan tinggal di Daerah Toba. Tentang nama tempat “Toba”, Meerwaldt pada akhir abad ke-19 melaporkan pengamatannya sebagai berikut:

Sungguh mengherankan bahwa ketika berangkat dari selatan menuju utara Tanah-tanah Batak, semakin kita merasa mendekati Toba yang sesungguhnya, semakin Toba mundur menjauh. Di Angkola, istilah “Toba” menunjuk semua

yang ada di sisi seberang Sungai Aek Poli, berarti di sebelah utara lembah Sungai Batang Toru. Namun, begitu kita sampai di Sungai Aek Poli, kita mendengar bahwa “Toba” bermula di lembah Silindung. Penduduk Silindung sendiri menamakan “Toba” daerah yang ada di utara rantai pegunungan yang menutup lembah tersebut. Jika kita berjalan lebih jauh lagi dan tiba di dataran tinggi, kita disuruh melanjutkan sampai dilayah tepi danau. Baru di sanalah kita menemukan orang-orang yang menamakan tanah mereka “Toba” dan menyebut dirinya “halak Toba”³⁴.

Dari daerah Toba inilah etnik Batak Toba kemudian menyebar dan bermigrasi ke daerah sekitarnya yang lebih luas yaitu daerah Mandailing dan daerah Angkola. Disini mereka menjadi satu suku yang disebut suku Mandailing. Dalam pemerintahan Orde Baru wilayah Mandailing dan Angkola masuk daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Wilayah Toba masuk Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Tetapi di era reformasi, daerah ini direformasi atau dimekarkan menjadi 5 kabupaten sesuai dengan lima subetnik Batak Toba. Masing-masing dari etnik Batak Toba menempati suatu wilayah tertentu baik dalam peta Pemerintah Kolonialisme Belanda tahun 1930-an dan Pemerintahan Indonesia pasca otonomi daerah atau era orde reformasi (Tabel 2.4).

Tabel 2.4: Wilayah Administratif Tanah Batak Toba

Etnik Toba	Kolonialisme Belanda <i>Afdeeling Batak Tobalanden</i>	Indonesia Pasca Orde Baru <i>Daerah Kabupaten</i>
Samosir	<i>Onderafdeeling Samosir (Pangururan)</i>	Daerah Kabupaten Samosir dengan ibu kota Pangururan.
Holbung	<i>Onderafdeeling Toba (Balige)</i>	Kabupaten Toba Samosir dengan ibu kota Balige.
Humbang	<i>Hoogvlankte van Toba (Siborongborong).</i>	Kabupaten Humbang-Habinsaran dengan ibu kota Dolok Sanggul
Silindung	<i>Onderafdeeling Silindung. (Tarutung)</i>	Kabupaten Tapanuli Utara dengan ibu kota Tarutung.

Toba Samosir menempati daerah Samosir (pada masa kolonialisme Belanda disebut *Onderafdeeling*³⁵ Samosir), suatu daerah yang mencakup pulau Samosir dan daerah pantai barat Danau Toba, meliputi deratan lembah subur seperti Sagala, Limbong, Harianboho, Sihotang, Tamba, Sabulan, Janjiraja. Sementara Samosir merupakan tanah tandus berbatu-batu.

Toba Holbung menempati daerah Toba Holbung (pada masa kolonialisme Belanda disebut *Onderafdeeling Toba*), yang meliputi Balige dan Porsea dan sekitarnya dan merupakan daerah persawahan terluas yang berada di sepanjang garis pantai selatan Danau Toba.

Toba Humbang menempati daerah Humbang (pada masa kolonialisme Belanda disebut *Onderafdeeling Hoogvlankte van Toba*). Daerah Humbang memiliki wilayah yang terdiri dari padang-padang luas dan pegunungan berhutan lebat. Hanya sedikit lahan untuk persawahan.

Toba Silindung menempati daerah Silindung (pada masa kolonialisme Belanda disebut *Onderafdeeling Silindung*). Daerah ini memiliki daerah persawahan kedua setelah Toba Holbung, termasuk persawahan hingga lembah subur Pahae. Wilayah ini sampai ke lembah-lembah di pantai Danau Toba, seperti Bakara dan Muara.

Jadi, tempat penyebaran utama dari etnik Batak Toba adalah Wilayah Toba yang meliputi Samosir, Holbung, Humbang dan Silindung. Dikemudian hari, orang Toba yang tinggal atau berasal dari Samosir disebut parsamosir, orang Toba yang tinggal di atau berasal dari Holbung disebut parholbung atau lebih sering disebut partobaholbung, orang Toba yang tinggal di atau berasal dari Humbang disebut parhumbang, dan orang Toba yang tinggal di atau berasal dari Silindung disebut parsilindung. Pada tahun 1820-an, sebelum missioner Jerman datang, beberapa wilayah sudah memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan sudah padat dihuni penduduk. Daerah Toba Silindung berisi 82 huta dengan penduduk antara 80.000 – 100.000 jiwa. Penduduk Toba Holbung lebih banyak lagi dan Toba Humbang masih di atasnya³⁶. Pada pertengahan abad ke-19, sebelum kolonialisme Belanda menguasai daerah Toba, jumlah penduduk daerah Toba berkisar 200.000 jiwa. Pada tahun 1920 penduduk Tapanuli diperkirakan sebanyak 369.041 jiwa, dan tahun 1930 diperkirakan berjumlah 412.889 jiwa (Tabel 2.5).

Etnik Toba	1920	1930
• Samosir	83.000.433	96.000
• Holbung	125.000.610	134.495
• Humbang	74.552	84.698
• Silindung	85.446	97.716
Total	369.041	412.889

Sumber: OHS Purba dan Elvis F. Purba. 1997: 55; dan Sitor Situmorang.

Migrasi Kedua

Dari daerah Toba kemudian etnik Batak Toba *marserak* atau bermigrasi³⁷ ke Sumatera Timur³⁸ (Sumatera Utara sekarang) , hingga ke Medan pada sekitar tahun 1900. Karena itu *marserak* juga dapat berarti menyebar ke daerah lain yang berbeda budayanya³⁹. Ini dilakukan untuk memperbaiki ekonomi dan

kesejahteraan hidup atau mencapai *hamoraon* dan *hasangapon*. Dorongan bagi kaum terdidik Batak Toba meninggalkan kampungnya adalah untuk menghindari kemiskinan serta untuk meningkatkan kesejahteraannya⁴⁰.

Vergowen telah mengumpulkan tradisi-tradisi Toba berkaitan dengan sejarah penyebaran penduduk di wilayah tersebut dan membuat penelitian tentang penyebaran marga-marga Toba. Menurut tradisi, Pulau Samosir dan sekeliling Danau Toba merupakan daerah asal migrasi⁴¹. Dari daerah asal ini kemudian Batak Toba menyebar atau bermigrasi ke luar daerah Toba dengan berjalan kaki hingga berhari-hari. Hasil penelitian genealogi (asal-usul) masyarakat Batak memperlihatkan dengan jelas bahwa secara konsisten telah terjadi migrasi masyarakat Batak Toba dari sekitar Danau Toba dimulai sejak tahun 1870-an. Berdasarkan peta migrasi kuno, etnik Toba menyebar ke Aceh, Karo (Kabanjahe), Pakpak-Dairi (Sidikalang). Kemudian bermigrasi lagi ke Simalungun (Pematang Siantar), Deli Serdang (Tebing Tinggi), Pardembanan Asahan (Tanjung Balai) dan Batubara, Tapanuli Tengah (Sibolga dan Barus), Tapanuli Selatan ke Angkola (Gunung Tua), dan Mandailing (Padang Sidempuan) hingga ke Natal. Setidaknya, sampai permulaan tahun 1929 pembukaan dan keberadaan jalan-jalan⁴² yang menghubungkan Tapanuli Utara dengan pantai timur dan pantai barat memberi kemudahan bagi penduduk pindah dari Tapanuli Utara ke daerah lain di Sumatera Utara. Terbukalah pintu kepada “dunia bebas” bagi penduduk Tapanuli Utara.

Dari berbagai informasi ditemukan bahwa sejak akhir abad ke-19, kaum pendatang Toba yang terdiri dari ribuan orang mulai tinggal di Simalungun, antara lain di dekat Pematangsiantar, untuk membuka sawah dan menggarapnya⁴³. Pada tahun 1920, diperkirakan ada 26.000 migran Toba di Simalungun⁴⁴, sedangkan tahun 1930 diperkirakan sebanyak 30.433 di Simalungun⁴⁵. Sebagian dari mereka adalah bekerja di perkebunan. Migrasi ke ada mobilisasi dari pemerintah Belanda untuk dipekerjakan di perkebunan di pantai timur Sumatera Utara⁴⁶. Lebih khusus lagi, berdasarkan data sensus tahun 1930, sebanyak 15.150 orang atau sekitar 15,7% dari jumlah penduduk Oderaafdeling Samosir pindah ke daerah lain, di antaranya, 2.819 orang ke Dairi dan 6.859 orang di Simalungun⁴⁷.

Migrasi Batak Toba juga ke arah Angkola, Mandailing, Sipirok dan Sidempuan yang sebelum otonomi daerah termasuk daerah Tapanuli Selatan. Banyak marga Tapanuli Selatan yang yang punya tradisi bermigrasi dari utara. Seandainya pun tidak terdapat tradisi semacam itu, adanya marga yang sama (bunyinya) dengan di utara – yang dapat dianggap sebagai sisa orang-orang yang tidak ikut bermigrasi – serta kesamaan bahasa dan adat telah membuktikan bahwa Batak Tapanuli Selatan berasal dari Toba⁴⁸. Berdasarkan sensus tahun 1930, telah banyak orang Batak Toba yang tinggal di luar daerah Tapanuli Utara. Di wilayah Keresidenan Tapanuli (tidak termasuk Tapanuli Utara) seperti Barus, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga terdapat 107.995 jiwa. Di

Sumatera Timur, seperti Simalungun, Asahan, Tanah Karo, Kota Pematang Siantar, Deli Serdang, Kota Medan, Langkat, Kota Tanjung Balai, Labuhan Batu, Kota Tebing Tinggi dan Kota Binjai terdapat sebanyak 74.224 jiwa dan di Tanah Alas sebanyak 1.789 jiwa⁴⁹.

Jadi migrasi juga sampai ke Medan jauh sebelum tahun 1930. Sebuah gelombang migrasi sekunder dari daerah Toba berlangsung mulai tahun 1933 menuju daerah Bedagai di pesisir, antara Perbaungan dan Tebing Tinggi. Perlu ditambahkan bahwa tahun 1929, sudah ada lebih daripada seribu orang Toba menetap di dataran rendah Deli-Serdang, antara lain di Medan⁵⁰. Sementara rombongan pendatang Toba juga menetap di daerah Alas sejak tahun 1920-an untuk membuka sawah dan ladang.

Migrasi ke Jakarta pun diperkirakan telah terjadi sekitar awal abad 20. Dari hasil studi Lance Castles, orang Batak Toba yang pertama datang ke Jakarta sekurang-kurangnya pada tahun 1907. Jumlah orang Batak Toba di Jakarta tahun 1930 suda berkisar 1.263 orang⁵¹. Pada tahun 1917 suku Batak Toba telah hidup secara permanen di sekitar 30 kota. Mayoritas mereka adalah pelajar⁵². Tetapi tidak diketahui secara pasti apakah yang bermigrasi tersebut berasal dari pusat negeri Toba ataukah mereka yang sudah bermigrasi ke sekitar atau di luar daerah Toba.

Migrasi ketiga

Orang Batak Toba selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan kesejahteraannya. Dan bermigrasi, bahasa setempat adalah *ma(nga)ranto*, merupakan cara untuk mendapat hidup yang lebih baik. Apalagi jika ada yang berhasil, maka akan menjadi pemacu bagi tiap orang untuk mengikuti jejaknya yaitu bermigrasi. *Maranto* atau merantau tidak hanya tradisi, melainkan juga menjadi prestis bagi orang Batak Toba.

Migrasi ketiga terjadi pada tahun 1950-an. Migrasi besar orang Toba ke arah Pesisir Timur dimulai tahun 1950, setelah dihapusnya Negara Sumatera Timur. Selama periode 1950-1956, paling tidak ada 250.000 orang “Toba Batak” yang meninggalkan pegunungan Bukit Barisan untuk menetap di dataran rendah. Mereka lari dari pedalaman yang situasinya tidak aman dan menetap di Medan atau di perkebunan tembakau yang terlantar, kemudian di tanah-tanah kosong dekat kampung-kampung Melayu. Orang-orang Toba itu tidak hanya datang dari sekeliling Danau Toba, tetapi juga orang Toba dari daerah Alas yang ditinggalkan oleh ribuan keluarga yang lari menghindari pemberontakan “Darul Islam” antara tahun 1954 dan 1957⁵³.

Pada perioda ini dan sesudahnya juga terjadi migrasi intensif dari masyarakat Batak Toba ke luar dari daerah Toba dan ke luar Sumatera Utara ke

daerah Sumatera lain. Mereka adalah kelompok petani yang tidak memiliki lahan yang memadai untuk membuka lahan pertanian baru.

Sebagian lagi ke Jawa, khususnya ke Jakarta. Jumlah Batak Toba diperkirakan sebanyak 28.900 jiwa pada tahun 1961 dan menjadi 81.248 pada tahun 1961 dan menjadi 81.248 pada tahun 2000⁵⁴. Mereka adalah kelompok terdidik untuk mencari pekerjaan di bidang pemerintahan dan swasta. Sebagian lagi adalah untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara ada juga kelompok petani yang memiliki lahan tidak memadai bermigrasi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, transpodt umum, tukang tempel ban dan membungakan uang⁵⁵.

Struktur Sosial Batak Toba

Dari berbagai kepustakaan terutama kepustakaan antropologi ditemukan bahwa suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak ialah Toba, Angkola-Mandailing, Simalungun, Karo, Pakpak-Dairi. Jadi, kata “Batak” menunjuk pada semua sub etnis “Batak” di atas. Masing-masing suku atau puak memiliki budaya, bahasa dan tulisan sendiri-sendiri. Meskipun demikian mereka mempunyai banyak persamaan terutama antara kelompok atau rumpun selatan (Angkola-Mandailing dan Toba) dan rumpun utara (Pakpak dan Karo) dan kelompok tengah (Simalungun). Karena ada perbedaan bahasa dan tulisan maka di antara mereka sulit berkomunikasi. Di antara mereka juga ada persamaan yaitu mereka memiliki struktur sosial dan sistem kekerabatan yang sama. Penyebutan struktur sosial dan kekerabatan menurut keenam puak Batak tersebut adalah:

1. Toba: Dalihan Na Tolu dengan sistem dan filosofi kekerabatan Manat Mardongan Tubu, Somba Marhula-hula, Elek Marboru.
2. Mandailing dan Angkola: Dalian Na Tolu dengan sistem dan filosofi kekerabatan Hormat Marmora, Manat Markahanggi, Elek Maranak Boru
3. Simalungun: Tolu Sahundulan dengan sistem dan filosofi kekerabatan Martondong Ningon Sombah; Marsanina Ningon Manat; Marboru Ningon Elek.
4. Karo: Rakut Sitelu dengan sistem dan filosofi kekerabatan Nembah Man Kalimbubu, Mehamat Man Sembuyak, Nami-nami Man Anak Beru
5. Pakpak: Daliken Sitelu dengan sistem dan filosofi kekerabatan Sembah Merkula-kula, Manat Merdengon Tubuh, Elek Marberru.

Struktur sosial atau kerabat huluhula/Mora/tondong/kalimbubu/ kula-kula adalah pihak keluarga dari isteri. Hula-hula menempati posisi yang paling dihormati dalam pergaulan dan adat-istiadat Batak (semua sub-suku Batak)

sehingga kepada semua masyarakat Batak dipesanan harus hormat kepada Hulahula atau somba marhula-hula.

Struktur sosial atau kerabat dengan tubu/kahaanggi/sanina/sembuyak/ dengan tubuh adalah saudara laki-laki satu marga⁵⁶. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Mereka ini seperti batang pohon yang saling berdekatan, saling menopang, walaupun karena saking dekatnya kadang-kadang saling gesek. Namun, pertikaian tidak membuat hubungan satu marga bisa terpisah. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi tetap bersatu. Namun demikian kepada semua masyarakat Batak (berbudaya Batak) dipesanan harus bijaksana kepada saudara semarga. Diistilahkan, manat mardongan tubu.

Struktur sosial atau kerabat boru/anak boru/boru/anak beru/berru adalah pihak keluarga yang mengambil isteri dari suatu marga (keluarga lain). Boru menempati posisi paling rendah sebagai 'parhobas' atau pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun (terutama) dalam setiap upacara adat. Namun walaupun berfungsi sebagai pelayan bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena. Melainkan pihak boru harus diambil hatinya, dibujuk, diistilahkan: Elek marboru.

Catatan Akhir

¹ Akhir-akhir ini ada kecenderungan predikat Batak melekat pada etnik Toba. Pihak luar juga cenderung menganggap bahwa masyarakat Batak itu adalah orang Toba. Jika disebut masyarakat Batak, itu menunjuk pada orang Toba. Kemudian sebagian dari etnik lain utamanya Karo (lihat <http://tanobatak.wordpress.com/2010/07/21/kenapa-harus-karo-bukan-batak/>) dan Angkola-Mandailing (lihat <http://tobadreams.wordpress.com/2008/10/09/mandailing-menyangkal-kebatakannya-akibat-emosi-keagamaan/>) tidak menyebut dirinya sebagai bagian dari suku Batak alias tidak lagi menggunakan identitas Batak. Ini terjadi terutama setelah Tengku Luckman Sinar dalam wawancara bulan Agustus 1990 menyatakan bahwa orang Karo bukanlah orang "Batak", dan bahwa masuknya "orang-orang gunung" dalam satuan "Batak" itu dilakukan oleh Belanda. Pada hal menurut Siti Omas br Manurung, seorang Toba isteri Raja Barita putra dari Singamangaraja XII "pendeta-raja-Batak" terakhir dari Dinasti Singamangaraja pada bulan Januari 1992 menyatakan bahwa sebelum kedatangan Belanda, semua orang, baik Karo maupun Simalungun, mengakui dirinya sebagai "Batak" dan Belandalah yang telah membuat terpisahnya kelompok-kelompok tersebut. Tetapi menurut RW. Liddle (1970), sebelum abad ke-20, di Sumatera bagian utara tidak terdapat kelompok etnis sebagai satuan sosial koheren dan yang dipandang demikian oleh anggota-anggotanya. Menurut Liddle, sampai abad ke-19 interaksi sosial di daerah itu praktis terbatas pada hubungan antar individu, antar kelompok kekerabatan atau antar kampung. Sementara hampir tidak ada interaksi pada tingkat lebih luas atau kesadaran menjadi bagian dari satuan-satuan sosial dan politik yang lebih besar. Munculnya kesadaran mengenai sebuah "keluarga besar Batak", menurut L. Castles (1975), baru terjadi pada zaman kolonial. Lihat Daniel Peret. 2010. Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Terjemahan Saraswati Wardhany. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), h. 47. Meskipun demikian sebagian dari orang Karo dan Pakpak mengakui bahwa "nenek moyang" masyarakat Batak dan "nenek moyang" mereka berasal dari suku bangsa dan daerah asal yang sama, yaitu dari Hindia Belakang. Di Sumatera Utara mereka menghimpun berdasarkan *culture area* (daerah kebudayaan) menjadi satu suku bangsa yang disebut Batak. Ypes mengatakan bahwa Dairi, Karo, Simalungun, Angkola

-
- Mandailing berasal dari suku Toba, demikian juga dialeknya. N. Siahaan dan H. Pardede mengatakan, “jika orang bukan Batak memakai marga berarti menjadi masyarakat Batak”. Karena Karo dan Dairi memiliki marga maka mereka berarti adalah juga masyarakat Batak. Lihat N. Siahaan dan H. Pardede, tanpa tahun, *Sejarah Perkembangan Marga-marga Batak Toba*. Balige: Indra, h. 15, 48.
- ² Lihat antara lain Harahap, E. (ta: tahun). *Perihal Bangsa Batak*. Departemen PP dan K, Jakarta; Hutagalung, W. M. 1991. *Pustaka Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak*, Tulus Jaya; N. Siahaan dan H. Pardede, ta: tahun, *Sejarah Perkembangan Marga-marga Batak Toba*. Balige: Indra; Batara Sangti. 1977. *Sejarah Batak*. Balige: Karl Sianipar.
 - ³ Bandingkan, misalnya, versi dari Hutagalung, W. M. 1991. *Pustaka Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak*. Tulus Jaya; Sangti, Batara. 1977. *Sejarah Batak*. Balige: Karl Sianipar; Raja Patik Tampubolon. 2002. *Pustaka Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama.
 - ⁴ Clark Cunningham membantah kepercayaan bahwa masyarakat Batak pertama, Si Raja Batak, turun dari langit ke Gunung Pusuk Buhit di sebelah barat pantai Danau Toba. Lihat Lance Castles. *op cit*. h. 3.
 - ⁵ Diperkirakan Danau Toba terjadi saat ledakan sekitar 73.000-75.000 tahun yang lalu dan merupakan letusan supervolcano (gunung berapi super) yang paling baru. Bill Rose dan Craig Chesner dari Michigan Technological University memperkirakan bahwa bahan-bahan vulkanik yang dimuntahkan gunung itu sebanyak 2800km³, dengan 800km³ batuan ignimbrit dan 2000km³ abu vulkanik yang diperkirakan tertiuip angin ke barat selama 2 minggu. Debu vulkanik yang ditiup angin telah menyebar ke separuh bumi, dari cina sampai ke afrika selatan. Letusannya terjadi selama 1 minggu dan lontaran debunya mencapai 10 KM diatas permukaan laut.
 - ⁶ Koentjaraningrat, Pendahuluan, dalam Koentjaraningrat 1976. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan: Jakarta, h. 5-6.
 - ⁷ *Ibdi*, h. 10-11.
 - ⁸ *Ibid*, h. 9-10
 - ⁹ *Ibid*, h. 21.
 - ¹⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Ibid*, h. 63-65.
 - ¹¹ Koentjaraningrat, *ibid*, h. 21-22.
 - ¹² Disarikan dari Bisuk Siahaan h. 6-7.
 - ¹³ *Ibid*
 - ¹⁴ Batara Sangti. *op cit*. h. 257.
 - ¹⁵ *Ibid*, h. 272-273.
 - ¹⁶ *Ibid*, h. 257.
 - ¹⁷ *Ibid*, h. 236.
 - ¹⁸ W.B. Sidjabat. 1982. *Ahu Si Singamangaraja*. Jakarta: Sinar Harapan, h. 413.
 - ¹⁹ Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cetakan Delapan. Jakarta: Rineka Cipta, h. 271-272.
 - ²⁰ Tentang hubungan antara sejarah dan mitologi tentang suku Batak, Gultom Radjamarpodang menulis: Apabila kita perhatikan silsilah Siraja Batak sampai generasi sekarang, kita akan menemui bahwa generasi Batak baru ada sekitar 35 generasi. Jika satu generasi sekitar 25 tahun berarti Batak dan Kerajaan Batak itu sampai saat ini baru berusia 950 tahun. Dengan kata lain bahwa Kerajaan Batak itu baru ada sekitar 900 s/d 1000 tahun yang lampau mendiami Pulau Sumatera. Manakah yang benar antara catatan sejarah dan silsilah Siraja Batak ... bahwa Siraja Batak baru lahir sekitar 1000 tahun yang lampau. Pada hal berdasarkan catatan sejarah tadi masyarakat Batak itu sudah ada sekitar 2000 tahun yang lampau. Perbedaan ini belum terjawab selama ini. Lihat DJ. Gultom Rajamarpodang. *Ibid*. h. 12.
 - ²¹ N. Siahaan dan H. Pardede, *op cit*, h. 10. Nama Sianjur Mulana memiliki makna sesuai dengan kebiasaan masyarakat Batak Toba hingga dewasa ini umumnya membuat nama orang, kampung, dsbnya, harus sedapat mungkin sesuai dengan latarbelakangnya, pembawaan,

- keadaan, pengharapan, kepribadian atau berdasarkan renungan, ramalan, mimpi (toba: *tona*). Uraian lebih lanjut tentang makna nama Sianjur Mulana. Lihat Batara Sangti, *ibid*, h. 264.
- ²² Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah *bawahan* dari provinsi, karena itu bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Masih ditemukan kabupaten administrasi. Berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, kabupaten administrasi bukanlah daerah otonom. Kabupaten administrasi dipimpin oleh seorang bupati dan dibantu oleh wakil bupati yang diangkat oleh gubernur dari kalangan pegawai negeri sipil.
- ²³ Sebelumnya, yaitu pada tahun 1946 Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi merupakan satu kabupaten yang disebut Kabupaten Tanah Batak. Kabupaten ini terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu Silindung, Humbang, Toba, Samosir dan Dairi. Masing-masing dipimpin oleh seorang Demang. Pada Tahun 1947, Kabupaten Tanah Batak dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu tanpa wilayah Dairi yang telah berubah menjadi kabupaten. Setelah pengesahan kedaulatan, pada permulaan tahun 1950 di Tapanuli di bentuk Kabupaten baru yaitu Kabupaten Tapanuli Utara (dulu Kabupaten Batak), Kabupaten Tapanuli Selatan (dulu Kabupaten Padang Sidempuan), Kabupaten Tapanuli Tengah (dulu Kabupaten Sibolga) dan Kabupaten Nias (dulu Kabupaten Nias). Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dairi pada waktu itu, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan, pada tahun 1956 dibentuk Kabupaten Dairi yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 1998 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan kembali menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir. Semuanya adalah tempat kediaman dominan etnik Batak Toba.
- ²⁴ Jamaludin S. Hasibuan. 1985. *Art Et Culture/Seni Budaya Batak*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, h. 238-239.
- ²⁵ Ada dua makna dalam penggunaan istilah atau kata “bangso” (bangsa, dalam bahasa Indonesia) untuk “bangso Batak”. Pertama, dalam makna tradisional atau lama yang berarti sebagai “sekelompok orang” atau “suku”. Kedua, menggunakan istilah bangsa dalam makna modern yaitu “kesatuan politik”.
- ²⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak#Identitas_Batak
- ²⁷ Pembahasan tentang agama malim, lihat Gultom, Ibrahim. 2010. *Agama Malim di Tanah Batak*. Bumi Aksara. Jakarta.
- ²⁸ Dalam silsilah Si Raja Batak dan marga-marga keturunannya lebih nampak bahwa Si Raja Batak adalah nenek moyang dari suku bangsa Batak Toba. Marga-marga dari suku bangsa Batak Toba ini kemudian menyebar dan bergabung dalam marga-marga di daerah Karo dan Pakpak. Lihat N. Siahaan dan H. Pardede, *op cit*, h. 15, 48.
- ²⁹ Nama Singaraja Batak sebagai leluhur masyarakat Batak Toba ditemukan dalam buku Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h, 182, 190.
- ³⁰ Pembahasan tentang Migrasi Batak Toba, baca OHS Putba dan Elvis E. Purba. 1997. *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*. Medan: Monora.
- ³¹ Paul B. Pedersen. 1975. *Darah Batak dan Jiwa Protestan: Perkembangan Gereja Batak di Sumatera Utara (terjemahan)*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, h. 34.
- ³² Ada beberapa istilah yang digunakan untuk maksud yang sama seperti: manombang, mangaranto, marjalang, marlompong, mangombo, mangalului jampalan na lomak, masiampapaga na lomak. Uraian lebih lanjut tentang terminologi ini lihat Pembahasan tentang

- Migrasi Batak Toba, baca OHS Putba dan Elvis E. Purba. 1997. Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak). Medan: Monorah, h. 22-25.
- ³³ Kata “*marga*” bagi masyarakat Batak dapat memiliki makna tanpa batas yang pasti, bisa menunjukkan baik satuan-satuan yang lebih kecil maupun yang lebih besar, dan juga kelompok-kelompok yang paling besar, yakni: bisa menunjuk pada “*kelompok suku*”, “*marga induk*” atau “*marga*”. Istilah “*kelompok suku*” ditujukan kepada kelompok *marga* dari pohon silsilah; istilah “*marga induk*” dapat digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian, atau puak utama, yang menjadi percabangan kelompok suku; dan istilah “*marga*” dimaksudkan untuk menandai bagian-bagian yang terpisah dari “*marga induk*”. Istilah “*cabang marga*” digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian *marga* yang besar, tetapi masih belum terpisah, dan galur keturunan (*lineage*) atau “*saompu*” untuk menunjukkan kelompok-kelompok yang lebih kecil dari keturunan pihak ayah dan merupakan komponen pembentuk cabang *marga*. Meskipun demikian *Marga* dalam masyarakat Batak Toba dapat dikelompokkan kedalam dua himpunan pokok *marga* besar. Vergouwen menamakannya sebagai “*kelompok suku*”. Kelompok suku yang dimaksud ialah Lontung (keturunan Tateabulan) dan Sumba (keturunan Isumbaon). Pokok *marga* Sumba berkembang menjadi tiga *marga* yang disebut “*puak*”. Ketiga puak yang dimaksud ialah: Nai Ambaton (keturunan Tuan Sorbadijulu), Nai Suanon (keturunan Tuan Sorbadijae), dan Nai Suanon (keturunan Tuan Sorbadibanua). Tiap puak berkembang menjadi sejumlah kelompok-kelompok *marga*. Vergouwen menamakannya “*marga induk*” atau “*marga inti*”. Puak Nai Suanon, misalnya, berkembang menjadi delapan *marga* induk atau *marga inti*, yaitu: Sibagotnipohan, Sipaettua, Silahisabungan, Siraja Oloan, *Hutalima*, Sumba, Sobu, Pospos. Tiap *marga* induk kemudian berkembang menjadi apa yang disebut sebagai *marga* dan tiap *marga* berkembang lagi menjadi cabang *marga*. lihat J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 36, 38.
- ³⁴ Dikutip dari Daniel Peret, *ibid*, h. 74.
- ³⁵ Pengelompokan ini sejalan dengan pengelompokan J.C. Vergouwen yang membagi seluruh Tanah Toba ke dalam tiga wilayah masing-masing dengan ciri hukum sendiri, yaitu: 1. Seluruh bagian sebelah selatan yang mencakup Humbang, Habinsaran Selatan, Silindung, dan Pahae, yang ke dalamnya harus pula dimasukkan Barus Hulu dan Hurlang; 2. Toba Holbung, Habinsaran Utara, dan Uluan; 3. Muara, Samosir, dan pantai bagian barat Danau Toba. Lihat J.C. Vergouwen. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Azet, h. 6. Pada masa kolonialisme Pemerintahan Belanda, pengelompokan ini dijadikan sebagai dasar pengelompokan daerah Batak Toba yang disebut *Afdeeling Batak Tobalanden* (tanah Batak Toba) yang terdiri dari *Onderafdeeling* Silindung, *Onderafdeeling* Toba, *Hoogvlankte van Toba* (Dataran Tinggi Toba), dan *Onderafdeeling* Samosir. *Afdeeling* adalah sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang diperintah seorang asisten residen. *Afdeeling* merupakan bagian dari sebuah Karesidenan. Sebuah *afdeeling* terdiri atas beberapa *onderafdeling* (setingkat kabupaten).
- ³⁶ OHS. Purba dan Elvis E. Purba. 1997. Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak). Medan: Monora, h. 53.
- ³⁷ Faktor-faktor penyebab migrasi pada era ini antara lain faktor fisik geografis, iklim/musim, kesuburan lahan; faktor sosial dan demografis; faktor pendidikan; faktor politik; faktor ekonomi; pembukaan jaringan jalan. Tentang hal ini baca OHS. Purba dan Elvis E. Purba. 1997. *Ibid*, bab 4.
- ³⁸ Tentang migrasi orang Toba ke Sumatera timur setelah perang lihat Clark E. Cunningham. 1958. *The Post-war Migration of the Toba Bataks to East Sumatra*. Cultural report Series, Southeast Asia Studies. New Haven: Yale University.
- ³⁹ Dalam percakapan sehari-hari ditemukan beberapa istilah atau kata yang mengandung maksud atau tujuan yang sama, yaitu pergi ke daerah lain di luar kabupaten atau propinsi, tetapi dengan makna yang berbeda. Istilah yang dimaksud ialah antara lain manombang, mangaranto, marjalang, marlompong, mangombo, mangalului jampalan na lomak atau mangalului ampapaga nalomak. Uraian dari masing-masing istilah ini baca OHS. Purba dan Elvis E. Purba. 1997. *Ibid*, h. 22-24.
- ⁴⁰ Kesimpulan yang dibuat oleh Purba dan Purba dari tulisan Bruner tentang “Medan: The Role of Kinship in an Indonesian City” tahun 1963. OHS. Purba dan Elvis E. Purba. 1997. *Ibid*, h. 5.

-
- ⁴¹ Daniel Peret, *ibid*, h. 45. Dijelaskan juga hasil penelitian dari JH. Neuman tahun 1926 tentang asal dan penyebaran dari etnik Karo berdasarkan sastra lisan dan transkripsi dua naskah setempat yaitu Pustaka Kembaren dan Pustaka Ginting. Lihat *ibid*, h 45-46.
- ⁴² Pembukaan jaringan jalan dari dan menuju Tapanuli Utara sebagai tempat orang Batak Toba dilakukan sekitar tahun 1906 – 1930. Uraian lebih rinci lihat OHS. Purba dan Elvis E. Purba. 1997. *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*. Medan: Monora, h. OHS. Purba dan Elvis E. Purba. 1997. *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*. Medan: Monora, h. 91-93.
- ⁴³ *Ibid*. h. 40-41.
- ⁴⁴ Johan Hasselgren, 2008. *ibid*, h. 142.
- ⁴⁵ OHS. Purba dan Elvis E. Purba. 1997. *Ibid*, h. 56.
- ⁴⁶ Togar Nainggolan. 2012. *Batak Toba di Jakarta*. Medan: Bina Media Perintis, h. 116.
- ⁴⁷ Berdasarkan Volkstelling tahun 1930 sebagaimana dikemukakan oleh OHS. Purba dan Elvis E. Purba. 1997. *Ibid*, h. 40.
- ⁴⁸ Lance Castles. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940*. Diterjemahkan oleh Maurits Simatupang. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, h. 14.
- ⁴⁹ OHS. Purba dan Elvis E. Purba. 1997. *Ibid*, h. 57. Lihat juga penjelasan lebih rinci tentang jumlah jiwa di tiap daerah di Tapanuli dan Sumatera Timur.
- ⁵⁰ *Ibid*. h. 40-41.
- ⁵¹ Togar Nainggolan, 2012. *ibid*, h. 121.
- ⁵² Johan Hasselgren, 2008. *ibid*, h. 141.
- ⁵³ *Ibid*. h. 35.
- ⁵⁴ Togar Nainggolan, 2012. *ibid*, h. 121.
- ⁵⁵ Togar Nainggolan, 2012. *ibid*, h. 129.
- ⁵⁶ Kata marga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jalan. Tetapi juga dapat berbunyi “warga” dari bahasa Sanskerta. Tetapi karena orang Toba tidak mengenal huruf “w” maka diucapkan marga, sehingga hubungan kemargaan dapat juga berarti hubungan kewargaan.

Bab 3

Kerajaan Tradisional Batak Toba dan Dinasti Singamangaraja

Pendahuluan

Institusi birokrasi dalam masyarakat tradisional bagaimanapun lahir dan berkembang dalam sejarah manusia saat itu. Birokrasi berada dalam satu ruang sosio-politik, dan mengambil bentuk sebagaimana ruang sosio-politik yang didiaminya. Ruang sosio-politik itulah yang secara riil membentuk bentuk birokrasi dan bukan sebaliknya¹. Birokrasi yang terbentuk saat itu merupakan hasil dari kreasi dan perilaku manusia untuk kebutuhan saat itu. Apakah masyarakat tradisional Batak Toba tidak memiliki ruang sosio-politik untuk membentuk birokrasi untuk kebutuhan saat itu?. Banyak pihak, termasuk dari kalangan masyarakat Batak Toba itu sendiri, menganggap bahwa masyarakat tradisional Batak Toba tidak pernah memiliki birokrasi karena tidak pernah ada kerajaan yang mengatur kehidupan berpemerintahan Batak Toba. Menjadi pertanyaan penting adalah benarkah ada masyarakat dengan jumlah yang besar dengan wilayah yang luas seperti masyarakat tradisional Batak Toba dapat hidup tenteram, aman dan damai tanpa ada satu harajaon yang *mangarajai* atau memerintah?

Lance Castle, misalnya, dalam disertasinya *The Political Life of a Sumateran Residency: Tapanuli, 1915 – 1940* yang telah diterjemahkan menjadi *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940*, menyebutkan bahwa tanah Batak makmur tanpa satu kerajaan yang melindungi dan memerintah². Dinasti Singamangaraja dianggap bukanlah satu kerajaan karena Raja Singamangaraja tidak berkedudukan dan tidak memiliki kekuasaan sebagai seorang raja seperti di banyak masyarakat tradisional, sebut saja kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera Barat, dll. Walaupun Raja Singa Mangaraja memiliki kekuasaan atau pengaruh, kekuasaannya hanya terbatas pada daerahnya saja yang sangat terbatas ialah Bakara.

Jika dibandingkan dengan masyarakat tradisional lain di daerah atau negara lain maka pendapat Lance Castle tersebut dapat diterima. Tetapi untuk menyatakan bahwa ada negara atau pemerintahan atau kerajaan di satu masyarakat tradisional atau sebaliknya mengatakan tidak ada negara, pemerintahan atau kerajaan di satu masyarakat tradisional lain dengan membandingkan antara pemerintahan atau kerajaan yang satu dengan yang

lainnya di daerah yang satu dengan di daerah lainnya yang berbeda secara kultural adalah suatu pemikiran keliru.

Kerajaan Tradisional Batak Toba

Secara kultural, setiap masyarakat tradisional memiliki karakteristik sendiri dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Atau setiap masyarakat tradisional dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan dipengaruhi oleh kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Tata kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan masyarakat Batak Toba tradisional akan berbeda dengan masyarakat tradisional di Jawa atau di daerah lainnya karena masyarakat Batak Toba memiliki budaya yang berbeda dengan budaya masyarakat lainnya.

Jadi, bagi orang yang mengenal masyarakat Batak Toba tradisional apalagi yang mendalami sejarahnya serta memahami dan mendalami hakekat negara, pemerintahan dan birokrasi tradisional, pandangan tersebut adalah pandangan yang dangkal. Bukan hanya orang asing atau penulis luar Indonesia yang berpandangan seperti itu, bahkan sangat disayangkan bahwa dari kalangan Indonesia sendiri baik sarjana maupun cendekiawan menelan bulat-bulat pandangan tersebut dan menyebarkanluaskannya. Sesuai dengan konteks kulturalnya, maka masyarakat tradisional Batak Toba sudah memiliki kerajaan yang melindungi, memerintah dan mengatur masyarakat Batak Toba ketika itu. Itu dapat dijelaskan dari pendekatan atau perspektif mitologi dan histori.

Kerajaan Batak Toba dalam Mitologi

Dalam mitologi masyarakat Batak Toba sudah dikemukakan ada pemerintahan atau *harajaon* dalam masyarakat Batak Toba. Dalam mitologi masyarakat Batak Toba diceriterakan bahwa Si Raja Batak, leluhur orang Batak, memiliki dua orang putera. Putera pertama bernama Guru Tatea Bulan dan putera kedua bernama Raja Isumbaon. Suatu ketika Raja Batak bersama kedua puteranya berdoa atau *martonggo* kepada Debata Mulajadi Nabolon untuk memohon apa yang harus dia berikan kepada kedua puteranya selain dari apa yang sudah dia miliki. Di akhir doanya Raja Batak mengucapkan: *Asa tongos ma da Ompung sahala tua, sahala harajaon bagian ni anakhu na dua on* (agar berikanlah ya leluhur wibawa berkat, wibawa kerajaan milik dari bagi kedua anak saya ini).³ Debata Mulajadi Na Bolon mendengar dan kemudian memberikan Pustaha Tumbaga Holing di hadapan mereka.

Pustaha ini terdiri dari dua bagian yaitu Pustaha Laklak dan Pustaha Tumbaga⁴ atau lainnya menyebut Surat Agong dan Surat Tumbaga. Pustaha Laklak atau Surat Agong berisi “Raksa/rangsa ni hadatuon atau panuratan ni

hadatuon (tulisan tentang pengetahuan adikodrati) berupa pengetahuan magis-religius untuk datu atau guru, seperti *habeguon* (ilmu tentang hal-hal yang bersifat mistik), *parmonsahon* (kependekaran, ilmu silat dan perang) dan *pangaliluon* (ilmu menghilang dan membuat orang linglung/bingung). Semuanya merupakan ilmu dukun, sihir dan pengobatan. Pustaka Laklak ini diserahkan oleh Raja Batak kepada putera sulungnya Guru Tatea Bulan. Pustaka Tumbaga bersisi “Torsa ni Harajaon” atau *panuratan ruhut-ruhut ni harajaon* yaitu pengetahuan yang dibutuhkan untuk kerajaan Raja atau memimpin dan mengatur masyarakat mengenai ilmu pemerintahan, adat dan hukum, *paruhumon* (hukum dan peradilan), pertanian (*parhaumaon*), dan pengetahuan dagang (*partigatigaon*), seni cipta (*paningaon*). Surat Pustaka Tumbaga tersebut diserahkan oleh Raja Batak kepada puteranya bernama Raja Isumbaon.

Berdasarkan Pustaka yang diterima oleh kakek moyang kelompok Guru Tatea Bulan atau Ilontungon dan Raja Isumbaon atau Sumba maka ada bukti empiris bahwa dalam sejarah kemasyarakatan dan pemerintahan Batak Toba menunjukkan para datu maupun kependekaran banyak digeluti oleh keturunan Guru Tatea Bulan; sedangkan *Harajaon* Batak berasal dari dan dipimpin oleh keturunan Raja Isumbaon. Dinasti yang ada dalam masyarakat Batak adalah Dinasti Singamangaraja I hingga XII dan yang menjadi Raja adalah Singamangaraja dari klan marga Bakkara keturunan Raja Oloan keturunan dari Raja Isumbaon.

Dalam turiturian juga dikisahkan bahwa kedua Pustaka tersebut tidak pernah dibuka oleh pemegang wasiat yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Barulah pada generasi Martua Rajadoli keturunan raja Ilontungon dan generasi Tuan Sorimangaraja keturunan Raja Isumbaon mulai membuka dan membaca Pustaka masing-masing. Itu sebabnya disebut *Martua Rajadoli mula ni Raksa ni Hadatuon sian Pustaka Laklak*; Tuan Sorimangaraja mula ni *Torsa ni Harajaon sian Pustaka Tumbaga*, atau Martua Raja Doli awal dari pengetahuan adikodrati yang tertulis dalam Pustaka Laklak; Tuan Sorimangaraja awal dari pengetahuan dari pemerintahan yang tertulis dalam Pustaka Tumbaga. Sesudah dewasa, Tuan Sorimangaraja membuka Pustaka Tumbaga yang dimilikinya yang berasal dari kakeknya. Terlebih dahulu dia berdoa kepada Debata Mulajadi Na Bolon (Allah Maha Pencipta) ketika hendak membuka Pustaka miliknya. Setelah dibuka ternyata dalam Pustaka tersebut ditemukan *Torsa⁵ ni Harajaon* yang memuat⁶:

1. *Torsa ni Harajaon partubu* (tarombo), mengatur bahwa anak sulung atau marga yang sulung menjadi pengatur kerajaan, dan mengatur posisi dari dongan tubu, haha anggi, hula-hula dan boru.
2. *Torsa ni Harajaon Pusaka* (adat pusaka), mengatur tentang pembagian harta.

3. *Torsa ni Harajaon Patik dohot Uhum* (undang-undang), menetapkan hak-hak dari adat tarombo dan hak-hak dari adat pusaka harta dan barang dan adat pergaulan sehari-hari dan prgaulan marga.

Tuan Sorimangaraja keturunan Raja Isumbaon dianggap sebagai Raja pertama dari dinasti pertama ialah Dinasti Sorimangaraja. Ketika memerintah, Tuan Sorimangaraja menggunakan isi dalam Pustaha Tumbaga yang menyangkut pada *Torsa ni Harajaon*. Torsa ini memuat tata aturan bermasyarakat dan berpemerintahan serta mengatur seluruh selukbeluk kerajaan. Dalam Torsa diatur, misalnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini disebut “poda”. Ada tiga isi “poda” dalam masyarakat tradisional Batak Toba yaitu “*na unang, na tongka, na so jadi*” (yang jangan, yang pantang, yang tidak boleh). Ini menjadi dasar dari “patik dohot uhum” bagi kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional.

Kerajaan Batak Toba dalam Histori

Menurut Bonald, tidak pernah ada masyarakat tanpa pemerintahan⁷. Demikian juga halnya dengan Batak Toba sebagai satu kelompok masyarakat yang besar dan bertempat tinggal disatu wilayah yang luas pasti sudah memiliki memiliki pemerintahan yang mengatur hidup bersama mereka. Tidak mungkin sekelompok besar masyarakat dapat hidup tenteram jika tidak ada pemerintahan yang mengatur seluruh kehidupan bersama dari masyarakat tersebut. Bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba tradisional yang ada di Sumatera adalah kerajaan, bahasa setempat disebut *harajaon* (*harajaon* juga dapat berarti pemerintahana atau kekuasaan)

Jauh sebelum kolonialisme menguasai Indonesia, telah ada pemerintahan dalam masyarakat tradisional Indonesia yang disebut “kerajaan”. Dalam satu pemerintahan pasti ada birokrasi sehingga birokrasi dalam pemerintahan tradisional disebut “birokrasi tradisional”. Masa tersebut dinamakan masa feodalisme atau era raja-raja sehingga birokrasi tradisional masa itu, terutama zaman kerajaan Hindu Jawa sampai Mataram di Jawa, masuk dalam kategori “birokrasi feodal” atau “birokrasi patrimonial”. Tetapi ketika pemerintah kolonial menguasai Indonesia, lambat laun birokrasi tradisional mulai digantikan oleh birokrasi kolonial. Deskripsi umum tentang keberadaan sebuah birokrasi dalam masyarakat tradisional secara rinci dapat dilihat pada birokrasi kerajaan di Jawa sejak jaman Majapahit sampai pada kerajaan-kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta. Juga ditemukan pada kerajaan Padjadjaran dan Galuh di Jawa Barat, kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, Pagaruyung di Sumatera Barat.

Batak Toba tradisional telah memiliki pemerintahan untuk mengatur kehidupan bersama setempat dengan karakteristiknya sendiri sesuai dengan kebutuhannya sendiri dan berdasarkan pada budayanya sendiri. Tentu kerajaan

dalam masyarakat tradisional Batak Toba pra kolonialisme tidak memiliki suatu susunan pemerintahan yang sama seperti yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Jawa atau seperti kerajaan-kerajaan di negara-negara eropa pada abad pertengahan⁸. Pemerintahan kerajaan yang pernah ada dalam masyarakat tradisional Batak Toba, seperti Harajaon Bius dan Harajaon Dinasti Singa Mangaraja, sangat berbeda baik dalam hal bentuk dan pembentukannya, strukturnya, kekuasaannya, aturannya maupun ideologi yang mendasarinya. Pemerintahan dalam masyarakat Batak tradisional merupakan perpaduan antara organisasi formal dengan kerohanian agama dan kekerabatan adat istiadat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Batak Toba tradisional. Pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional merupakan pemerintahan berdasarkan religi dan adat. Religi dan adat menjadi landasan dan ideologi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau kerajaan tradisional Batak Toba.

Wujud yang paling nyata dari harajaon dalam masyarakat Batak Toba tradisional ialah *harajaon huta*, *harajaon horja* dan *harajaon bius*. Kemudian tumbuh satu harajaon yang memiliki cakupan tatakelola yang lebih luas yaitu Dinasti Singamangaraja. Beberapa harajaon huta, horja dan bius telah berdiri lama di daerah Batak Toba mulai dari Sianjur Mula-mula. Lebih luas dari itu juga telah pernah berdiri kerajaan sekitar 100 tahun SM. Sebut saja Kerajaan Batahan Pulo Morsa yang bertahan selama 24 keturunan⁹. Kerajaan Hatorusan dalam Dinasti Raja Uti bagi kelompok Guru Tatea Bulan atau Ilontungon diperkirakan sampai abad ke-16 mencapai 90 generasi. Pada saat yang sama juga terdapat Dinasti yang mengatur masyarakat Batak dari kelompok Raja Isumbaon yaitu Dinasti Sori Mangaraja yang berpusat di Balige Raja. Dinasti ini di bawah pimpinan Raja/Tuan Sorimangaraja menciptakan tatanan bangsa Batak yang maju dan mengatur seluruh bangsa Batak Toba dalam satu pemerintahan berbentuk Teokrasi. Terakhir Dinasti ini dipimpin oleh putra sulungnya Sibagot ni Pohan

Di laon laon ni ari dung mate sarimatua Tuan Sorimangaraja gabe Sibagot ni Pohan do muse junjungan ni harajaon, sitiop tampuk ni adat dohot tampuk ni uhum di tano Baligeraja singkat ni amana i. ... Sitiop tampuk ni adat, patik dohot uhum di harajaon i, ibana do mamantikhon Baringin Bius Godang di tano Baligeraja; “Bius Patane Bale Onan Balige, hasahatan ni solu, hasampean ni hole”. Digoari do di tonggo-tonggo tano Balige i songon on:
Tano Balige tano Baligeraja, tano marpidan-pidan, tano marpolin-polin.
Tano na sinolupan. tano binalean, tinombang ni Ompunta Tuan Sorimangaraja, Raja Ulu ni Ubi.
Raja tiang ni tano, raja na so olo matua, raja na so olo mate.
Asa tano Baligeraja do rapot pamuraion, jala portangisan ni na ro!”¹⁰

Dinasti Sorimangaraja kemudian berlanjut menjadi Dinasti Singa Mangaraja yang berpusat di Bakara di tepi tenggara Danau Toba. Raja Manghantal menjadi

raja pertama pada tahun 1540 Masehi dengan gelar Raja Sisingamangaraja I. Kerajaan Dinasti Singamangaraja berlanjut hingga 12 generasi dan yang terakhir adalah Raja Singa Mangaraja XII yang meninggal tahun 1907.

Dinasti Singa Mangaraja di bawah Raja Singamangaraja memiliki “birokrasi kerajaan atau pemerintahan” yang lebih nyata serta efektif dan kuat. Sidjabat menulis:

Sekalipun Si Singamangaraja I adalah orang yang berkuasa, namun pada zamannya belum tampak dengan jelas, bahwa ia berkuasa atas seluruh orang Batak. Itulah sebabnya mengapa hingga sekarang ini juga masih ada sebagian kecil orang Batak yang enggan menerima Si Singamangaraja selaku maharaja bagi seluruh orang Batak. Namun akhir-akhir ini, bahkan penduduk di daerah Deli dan Langkat pun sudah ada juga yang secara tertulis mengakui kekuasaan Si Singamangaraja, sebagaimana tercantum dalam naskah lama “Riwayat Hampan Perak” yang terjemahannya telah diterbitkan oleh Panitia Hari Jadi Kota Medan dan disajikan oleh Dada Meuraxa dalam buku Sejarah Hari Jadinya Kota Medan 1 Juli 1590. Dalam naskah ini dikemukakan, bahwa orang yang berkuasa di Hampan Perak Sepuluh Dua Kuta, adalah keturunan “Raja bernama Singa Mahraja yang memerintah di negeri Bekarah”.

Sekalipun ada yang tidak mengakui, namun tak dapat disangkal bahwa sudah sejak lama Raja Si Singamangaraja ini merupakan primus inter pares terkemuka di Sumatera Utara. ... Marsden dan “negarawan” serta peneliti seperti Raffles cukup menunjukkan betapa pentingnya kekuasaan dan fungsi Si Singamangaraja X yakni kakek Si Singamangaraja XII. Peranan yang penting ini juga disadari dengan mendalam oleh tokoh-tokoh peneliti seperti HN. van der Tuuk, B. Hagen, JF. von Brenner, bahkan Nommensen, Warneck, Meerwaldt dan RH. Geldern sendiri.

Merupakan kenyataan pula bahwa pada zaman Si Singamangaraja X, XI dan XII pola sistem kekuasaan raja di Tapanuli Utara sudah kian meningkat. Si Singamangaraja XII bukan lagi hanya merupakan raja-imam (priesterkoning) dan pengetua primus inter pares dalam masyarakat Batak. Ia sudah memainkan peranan selaku maharaja, tanpa meninggalkan imamatnya. Van der Tuuk sendiri bahkan telah menamakan Si Singamangaraja XI sebagai Koning Aller Bataks (raja dari segala orang Batak), ketika ia berjumpa secara pribadi tahun 1853 di Bakkara¹¹.

Lagi pula Dinasti ini telah diserang oleh Minangkabau dan oleh Mojopahit dan Sriwijaya. Itu karena Dinasti Singamangaraja ini dianggap sebagai kerajaan yang kuat dengan jumlah penduduk yang besar dengan wilayah kekuasaan yang luas sehingga harus segera diserang dan ditaklukkan. Tetapi Kerajaan Dinasti Singamangaraja mampu mempertahankan diri baik dari serangan Minangkabau dalam perang Padri, maupun serangan Mojopahit dan Sriwijaya. Birokrasi dari Dinasti Singa Mangaraja juga kuat karena Dinasti Singa Mangaraja XII, dapat bertahan selama 30 tahun melawan kolonialisme Belanda. Dinasti ini tidak mungkin dapat bertahan hingga kira-kira 392 tahun jika tidak didukung oleh

birokrasi yang kuat yang sesuai dengan budaya kerohanian dan budaya kekerabatan masyarakat *Toba* pada masa itu¹².

Raja Singa Mangaraja dianggap sebagai raja yang senantiasa melindungi dan menjaga persatuan dan keadilan, serta sebagai pendeta yang menjaga keserasian hubungan dengan para dewata.¹³ Raja Singa Mangaraja adalah pemimpin puncak dalam birokrasi Negeri *Toba* dan diakui oleh seluruh raja-raja di tanah Batak dan daerah-daerah kerajaan di sekitarnya¹⁴. Dinasti Singamangaraja dan Raja Singamangaraja diakui ada secara regional karena Sriijawa dan Kerajaan Minangkabau datang untuk menyerang dan ingin menguasai, diakui secara nasional sebagai Raja oleh Pemerintah Indonesia karena dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dengan keputusan Presiden RI No. 590 pada Tanggal 9 November 1961, dan juga pengakuan internasional, setidaknnya oleh Pemerintah Kolonialisme Belanda.

Konsep birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional memang lebih jelas dalam Dinasti Singa Mangaraja (I-XII). Dinasti ini sudah memiliki birokrasi yang telah terpola dalam satu struktur organisasional. Struktur merupakan satu dimensi utama dari birokrasi. Dalam struktur birokrasi Dinasti Singa Mangaraja telah tersusun peranan dan hubungan-hubungan peranan, alokasi kegiatan untuk memisahkan subunit-subunit, distribusi otoritas di antara posisi-posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal¹⁵.

Terbentuknya Kerajaan Tradisional Batak Toba

Terbentuknya *harajaon* atau pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional melalui proses tersendiri. Pada awalnya didirikan satu “pemerintahan” yang disebut Huta. Huta didirikan dan diatur oleh marga pendiri Huta tersebut. Satu Huta kemudian berkembang menjadi banyak Huta. Untuk itu dibutuhkan pengaturan baru agar tercipta harmoni. Untuk itu sejumlah *Huta* membentuk satu pemerintahan baru yang disebut Harajaon Horja. Dengan demikian, tiap Harajaon *Horja* membawahi sejumlah *Huta*. Harajaon *Horja* adalah satu bentuk pemerintahan konfederasi dari sejumlah Harajaon *Huta*. Adapun batas-batas wilayah pemerintahan *Horja* sama dengan batas wilayah Harajaon *Huta* yang menjadi bagian dari *Horja*.

Jumlah *Horja* juga semakin bertambah dan tiap *horja* memiliki kepentingan yang mungkin sama atau mungkin berbeda dengan Harajaon *Horja* lain sehingga dirasakan memerlukan pengaturan bersama. Untuk itu sejumlah Harajaon *Horja* membentuk satu pemerintahan yang lebih besar yang disebut Harajaon *Bius*. Ini berarti tiap Harajaon *Bius* terdiri dari sejumlah Harajaon *Horja* dan Harajaon *Bius* merupakan pemerintahan konfederasi dari sejumlah Harajaon *Horja*. Adapun batas wilayah dari setiap pemerintahan atau Harajaon *Bius* adalah sama dengan batas wilayah dari setiap Harajaon *Huta* yang berada di golat *Bius*.

Seperti halnya dengan pemerintahan Huta dan Horja, maka pemerintahan Bius juga bertambah dengan berbagai kepentingan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan dan keamanan dari Harajaon Bius maka ada Harajaon Bius yang merasa perlu bergabung dengan Harajaon Bius lain. Untuk itu sejumlah “pemerintahan” Bius kemudian menyatakan bergabung dengan satu Harajaon Bius Bakkara yaitu Kerajaan Dinasti Singa Mangaraja. Itu sebabnya di Bakkara ada dua kerajaan yaitu Harajaon Bius Bakkara atau Bius Sionom Ompu dan Kerajaan Dinasti Singa Mangaraja. Walaupun Harajaon *Huta* telah berkonfederasi menjadi Horja, Harajaon Horja menjadi Bius dan Harajaon Bius masuk dalam Dinasti Singamangaraja, tiap Harajaon Huta tetap menjadi daerah yang memiliki otonomi.

Pemerintahan konfederasi dalam bentuk harajaon (Huta, Horja, Bius dan Dinasti) sekaligus melukiskan skema pembentukan struktur harajaon dalam masyarakat Batak Toba tradisional yang dinyatakan dalam ungkapan Batak Toba berikut: *Marga do mula ni harajaon Huta* (marga membentuk/berasal dari pemerintahan/kerajaan Huta),

Huta do mula ni harajaon Horja (pemerintahan/kerajaan Horja bermula/berasal dari Huta), *Horja do mula ni harajaon Bius* (pemerintahan/kerajaan Bius bermula/terbentuk dari Horja), *Bius do mula ni harajaon Toba* (pemerintahan/kerajaan Batak Toba Bius bermula/terbentuk dari Bius).

Dengan demikian dari perspektif sejarah geopolitik dan pemerintahan telah ada “Kerajaan *Toba-Tua*” di pedalaman Sumatera Utara¹⁶. Kerajaan terkecil adalah Harajaon Huta. Huta terus berkembang dan bertambah secara kuantitas maupun kualitas baik jumlah penduduk, luas wilayah dan kegiatan. Karena itu ada hal-hal yang harus dilakukan bersama oleh beberapa huta yang berdekatan, sehingga mereka kemudian membentuk satu Harajaon yang lebih besar yang disebut Harajaon Horja. Harajaon Horja juga semakin bertambah seiring bertambahnya harajaon huta sehingga kebutuhan dan kepentingan setiap Harajaon Horja semakin luas. Untuk itu beberapa Horja membentuk satu harajaon yang lebih besar lagi yang disebut Harajaon Bius. Situmorang menyebut Bius sebagai negara mini¹⁷. Akhirnya, Bius menjadi semakin besar dan banyak, sehingga sejumlah bius menyatakan dirinya menjadi “konfederasi” dalam Harajaon atau pemerintahan Dinasti Singa Mangaraja. Datuk Endang mengemukakan tentang dasar-dasar kerajaan di tanah Batak sebagai berikut:

Pada umumnya, kerajaan di tanah Batak bersifat otonom yang terbagi dalam 3 jenis badan-badan pemerintahan: huta (kampung), horja, dan bius. Huta, dipimpin oleh Raja Huta. Dia berasal dari keturunan pembuka (stichter) perkampungan. Horja, dipimpin oleh Raja Doli. Horja terjadi karena penggabungan dari beberapa huta. Wakil-wakil yang duduk di dalam horja dipilih oleh raja-raja huta. Bius, dikepalai oleh Raja Oloan. Bius terjadi dari

penggabungan beberapa horja. wakil-wakil yang duduk di dalam bius adalah raja-raja horja¹⁸.

Oleh karena itu status “Kerajaan Batak Toba-Tua” sebagai kerajaan dari masyarakat Toba tradisional yang merdeka dengan sejarahnya sendiri dan karakteristiknya sendiri tidak dapat diragukan lagi. Sebuah “Kerajaan Toba-Tua” yang memiliki sistem pemerintahan khas, memiliki wilayah pasti dengan perbatasan yang pasti, mempunyai penduduk yang mendiaminya sebagai negeri leluhurnya, memiliki hukum dan peraturan dalam adat-istiadat dan hak ulayat, dan memiliki bahasa dan kebudayaan yang sama dan menjalani proses pelembagaan (institusionalisasi) sebagai gagasan sosial-ekonomi dan politik yang diwarisi dan dianut bersama. Masyarakat Batak-Toba tradisional telah memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk “kerajaan” tidak dapat disangkal. Itu terutama tampak jelas dalam Kerajaan Singa Mangaraja I-XII. Hanya setelah Sumatera masuk ke dalam pengaruh kolonialisme Belanda, dan daerah Toba ada di dalamnya, maka status Toba sebagai negeri dan kerajaan berakhir¹⁹.

Keliru jika dikatakan bahwa masyarakat Batak Toba tidak pernah memiliki negara dan pemerintahan²⁰. Kesatuan hidup masyarakat Batak Toba tradisional telah memenuhi unsur-unsur untuk disebut sebagai suatu negara²¹ dan pemerintah. Unsur yang dimaksud ialah ada wilayah yang pasti, penduduk yang pasti yang hidup teratur, pemerintah yang pasti dan berdaulat sehingga merupakan sebuah nation (bangsa). Wilayah dan pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional terdiri dari wilayah dan pemerintahan Huta, wilayah dan pemerintahan Horja, dan wilayah dan pemerintahan Bius dan Pemerintahan Dinasti Singa Mangaraja.

Baik harajaon bius maupun Dinasti Singa Mangaraja, keduanya telah menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah seperti membuat peraturan (*regeling*), mengadili (*rechtspraak*), melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan keamanan pertahanan (*politie*), serta mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Bahkan Heine-Geldern mengumpulkan berbagai bukti bahwa Dinasti Singamangaraja memungut pajak, bertindak sebagai panglima perang, dan hakim dalam memutuskan perkara dalam masyarakat Batak²². Memang harus diakui,

bilamana penelitian tentang kekuasaan dan wibawa Si Singamangaraja kita dasarkan hanya pada data-data yang terdapat di Tapanuli Utara, tanpa juga memperhitungkan keadaan di habinsaran, Pardembanan, Simalungun, dairi, Pakpak dan Tanah Karo, ya bahkan di Deli Serdang (semua ini adalah daerah-daerah di Sumatera Utara, penulis) maka orang akan mengatakan bahwa kekuasaan dan wibawa Si Singamangaraja ...selaku raja duniawi ... tidak melebihi kekuasaan raja-raja yang lain, dalam arti terbatas pada daerahnya saja, yaitu Bakara. Tetapi dari data-data... ditambah lagi dengan hasil

wawancara dengan berbagai orang-orang tua di Simalungun, Tapanuli Selatan, Pahae, Samosir, Barus, dairi Karo, Aceh Tenggara Habinsaran, Penang dan Pardembanan, ternyata bahwa Si Singamangaraja bukan saja dihormati selaku raja di Bakara, melainkan selaku raja ni halak Batak (raja dari orang Batak)²³.

Jadi, Raja Singa Mangaraja diakui kewenangannya atas semua “Negeri Batak”, bukan hanya oleh Toba, tetapi juga oleh kerajaan sekitarnya. Raja Singamangaraja bukan saja dihormati selaku raja di Bakara, melainkan sebagai *raja ni halak Batak* (raja dari orang Batak).²⁴ Ia adalah *Koning aller Bataks* (raja dari segala orang Batak).²⁵ Raja Singa Mangaraja diakui sebagai maharaja Batak Toba dan tinggal di Bakara sebagai pusat *Harajaon Toba* yang terletak di tepi teluk Bakara Danau Toba. Di Bakara terdapat *ruma*, rumah dan *bale*, balai kerajaan, masing-masing di Lumban Raja (tempat di mana istana raja dibangun) dan *Onan Bale* dan dilengkapi dengan benteng-benteng alam. Rumah-rumah kerajaan terdiri atas *Rumah Bolon*, *Ruma Santi/Ruma Parsantian*, *Sopo Bolon*, *Sopo Godang*. Balai kerajaan meliputi *Bale Pasogit*, *Bale Partonggoan*, *Patene*, *Bale Adat Paruhuman*, dan *Bale Bius* yang dilengkapi dengan *pardebataan* (tempat menyembah kepada *Debata*) dan *partungkoan* (tempat bermusyawarah) yang merupakan sebuah pelataran. Singkatnya, pusat wilayah kerajaan Batak Toba adalah Bakara dan tempat di mana istana raja didirikan sebagai tempat tinggal raja disebut *Huta Raja*. *Huta* dari kata kuta (sanskerta) berarti kota, tembok istana, benteng, puri. Dalam hal ini *Huta Raja* atau Kota Raja berarti tempat tinggal raja dan istananya dan sebagai pusat pemerintahan.

Lahirnya Dinasti Singa Mangaraja

Dibandingkan dengan kerajaan lain yang pernah ada dalam masyarakat Batak Toba tradisional, maka Dinasti Singamangaraja adalah lebih jelas. Setelah Tuan Sorimangaraja (putera Raja Isombaon) yang dianggap sebagai maharaja Kerajaan Batak Toba-tua meninggal dunia (1395-1425), terjadilah kekosongan pemimpin yang dapat mempersatukan masyarakat Batak Toba sebagai masyarakat Dalihan Na Tolu (DNT).²⁶ Padahal akhir kekuasaan Tuan Sorimangaraja, justeru situasi sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan agama mengalami pergolakan di kawasan Sumatera Utara terutama akibat ekspansi dari berbagai kerajaan (Aceh, Mojopahit, Sriwijawa, Pagaruyung) dan negara (Portugis) termasuk penyebaran agama Hindu, Islam, Protestan dan Katolik. ke wilayah kekuasaan Batak Toba.

Akibat kekosongan pemimpin atau raja yang berperan sebagai mediator atau wakil dari masyarakat DNT terjadilah perselisihan antara marga dengan marga atau antara bius dengan bius. Perselisihan bisa akibat perang, atau perbudakan terutama pada zaman Pidari atau karena *manombang* (merantau).

Perselisihan sangat banyak terjadi karena mempertahankan kelanjutan “kedudukan” dan “derajat” masing-masing terutama pergolakan perebutan hak “*sihahaan*” atau *siabangan*” (anak sulung)²⁷ pada beberapa kelompok keluarga yang *sama* (satu bapak) atau *saompu* (satu kakek bersama)²⁸, hak sebagai marga sipungka huta dan marga raja, yang sangat peka dan sulit diselesaikan. Perebutan ini terjadi dalam rangka perebutan kedudukan sebagai “raja penguasa”. Sebab menurut adat, yang berhak memiliki kedudukan atau posisi sebagai “raja” adalah dari keturunan marga raja atau marga sipungka huta dari marga yang lebih tua. Karena itu tendensi kehancuran tatanan masyarakat DNT dan kerajaan Batak Toba-tua saat itu terjadi akibat faktor internal (perselisihan marga) dan eksternal (ekspansi kerajaan dari luar dan penyebaran agama).

Raja-raja Bius yang ada di tanah Batak Toba yang melihat gejala tersebut merasa ikut bertanggungjawab dan untuk itu mereka melakukan aktivitas untuk memobilisasi kegiatan untuk mencari pemimpin pemersatu yang mampu mempertahankan keutuhan wilayah, keutuhan tatanan masyarakat DNT, dan terutama untuk mempertahankan kebudayaan kerohanian Batak Toba yang ber*Debata Na Tolu*. Untuk itu mereka sepakat melakukan horja bius pada akhir abad 15 atau awal abad 16²⁹. Dalam horja tersebut diucapkan “*Tonggo-tonggo Bius Sianjur Mulana*.”³⁰ Tonggo-tonggo Bius biasanya dimaksudkan untuk memohon kehadiran *Mulajadi Nabolon, Debata*, agar supaya dianugerahkan seorang tokoh pemimpin besar (Maharaja Diraja) yang berjiwa seni, pengukir dan pelukis yang dapat mencipta (toba: *paninga*), seperti yang dimiliki oleh Tuan Sori Mangaraja ketika memimpin masyarakat dan kerajaan Batak Toba-tua. Setelah upacara horja bius tersebut, tidak lama kemudian lahir³¹ seorang raja bagi masyarakat dan kerajaan Batak Toba bernama Raja Manghunta anak dari Raja Bona ni Onan Sinambela dari istrinya boru Pasaribu di Bakkara Toba. Kelahirannya dianggap sebagai kehendak dari Mulajadi Na Bolon³². Dalam umpasa Batak Toba dikatakan:

Marbunga ma jarugi, sajongkal dua jari.

Muba ma ugari sian bongka siapari.

Tubu ma sada Raja tinongos ni Mulajadi.

Raja Nahasaktian na uja manotari

Demikianlah Raja Manghunta anak dari Raja Bona ni Onan naik tahta atau ditabalkan menjadi raja dan diberi gelar Raja Singa Mangaraja. Dia adalah Raja Singa Mangaraja I. Sebagai raja, ia memiliki benda pusaka yang disebut “*Pusaka Na Hasaktian*”. Dikatakan dalam mitologi (turi-turian) bahwa *Pusaka Hasaktian* ini merupakan pusaka kesaktian dari Si Raja Batak yang diberikan oleh Mulajadi Na Bolon dan secara turun-temurun Pusaka Hasaktian itu sampai kepada Raja Singa Mangaraja I hingga Raja Singa Mangaraja XII³³. Adapun Pusaka Hasaktian tersebut ialah³⁴:

1. Gaja Dolok (Gaja Puti). Didok namanghunduli gaja dolok, sae do di jolo sae di pudi, ala di dolok do ibana hundul, di na sae di na tiur, ingkon songon i do pamolus ni anak ni Raja, na marsahala harajaon di Patik dohot Uhum. Puti so haliapan, puti sohapurpuran, asa tiur songon ari, rondang songon bulan,, dao abad dohot bingkolang di pamolus ni raja i, ndang songon pamolus ni gaja binatang , tiur tu jolo hape potpot di pudi.
2. Piso Gadja Dompok³⁵ atau Piso Solam Debata. Didok diumpat marsillam-sillam dipasarung marungut-ungut. Tanda ni piso ni Raja na marsahala hasaktian, marsillam molo diumpat boaboa ni parsaulian, dapot na jinalahan, tarida na niluluan, sinur na pinahan, gabe na niula. Molo dipasarung marungutungut (marunung-unung), boa-boa ni na laho manegai ma, adong ma di halak na sega; asa dua bagian sakti ni Piso Solam Debata i molo marsillam-sillam dompok parsaulian, molo marsungut-sungut manegai - hamagoan.
3. Hujur Sane Siringis. Didok hujur sitonggo mual dohot udan. Boi ditonggo hujur I mual manang udan, boi ditonggang nang udan asa unang ro sangga adong horja manang gondang.
4. Piso Halasan. Didok piso sitonggo halasan tu na uli sitonggo halasan tu hagabeon. Pangupaon dipangke do Piuso Halasan I, mangido tubu ni anak dohot boru, asa muli na so muli, mangoli na so mangoli, las ni roha to gagabeon.
5. Piso Pangabas. Didok piso mangabas begu jau, mangabas begu toba, sipurngut ni ladang pangulu balang na pitu, uti-utian ni sibursok, ujar-ujaran ni sitatap. Piso panjaga do I di Raja Nahasaktian.

Benda pusaka lain sebagaimana dikemukakan dalam tonggo-tonggo Singa Mangaraja, ialah:

1. Lage-lage haomasan lage sipitu lampis.
2. Tabu-tabu sitarapullang.
3. Tumtuman baen sutora.
4. Hoda hundangan sihapas.

Benda-benda pusaka tersebut digunakan untuk menentukan apakah seseorang layak menjadi penerus tahta kerajaan Singa Mangaraja. Dalam setiap pergantian raja, bila raja telah tiba waktunya untuk meletakkan jabatan atau wafat, maka putra mahkota diuji untuk mencabut Piso Gadja Dompok, mendatangkan hujan dengan menggunakan Hujur Sane Siringis hujur sitonggo mual, atau memohon kemakmuran melalui Piso Halasan. Yang mampu melakukan hal-hal tersebutlah yang berhak menggantikan raja. Semua benda-benda pemberian ini kemudian dimiliki masing-masing sebagai berikut: Tabu-tabu Si Tara Pullang untuk Bakara, Hujur Si Ringis untuk Sinambela, Pungga Haomasan untuk Marbun, Lage Omas untuk Simanullang, Bulang untuk Simamora. Sementara Piso

Gaja Dompok dan Hoda hundangan sihapus menjadi milik dan pertanda bagi Raja Singa Mangaraja turun temurun³⁶.

Demikianlah terjadi reinkarnasi untuk seorang raja dalam kerajaan Batak Toba-tua dari Sorimangaraja ke Raja Singa Mangaraja I. Demikian berlanjut

Tabel 3.5 Silsilah Raja Singamangaraja

Gelar Kerajaan	Nama Asli	Tahun
1. Raja Sisingamangaraja I	Raja Mahkota atau Raja Manghantal	1540-1550
2. Raja Sisingamangaraja II	Raja Manjolong gelar Ompu Raja Tinaruan	1550-595
3. Raja Sisingamangaraja III	Raja Itubungna	1595-1627
4. Raja Sisingamangaraja IV	Tuan Sorimangaraja	1627-1667
5. Raja Sisingamangaraja V	Raja Pallongos	1667-1730
6. Raja Sisingamangaraja VI	Raja Pangolbuk	1730-1751
7. Raja Sisingamangaraja VII	Ompu Tuan Lumbut	1751-1771
8. Raja Sisingamangaraja VIII,	Ompu Sotaronggal, gelar Raja Bukit	1771-1788
9. Raja Sisingamangaraja IX	Ompu Sohalompoan, Gelar Datu Muara Labu	1788-1819
10. Raja Sisingamangaraja X	Aman Julangga, Gelar Ompu Tuan Na Bolon	1819-1841
11. Raja Sisingamangaraja XI	Ompu Sohahuaon	1841-1871
12. Raja Sisingamangaraja XII	Patuan Bosar, gelar Ompu Pulo Batu,	1871-1907

hingga Raja Singa Mangaraja XII (Tabel 3.5). Kelahiran dari Raja Manghantal atau Tuan Singa Mangaraja I dianggap sebagai awal dari Dinasti Singa Mangaraja (1515 M). Dinasti ini berakhir pada saat Patuan Bosar Ompu Pulo Batu (Tuan Singa Mangaraja XII) wafat pada tahun 1907. Ini berarti bahwa Dinasti Singa Mangaraja sebagai Maharajadiraja Batak Toba telah berlangsung selama 392 tahun. Raja Singa Mangaraja sebagai raja dalam kerajaan Batak Toba dilegitimasi oleh para raja-raja bius³⁷, diakui serta dijunjung tinggi sebagai raja oleh raja-raja dan masyarakat Batak Toba karena ia memiliki “*sahala harajaon*”.

Sahala harajaon, seperti disandang oleh Si Singa Mangaraja bukanlah hasil upaya manusia. Ia lebih sebagai karunia dari atas, yang bagi orang yang beruntung terkadang *dimemehon* (disuapkan). “Mulajadi Nabolon telah menganugerahkan karunia keadilan dan kerajaan kepada Si Singa Mangaraja, yakni “Singa (hakikat) hukum, hakikat kerajaan, hakikat sabda. Padanyalah satuan ukuran, hakikat kerajaan, ketentuan satuan segalaukuran, bajak pembelah tali (keadilan sempurna), hakikat satuan ukuran isi dan inti serta satuan timbangan. Yang berlebihan disisihkan, dan yang kurang digenapi³⁸.”

Kriteria-kriteria lain yang dapat dikemukakan sebagai argumentasi bahwa telah ada Negara dengan sistem kerajaan untuk masyarakat Batak Toba tradisional seperti Dinasti Singamangaraja adalah:

1. Memiliki pemerintahan. Pemerintahan dalam dinasti Singamangaraja berbentuk kerajaan. Pimpinan tertinggi adalah seorang raja yang diangkat sedcara turun temurun.
2. Memiliki rakyat. Suatu negara atau kerajaan memiliki rakyat. Pusat Negara Toba di bawah Dinasti Singamangaraja memiliki rakyat yang selalu patuh terhadap *tona* atau perintahnya ialah masyarakat Batak Toba.
3. Pusat kerajaan. Seorang raja tinggal di pusat kota dalam suatu istana dengan bentengnya. Singamangaraja tinggal di satu daerah yang disebut *huta raja* (kuta raja) dan di satu bangunan rumah tempat tinggal raja yang disebut istana raja.
4. Struktur birokrasi. Organisasi birokrasi kerajaan Singamangaraja distruktur berdasarkan struktur teritorial dan struktur fungsional.
5. Perangkat birokrasi. Kerajaan Batak Toba di bawah Dinasti Singamangaraja memiliki perangkat birokrasi yang melaksanakan tugas-tugas pengaturan untuk memberi keamanan regional, keteraturan lokal, ketertiban sosial, kesejahteraan dan pelayanan publik.
6. Pengakuan. Raja dan kerajaan selalu mendapat pengakuan. Demikian juga Raja Singamangaraja diakui sebagai raja atau maharaja oleh umumnya masyarakat dan raja-raja Batak Toba dan juga oleh raja-raja di sekitar wilayah Batak Toba. Ia juga diakui sebagai raja oleh orang asing seperti kolonialisme Belanda. Raja Singamangaraja XII, misalnya, bukan lagi hanya raja-imam (*priesterkoning*) dan pengetua primus inter pares dalam masyarakat Batak. Ia juga sudah memainkan peranan selaku maharaja, tanpa meninggalkan imamatnya.
7. Hak pengaturan atas suatu wilayah yang pasti. Satu kerajaan memiliki satu wilayah yang pasti. Kerajaan Batak Toba memiliki wilayah atau teritori yang pasti dan tidak dapat dimasukkan sebagai wilayah kerajaan yang ada di sekitarnya.³⁹ Di lihat dari peta sekarang ini, wilayah *harajaon* Batak Toba atau Dinasti Singamangaraja terletak di sebelah barat Sumatera Utara sekarang. Wilayahnya kurang lebih sama dengan wilayah dari empat Kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Tapanuli Utara, Humbang-Habinsaran, Toba dan

Samosir. Pada masa itu Kerajaan Batak Toba-tua berbatasan dengan Kerajaan Raya di sebelah Timur, Kerajaan Aceh di sebelah Utara, Kerajaan Pasai di sebelah Selatan, dan Kerajaan Barus di sebelah Barat.

8. Kekuasaan. Dinasti Singamangaraja memungut pajak, bertindak sebagai panglima perang, dan hakim dalam memutuskan perkara⁴⁰.
9. Lambang. Tiap raja atau kerajaan memiliki lambang yang dapat dijadikan sebagai simbol kepatuhan masyarakat. Kerajaan Batak Toba di bawah Dinasti Raja Singamangaraja memiliki sejumlah lambang kebesaran ialah *piso gadja dompak* (pisau gajah menghadap), *tungkot tunggal panaluan* (tongkat tunggal panaluan), memiliki bendera dan lagu “kebangsaan”.

Kerajaan Singamangaraja: Pemersatu Batak Toba?

Di atas kerajaan-kerajaan kecil (Harajaon Huta), sedang (Harajaon Horja) dan besar (Harajaon Bius) ada Kerajaan Singa Mangaraja. Kerajaan ini menjadi pengikat atau pemersatu dari seluruh harajaon dalam masyarakat Batak Toba tradisional tersebut, terutama pengikat *harajaon bius* yang berkonfederasi. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja dengan gelar Raja Singa Mangaraja. Dia dianggap sebagai pimpinan rohani dan pimpinan duniawi. Singa Mangaraja menjadi lambang persatuan dari harajaon Batak Toba tradisional.

Setelah Raja Manghantal anak dari Raja Bona ni Onan naik tahta atau ditabalkan menjadi raja dan diberi gelar Raja Singa Mangaraja (Raja Singa Mangaraja I) dari Dinasti Singamangaraja, ia menata kehidupan masyarakat Bakkara dan Harajaon Bius lain yang berkonfederasi dengannya. Mula-mula ia menata kehidupan berpemerintahan di Bakkara. Berbagai kepentingan dan pertikaian antar kelompok masyarakat diakomodasi dengan berkoalisi dengan panitua di Bakkara. Raja-raja dari si Onom Ompu yang meliputi Bakkara, Sihite, Simanullang, Sinambela, Simamora dan Marbun diangkat menjadi perwakilan dan sebagai anggota kabinet di harajaon Bakkara. Kepada masing-masing perwakilan diberi wewenang dan bahkan kepada setiap marga diberi simbol kerajaan berupa barang pusaka kerajaan. Pembagian kerja di dalam kerajaan dilakukan dengan baik dalam beberapa fungsi, seperti lembaga Pande Na Bolon yang bertugas sebagai penasihat dan juga sebagai fasilitator di bidang adat dan sosial, Ulu Taon yang bertugas mengatur pertanian dan ekonomi, Ulu Balang yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan dan lembaga Parbaringin yang bertugas mengatur upacara keagamaan. Untuk mengikat semua bius yang menjadi bagian dari kerajaan dalam satu kesatuan yang utuh, Raja Singamangaraja I hingga IX melakukan berbagai pendekatan secara spiritual.

Agar wilayah Batak Toba dan sekitarnya menjadi satu, maka Raja Mangkuntal merangkul Humbang. Humbang adalah daerah di bagian barat

kerajaan. Daerah ini mudah dirangkul karena berpenduduk keturunan Raja Isumbaon, sama seperti Raja Manghantal. Mereka adalah marga Sihombing dan Simamora dan Marbun. Di Humbang diangkat perwakilan terutama untuk lembaga Parbaringin. Dari Humbang dia ke Silindung dan ke Holbung dan juga untuk daerah-daerah yang lain di luar daerah Batak Toba yang berbatasan langsung dengan kerajaan. Insting kepemimpinan yang dia miliki membuatnya memahami betul langkah-langkah politik yang sesuai dengan karakter sebuah huta. Sikap ini dengan cepat dapat menyatukan masyarakat Batak yang berbeda-beda marga dan kepentingan huta. Egoisme, primordialisme huta dan fanatisme marga serta kebiasaan bertengkar orang-orang Batak ditundukkan dengan harmoni dan kebersamaan⁴¹.

Manghantal memerintah tidak dalam waktu lama. Sebelum putra mahkotanya, Manjolong, berumur dewasa, masih 12 tahun, Manghantal dikabarkan menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Tetapi, walaupun Raja Manghantal atau Raja Mahkota bergelar Sisingamangaraja I hanya memerintah Tanah Batak selama 10 tahun, tetapi selama periode tersebut sudah tercipta persatuan dan kesatuan untuk sebagian besar pemerintahan bius dan wilayah Batak Toba.

Raja Singa Mangaraja I-XII bukan tokoh mitologis, melainkan tokoh historis yang pernah benar-benar hidup dan berjuang demi kepentingan rakyat, baik dalam bidang kemasyarakatan (sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan) dan bidang kerohanian, seperti dilakukan misalnya oleh Singa Mangaraja XI ketika mengadakan perlawanan sengit dengan Bonjol dalam perang Padri (orientasi untuk kepentingan lokal) dan kerajaan lainnya untuk kepentingan Batak Toba, Singa Mangaraja XII ketika mengadakan perlawanan sengit dengan Kolonialisme Belanda (orientasi untuk kepentingan nasional).⁴² Pihak Belanda dan Jerman menamakan Raja Singa Mangaraja sebagai *Priester-Koning*, yang berarti "Raja-Imam" atau "Pemimpin Mesiani". Dia dianggap mempunyai wibawa istimewa di bidang *seculer* (kemasyarakatan) dan *sacred* (agama), atau di bidang duniawi dan bidang rohani.⁴³ Oleh kemasyiasannya, maka Si Singa Mangaraja bagi masyarakat Batak Toba dianggap sebagai *raja dame*.

Sebagai raja, Raja Singamangaraja mengunjungi bius atau huta yang sedang bertikai untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Sebelum Raja Singamangaraja tiba di daerah yang bertikai dan mereka mengetahui bahwa Raja Singamangaraja akan mengunjungi atau lewat dari bius atau huta mereka maka mereka akan segera berdamai atau menyelesaikan pertikaian di antara mereka. Masyarakat percaya bahwa mereka tidak akan mendapat pancaran sahala dari Raja Si Singa Mangaraja jika mereka dalam keadaan bertikai. Hanya huta atau bius atau horja yang damai yang akan mendapat limpahan sahala dari Si Singa

Mangaraja. Itu disebabkan Raja Singa Mangaraja dianggap oleh masyarakat sebagai “utusan debata”

Lembaga Singa Mangaraja telah pernah berpengaruh luas di luar Bakkara terutama wilayah Sumba yang terdiri atas Samosir Utara, lembah-lembah di pantai barat Danau Toba, Toba Holbung, Habinsaran, Humbang, dan Silindung. Bahkan berkat kharismanya dan terangkat oleh gelombang perasaan anti Belanda, Raja Singa Mangaraja XII bukan saja diakui di kampungnya sendiri di Bakkara dan di tanah atau daerah Sumba (keturunan Raja Isumbaon), melainkan juga di tanah atau daerah Lontung (keturunan Guru tatea Bulan), dan bahkan di daerah luar Toba seperti Dairi, Simalungun dan Karo. Sebagai tokoh pertama dalam sejarah Batak yang memiliki pengaruh yang begitu luas, Ompu Pulo Batu menjadi raja pertama di tanah Batak yang memiliki Cap untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa status-nya setara dengan raja-raja lain di Sumatera. Beliau juga menjadi Raja Batak pertama yang memilih kertas sebagai media tulis⁴⁴.

Tidak ada orang atau orang-orang yang memangku kekuasaan sentral dan menjadi pemersatu masyarakat dan tanah Batak Toba sebelum ada konfederasi pemerintahan Dinasti Singa Mangaraja. Tidak ada unit organisasi yang menyelesaikan masalah-masalah lintas wilayah Bius di tanah Batak Toba, baik menangani perselisihan berkenaan dengan urusan irigasi maupun pelanggaran yang cakupannya melebihi suatu wilayah Bius. Tetapi dalam Kerajaan Dinasti Singa Mangaraja, pemerintahan ini telah mampu melakukan semuanya itu dan mengurus berbagai hal dan kebutuhan serta menyelesaikan berbagai perselisihan lintas Bius yang berkonfederasi dengan Dinasti Singa Mangaraja. Sidjabat menulis:

Sejak semula Singamangaraja I hingga Singamangaraja XII, berusaha mewujudkan kesatuan dan persatuan, yang sudah merupakan pokok perhatian dalam melaksanakan fungsinya. Perkataan Maharaja sendiri juga sudah mencakup pemikiran untuk mengadakan ikatan di kalangan pelbagai raja huta di Sumatera utara. Memang ada pandangan beberapa orang yang mengatakan bahwa sistem kemaharajaan itu sudah pernah diberlakukan sebelum zaman Singamangaraja I; pendapat ini dapat juga diterima. Hal ini ditemukan juga dalam diri Sorimangaraja⁴⁵.

Sebagai contoh, Harajaon Raja Singa Mangaraja VII di bawah pemerintahan Raja Ompu Sotaronggal, pemerintahan Dinasti Raja Singa Mangaraja sudah kuat. Tidak ada siapapun yang mampu menggulingkannya. Pada saat itu sudah teratur bahwa tiap kelompok masyarakat sudah memiliki harajaon Bius dan wilayahnya yang disebut Parbuisan di bawah pengaturan dari Raja Singa Mangaraja. Tetapi di sana sini masih terjadi permusuhan, perang antar daerah dengan daerah, Huta dengan Huta. Meskipun demikian masih ada daerah yang melaksanakan secara jujur patik dan uhum dan dari sini datang pesan dari Raja

Nahasaktian untuk menyelesaikan permusuhan, karena ia harus mendatangi setiap marga dan daerah Bangsa Batak. Di sini Raja Nahasaktian menunjukkan keimamannya dan kebiasaannya, bahwa patik dan uhum kesaktian dari kerajaan Singa Mangaraja berasal dari Dewata⁴⁶. Demikian juga Dinasti Singa Mangaraja XI di bawah pemerintahan Ompu Sohahuaon, tanah Batak dalam keadaan aman dan tenang. Mereka melaksanakan peraturan dan hukum yang disampaikan oleh Raja Singa Mangaraja XI yang berasal dari Dewata. Saat itu banyak Raja-raja, baik Bius, Horja dan Hita serta Raja dari Marga-marga datang menemui raja ke Bakkara. Mereka bertranya tentang kabar baik apa yang akan datang, pesan dan sembah yang harus disampaikan kepada Dewata. Ketika datang, mereka juga membawa berbagai macam persembahan, seperti tuak, beras, ulos dan padi⁴⁷.

Jadi, Kerajaan Singa Mangaraja yang mendiami daerah Bakkara yang terletak di ujung baratdaya Danau Toba telah berhasil menciptakan semacam stabilitas dalam masyarakat Batak. Tindakan yang mengarah kepada perwujudan yang lebih nyata dari kesatuan ini dibarengi dengan mengadakan usaha-usaha pembaharuan sosial dalam masyarakat tradisional Batak. Dalam melaksanakan usaha-usahanya ini alam sekitar Samosir dan Danau Toba memang sangat dominan mempengaruhi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan pemecahan-pemecahan yang dianjurkan. Jadi usaha-usaha yang menjurus kepada kesatuan, yang dirancang dalam bentuk pemerintahan yang secara fungsional terpusat sudah dilakukan terutama dalam Dinasti Singamangaraja XII di bawah pemerintahan Ompu Pulo Batu. Akan tetapi secara historis usaha ini mengalami rintangan yang besar dari dalam oleh kelompok Ilontungon atau harajaon bius dari Keturunan Guru Tatea Bulan, terutama dari luar oleh serangan Perang Padri dari Selatan dan tindakan Pemewrintah Kolonialisme Belanda yang secara berencana ingin menghancurkan pemerintahan Singamangaraja⁴⁸.

Singa Mangaraja dianggap sebagai raja-dewa (*god-kings*). Ia juga dianggap sebagai pendeta tertinggi dalam *moitie* kelompok Sumba yang mencakup marga dinasti Singa Mangaraja. Singa Mangaraja adalah penyandang sahala tertinggi. Para ibu mengarahkan wajah anak-anak mereka menghadap dia untuk menerima kebajikan yang mengalir dari dia⁴⁹. Lagipula banyak keajaiban yang dianggap diperbuat oleh Raja Singa Mangaraja. Dia memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan dan menimbulkan mata air di daerah-daerah yang dilanda kekeringan, seperti di Samosir dan sekitarnya. Di Tomok ia menimbulkan mata air di Siulakhosa. Di Lumban Bakkara Ambarita, ia membuat mata air⁵⁰. Jika ia sudah memberikan titah melalui pembawa titah dan titah tersebut tidak dituruti, maka bagi yang tidak menuruti atau yang menolak akan datang bencana yang mereka tidak sangka-sangka. Raja Patik Tampubolon mengatakan:

Di na so panagamanna: ia so masurbu ma hutana, ba so masa ma bodil tu pinahanna, manang ro lalo mangarompasi dohot mangarongronghon huta

dohot golatna, manang ro udan ambolas dohot alogo na marpiu-piu manegai suansuananna, ia so i baroon emena, lambangon, siraraon, bagudungon, antingangoon, amporikon; manang ia so gadongna ma gabe simarlangkop-langkop, manang masa sahit sampar, ro begu rojan begu antuk dohot nenge na birong dla, laho mangaribas dohot maninggala na manjua dohot na mangalaosi angka na geduk i⁵¹.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa aneka ragam bencana yang mungkin datang kepada suatu daerah yang tidak mematuhi pesan Raja Singa Mangaraja, seperti kebakaran, ternak mati, gempa, hujan es merusak tanaman, padi jelek, penyakit atau ada jin mengganggu.

Bakara sebagai Pusat Kerajaan Dinasti Singamangaraja

Dalam sistem teritorial pemerintahan Negara Batak Toba dan sistem bius pada khususnya, Bakara memiliki posisi khusus. Kekhususan Bakara ialah sebagai Bius Mandiri dan sebagai tempat Kraton Dinasti Singa Mangaraja. Sitor Situmorang mengatakan bahwa Bakkara sebagai Bius mandiri memiliki dua peranan kelembagaan politik “nasional” Toba. Pertama, sebagai Bius Bakkara yang berdaulat atas wilayahnya, berporos pengayoman hak ulayat Paguyuban Bakkara dan wewenang pemerintahan serta pengaturan sosial politik sebagaimana menjadi ciri Bius. Kedua, sebagai kedudukan Lembaga Singa Mangaraja (Kraton Dinasti)⁵².

Selanjutnya Sitor Situmorang mengatakan bahwa antara Bius Bakkara sebagai Bius yang mandiri dan berdaulat dan sebagai tempat kedudukan Lembaga Singa Mangaraja terdapat pertalian di dua bidang yaitu: di bidang simbolis, mengenai penghormatan kehadiran Lembaga Singa Mangaraja dan di bidang pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan Singa Mangaraja sebagai Dewaraja, panutan semua Parbaringin di semua Bius dalam penyelenggaraan upacara-upacara yang bersifat keagamaan (religious). Dalam hal penghormatan simbolis, di pusat Bius Bakkara, terdapat tempat keramat paguyuban, sesuai tradisi ditanam beringin berjumlah enam buah, melambangkan Bakkara sebagai kedudukan Lembaga Singa Mangaraja, sebuah perlambang yang tidak terdapat dip sat kramat Bius lainnya. Di bidang pelaksanaan upacara di kraton Singa Mangaraja, barisan pendeta Parbaringin dari Bius Bakkara ikut berperan sesuai tata tertib upacara yang menyangkut Singa Mangaraja. Partisipasi Parbaringin lokal dalam upacara di kraton Singa Mangaraja sebagai pelaksana, terlepas dari tugas mereka sebagai “pendeta-pendeta” Bius Bakkara⁵³.

Jadi, Bakkara memiliki status ganda dalam teritori Harajaon Batak Toba, khususnya Harajaon Singa Mangaraja. Pertama, Bakkara merupakan Bius mandiri yang otonom seperti Bius-Bius lain di luar lembaga atau Dinasti Singa Mangaraja. Sebagai Bius, maka Bakkara dipimpin oleh Raja-raja Bius atau

Dewan Bius yang berasal dari perwakilan Raja Horja. Kedua, Bakkara menjadi tempat dimana Dinasti Singa Mangaraja berada. Ia menjadi pusat pemerintahan Harajaon Singa Mangaraja. Karena itu Raja Singa Mangaraja bukanlah Raja Bius di Bakkara, melainkan Raja Dinasti Singamangaraja yang didalamnya berhimpun Bius Bakkara dan sejumlah (tidak semuanya) Bius-Bius yang ada di tanah Batak dan bahkan Bius yang ada di tanah Dairi seperti Bius Sionom Hudon.

Catatan

- ¹ M. Mas'ud Said. 2010. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press, h. 81.
- ² Lance Castles. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940*. Diterjemahkan oleh Maurits Simatupang. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- ³ Doa Raja Batak secara lengkap kepada Debata Muljadi Nabolon, lihat W.M. Hutagalung. 1991. Pustaka Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak. Tulus Jaya, h. 32-33.
- ⁴ Pustaka merupakan karya tulis dalam bahasa dan tulisan Batak yang memuat pengetahuan tentang berbagai hal. Karena karya tulis tersebut ditulis di atas beberapa lempengan *Laklak* (kulit kayu), maka Pustaka disebut juga Laklak.
- ⁵ Tentang torsa, Raja Patik Tampu Bolon mengatakan: Ia torsa-torsa sipat-sipat ni kajirubu, na patorangkon ganup-ganup bagian ni Adat Batak. Torsa do na paboahon, na patuduhon, dohot na patandahon sian mulana sahat tu ujungna. Molo didok torsa ni adat, ima paboahon hatorangan ni adat, molo didook torsa ni harajaon, ima na paboahon taringot tu harajaon. Torsa do na manorangi sipat-sipat ni adat siulahononta dohot sipasidingon, adat na uli manang adat na roa, songon naung niatur ni umpasa dohot umpama na martudosan marbindu-bindu dohot margoli-goli. Tu adat hadewataon umpasa pasu-pasu, tu adat hajolmaon umpama tudosan. Raja Patik Tampubolon. 2002. *Pustaka Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama, h. 96.
- ⁶ Ibid, h. 208.
- ⁷ George Balandier. 1986. Antropologi Politik. Jakarta: CV. Rajawali, h. 28.
- ⁸ Bandingkan dengan Bungaran Antonius Simanjuntak, 2006. Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 66.
- ⁹ Tiurma. L Tobing. 1981. Raja Sisingamangaraja XII. Depdikbud.
- ¹⁰ <http://simanjuntak.or.id/2008/02/sibagot-ni-pohan/>
- ¹¹ W.B. Sidjabat. 1982. Ibid, h.70-71.
- ¹² W.B. Sidjabat. Ibid.
- ¹³ Jamaludin S. Hasibuan 1985. *Art Et Culture/Seni Budaya Batak*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, h. 237.
- ¹⁴ Uraian lebih lanjut W.B. Sidjabat. 1982. *Ahu Si Singamangaraja*. Jakarta: Sinar Harapan; Batara Sangti. 1977. *Sejarah Batak*. Balige: Karl Sianipar.
- ¹⁵ Ulbert Silalahi, 1996, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, h. 157-159.
- ¹⁶ Beberapa penulis tentang perkembangan di Sumatera Utara mengatakan bahwa "masyarakat Batak hingga abad XIX hidup dalam *splendid isolation*." Maksudnya, penduduk Sumatera Utara yang terkenal kuat dengan adatnya itu seolah-olah tak mempunyai hubungan dengan kalangan luar di Nusantara sendiri, apalagi dengan orang dari luar negeri. Ini merupakan pandangan orang dari luar Indonesia yang juga banyak dianut oleh kalangan Indonesia sendiri. Menurut Sidjabat pendapat ini tidak memiliki dasar ilmiah dan historis, sebab sejak abad-abad pertama tarikh masehi menunjukkan daerah Barus sebagai satu daerah di Sumatera Utara sudah dikenal melalui perdagangan kapur barus atau kamper (camphor) dan kemenyan (benzoin), lada, kulit manis dan rempah-rempah lainnya. Demikian juga dalam abad VII tarikh masehi

- telah masuk orang Kristen Nestoria di Barus. Uraian tentang ini lihat W.B. Sidjabat. 1982. *Ahu Si Singa Mangaraja*. Jakarta: Sinar Harapan, h. 31-36.
- ¹⁷ Sitor Situmorang. 2004. Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX. Jakarta: Komunitas Bambu, h. 20.
- ¹⁸ Diunduh dari <http://www.mail-archive.com/palanta@minang.rantaunet.org/msg16727.html> pada tanggal 22 Mei 2012. Selanjutnya dikemukakan bahwa di Tapanuli Tengah/Selatan, raja doli dan raja oloan dinamai Raja Pandapotan dan Raja Junjungan. Di daerah Karo/Dairi dinamai Sibayak dan Partakki, sedang di Simalungun dinamai Tuhan atau Pertuhanan. Di sentrum tanah Batak sendiri, sehubungan dengan nama-nama yang berbeda-beda itu, ada juga yang dinamai Raja Ihutan.
- ¹⁹ Ibid, h. 11-12.
- ²⁰ Mengacu pada pendapat Uli Kozok. 2009. Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia; dan W.B. Sidjabat. 1982. *Ahu Si Singamangaraja*. Jakarta: Sinar Harapan; Batara Sangti. 1977. *Sejarah Batak*. Balige: Karl Sianipar.
- ²¹ Atas dasar itu Pemerintah Kolonialisme Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia (1945-1949) mendirikan Negara Sumatera Timur (1948-1950) dan Negara Batak Raya (1948-1949).
- ²² Lance Castle, *ibid*.
- ²³ W.B. Sidjabat, *ibid*, h. 75-76.
- ²⁴ W.B. Sidjabat. 1982. *Ahu Si Singamangaraja*. Jakarta: Sinar Harapan, h. 75-76.
- ²⁵ Penamaan Van der Tuuk seperti dikutip oleh W.B. Sidjabat, *ibid*, h. 71.
- ²⁶ Setelah Tuan Sori Mangaraja wafat di Balige Raja, pernah muncul tokoh pemersatu yang memiliki sahala bernama Jonggi Manao di Sianjur Mulana. Tokoh ini membawa aliran kerajaan yang dinamakan “Banua Holing”. Tetapi karena terjadi pada waktu yang singkat, maka ajarannya tidak sempat tumbuh di tengah-tengah masyarakat Batak Toba. Lihat Batara Sangti, *op cit*, h. 329.
- ²⁷ Perselisihan dalam satu marga induk terutama dalam hal abang-adik ini sudah menyebar secara luas ke banyak marga dan marga induk yang hingga sekarang masih dijumpai di tengah-tengah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba, terutama antara pihak *sibolon partubu* (keluarga besar dan maju) dan *sietek partubu* (keluarga kecil dan kurang maju). Misalnya, keturunan Tuan Sorba Dibanua antara putera-putera boru Pasaribu kontra putera-putera Siboru Basopaet, antar putera-putera Tuan Sorbadibanua dari isterinya boru Pasaribu. Juga antara *marga* Pandiangan dengan *marga* Samosir; antara *marga* Situmorang dengan *marga* Sinaga; antara *marga* Simamora dan *marga* Sihombing; antara *marga* Pasaribu dan *marga* Lubis, Panggabean dan Hutabarat, juga antara Tampubolon dan Barimbing, Silaen, antara keturunan Raja Marsundung (*marga* Simanjuntak) yaitu antara keturunan boru Hasibuan (disebut Parhorbo Jolo atau Parsuratan) dan keturunan boru Hotang (disebut Parhorbo Pudi yang terdiri dari Mardaup, Sitombuk, Hutabulu). Ulbert Silalahi, 1998, *op cit*, h. 3.
- ²⁸ Dalam masyarakat Batak Toba soal abang-adik amat pentingnya. Siapakah di antara anak-anak lelaki seorang bapak anak sulung, siapa kemudian ber-turut-turut adik-adiknya. Jika hanya satu isterinya soal itu amat mudah dijawab. Tetapi jika ada beberapa isteri, maka kadang-kadang timbul persoalan di antara keturunannya. Lihat N. Siahaan dan H. Pardede, *op cit*, h. 45.
- ²⁹ Berdasarkan Batara Sangti, *op cit*, h. 329.
- ³⁰ Tonggo-tonggo atau permohonan takzim disampaikan pada upacara seremonial oleh para datu atau oleh parbaringin ialah pendeta persembahan darai bius, atau oleh tua-tua utama dari marga. Isi dari Tonggo-tonggo Bius Sianjur Mulana adalah sebagai berikut: “*Ale amang batara Guru humundul, amang situmbur ni bulu, sidangka ni hopo, Batara Guru humundul, amang na pande mangomo; simbora ma galunggang, simbora nigalungganghon, gabe ma panggual, na morama na pagualhon. Asa bahen ma jolo teptep mula ni gondang, serser mula ni tortor, sipu do mula ni tabas, laning do mula ni pollung, juhut do mangula hata, indahan do mangula uhum. Ima gondang ni rajanta, Siraja Sorbajati, Ompu Panderaja, Amani Pandemauli, mula ni hapandean, mula ni parbinotoan, mula ni dungdang, mula ni sahala. Ima rajanta situasi raja uhir, situasi ruma gorga, mula ni penguhiron jumadhon panggorgaon, mula ni panjungkiton jumadhon paniraton; mula ni pangkoliton jumadhon hadumaon, mula ni*

hadumaon jumadihon hamoraon. Mula ni hajungkingon jumadihon hasingalon. Mula ni hasingalon jumadihon harajaon. Asa tohuk ni tohuk, tohuk ni bajar-bajar, tahi ni begu pe so tuk, tahi ni musu pe antong ngal. Langit so matombuk, tano so maganggang.” Dikutip dari Batara sangti, h. 329-330.

- ³¹ Menurut cerita proses ajaib kelahiran Sisingamangaraja I bermula saat jatuhnya ‘jambu baru’ dari langit waktu Ibunya yaitu Siat Natundal istri dari Raja Bonanionan Sinambela, sedang mandi dan kemudian memakan buah tersebut. Lalu sebulan setelah kejadian itu maka mengandunglah Siat natundal tetapi sampai 3 tahun tidak kunjung lahir juga bayi dalam rahimnya. Kemudian hal ini membuat resah suaminya-Raja Bonanionan dan menanyakan keganjilan ini kepada Datu(Shaman), dan Datu itu berkata bahwa keanehan ini dikarenakan bahwa bayi yang dikandung istrinya itu ialah inkarnasi dari ‘Batara Guru’ dan Datu itu meramalkan bahwa bayi itu akan lahir pada tahun keempat. Setelah 4 tahun kemudian lahirlah bayi tersebut dengan disertai oleh gemuruh halilintar, gempa bumi dan tanda-tanda keajaiban lainnya. Setelah bayi itu lahir, Sang ayah juga menerima Kitab Batara Guru dan didalam kitab itu disebutkan bahwa dia harus memanggil anaknya ‘Singamangaraja’. Dan sebab itu Singamangaraja I disebutkan sebagai inkarnasi dari Batara Guru dan mempunyai kesaktian. Disini kita lihat bahwa ‘Batara Guru’ juga merupakan peresapan kebudayaan Hindu yang masuk ke dalam kebudayaan batak kuno dan beberapa kerajaan di daerah Sumatra, Jawa dan Bali. Menurut Kepercayaan Hindu Batara Guru ialah nama lain/gelar untuk Dewa Shiva(Siwa) dan Hindu-Jawa menyebutnya ‘Sang Hyang Batara Guru’.
- ³² Uraian dan penjelasan lebih lanjut tentang awal dari kerajaan Singa Mangaraja I (Raja Manghantal) dan mitologi kelahirannya lihat antara lain Raja Patik Tampubolon. 2002. *Pustaha Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama, h.135-142; Batara Sangti, *op cit*, h. 333. Menurut Adniel L. Tobing, Raja Manghantal gelar Singa Mangaraja I yang dilahirkan oleh ibu suri boru Pasaribu di Bakkara Toba, tidaklah terjadi atas percampuran dengan suaminya atau seorang lelaki lain. Ia lahir semata-mata karena kuasa Muljadi Nabolon (Maha Pencipta) penuh dengan keajaiban dan keanehan. Nama Tuan Singa Mangaraja langsung diterima oleh ibu suri dari Tuhan sebelum terjadi benih baginda. Uraian dan penjelasan lebih lanjut, lihat Batara Sangti, *op cit*, h. 333. Baca juga mitologi tentang Mula ni Harajaon Singa Mangaraja I dalam Raja Patik Tampubolon. 2002. *Pustaha Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama, h.135
- ³³ Ada yang mengatakan benda-benda mujijat ini konon diterima dari Raja Uti.
- ³⁴ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 94.
- ³⁵ Menurut pengakuan Raja Napatar, cucu Raja Sdingamangaraja XII, Piso Gadjia Dompok ada di Museum Nasional. Saya juga baru tahun lalu melihat itu. Sebelum acara pesta 100 tahun SiSinga Mangaraja XII kami diajak melihat Piso Gaja Dompok itu. Kami diantar ke tempatnya Piso Gaja Dompok itu, saya kenalkan diri. Saya melihat sarungnya sudah lapuk. Gajah itu memang ada. Saya ingat dulu yang menyimpan Piso Gaja Dompok ini Sunting Mariam putrinya yang nomor dua. Dia meninggal 1979. Dulu saya ingat pesannya bahwa di ujung pangkal pisau ini ada permata merah. Lalu kepala museum menggelap dan memang kelihatan mutiara merah. Diunduh dari <http://batak.blogspot.com/2009/01/siSingaMangaraja-menurut-cucunya.html> pada tanggal 20 April 2012.
- ³⁶ Raja Gomal Sinambela (Cicit R.S.M. XI). Mengenal Singa Mangaraja XI dan Perjuangannya. Naskah Tulisan.
- ³⁷ Setelah pemerintah Belanda berkuasa di Tapanuli, istilah bius yang mempunyai makna politik dilenyapkan dan diganti jadi huta biasa. Belanda menyadari bahwa disebagian wilayah Toba organisasi bius dan dewan bius adalah perpanjangan tangan Singa Mangaraja. Singa Mangaraja dan organisasi parbaringin terkait erat dengan bius.
- ³⁸ Anicetus B. Sinaga. 2012. Taman Monumen Dalihan Na Tolu Batak. Medan: Bina Media Perintis, h. 66.
- ³⁹ Menurut Sidjabat, tak jarang kita melihat adanya tuntutan seorang sultan, umpamanya dari Asahan atasdaerahnya yang sebenarnya sudah di luar wilayah kesultanan yang sesungguhnya. Inilah sebabnya mengapa pada beberapa peta lama daerah kekuasaan Si Singamangaraja kadang-kadang dianggap termasuk daerah kesultanan Siak. Tetapi tentunya

-
- hal itu hanya terdapat di peta saja, bukan melukiskan keadaan yang sesungguhnya. W.B. Sidjabat, *ibid*, h. 69-70.
- ⁴⁰ Lance Castles. 2002. *ibid*, h. 13.
- ⁴¹ <http://indoparsada.blog.com/2011/12/08/275/>
- ⁴² W.B. Sidjabat, *op cit*, h. 22.
- ⁴³ Sidjabat mengatakan: Selain merupakan Raja na hasantian (raja yang penuh kesaktian), Raja Si Singa Mangaraja, Singa Mangalompoi, Singa Sohalompoan yang ditetapkan oleh Muljadi Nabolon, Si Singa Mangaraja dihormati juga oleh penduduk asli selaku: *Raja na pitu hali malim, nimalimhon ni Muljadi Nabolon*. Lihat W.B. Sidjabat, *ibid*, h. 196, 198.
- ⁴⁴ Uli Kozok. *Ibid*, h. 151.
- ⁴⁵ W.B Sidjabat, *ibid*, h78-79.
- ⁴⁶ Raja Patik Tampubolon menggambarkan Harajaon Dinasti Singa Mangaraja VII di bawah pemerintahan Raja Ompu Sotaronggal sebagai berikut: Ndang adong manang harajaon dia pe naboi mangonggal Raja Nahasaktian i di na satingki i (maksudnya: pada masa Raja Ompu Sotaronggal Raja Singa Mangaraja VII, penulis). Disi nunga taratur ianggo di bona pasogit adong be do harajaon Bius dohot Parbuisan na siningahon ni R. Singa Mangaraja. Alai ala angka pidari hamusuon nahinan, torop dope sian angka Marga dohot Houm ni Bangso Batak, na so boi manjungung baringinna, ala so adong keamanan dohot ketenteraman umum; ai masiporangan do luat tu luat, dohot huta tu huta, masibuharan, masiihotan dohot masibajoan, tung musu garembong do na masa di pidari i. Alai atik pe songoni taon be angka parmusuon marluat-luat, ianggo siulahon hatigoran patik dohot uhum, sai adong be do i dipatupa Dewata di ganup-ganup luat, asa sian i adong partonaan ni R. Nahasaktian i laho pademak angka parmusuon i, ala ingkon mamolus ma ibana tu ganup-ganup Marga dohot Houm ni Bangso Batak. Dison ma dipataridahon R. Nahasaktian i hamalimonna dohot hasomalanna, na sian Muljadi Nabolon di patik dohot uhum hasaktian ni harajaon Singa Mangaraja.
- ⁴⁷ Raja Patik Tampubolon menjelaskan Dinasti Singa Mangaraja XI di bawah pemerintahan Ompu Sohahuaon sebagai berikut: Sahat sarimatua bulung do Raja i O. Sohahuaon mangulahon harajaon Singa Mangaraja i ditumpak O. Dewata, aman jala sonang do tano Batak mangulahon patik dohot uhum na sian O. Muljadi Nabolon. Mansai torop do sian Raja-raja ni Marga dohot houm ro manopot ibana tu Bakkara, manungkun angka barita na uli, tona dohot somba sibahenon tu O. Muljadi Nabolon dohot mangusungi angka silua, tuak na tonggi, botabota, ulos, tali-tali dohot boni sitambatua dla. Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 148.
- ⁴⁸ WB. Sidjabat, *ibid*, h. 79.
- ⁴⁹ Lance Castle, *ibid*, h. 15.
- ⁵⁰ WB. Sidjabat, *ibid*, h. 77.
- ⁵¹ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 149.
- ⁵² Sitor Situmorang, *ibid*, h. 251.
- ⁵³ Sitor Situmorang, *ibid*, h. 251-252.

Bab 4

Budaya dan Ideologi Birokrasi Tradisional Batak Toba

Pendahuluan

Watak birokrasi tradisional merupakan cerminan dari watak dan kebutuhan masyarakat tradisional. Budaya dari masyarakat tradisional ikut membentuk budaya birokrasi sehingga nilai-nilai tradisional cenderung persisten mewarnai sosok birokrasi tradisional. Semangat dan ciri-ciri birokrasi tradisional secara substansial bersumber dari nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu hikmah yang bisa dipetik dari membicarakan sejarah birokrasi ialah memperkaya perspektif kita mengenai bagaimana pengaruh kultur terhadap birokrasi, bagaimanakah bentuk dan nilai setempat menjadikan sifat dan penampilan birokrasi dalam tataran praktek. Karena itu setiap cara manusia menjalankan birokrasi akan selalu dipengaruhi oleh kultur individual dan kultur komunal¹.

Bagi masyarakat tradisional Batak Toba kultur individual dan kultur komunal terkandung dalam dua budaya dasar yaitu budaya kerohanian agama dan budaya kekerabatan adat². Nilai-nilai budaya kerohanian dan budaya kekerabatan menjadi nilai-nilai dasar yang mengikat kehidupan dan interaksi sosial dan organisasional masyarakat Batak Toba tradisional³.

Budaya kerohanian merupakan satu budaya dasar dari masyarakat Batak Toba tradisional. Budaya kerohanian terkait dengan religi atau agama atau kepercayaan. Nilai-nilai budaya kerohanian agama menjadi nilai-nilai dasar yang mengikat kehidupan dan interaksi sosial dan organisasional masyarakat Batak Toba tradisional⁴. Budaya kerohanian menentukan kesadaran kolektif manusia tentang hubungan manusia dengan dunia dan alam semesta yang kosmosentris dan hubungan manusia dengan Tuhan.

Budaya kekerabatan juga menjadi satu budaya dasar dan utama dalam masyarakat tradisional Batak Toba. Budaya kekerabatan terkait dengan adat istiadat dan hubungan marga. Budaya kekerabatan menentukan kesadaran kolektif manusia tentang hubungan manusia dengan manusia.

Baik budaya kerohanian agama maupun budaya kekerabatan adat, keduanya membentuk ideologi birokrasi kerajaan tradisional dan memberi corak atas perilaku birokrasi tradisional dari dan dalam masyarakat Batak Toba saat itu.

Budaya Kerohanian

Berdasarkan budaya kerohanian agama (disebut “agama suku”) Batak Toba tua atau purba percaya bahwa langit dan bumi dan manusia dan segala isinya diciptakan oleh tuhan. Mereka menamakannya *Debata Mulajadi Na Bolon*. *Debata Mulajadi Na Bolon*⁵ adalah permulaan dari segala yang ada. *Debata Mulajadi Na Bolon* merupakan Dewa tertinggi yang disembah oleh agama Batak Toba Tua dan Agama Malim atau Parmalim. *Debata Mulajadi Na Bolon*, allah dari masyarakat Batak Toba tua, bergelar Ompu Raja Mulamura (Ompu Raja Permulaan) atau Debata Mulamura (Allah Permulaan) dan Ompu Raja Mulajadi (Ompu Raja Pencipta) atau *Debata Mulajadi* (Allah Pencipta).

Percaya Banua Na Tolu

Masyarakat Batak Toba tradisional juga percaya bahwa makrokosmos atau alam semesta terdiri dari tiga bagian yaitu *Banua Ginjang* (dunia atas), *Banua Tonga* (dunia tengah) dan *Banua Toru* (dunia bawah)⁶. Tiga *banua* ini merupakan totalitas dari makrokosmos. Penganut agama Batak Toba Tua percaya bahwa kosmos merupakan kesatuan dari benua atas, benua tengah dan benua bawah atau *banua na tolu*, benua yang tiga.

Banua Ginjang merupakan benua pertama yang sudah ada dari mulanya. Seperti di tulis oleh Raja Patik Tampubolon, “*naung adong hian do sada banua, ima banua ni Ompu Mulajadi Na Bolon; Banua Parjolo; rap dohot angka surusuruan Parhaladona*”⁷. Banua ini dipercaya menjadi tempat tuhan mereka ialah *Debata Mulajadi Na Bolon* yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk banua toru. bersama dengan Debata Na Tolu, para pesuruh atau *Suru-suruan Parhalado* dan dewa-dewa lain dan keluarganya. *Banua Parjolo* merupakan banua tempat para dewata yang disebut juga sebagai *abat parsoran di angka jolma na di banua i* (abad kebersamaan dari manusia-dewata yang ada di banua tersebut). Raja Patik Tampubolon mengatakan:

Di Banua Ginjang i ma Hadewataon; inganan sambulo, Tondi ni Tondi; OMN (singkatan dari Ompu Mulajadi *Na Bolon*, penulis); Suru-suruan Parhalado, Dewata Na Tolu, Dewa-dewa, Sahala, Simangot, dohot angka tondi-tondi dla; ima na dipauba sian hajolmaon hian gabe martondi/sahala. Asa ndang marhadirion jolma be halak di Banua Ginjang i, marhadirion tondi/sahala; mar-haDewataon, dohot marpartondion; marsanggap, martua jala sonang⁸.

Debata penghuni banua ginjang menjadi sumber dari segala yang diperlukan oleh manusia yang tinggal di Banua Tonga untuk bisa hidup sejahtera. Sebagai ciptaan Debata yang tinggal di bumi, manusia percaya kepada *Debata Mulajadi Na Bolon* sebagai maha awal dan maha akhir, maha besar, maha pencipta, maha menjadikan, maha kuasa, awal mula dari segala yang ada⁹. Banua

Ginjang disebut langit. Sebelum ada manusia dan sebelum ada bumi, Maha Pencipta sudah menciptakan langit. Langit yang diciptakan oleh Debata terdiri dari tujuh lapis. Setiap lapis ada penghuni.

Langit parjolo atau lapis pertama atau paling bawah merupakan tempat orang-orang yang berkelakuan bertentangan dengan Patik dohot Uhum, *na mangulahon na suhar* selama hidupnya. Juga para pembunuh. Inilah tempat siksaan yang paling berat, kepala di bawah, kaki di sebelah atas.

Langit kedua merupakan tempat para pencuri. ia akan tetap berdiri siang dan malam dan mereka akan menderita memegang dan membawa-bawa apapun yang dia curi pada masa hidupnya. Akan kelihatan besar atau kecil kejahatan yang diperbuatnya, atau yang dicurinya.

Langit ketiga menjadi tempat manusia yang suka berdusta semasa hidupnya. Sesudah ia mati, Allah akan menarik lidah orang itu hingga terseret-seret ketika mereka berjalan sesuai dengan perbuatan jahat mereka.

Langit keempat menjadi tempat manusia yang semasa hidupnya suka menipu atau munafik (Toba, *pangansi*) dan membuat keributan, membungakan uang. Selamanya siang dan malam mereka yang menipu dan pembuat onar dirantai kaki dan tangannya saling menagih piutang dan atau membayar utang. Juga menjadi tempat orang yang bunuh diri. Mereka dimasukkan *dibeanghon* dalam kerangkeng besi agar tidak bisa bergerak.

Langit kelima merupakan tempat orang yang ketika masa hidupnya suka menolong yang berkesusahan dan yang miskin. Mereka akan berdiri bersama dengan yang mereka bantu. Mereka akan mendapatkan berlipatganda dari Allah sebagai balasan kebaikan yang telah mereka perbuat semasa hidupnya. Batak mengatakan “*ia uli sinuan, uli do gotilon; ia duri sinuan, duri do gotilon*” (jika kita berbuat baik, akan mendapat balasan yang baik; jika berbuat jahat, akan mendapat balasan yang jahat).

Langit ke enam adalah tempat orang yang belum pernah melakukan kesalahan dan dosa yaitu anak-anak. Juga tempat orang yang menghormati ibu dan bapanya, rajanya, gurunya, orang tua, dan orang lain atau tempat orang yang tidak menyimpang dari *patik dohot uhum*.

Langit lapis ketujuh adalah tempat Mulajadi *Na Bolon*. Langit lapis ketujuh tempat Mulajadi *Na Bolon* sering disebut *langit ni langitan, di ginjang ni ginjangan*. Ini menggambarkan tempat yang paling tertinggi. Allah juga menempatkan orang-orang yang masa hidupnya memiliki perilaku terhormat dan raja yang baik hati dan bijaksana.

Banua Tonga adalah benua kedua yang disebut bumi. Benua ini adalah tempat manusia atau *jolma*¹⁰. Bumi dan manusia adalah ciptaan *Debata Mulajadi Na Bolon* melalui Si Boru Deak Parujar. Karena itu *Si Boru Deak Parujar* disebut *na marmulahon tano* (yang berawalkan tanah), *na marmulahon jolma tu banua*

tonga on (yang berawalkan manusia ke benua tengah ini)¹¹. Tentang Banua Tonga, Raja Patik Tampu Bolon mengatakan sebagai berikut:

Di Banua Tonga ima hajolmaon, ima inganan ni jolma na martondi/ngolu na marhadirion tondi raphon badan (badan na marngolu jolma). Asa saleleng mangolu jolma i martondi do, alai molo dung mate ndang martondi be, ndang marhajolmaon be di Banua Tonga, nunga sirang tondi sian badan, jadi mulak tu sambulo Hadewataon ma tondi haroroanna hian, ba mulak tu asalna ma badan. Tu tano badan tu alogo hosa, tu toru ni tano hamatean¹².

Banua Toru adalah benua ketiga. Benua ini adalah tempat tubuh manusia ketika manusia mati. Sebab sesudah orang mati, roh manusia kembali ke tempat asal darimana sebelumnya roh berasal yaitu sambulo Hadewataon, sedangkan badan kembali ke asalnya. Badan kembali ke tanah, ke bawah dari tanah kematian¹³. Raja Patik Tampubolon mengatakan “*Asa panduduran ni na roa ma Hamatean Banua Toru i*”¹⁴. Tetapi selain sebagai kematian, Banua Toru juga sering digambarkan sebagai kesuburan.

Uraian di atas menunjukkan ada kaitan perhubungan antara banua ginjang, banua tonga dan banua toru dengan perjalanan hidup manusia. Pertama, manusia berasal dari Banua Ginjang dari ciptaan Tuhan. Kedua, kemudian manusia hidup dan tinggal di Banua Tonga. Akhirnya, manusia mati menempati Banua Toru. Tetapi rohnya, sesuai dengan perbuatannya di bumi, masuk kembali ke banua ginjang. Jika perbuatannya jahat akan menempati langit lapis pertama hingga lapis kelima sesuai dengan amal perbuatan kejahatannya. Jika perbuatannya baik akan menempati langit ke tujuh sesuai dengan amal perbuatan kebajikannya¹⁵. Tentang kaitan perhubungan antara banua ginjang, banua tonga dan banua toru dengan perjalanan hidup manusia, Raja Patik Tampubolon mengatakan sebagai berikut:

Dikaji tubu ni banua Toru: Sian na sada do gabe dua dohot gabe tolu: Sian Banua Ginjang adong Banua Tonga (Hajolmaon), sian Banua Tonga adong Banua Toru (Hamatean). Asa angka na Martondi-Marsahala hasaktian ma Hadewataon Banua Ginjang i inganan Sambulo ni Tondi – Tondi ni Tondi. Angka na marhadirion tondi/ngolu (tondi raphon badan) dohot na marsahala simangot ma Hajolmaon i, ima Banua Tonga. Angka na mate sian Hajolmaon ma na di Hamatean Banua Toru i, angka naung mintop sonondangna, ima nanidokna na mulak tu asalna, “badan tu tano, hosa tu alogo”¹⁶.

Percaya Debata Na Tolu

Dalam konsep totalitas makrokosmos dipastikan bahwa *Debata Mulajadi Na Bolon* menguasai seluruh banua, baik banua ginjang, banua tonga maupun banua toru. Dalam konsep totalitas tersebut masyarakat Batak Toba-Tua juga percaya *tolu ragam ni Debata* (tiga macam debata) yaitu *Batara Guru*, *Sori Pada* dan *Mangala Bulan*. Mereka disebut *debata na tolu* (debata yang tiga) atau *debata*

sitolu sada (*debata* tritunggal, tiga tapi satu). Tentang kehadiran dari tiga debata ini, ada dua pendapat. Pendapat pertama seperti dikemukakan oleh A.B. Sinaga mengatakan bahwa debata na tolu yaitu *Batara Guru, Sori Pada* dan *Mangala Bulan* adalah diciptakan oleh *Debata Mulajadi Na Bolon*¹⁷. Pendapat kedua seperti dikemukakan oleh PHO. Lumban Tobing mengatakan bahwa debata na tolu adalah diri dari *Debata Mulajadi Na Bolon*. *Debata Mulajadi Na Bolon* menjelma menjadi tiga diri yaitu sebagai debata banua ginjang, sebagai debata banua tonga dan sebagai debata banua toru. Sebagai debata banua ginjang ia dinamakan *Debata Batara Guru* atau Tuan/Ompu Bubi *Na Bolon*, sebagai debata banua tonga ia dinamakan *Debata Soripada* atau Tuan/Ompu Silaon *Na Bolon*, dan sebagai debata banua toru ia dinamakan *Debata Mangala Bulan* atau Tuan/Ompu Pane *Na Bolon*¹⁸. Karena itu masyarakat Batak Toba tradisional percaya *sada Debata di ginjang, sada Debata di tonga, sada Debata di toru* (satu *Dewata* di atas, satu *Dewata* di tengah dan satu *Dewata* di bawah) (Tabel 4.1).

Tabel 4.1: Makrokosmos dan pengatur dalam perspektif budaya kerohanian Batak Toba

Makrokosmos	Pengatur/Penjaga/Pelindung
Banua Ginjang	Debata Batara Guru atau Tuan Bubi Na Bolon
Banua Tonga	Debata Soripada atau Tuan Silaon Na Bolon
Banua Toru	Debata Mangalabulan atau Tuan Pane Na Bolon

Apakah diciptakan ataukah penjelmaan, *tolu nasida di suhu ni partubu, jala tolu nasida di harajaon panggomgoman* (tiga mereka di suhu kelahiran dan tiga mereka di kerajaan pemerintahan)¹⁹. Keberadaan *Debata Mulajadi Na Bolon* di semua tingkat dunia dengan sebutan nama yang berbeda membuat ia selalu ada di semua tempat, setiap waktu dan semua kepentingan. Inilah paham yang dianut oleh Agama Batak yaitu paham agama yang dianut oleh masyarakat Batak Toba-Tua atau disebut *pantheisme*²⁰.

Masing-masing debata memiliki sifat dan fungsi. *Batara Guru* bersifat pemimpin: pamong, bijaksana; *Soripada* memiliki sifat wanita: pengasih, pemelihara, welas asih; sementara *Mangalabulan* atau *Balabulan* bersifat perwira: perkasa, tangkas, lincah, kuat²¹. Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing debata dapat dikemukakan sebagai berikut. *Batara Guru* yang disebut Tuan Bubi *Na Bolon* menjaga harmoni di banua ginjang. Ia mengatur hidup dan maut (*hasangapon*). *Debata Soripada* yang juga disebut Tuan Silaon *Na Bolon* menjaga harmoni di banua tonga. Ia menganugerahkan anak kepada manusia (*hagabeaon*). *Debata Mangala Bulan* yang disebut Tuan Pane *Na Bolon* menjaga harmoni di banua toru. Ia mengirimkan cahaya, guruh, hujan, ombak dan kesuburan tanah (*hamoraon*). Ia berkuasa atas laut, kilat, dan guntur²².

Debata Batara Guru²³ memiliki fungsi dan tugas sebagai *Bataraguru doli*, *Bataraguru panungkunan*, *Bataraguru pandapotan*, *pandapotan ni nasa harajaon*²⁴. *Bataraguru panungkunan* ialah sebagai tempat bertanya manusia tentang segala yang berkaitan dengan *uhum* (hukum) dan *harajaon* (kerajaan, pemerintahan). Batara Guru *pandapotan* adalah sebagai tempat pengharapan, pengharapan dari seluruh kerajaan. A.B. Sinaga menyebut Batara Guru sebagai administrator kuasa mencipta dari Mulajadi *Na Bolon*. Dia adalah refleksi dan personifikasi tindak kreatif²⁵. Lainnya mengatakan bahwa tugas dan wewenang Batara Guru adalah sebagai pemberi keadilan, hukum kerajaan, kearifan dan pengetahuan bagi manusia yang dilambangkan dengan warna hitam²⁶. Dari dialah sumber kharisma kerajaan (*sahala harajaon*) bagi manusia di dunia. Artinya siapapun yang dipilih dan diangkat sebagai raja, maka dari dialah turunnya karisma kerajaan tersebut. Bataraguru merupakan perpanjangan tangan *Debata Mulajadi Na Bolon* dalam memberikan hukum dan jabatan kerajaan²⁷. Fungsi dan tugas dari Debata Batara Guru juga tampak dari deskripsi Raja Patik Tampubolon sebagai berikut,

Na sintak sumunde-sunde na uja manotari, na manektekkon udan dohot las ni ari, asa tubu anak na martua na songon mataniari dohot boru na marsangap na uja manotari; na untopak sambubu na rumaping jari-jari na mambahen halak martua na mambahen halak gabe²⁸.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya, Batara Guru adalah *sitiop timbangan di saluhut tinompana. Mula ni gantang tarajuan, hatian sibola timbang, ninggala sibola tali, tu atas sora mungkit, tu toru so ra monggal, tu lambung so ra teleng*²⁹.

Kepada Debata Batara Guru, masyarakat Batak Toba tradisional selalu *martonggo* atau berdoa menurut agama yang mereka anut. Adapun *tonggo-tonggo tohonan* (doa-doa jabatan/martabat) kepada Debata Batara Guru adalah sebagai berikut:

Debata Bataraguru!

Bataraguru Doli, Bataraguru panungkunan, panungkunan di poda, panungkunan di uhum. Bataraguru Dolu, Bataraguru pandapotan, mulani gantang tarajuan dohot hatian pamonaran. Parhaeen sutora malam, haen sutora itam, panantanan to toru parhitean lahi tu ginjang, parhoda homitan silinton (Silintong), parjugia na so pipoty, pangahitan di sangap, pangahitan di badia, badia ni guru Bataraguru humundul, hundul di gaja dolok manata pinomporna, asa lehet ma di purbana, sahat ma saurmatua.

Asa dao ma begu monggop, sai tio songon tapian,
Sai tu toropna hita on, ja;a dapot parsaulian

Asa disi sirungguk, disi do sitata,

Ia disi hita hundul disi do O. Debata.

Poltak mataniari, mangihut bintang sidongdong.

Horas ma hita madingin, Ompunta Debata ma margomgom

Sahat ni solu, sahat ma tu bontean

Sahat tonggo pangidoan, sahat tu hita panggabean³⁰.

Debata Soripada, atau Debata Sori, juga disebut Debata Balasori memiliki fungsi dan tugas *sibahen parsorion*, *sori gabe manang sori mago*, *manang bagian ni nasa jolma manisias*³¹. Dia menurunkan ajaran hamalimon (keagamaan) kepada manusia dan bumi. Menurut kepercayaan Malim, dia adalah asal mula *pangurason* (air suci), *parsuksion* (pencucian), *haiason* (kebersihan), *parsolamon* (perilaku yang suci), dan *hamalimon* (kesalehan). Debata Sori juga memiliki fungsi sebagai sumber hukum, kesucian, hamalimon (keagamaan), kebenaran, dan kemuliaan. Ia dilambangkan dengan warna putih³².

Berdasarkan agama mereka anut, masyarakat Batak Toba tradisional selalu berdoa atau *martonggo* kepada Debata Balasori. Adapun *tonggo-tonggo tohonan* (doa-doa jabatan/martabat) kepada Debata Balasori adalah sebagai berikut:

Debata Balasori!

Balasori manjujung, Balasori malela, manjujung do di ulu, manjujung dohot di roha; sori so haliapan, sori so hapurpuran, soripada na uli, soripada na danggan. Hundul di gaja dolok marpiso solam debata, pantik do hujur sane, piso halasan di tanganna; marlagelage tiar, di saoran puti do urasna, jala punga haomasan pambuatan ni taoarna. Pardaung ni pandang di julu, na pandang di jae, na manggagat di limut, na mandilatdilat di batu, parsisik na rumengget-rengget, marmatahon na so matana, marhuteptep di sangkalan, tano tabo di tolonanna. Ompunta parhoda sibara, parhomitan tumpal pinarbulang. Sisaktihon harajaon, sisaktihon hasangapon di angka anak na martua dohot boru na marharatan. Hamu do da ompung sipasindak panaili, sipaulak hosa loja, sipasinur na pinahan, sipagabe na niula dohot silehon panggabean – parhorasan di hami jolma manisias, pangahitan di sangap, pangahitan di badia.

Asa marpusuk ma baringin, mardangka hariara,

Horas ma hami madingin, asa matangkang ma juara.

Asa eme sitambatua ma parlinggoman ni siborok,

Debata do na martua sude ma tondi diparorot.

Sai di ruma pongki, bahul-bahul pansalongan,

Sai di ruma tondi, sai ro ma pansamotan³³.

Debata Mangala Bulan atau Debata Bala Bulan berfungsi dan bertugas untuk memberikan penerangan dan peramalan (*panurirangon*)³⁴, ketabiban (*hadatuon*) dan kekuatan (*hagagoon*) kepada manusia. Balabulan adalah sumber pemberi kekuasaan, hagagoon (kekuatan) dan kesaktian dan kedudukan bagi

manusia yang dilambangkan warna merah³⁵. Oleh karena itu masyarakat Batak Toba tradisional, berdasarkan agama yang mereka anut, selalu berdoa atau *martonggo* kepada Debata Balabulan. Adapun *tonggo-tonggo tohonan* (doa-doa jabatan/martabat) kepada Debata Balabulan adalah sebagai berikut:

Debata Balabulan!

Balabulan matubun, Balabulan marubun, maryubun di bonana, marubun di punsuna. Sibondut buhul-buhul, sisobur daro mata; pagar pulungpulungan pinasintong ni podana. Parbulang tiga bolit, parbohom tonggong banua; partambatua na godang jala sibagandingtua. Parhoda sibaganding; parpiso mangan mangeluk; parhujur sidua ujung; parpiso sidua bala; sipamuli amporik sahat tu asar-asarna, sipalao bagudung tu ruang-ruangna, sipalao gilok-gilok tu tano ingananna.

Asa sinemnem uruk-uruk, marsilanlan aek toba
Na magodang ndang jadi marungutungut, dakdanak pe marlas ni roha.

Asa binanga ni sihombing binongkal ni tarabunga,
Tu sanggar ma amporik tu lubanglubang ma satua,
Asa sinur ma pinahan, gabe dohot na niula,
Simbur magodang ma na metmet, pengpeng laho matua,
Sai mardangka ma ubanna, limutlimuton tanggurungna,
Horas pardalandalan nang na tading di huta.

Ba tingko ma inggir-inggir, tingko rata-rata,
Pangidoan, pasu-pasu, sai pasauthon ma O.Debata³⁶.

Telah dikemukakan bahwa totalitas dari tiga *Debata* ada pada diri *Debata Mulajadi Na Bolon*. Karena itu *Debata Mulajadi Na Bolon* merupakan harmoni dan sekaligus kesatuan dari tiga unsur yang berbeda yang *mengatur* tiga dunia tersebut. Kemudian masyarakat Batak Toba tradisional percaya bahwa keharmonisan dan ketidakharmonisan jagat raya akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Keharmonisan jagat raya akan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi dunia manusia. Sebaliknya, malapetaka, penderitaan dan gangguan lain yang merugikan masyarakat merupakan akibat dari ketidakharmonisan jagat raya. Niels Mulder menulis:

Kenyataan bahwa kehidupan tunduk pada hukum kosmis dan merupakan bagian dari suatu tatanan yang tak terhindarkan merangsang timbulnya dayatarik yang besar akan ramalan dan kegiatan di masa depan. Karena rancangan kosmis itu telah “ditetapkan”, maka ia dapat pula diketahui dan tinggallah merupakan masalah penemuan kordinatnya untuk mengetahui kejadian di masa depan. Oleh karena itu ramalan mungkin dilakukan kalau orang mendapat kesempatan untuk mengetahui rancangan besar itu dengan cara meditasi atau laku mistik, perhitungan magis atau pengetahuan mengenai perbintangan.³⁷

Kadang-kadang syarat-syarat dan peristiwa-peristiwa bahwa sedang terjadi disharmoni atau gangguan dalam alam semesta dapat dikenali sebagai membahayakan dan secara potensial mengganggu. Peristiwa itu harus dicegah dengan melaksanakan upacara ritual, seperti upacara *horja santi*. Upacara ritual ini bertujuan agar terhindar dari bahaya atau gangguan dengan memohon berkat dari *Debata*, roh halus dan roh nenek moyang. Orang yang ahli atau memiliki kemampuan untuk menetapkan hari baik atau buruk atau membaca dan memaknakan tanda-tanda jagat raya bagi kehidupan manusia adalah “parbaringin” atau juga “datu” yang dianggap memiliki kemampuan magis. Perhitungan tentang hari baik atau buruk dalam masyarakat Batak Toba tradisional ditulis dalam apa yang disebut “*Parhalaan*”, kadang-kadang disebut Kalender Batak.

Di samping *Debata Mulajadi Na Bolon* dan *Debata Natoli*, masyarakat Batak Toba percaya masih ada dua dewa yang ikut menentukan kehidupan dan kesejahteraan mereka dan selalu muncul dalam tonggo-tonggo. Dua dewa yang dimaksud ialah Boraspati ni Tano dan Boru Saniang Naga. Kuasa yang mereka miliki juga dipercaya berasal dari *Mulajadi Na Bolon*. Boraspati ni Tano – dalam karya ukir dibuat dalam betuk mirip *ilik*, atau kadal – dan berkuasa untuk menentukan kesuburan tanah. Sedangkan Boru Saniang Naga berkuasa atas air yang ada baik di laut maupun di darat sehingga dianggap juga sebagai dewi air³⁸.

Terkait dengan masyarakat Batak Toba tradisional sebagai masyarakat agraris, sementara kesuburan tanah dan air sangat dibutuhkan untuk pertanian, maka kedua dewa ini sangat dihormati, dipuja dan selalu diberikan persembahan atau sesaji dalam suatu upacara bius, agar memberkatinya baik ketika mulai mengolah tanah maupun sesudahnya atau ketika mendapat hasil panen. Dalam kepercayaan masyarakat Batak Toba-Tua, totalitas makrokosmos (dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah) sangat tergantung dari totalitas dari yang diberi otoritas untuk menjaga dan mengatur. Kedamaian alam semesta terjamin hanya jika ada kerjasama yang baik antara ketiga yang menjaga dan mengaturnya.

Budaya Kekerabatan

Budaya kekerabatan Batak Toba, dalam bahasa setempat disebut *ruhut ni pardonganon*, *ruhut ni partondongon*, *partording ni partuturon*, terpola dalam apa yang disebut *Dalihan NaTolu*. Secara etimologi *Dalihan Na Tolu* (DNT) terbentuk dari tiga kata: *Dalihan* = tungku, *Na* = yang/nan; dan *Tolu* = tiga. Jadi, DNT berarti Tungku Yang/Nan Tiga atau tiga batu tungku (*three-cornered cooking hearth*) yang secara tradisional biasanya digunakan untuk memasak. Tiga tungku ini menjadi simbol dari struktur sosial dalam budaya kekerabatan Batak Toba³⁹ yang terdiri dari: *dongan tubu*, *hula-hula*, dan *boru*. Dalam arti luas, DNT merupakan struktur sosial kemasyarakatan atas dasar hubungan kekerabatan yang

menjadi landasan dari semua kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan kultural dan adat istiadat⁴⁰. Tidak ada satu *horja* atau kegiatan pesta adat apapun baik suka maupun duka dapat berjalan tanpa DNT.

Struktur sosial *dongan tubu*, kadang-kadang disebut *dongan sabutuha*, *dongan samarga*, adalah kelompok kerabat *saompu* (satu kakek bersama, satu galur keturunan) dan menunjuk pada sistem kekerabatan agnata.⁴¹ Struktur sosial *hula-hula* adalah marga pemberi isteri, sedangkan struktur sosial *boru* adalah marga pengambil isteri. Hubungan antara hula-hula dan boru merupakan sistem kekerabatan affina.⁴²

Kekerabatan DNT terbentuk baik oleh hubungan darah dan hubungan perkawinan.⁴³ Pertama, hubungan pertalian darah membentuk dalihan *dongan sabutuha*, yaitu kelompok yang memiliki marga yang sama atau segenap keturunan laki-laki dari satu kakek yang sama atau menurut garis keturunan ayah yang disebut hubungan *genealogis-agnatik-patrilinealistik*. *Dongan sabutuha* juga sering disebut *dongan samarga*, atau *dongan tubu*. Penggunaan ketiga istilah ini, meskipun dapat dipertukarkan, tetapi masing-masing memiliki makna yang berbeda. *Dongan sabutuha* digunakan untuk satu marga atau submarga, *dongan samarga* biasanya digunakan untuk urutan yang lebih umum pada tingkatan satu kakek moyang bersama atau marga induk, sedangkan *dongan tubu* digunakan untuk tingkatan satu bapak atau *saompung* (satu kakek) atau *saompu* (satu kakek bersama).

Kedua, hubungan pertalian perkawinan yang disebut hubungan afina membentuk dalihan *hulahula* dan dalihan *boru*⁴⁴. *Hulahula* ialah marga saudara laki-laki isteri atau semarga dengannya, sedangkan *boru* ialah marga pengambil saudara perempuan menjadi isteri atau marga pengambil isteri atau semarga dengannya. Karena itu dalam diri tiap individu masyarakat Batak Toba yang sudah menikah melekat ketiga dalihan tersebut. Tiap individu masyarakat Batak dalam satu *horja* tertentu dapat berposisi sebagai *dongan sabutuha*, sedangkan dalam *horja* lain mungkin sebagai *hulahula* atau mungkin sebagai *boru*. Setiap posisi tentu menuntut suatu sikap atau perilaku tertentu terhadap yang lain. Pihak yang semarga harus menunjukkan sikap *manat* kepada yang semarga dengannya, pihak boru atau pengambil isteri harus menunjukkan sikap *somba* kepada marga pemberi isteri, dan pihak hula-hula atau pemberi isteri harus menunjukkan sikap *elek* kepada marga pengambil isteri.

Dongan Tubu: Manat Mardongan Tubu

Pihak yang semarga harus *manat* satu dengan lainnya. *Manat* mengandung makna menjaga persaudaraan dan persahabatan dengan sesama kelompok semarga, satu kakek atau satu kakek bersama, atau satu bapak agar tidak berseteru. Untuk itu perlu ada keseriusan sikap dan perilaku terhadap kerabat

semarga, berdiri sama tinggi duduk sama rendah, terikat dalam hak dan kewajiban yang sama, setanah dan sekarya dalam adat dalam suka dan duka, serta mengembangkan perasaan solidaritas yang kuat.⁴⁵ Hakekat *manat* dalam hubungan personal di antara semarga mengisyaratkan sikap bijaksana, hati-hati, waspada, santun, dan yang lebih penting saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga perasaan, dan menghilangkan sikap hotel (*hosom* atau dengki, teal atau sombong, elat atau iri, late atau cemburu). Diantara mereka yang *mardongan tubu*, harus menunjukkan sikap dan perilaku seperti diungkapkan dalam norma dan nilai tradisional dalam peribahasa berikut:

1. *Marpusuk ni langge do mardangka ni rintua*
Marhaha-maranggi do na mardongan sabutuha.
Berpucuk dari langge juga bercabang dari rintua
Berabang-adik juga yang semarga.
2. *Timbo dolok Martimbang toru na ido huta nami*
Ndang denggan molo sirang halak na marhaha-anggi
Tinggi bukit Martimbang di bawahnya desa kami
Tidak baik kalau pisah orang yang berabang-adik.
3. *Marboras ma dangkana marmutik ma rantingna*
Horas ma hahana songoni ma nang anggina.
Berbuah cabangnya berputik rantingnya
Sejahtera abangnya begitu juga adiknya.
4. *Assimun sada holbung pege sangkarimbang,*
Manimbung rap tu toru mangangkat rap tu ginjang.
Mentimun satu lembah jahe satu bongkolan
Melompat bersama ke bawah melompat bersama ke atas

Empat ungkapan metafor di atas mengandung makna bahwa institusi sosial *dongan sabutuha* merupakan kesatuan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan mereka merasa satu perasaan, satu penderitaan dan satu kebahagiaan, sepenanggungan, saling tolong menolong satu sama lain. Kelompok dalihan *dongan tubu* atau semarga diisyaratkan agar marbagi di na otik, mardua di na godang (berbagi yang sedikit, berbagi yang banyak); sada songon daini aek, unang mardua songon daini tuak (harus bersatu seperti rasa air, jangan berbeda seperti rasa tuak). Dalam pepatah melayu dikatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Untuk itu di antara anggota *dalihan dongan tubu* atau *dongan sabutuha* atau *semarga* dituntut untuk saling membina rasa solidaritas primordial yang positif.⁴⁶ Di antara orang semarga tidak baik kalau terjadi pertengkaran atau konflik atau perselisihan (metafor 2), di antara mereka harus sama-sama bahagia dan gembira, sama-sama makmur dan sejahtera (metafor 3), dan di antara mereka harus satu niat satu tujuan.

Hula-hula: Elek Marboru

Pihak hula-hula atau pemberi isteri harus *elek marboru* atau membujuk/mempengaruhi supaya mau turut kepada marga pengambil isteri. *Elek* mengandung makna sikap dan perilaku sayang tanpa pamrih, membujuk, perhatian, menghibur, merangkul, memuji, menyenangkan, dan yang terpenting adalah memanjakan dan tidak menyakiti hatinya. Kepada orang yang kita sayangi, kita harus berbuat “yang terbaik” agar ia senang. Sebab jika *boru* telah *somba marhulahula*, tetapi *hulahula* tidak *elek* terhadap *borunya*, maka kewibawaan *hulahula* menjadi hilang, *hulahula* tidak lagi menjadi pancaran *pangalapan pasu-pasu* atau tempat meminta berkat dan *pangalapan tua* atau tempat meminta tuah/keberuntungan dan bukan lagi menjadi *mata ni ari so suharon* atau orang yang pantas dihormati⁴⁷. Secara fungsional kedudukan *hula-hula* digambarkan dalam perumpamaan antara lain:⁴⁸

1. *Hulahula bona ni ari, tinongos ni Ompunta Mulajadi,
Sisubuton marulak noli, si sombaon di rim ni tahi.
Hula-hula sumber dari matahari diutus oleh Debata
Dihormati berulang kali disembah dengan setulus hati.*
2. *Mangula ma pangula laos dipasae duhut-duhut
Pasu-pasu ni hulahula padao mara marsundut-sundut.
Menggaraplah penggarap sambil dibersihkan rumput-rumput
Berkat dari hula-hula menjauhkan bahaya turun-temurun*

Ungkapan metafora 1 dan 2 di atas menunjukkan, bahwa secara fungsional institusi kerabat *hulahula* ibarat cahaya matahari yang diutus oleh *Debata* melalui kekuatan *tondi* (roh) yang ia miliki memberi berkat kepada pihak *borunya*. Ada dua kemungkinan pihak hula-hula menunjukkan sikap *elek* kepada *borunya* yaitu karena telah disomba oleh *boru* dan telah menjadi kaya atau dengan harapan agar disomba atau mendapat kekayaan. Yang manapun sebagai penyebab, berkat diterima oleh *boru* jika mereka sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus menunjukkan hormat kepada hula-hula sebagai pemberi berkat.

Boru: Somba Marhulahula

Pihak *boru* atau pengambil isteri harus *somba marhulahula* atau *somba* kepada marga pemberi isteri. *Somba* atau sembah berarti hormat, sujud, loyal, sopan, patuh. Sikap ini merupakan padanan perlakuan sayang atau kasih yang senantiasa ditunjukkan oleh *hulahula* kepada *borunya*. *Somba* akan membawa berkat berupa kesejahteraan dan keselamatan (panggabeian dan parhorason). Jika tidak *somba* akan membawa petaka, tidak mendapat berkat dan pahala. Sebab *hulahula* merupakan *pangalapan pasu-pasu pangalapan tua* (sumber pahala dan sumber berkat). Dalam masyarakat DNT, status *hulahula* merupakan status

terhormat ibarat *mata ni ari so suharon* (matahari yang tidak bisa dibalikkan).⁴⁹ Secara fungsional kedudukan *boru* dalam suatu *horja* tampak dalam perumpamaan berikut:

1. *Siporsan na dokdok,*
Sialap na dao na so mabiar di ari golap
Penanggung yang berat,
Pengambil yang jauh yang tidak takut pada hari gelap.
2. *Siboan indahan na sora bari,*
Siboan tuak na sora mansom.
Pembawa nasi yang tidak akan basi,
pembawa tuak yang tidak akan masem.

Ungkapan metafora atau kiasan 1 dan 2 menyiratkan bahwa secara fungsional institusi *boru* bertugas untuk melakukan berbagai pekerjaan bagi *hulahula* yang nantinya ia akan mendoatkan “imbalan” berupa berkat yang diberikan oleh *hulahula* yang merupakan berkat dan karunia dari *Debata Mulajadi Na Bolon* kepada *boru*. Ada dua kemungkinan pihak *boru* somba kepada hula-hula yaitu karena hula-hula telah menunjukkan sikap elek atau telah mendapat berkat atau dengan harapan untuk dielek atau mendapat berkat. Yang manapun sebagai sebab, sudah pasti bahwa kewibawaan *hulahula* secara fungsional tergantung pada sejauhmana pihak *boru* menunjukkan sikap dan perilaku *somba* kepadanya. Lebih dari itu, *hulahula* harus menjadikan *boru* sebagai *ianakhon* (anak laki-laki termasuk perempuan) sebagai *parhata siat* (orang yang kata-katanya diterima). Seandainya *hulahula* bersikeras menolak usul yang benar dari *borunya*, maka *tondi* dari *boru* bisa merugikan *hula-hula*. Kepercayaan adalah kejujuran dan keadilan *boru* diperkuat oleh pengetahuan bahwa ia sudah tentu tidak memihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi. Jika dihadapkan pada soal-soal yang berkaitan dengan *hulahulanya*, maka *boru* hanya berkepentingan untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan.⁵⁰

Jadi, makna *manat*, *somba*, *elek* (MSE) dalam budaya kekerabatan Batak Toba tradisional secara fungsional menunjukkan hubungan dan interaksi resiprositas seimbang untuk mewujudkan harmoni kehidupan bermasyarakat⁵¹. Itu karena struktur sosial dalam budaya kekerabatan Batak Toba bermakna berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kemudian luaran dari sikap/perilaku *manat*, *somba* dan *elek* adalah *sangap*, *gabe* dan *mora*. Luaran dari *manat* adalah *sangap*, luaran dari *somba* adalah *gabe* dan luaran dari *elek* adalah *mora*. *Gabe*, *mora* dan *sangap* adalah tujuan hidup dari masyarakat tradisional Batak Toba. Dalam ungkapan Batak Toba disebut:

Molo naeng sangap, manat mardongan tubu
Molo naeng gabe, somba marhulahula
Molo naeng mora, elek marboru.

Jika ingin kehormatan dan kemuliaan, rukun bersaudara semarga

Jika ingin banyak keturunan, hormat kepada hulahula.

Jika ingin kaya, sayang kepada *boru*.

Atau

Na manat mardongan tubu, sangap ma

Na somba marhulahula, gabe ma

Na elek marboru, mora ma

Yang rukun bersaudara, mulialah

Yang hormat kepada hulahula, berketurunanlah

Yang sayang kepada boru, makmurlah.

Ungkapan metafora di atas menunjukkan ada tiga nilai penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba tradisional yang diringkas menjadi *gabe*, *mora*, *sangap*. Ketiganya menjadi tujuan hidup dari masyarakat pada saat itu. Ketiganya juga menunjukkan kesetaraan sehingga menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan. *Gabe* tidak berarti kalau tidak *mora* dan *sangap*; *mora* tidak berarti kalau tidak *gabe* dan *sangap*; dan *sangap* tidak berarti kalau tidak *gabe* dan *mora*. Jadi, orang yang sempurna yang dikaruniai oleh Debata dalam masyarakat Batak Toba tradisional ialah *na gabe*, *na mora*, *na sangap*.

Hagabeon, secara tradisional, merupakan tujuan hidup masyarakat Batak. *Hagabeon* lebih bermakna sebagai orang yang memiliki banyak anak atau keturunan, banyak saudara, banyak keluarga dan panjang umur. Karena itu sangat wajar jika kepada pengantin selalu diungkapkan perumpamaan “*bintang na rumiris ombun na sumorop, anak pe riris dohot boru pe torop*”, atau “*maranak sampulu pitu marboru sampulu onom*”.

Hamoraon atau kekayaan dan makmur menunjukkan bahwa seseorang memiliki harta berupa ladang yang luas dan ternak yang banyak. Karena itu kepada pengantin selalu diungkapkan nilai budaya perumpamaan “*sai tubu ma dihamu anak na pistra dohot boru namora*”.

Hasangapon, juga menjadi tujuan hidup yang tidak lain merupakan kepemilikan kewibawan dan kemampuan untuk dihormati. *Hasangapon* ini diperoleh melalui pemilikan jabatan atau pekerjaan, baik di harajaon huta, horja atau bus dan jabatan di parbaringin. Bahkan di jaman modern ini, orang berlomba-lomba untuk merebut jabatan resmi di pemerintahan dan bahkan juga jabatan di gereja yang dianggap akan mendatangkan atau menambahkan *hasangapon*. Untuk memperoleh atau menambah *hasangapon* itulah sering memaksa orang untuk ikut dalam perebutan kepemimpinan atau perebutan pengikut, sehingga pejabat Belanda di Tapanuli menuduh orang Batak Toba gila kekuasaan⁵². Orang yang banyak pengikutnya menandakan orang tersebut memiliki *hasangapon* di mata yang mengikutinya.

Berdasarkan kerohanian dan budaya kekerabatan Dalihan Na Tolu mensyaratkan kalau ingin *gabe* maka harus *somba marhulahula*, kalau ingin *sangap* maka harus *manat mardongan tubu*, dan kalau ingin *mora* maka harus *elek marboru*. Dengan kata lain, orang Batak percaya kalau *somba marhulahula* akan mendapatkan *hagabeon*, kalau *manat mardongan tubu* akan mendapatkan *hasangapon*, dan kalau *elek marboru* akan mendapatkan *hamoraon*.

Gabe, *sangap*, dan *mora* sangat penting karena menjadi tujuan hidup bagi masyarakat Batak Toba, sama halnya dengan MSE juga penting dalam perilaku hidup dan interaksi sosial bagi masyarakat Batak Toba tradisional. *Hagabeon* (banyak keturunan dan sehat), *hasangapon* (kemuliaan) dan *hamoraon* (kesejahteraan, kekayaan) yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa ia memiliki *sahala* dan itu akan membuatnya memiliki *harajaon* (kekuasaan). Ini menggambarkan kualitas hidup seseorang yang memiliki *sahala*. Jika ternyata seseorang tidak *gabe*, tidak *sangap* dan tidak *mora* berarti *sahala* tidak ada padanya atau dari *gabe* berubah menjadi tidak *gabe*, dari *sangap* berubah menjadi tidak *sangap* dan dari *mora* berubah menjadi tidak *mora* berarti *sahala* yang tadinya ada padanya telah meninggalkannya. Orang yang tidak bersahala tentu tidak pantas menjadi raja. Jadi, *sahala* dapat hadir dalam diri seseorang, raja misalnya, tetapi juga dapat pudar atau hilang.

Keseimbangan di antara dalihan dongan sabutuha sangat jelas yaitu bahwa antara mereka harus menunjukkan sikap/perilaku manat. Sementara keseimbangan dan kesejajaran fungsional antara hula-hula dan boru juga jelas yaitu antara *elek* dan *somba*. Nilai *elek* dibayar dengan nilai *somba*, atau sebaliknya. Keseimbangan antara *hula-hula* dan *boru* tampak dalam perumpamaan berikut:

Ia tambur bonana rugun ma dohot punsuna;

Ia gabe maradophon hulahulana songoni ma maradophon boruna.

Kalau subur pohonnya rindanglah dengan pucuknya

Kalau berketurunan atas hulahulanya begitu juga terhadap *borunya*.

Hubungan antara Budaya Kerohanian Agama dan Budaya Kekerabatan Adat

Pedersen mengatakan ada hubungan antara kebudayaan rohani (agama) dan kebudayaan kemasyarakatan (adat dan kekerabatan)⁵³. Sementara Niessen mengatakan bahwa sistem kekerabatan (*kinship system*) Batak Toba memiliki dimensi spiritual (*spiritual dimension*)⁵⁴. Seluruh sistem kekerabatan dan hubungan sosial berkaitan dengan kepercayaan asli masyarakat Batak⁵⁵. Menurut Togar Nainggolan sering sulit untuk membuat pemisahan yang jelas antara pengertian “adat” dan “religi”.

Menurut isinya mereka mempunyai kesatuan yang sangat erat. Dari satu sisi sebagai tradisi nenek moyang, adat mempunyai sifat religius yang kuat. Dari sisi lain, religi etnis mendapat bentuk konkrit justru di dalam adat. Yang satu tidak dapat tanpa yang lain. Keduanya saling mengandaikan. Karena itu dalam konteks ini saya memakai term religi etnis, religi-adat atau religi tradisional secara bergantian. Memang adat lebih daripada hanya sebagai pengungkapan religius. Adat mempunyai fungsi kultural dan sosial⁵⁶.

Tetapi Raja Patik Tampubolon membuat pembedaan antara agama (budaya kerohanian) dan adat (budaya kekerabatan) dengan mengatakan:

Rap jadi hangoluan do, hangoluan do adat di na mangulahon adat, hangoluan do agama di na mangulahon agama (adat-ugari). Ia adat, hangoluan na tinanda dohot na tarida do i, na tedak torus torang, alai anggo agama hangoluan di banua ginjang do i sisaleleng ni lelengna didok agama Kristen ... Adat ima ngolu na di tano on, hangoluan ni jolma na marhajolmaon, lapatanna molo so marhajolmaon be, ndang mangolu tano on be, jadi na mate nama i. Agama ima ngolu banua ginjang di surgo manang di akhirat, ima ngolu ni tondi, sahala dohot simangot na mangolu saleleng ni lelengna. Artina, hahomion dope i, na songon nipi manang anggan-anggan ni roha⁵⁷.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa adat adalah kehidupan bagi yang melakukan adat, agama adalah kehidupan bagi yang melakukan agama. Adat merupakan kehidupan yang dikenal dan kelihatan, terang benderang, tetapi agama merupakan kehidupan di benua atas (surga) selama-lamanya. Adat ialah hidup yang ada di dunia, kehidupan manusia yang berkemanusiaan. Artinya, kalau tidak berkemanusiaan lagi, bukan hidup namanya, itu sama dengan mati. Agama ialah hidup di benua atas di surga. Itulah hidup dari roh yang hidup selama-lamanya.

Berdasarkan budaya kerohanian agama yang mereka anut, masyarakat Batak Toba tradisional percaya bahwa pertama, makrokosmos (alam semesta atau jagat raya) terdiri dari tiga *banua*, yaitu *banua ginjang*, *banua tonga* dan *banua toru*. Ketiganya disebut *banua na tolu*. Kedua, ada satu *Debata* yang mereka sembah yaitu *Debata Mulajadi Na Bolon*. Ketiga, ada tiga diri *Debata*, yaitu Batara Guru, Soripada dan Mangalabulan. Mereka disebut *Debata Na Tolu*. Kempat, tiap dunia dijaga dan diatur oleh seorang *Debata*. Masyarakat setempat mengatakan *sada Debata di ginjang*, *sada Debata di tonga*, *sada Debata di toru*. Batara Guru menjaga dan mengatur banua ginjang, Soripada menjaga dan mengatur banua tonga, dan Mangalabulan menjaga dan mengatur banua toru.

Budaya kerohanian agama tersebut dimanifestasikan dalam budaya kekerabatan adat. Pertama, makrokosmos direfleksikan dalam mikrokosmos. Makrokosmos atau alam semesta direfleksikan dalam mikrokosmos atau kemasyarakatan. Kedua, struktur makrokosmos atau jagat raya yang terdiri atas *banua ginjang*, *banua tonga* dan *banua toru* yang disebut sebagai *Banua Na Tolu* direfleksikan dalam struktur mikrokosmos atau masyarakat yang terdiri atas

dongan sabutuha, *hula-hula* dan *boru* yang disebut *Dalihan Na Tolu*. *Banua ginjang* dihadirkan oleh *hula-hula*, *banua tonga* dihadirkan oleh *dongan tubu* dan *banua toru* dihadirkan oleh *boru* (Tabel 4.2).

Tabel 4.2: Refleksi struktur makrokosmos dalam mikrokosmos

<i>Budaya Kerohanian: Struktur Makrokosmos (Banua)</i>	<i>Budaya Kekeabatan: Struktur Mikrokosmos (Masyarakat DNT)</i>
Banua Ginjang	Hulahula
Banua Tonga	Dongan Tubu
Banua Toru	Boru

Ketiga, penjaga dan pengatur jagat raya yaitu Batara Guru, Soripada dan Mangalabulan direfleksikan dalam penjaga dan pengatur masyarakat Dalihan Na Tolu yaitu *Raja Ni Dongan Tubu*, *Raja Ni Hula-hula*, *Raja Ni Boru*⁵⁸ yang disebut *Raja Dalihan Na Tolu* (Tabel 4.3). Batara Guru dihadirkan oleh *raja ni hulahula*,

Tabel 4.3: Refleksi pengatur makrokosmos dalam mikrokosmos

<i>Budaya Kerohanian: Penjaga Makrokosmos (Banua)</i>	<i>Budaya Kekeabatan: Penjaga Mikrokosmos (Masyarakat)</i>
Debata Batara Guru	Raja Ni Hulahula
Debata Sori Pada	Raja Ni Dongan Tubu
Debata Mangala Bulan	Raja Ni Boru

Soripada oleh *raja ni dongan sabutuha*, dan Mangalabulan oleh *raja ni boru*. Jadi, *hulahula*, *dongan sabutuha* dan *boru* tidak dapat dipisahkan hubungan-pergantungannya dengan *Banua Na Tolu*, sedangkan *raja ni hulahula*, Soripada oleh *raja ni dongansabutuha*, dan Mangalabulan oleh *raja ni boru* tidak dapat dipisahkan hubungan-pergantungannya dengan *Debata Na Tolu*.⁵⁹ Konsep atau makna tiga dimensi atau tiga dalam satu (*three in One*) teraplikasi juga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Batak Toba tradisional (Tabel 4.4)⁶⁰:

- Struktur alam semesta: Banua Ginjang, Banua Tonga, banua Toru (disebut *Banua Na Tolu*).
- Penghuni alam semesta: Debata, Jolma, Begu.
- Penjaga Dunia: Batara Guru, Soripada, Mangalabulan (disebut *Debata Na Tolu*).
- Struktur Masyarakat: *Hulahula*, *Sabutuha*, *Boru*. (disebut *Dalihan Na Tolu*).
- Pengatur Masyarakat: *Raja Ni Hulahula*, *Raja Ni Dongan Tubu*, *Raja Ni Boru* (disebut *Raja Na Tolu*).
- Sikap/perilaku bermasyarakat: *Somba*, *Manat*, *Elek*.

Tabel 4.4 Tiga dalam satu (tri tunggal) dalam kehidupan Batak Toba Tradisional

DIMENSI	UNSUR	
<ul style="list-style-type: none"> • Struktur alam semesta (Banua na tolu) • Penghuni alam semesta • Penjaga Dunia (Debata na tolu) • Struktur Masyarakat (Dalihan na Tolu) • Pengatur Masyarakat (Raja na tolu) • Sikap/perilaku bermasyarakat • Struktur kerajaan (harajaon na tolu) • Pengatur kerajaan (Raja na tolu) • Aktor dalam kerajaan (harajaon) • UNSUR HIDUP • KEKUATAN HIDUP • SIKLUS HIDUP • Kelompok MARGA • Bagian RUMAH • Jenis WARNA. • PEGANGAN HIDUP • TUJUAN HIDUP • Dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Banua Ginjang, • Debata • Batara Guru, • <i>Hulahula</i>, • Raja Ni <i>Hulahula</i>, • <i>Somba</i> • Bius • Raja Bius • Raja • <i>Hosa</i> (Nyawa) • <i>Sahala</i> (Jiwa) • Lahir • Lontung • Para (bagian atas) • Hitam • Agama • <i>sanggap</i> (mulia), • Dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Banua Tonga • Jolma • Soripada • <i>Sabutuha</i> • <i>Raja Ni Dongan Tubu</i> • <i>Manat</i> • Horja • Raja Horja • Aparat • <i>Sibuk</i> (Daging), • <i>Tondi</i> (Roh) • Hidup • Sumba • Tonga (bagian tengah) • Merah • Adat • <i>Gabe</i> (banyak anak) • Dll.
	<ul style="list-style-type: none"> • Banua Toru • Begu. • Mangalabulan • <i>Boru</i>. • <i>Raja Ni Boru</i> • <i>Elek</i>. • Huta • Raja Huta • Warga. • <i>Mudar</i> (Darah). • <i>Daging</i> (Badan). • Mati. • Borbor. • Bara (bagian bawah). • Putih. • Ekonomi. • <i>mora</i> (kaya), Dll. 	

- Struktur kerajaan: Bius, Horja, Huta (disebut Harajaon Na Tolu)
- Pengatur kerajaan: Raja Bius, Raja Horja, Raja Huta (disebut Raja Na tolu).
- Aktor dalam kerajaan (harajaon): Raja, Aparat, Warga.
- UNSUR HIDUP: *Hosa* (Nyawa), *Sibuk* (Daging), *Mudar* (Darah).
- KEKUATAN HIDUP: *Sahala* (Jiwa), *Tondi* (Roh), *Daging* (Badan).
- SIKLUS HIDUP: Lahir, Hidup, Mati.
- Kelompok MARGA: Lontung, Sumba, Borbor.
- Bagian RUMAH: Para (bagian atas), Tonga (bagian tengah), Bara/Tombara (bagian bawah).
- WARNA Bonang Manalu: Hitam, Merah, Putih.
- PEGANGAN HIDUP: Agama, Adat, Ekonomi.
- TUJUAN HIDUP: *gabe* (banyak anak dan sehat), *mora* (kaya), *sangap* (mulia),
• Dll.

Sementara itu totalitas masyarakat DNT sebagai landasan kehidupan kemasyarakatan merupakan gambaran dari totalitas makrokosmos dan pengaturnya menurut kepercayaan masyarakat Batak. Pemikiran totalitas tersebut juga menyangkut hubungan antara *Debata* sebagai makrokosmos dan manusia sebagai mikrokosmos. Hubungan antara makrokosmos atau alam semesta dengan mikrokosmos atau masyarakat bersifat totalitas. Hubungan antara dunia atas, tengah dan bawah adalah hubungan fungsional sehingga menghasilkan harmonisasi. Peniadaan salah satu dunia akan menghancurkan dunia lain serta seluruh eksistensinya. Dengan demikian terdapat kesatuan tanggungjawab dan keterikatan antara makro dan mikrokosmos atau antara kosmos, masyarakat dan individu sehingga setiap orang adalah bagian dari yang lain yang secara fungsional tak terpisahkan⁶¹.

Sebagai representasi dari makrokosmos serta simbolisasi kultural dari tungku maka makna unsur *dongan sabutuha*, *hulahula* dan *boru* merupakan tritunggal yang mempunyai hubungan sejajar, hubungan resiprositas sehingga yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain⁶². Jadi, tidak mengandung kebenaran kultural dan merupakan pemikiran yang keliru atau perkeliruan dan menyesatkan secara kultural jika dikatakan bahwa hula-hula memiliki posisi lebih tinggi dari boru, seperti banyak ditemukan dalam buku-buku tentang Batak, baik yang ditulis oleh masyarakat Batak sendiri maupun oleh orang asing⁶³.

Dalihan Na Tolu menunjukkan posisi berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah. Pertama, susunan masyarakat Batak Toba tradisional lebih memperlihatkan pelapisan sosial, bukan stratifikasi sosial (*social stratification*). Oleh sebab itu hubungan antara dalihan lebih menunjukkan hubungan fungsional, bukan hubungan hirarkhikal. Kedua, dalam perspektif budaya kerohanian, Batara Guru dihadirkan oleh *hulahula*, Soripada oleh *dongan tubu*, dan Mangalabulan oleh *boru*. Karena ketiga *Debata* yang mengatur alam semesta tersebut pun kedudukannya yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain maka kedudukan dari

tiga unsur DNT juga yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Ini sesuai dengan hakekat *dalihan na tolu* atau tungku yang tiga. Tidak mungkin ada kaki tungku yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan sama tinggi dan sama rendah. Jika kaki tungku yang satu lebih tinggi dan yang lain lebih rendah, maka alat masak yang ada di atasnya tidak akan dapat berdiam dengan pasti alias pasti goyang. Tetapi jika sama tinggi, maka tempat masak akan berdiri kokoh. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan dan adat istiadat. Ego harus ditopang oleh tiga kaki tungku, ialah hula-hula, dongan sabutuha dan boru sehingga ia berdiri kokoh.

Nilai yang dianut juga memiliki harga yang sama. Somba tidak lebih dari elek atau manat. Elek tidak kurang dari somba dan manat. Somba, elek dan manat memiliki nilai atau harga yang sama dalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya dengan gabe hasil dari somba, mora sebagai hasil dari elek dan sangap sebagai hasil dari manat.

Jadi, ketiga unsur DNT dan nilai perilaku yang semestinya dihadirkan memiliki keseimbangan yang bersifat mutlak, satu unsur didukung atau ditopang oleh dua unsur lain. Tanpa satu unsur tidak ada unsur lain dan adanya sesuatu karena adanya yang lain. Masing-masing mewujudkan diri ke dalam suatu kesatuan. Dalam kehidupan kemasyarakatan ketiga dalihan bermakna kerjasama seimbang, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, dan saling menghormati. Masing-masing memiliki posisi sosial yang sama dan sederajat, meskipun melaksanakan fungsi sosial yang berbeda. Karena itu tiga unsur DNT menciptakan harmoni kehidupan kemasyarakatan yang menghasilkan tertib sosial (*social order*) dalam hubungan-hubungan sosial (*social relations*).⁶⁴ DNT merupakan konsep eksistensi masyarakat, merupakan harmoni masyarakat, merupakan kesatuan yang menjamin kelangsungan masyarakat.⁶⁵

Seperti halnya dalam budaya kerohanian agama, kedamaian makrokosmos terjamin hanya bila ada harmoni antara tiga dunia melalui kerjasama yang baik dari Debata Na Tolu. Harmoni dalam mikrokosmos juga akan terjamin jika ada harmoni antara tiga dalihan melalui kerjasama yang baik dari Raja Dalihan Na Tolu. Mereka bekerjasama dan bersatu untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam tiap kegiatan kehidupan kemasyarakatan. Raja Dalihan Na Tolu yaitu raja ni hula-hula, raja ni dongan tubu dan raja ni boru bekerjasama dalam tiap kegiatan yang melibatkan masyarakat Dalihan Na Tolu. Jadi, seperti *Debata* sebagai simbol harmoni dalam makrokosmos, maka Raja dalam mikrokosmos atau dunia kemasyarakatan adalah juga menjadi simbol harmoni.

Dalam kepercayaan kosmos-magis atau kosmos-religius Batak Toba-tua ini kemudian menimbulkan kepercayaan bahwa kedudukan raja dalam mikrokosmos sama dengan kedudukan *Debata* dalam makrokosmos. *Debata* yang mengatur makrokosmos dalam budaya kerohanian Batak Toba direpresentasikan

oleh kehadiran raja yang juga berfungsi mengatur mikrokosmos atau dunia manusia dalam budaya kekerabatan. Jika *Debata* menjaga keseimbangan makrokosmos, maka raja, mewakili *Debata*, menjaga keseimbangan mikrokosmos. Berdasarkan budaya kerohaniannya, maka masyarakat Batak Toba tradisional percaya bahwa raja dianggap mempunyai kekuatan magis untuk memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi semua rakyatnya. Ini yang disebut oleh Heine Geldern sebagai kepercayaan *divine kingship* atau Dewa-Raja. Konsep “dewa-raja” (*god-kings*) ini dilukiskan dalam suatu kepercayaan, bahwa raja dianggap sebagai titisan *Debata*. Penitisan *Debata* dalam diri seseorang untuk menjadi raja dapat melalui jalan pemberian *sahala harajaon*. Konsep ini, menurut Clifford Geertz, merupakan satu ide politik yang dapat mengatur perilaku dan institusi sosial politik⁶⁶.

Seperti totalitas makrokosmos dalam kebudayaan kerohanian, maka ciri yang menonjol dalam kekerabatan DNT adalah sifatnya yang total yang tidak dapat dipandang secara terpisah antara *hulahula*, *dongan sabutuha*, dan *boru* sebagai unsur yang membentuknya⁶⁷. Perilaku dan hubungan sosial di antara ketiganya didasarkan atas falsafah MSE. Dongan tubu harus *manat* kepada dongan tubu, hula-hula harus *elek* kepada boru, dan boru harus *somba* kepada hula-hula. Falsafah MSE dalam hubungan sosial menunjukkan keselarasan, keseimbangan, kerukunan. Ketiganya menempati posisi sentral dalam budaya kekerabatan adat Batak Toba. Ibarat tungku, jika salah satu tungku lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain akan menciptakan ketidakseimbangan tungku.

Itu menunjukkan bahwa falsafah MSE pada hakekatnya menunjukkan falsafah harmoni. Ini merupakan nilai ideologi kekerabatan dalam birokrasi tradisional yang ketika menjalankan fungsi dan tugasnya, setiap birokrat harus menunjukkan sikap *somba* kepada atasan, *manat* terhadap sesama birokrat dan *elek* terhadap warga. Jadi, nilai DNT sebagai jaringan kekerabatan mengajarkan hak dan kewajiban yang setara di antara ketiga unsur. Untuk itu harus dibangun kesetaraan dan kesejajaran nilai MSE untuk menciptakan harmoni dalam hidup bermasyarakat. Jika sikap yang satu dianggap sehingga diperlakukan dalam tinakan sebagai lebih tinggi atau lebih rendah, maka akan terjadi disharmoni atau tidak ada keseimbangan.

Jadi, ada kesejajaran antara budaya kerohanian dan budaya kekerabatan, kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, kesejajaran antara jagat raya dan dunia manusia atau kemasyarakatan. Pengertian pokok tentang kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara jagat raya dan dunia manusia menurut Heine Geldern melahirkan suatu kepercayaan kosmos-magis atau kosmos-religius, itu sebagai gambaran jagat raya lebih kecil. Dalam kaitannya dengan kepercayaan kosmos-religius masyarakat Batak Toba tradisional, Gunung

Pusuk Buhit dianggap sebagai tempat bersemayam para *Debata* dan sekaligus sebagai pusat kekuatan dan kesucian.

Transformasi Budaya ke Ideologi

Laswel dan Kaplan mengatakan bahwa ideologi adalah suatu *political myth*, mitos politik yang fungsinya untuk memelihara struktur sosial. Unsur ideologi atau mitos politik yang menggambarkan dan menentukan rincian suatu struktur sosial ialah *political doctrine*, doktrin politik atau *political formula*, formula politik. Laswell dan Kaplan menyatakan bahwa pada masyarakat yang mempunyai struktur sosial yang stabil maka ideologi hanya merupakan konsensus sosial bukan merupakan rangkaian gagasan. Pertentangan sosial hanya akan terjadi bila terdapat ketidaksetujuan dalam aplikasi prinsip-prinsip ideologi terhadap kasus-kasus tertentu⁶⁸.

Dalam masyarakat tradisional, nilai-nilai budaya dasar dijadikan sebagai ideologi birokrasi (*bureaucratic ideology*). Kebudayaan dan berbagai aspek dan tatacara kehidupan yang terkait dengannya menjadi dasar dalam membentuk nilai-nilai ideologi. Nilai-nilai tradisi diangkat ke tingkat ideologi. Terjadi artikulasi dari nilai-nilai dasar budaya dalam kehidupan dan praktek birokrasi. Joel S. Kahn mengatakan bahwa *every vew of "reality" is the product of a cultural code*.⁶⁹ Menjadikan nilai-nilai budaya masyarakat tradisional setempat sebagai nilai-nilai dasar dari birokrasinya merupakan proses ideologisasi birokrasi. Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer mengatakan,

Ideologi-ideologi birokratis adalah nilai-nilai yang dihayati bersama yang mengidentifikasi seluruh anggota dengan ketentuan tradisional dalam suatu organisasi. Konsekuensi dari identifikasi ideologis ini, kritik terhadap ketentuan yang ada bisa dipertanyakan kepada anggota-anggota yang pekerjaannya tidak terlibat secara langsung juga mereka yang pekerjaannya di pengaruhi. Lebih jauh, ideologi-ideologi umum mengidentifikasi individu-individu yang menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan cara-cara tradisional sehingga segala tindakannya dianggap sebagai penyimpangan, individu-individu yang gagal menghayati nilai-nilai umum yang berlaku yang menyebabkan mereka tidak dihormati⁷⁰.

Tatanan yang menjadi unsur pembentuk ideologi birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional utamanya adalah kerohanian (keagamaan atau kepercayaan) dan kekerabatan (adat istiadat)⁷¹. Dengan demikian, nilai-nilai budaya masyarakat Batak Toba tradisional (juga disebut Batak Toba-Tua) yang membentuk ideologi birokrasi tradisional berakar kuat pada budaya kerohanian dan budaya kekerabatan. Budaya kerohanian dan budaya kekerabatan⁷² dan berbagai aspek dan tatacara kehidupan yang terkait dengannya menjadi dasar dalam membentuk nilai-nilai ideologi birokrasi dalam masyarakat Batak Toba

tradisional. Budaya kerohanian membentuk ideologi kerohanian (*the ideology of religion*) dan budaya kekerabatan membentuk ideologi kekerabatan (*the ideology of kinship*)⁷³. Ideologi-ideologi birokratis yang terbentuk dari budaya kerohanian dan kekerabatan menciptakan komitmen-komitmen masyarakat yang menguntungkan organisasi birokrasi⁷⁴. Meskipun demikian Blau dan Meyer mengatakan,

Meski ideologi-ideologi birokratis menciptakan komitmen-komitmen yang menguntungkan organisasi, ia secara simultan cenderung menekan pandangan-pandangan kritis yang sangat penting bagi vitalitas organisasi. Jika kecenderungan ini tidak diperhatikan akan terbentuk osifikasi (pengerasan) dan menghasilkan stereotipe birokrasi yang tidak efisien. Kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencegah agar tidak terjadi kekakuan birokratis, yang mudah dirumuskan secara teoritis tapi sangat sulit dipertahankan dalam praktik sehari-hari, adalah penilaian kritis secara kontinyu tentang semua ketentuan yang ada dari berbagai perspektif yang luas dan kesiapan memperhatikan kritik-kritik ini secara serius dan melakukan modifikasi-modifikasi yang diperlukan⁷⁵.

Transformasi Budaya Kerohanian ke Ideologi Kerohanian

Parson mengatakan bahwa ideologi adalah suatu sistem kepercayaan dan gagasan yang di dalamnya mengandung upaya tafsiran terhadap kolektivitas dan kenyataan yang dihadapi⁷⁶. Ini berarti bahwa sistem kepercayaan yang tampak dalam budaya kerohanian agama membentuk ideologi. Ideologi yang terbentuk dari sistem kepercayaan atau kerohanian agama adalah ideologi kerohanian. Dengan demikian ideologi birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional berakar kuat pada budaya kerohanian. Dalam praktek, terjadi proses transformasi budaya kerohanian agama dalam ideologi birokrasi. Oleh karena itu seperti dalam kebanyakan masyarakat tradisional, maka dalam masyarakat Batak Toba tradisional, agama merupakan ideologi politik, sehingga tidak dapat dilakukan pembedaan antara agama dan politik⁷⁷. Menurut Richard T. La Pierre, ideologi kepercayaan agama dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan stabilitas sosial yang mantap⁷⁸.

Hubungan antara ideologi dan kepercayaan terlihat dari adanya aksi saling pengaruh di antara keduanya. Kepercayaan-kepercayaan kadang kala menyumbang pembangunan ideologi, tetapi sebagai objek suatu kepentingan yang penting, sistem kepercayaan tidak membentuk ideologi. Kepercayaan hanya menjadi suatu instrumen pada suatu kepentingan tertentu, misalnya, untuk memenangkan suatu perjuangan⁷⁹. Budaya kerohanian menentukan kesadaran kolektif masyarakat Batak Toba tradisional tentang dunia dan alam semesta yang kosmosentris. Kesadaran kolektif masyarakat Batak Toba tradisional tentang

dunia dan alam semesta yang kosmo-sentris ini pada akhirnya sangat menentukan gambaran mereka tentang ruang, waktu dan masyarakat.

Ideologi kerohanian (agama) sangat jelas tampak dan mewarnai kehidupan birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional. Menurut kepercayaan kosmos-religius masyarakat Batak Toba tradisional, birokrasi dan unsur-unsurnya merupakan totalitas untuk menciptakan harmoni dalam birokrasi.

Model kognitif birokrasi yang bersumber dari birokrasi tradisional mengutamakan terwujudnya keharmonisan struktur dan hirarkhis yang pada hakekatnya mencerminkan pandangan kosmologis, bahwa eksistensinya berada dalam jagad yang utuh dan berjenjang-jenjang seperti keharmonisan dalam makrokosmos dan mikrokosmos. Untuk memelihara harmoni tadi maka mereka mengandalkan pada loyalitas dan keselarasan dan keseimbangan yang tercermin dalam konsep rukun⁸⁰. Berdasarkan model kognitif tersebut maka birokrasi tradisional, karena itu cenderung menabukan konflik baik antar unit terutama antara birokrat dan rakyat.

Kedamaian alam semesta terjamin, hanya jika ada kerjasama yang baik antara ketiga dunia dan pengaturnya. Demikian juga dalam dunia birokrasi, totalitas dan harmoni struktur teritorial birokrasi tradisional (huta, horja dan bius) sangat tergantung dari totalitas dan harmoni dari raja yang mengaturnya. Secara teritorial, raja huta, raja horja dan raja bius bersatu untuk menciptakan harmoni birokrasi. Totalitas ketiga raja ada pada diri Raja Singamangaraja. Karena itu Raja Singamangaraja merupakan harmoni dan sekaligus kesatuan dari tiga unsur yang berbeda yang *mengatur* tiga kerajaan tradisional tersebut.

Raja, aparatur dan warga sebagai tiga aktor dalam pemerintahan Batak-Toba tradisional juga menciptakan harmoni. Baik raja, aparat dan warga menjalankan tugas pokok dan fungsi serta hak dan kewajibannya masing-masing karena mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan tidak lepas dari kuasa *Debata*. Masyarakat Batak Toba tradisional termasuk raja, aparat dan warga percaya bahwa *Debata* selalu ada dan menyertai umat manusia. Dalam satu ungkapan disebut: "*Disi sirungguk disi sitata, disi hita hundul disi ompunta Debata* (disitu sirungguk di situ sitata, disitu kita duduk di situ ada *Debata*). Karena itu masyarakat Batak Toba tradisional dalam melakukan kegiatan dan tindakan selalu diawali oleh *tonggo*⁸¹ (doa) kepada *Debata* untuk mendapat bimbingan dan perlindungan. Jika kebijakan dan aturan gagal itu berarti kebijakan dan aturan tersebut tidak direstui oleh *Debata*. Jika raja, aparat dan warga melakukan tindakan merugikan, maka ia akan mendapat hukuman dari *Debata*.

Transfromasi Budaya Kekerabatan ke Ideologi Kekerabatan

Salah satu unsur pembentuk ideologi dalam masyarakat adalah adat istiadat sebagai tatanan yang membentuk norma kehidupan sosial⁸². Karena itu

ideologi birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional juga berakar kuat pada budaya kekerabatan terkait dengan adat istiadat, struktur sosial dan marga. Ideologi birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional disebut sebagai ideologi kekerabatan (*the ideology of kinship*)⁸³. Menstir kata-kata Joel S. Kahn, ideologi kekerabatan (adat istiadat dan marga) dalam masyarakat Batak Toba tradisional merupakan “*rest on certain directly perceivable aspects of personal appearance and social interaction, taking what appears as crucial to a definition of the structures which generate appearance*”.⁸⁴

Kekerabatan yang di dalamnya ada adat istiadat yang menjadi tatanan yang membentuk norma kehidupan sosial dan merupakan salah satu unsur ideologi⁸⁵. Ideologi kekerabatan masyarakat Batak Toba tradisional mengatur kehidupan mereka di dunia. Ideologi sistem kekerabatan menjadi pusat dan dasar kehidupan orang Batak Toba tradisional. Ideologi sistem kekerabatan ini menjadi kesadaran utama dalam berbuat dan berperilaku baik dalam ritus maupun dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kemasyarakatan⁸⁶, dan juga dalam berbuat dan berperilaku dalam berpemerintahan dan dalam birokrasi.

Semangat kekerabatan teraktualisasi dalam nilai *somba, manat, elek*. Sementara semangat ini telah tumbuh dalam diri dan dimiliki oleh setiap individu masyarakat Batak Toba karena setiap individu Batak Toba pasti pernah berposisi baik sebagai dongan tubu, hula-hula maupun boru. Semangat MSE menjadi nilai penting dalam birokrasi dan aparaturnya. Semangat *somba* teraktualisasi dalam sikap dan perilaku hormat menghormati, semangat *manat* teraktualisasi dalam sikap dan perilaku harga menghargai, dan semangat *elek* teraktualisasi dalam sikap dan perilaku kasih menasih. Dengan demikian, sikap dan perilaku para aktor birokrasi kerajaan dalam masyarakat Batak Toba tradisional seperti raja, aparatur dan warga akan menampilkan semangat saling menghormati, semangat saling menghargai dan semangat saling mengasahi.

Ideologi Komunalisme

Inti dari ideologi kerohanian (kepercayaan agama) dan ideologi kekerabatan (adat dan marga) adalah ideologi komunalisme. Ideologi ini melahirkan masyarakat dan birokrasi komunal⁸⁷. Dengan kata lain, ideologi kerohanian dan ideologi kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba tradisional secara bersama-sama membentuk ideologi birokrasi tradisional yaitu ideologi komunalisme. Tidak heran jika komunalitas oleh ikatan nilai-nilai budaya kerohanian agama dan budaya kekerabatan adat dan marga sangat kental dalam kehidupan kemasyarakatan Batak Toba tradisional, termasuk dalam birokrasi pemerintahan Batak Toba tradisional *in action*.

Masyarakat dan birokrasi komunalitas menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi. Solidaritas merupakan integrasi sosial yang didasarkan kepada interdependensi okupasional, persamaan-persamaan dan bahkan juga pada perbedaan-perbedaan komplementer. Integrasi sosial dapat diartikan sebagai kesetiakawanan, kebersamaan, dan kekompakan dalam menghadapi suka dan duka⁸⁸. Ungkapan metafor yang mencerminkan rasa solidaritas pada masyarakat Batak Toba adalah sebagai berikut:

1. *Manimbung rap tu toru.*
Mangangkat rap tu ginjang.
Melompat bersama turun ke bawah,
Meloncat bersama naik ke atas.
2. *Aek godang, tu aek laut.*
Dos ni roha, ria tolop, ido sibahen na sahat
Air sungai campur ke air laut.
Sehati, semua senang, tujuan akan tercapai
3. *Aek doras tu aek laut.*
Dos ni roha sibaen na saut.
Air sungai ke air laut
Sehati tercapai tujuan.

Ungkapan metafor 1 sangat jelas bermakna kebersamaan dan kekompakan. Kata “*rap*” atau bersama menyiratkan hal itu. Sementara kata *tu toru* atau ke bawah menyiratkan makna kesusahan; sedangkan kata *tu ginjang* atau ke atas menyiratkan makna kesenangan. Di antara pihak yang semarga harus menunjukkan sama-sama susah, sama-sama senang. Jadi kebersamaan dan kekompakan bukan hanya dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan susah. Susah dan senang harus dihadapi dan ditanggung bersama-sama.

Ungkapan metafor 2 atau 3 menyatakan nasehat untuk selalu kompak dan sehati, seperti tersirat dan tersurat dalam kata “*dos ni roha ria tolop, ido sibahen na sahat*”. Kata ini menyiratkan makna jika satu hati, maka apapun tujuan akan tercapai dengan bahagia. Ungkapan kedua ini juga mengandung makna solidaritas dan kekompakan. Baris kedua ungkapan kedua bagian kedua yang mengatakan “*dos ni roha sibaen na saut*” menyiratkan makna semua usaha pasti akan tercapai jika yang mengerjakannya sehati.

Ungkapan metafor 2, baik bagian pertama dan kedua menggunakan metafor “*aeek godang sampur tu aek laut*”, atau air sungai (yang deras airnya, jernih dan bisa digunakan untuk memasak dan mencuci) campur dengan air laut (yang tenang airnya, berasa asin) menyiratkan perilaku masyarakat Batak Toba harus bisa bersosialisasi dengan beragam perilaku yang lain yang berbeda. Jelaslah bahwa dalam ungkapan metafor di atas masyarakat Batak Toba sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan⁸⁹.

Baik ideologi kerohanian agama maupun ideologi kekerabatan adat menjadi kekuatan untuk menciptakan stabilitas sosial yang mantap dalam bermasyarakat dan berpemerintahan⁹⁰. Nilai-nilai kerohanian dan kekerabatan menjadi bagian dari tatanan kehidupan birokrasi pemerintahan yang mengatur dan mengarahkan semua tindakan dan perilaku birokrat, tidak terkecuali raja atau administrator dalam birokrasi tradisional masyarakat Batak Toba. Itu karena seluruh tindakan dan perilaku warga dalam hidup bermasyarakat, tidak terkecuali tindakan dan perilaku birokrasi dalam hidup berpemerintahan merupakan tindakan dan perilaku kebudayaan.

Transformasi Nilai-nilai Budaya Tradisional Masyarakat dalam Perilaku Birokrasi Tradisional

Tindakan birokrat dapat juga dilihat dalam koridor tindakan kebudayaan. Ada tiga nilai penting yang terkandung dalam kebudayaan kekerabatan adat yang telah disistematisasi menjadi ideologi birokrasi, yaitu MSE. Nilai MSE tentu sudah melekat dan berakar kuat dalam hubungan sosial atau kehidupan bermasyarakat bagi komunitas Batak Toba. Sikap dan perilaku MSE sudah mendarahdaging karena tiap individu Batak Toba berposisi dalam ke tiga dalihan. Tiap orang Batak Toba pasti menjadi hula-hula, menjadi dongan tubu dan menjadi boru. Itu berarti tiap orang Batak Toba dalam kehidupannya pasti sudah terbiasa atau mendarah daging dengan sikap atau perilaku MSE. Karena itu semangat elek, manat dan somba juga akan terimplementasikan dalam hidup berpemerintahan dan praktek birokrasi.

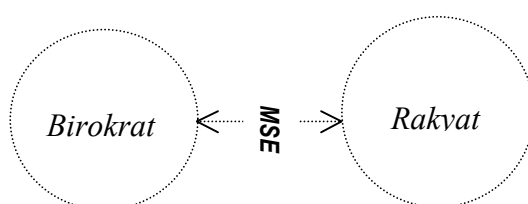
Atas dasar itu, maka dapat dikatakan bahwa filosofi berpemerintahan di Pusat *Harajaon* Batak Toba tradisional tidak lepas dari dan berakar kuat pada nilai-nilai MSE. Nilai-nilai ini memiliki makna ada kesatuan dan keseimbangan antara raja atau birokrat dan rakyat, pemimpin dan pengikut, *pargomgom* dan *nigomgom*, pemerintah dan yang diperintah. Apakah raja atau rakyat dituntut untuk berperilaku MSE. Falsafah MSE mengutamakan harmoni, keselarasan, keseimbangan, kerukunan, dan integrasi antara raja dan rakyat dan antara rakyat dan rakyat. Ini berarti bahwa harmoni, keselarasan, keseimbangan, kerukunan, dan integrasi menempati posisi sentral dalam budaya birokrasi Batak Toba-tua.

Dalam tata pemerintahan, setiap individu orang Batak harus berperilaku "raja". Raja dalam tata kekerabatan Batak bukan berarti orang yang berkuasa, tetapi orang yang berperilaku baik sesuai dengan tata krama dalam sistem pemerintahan tradisional yang berideologi kerohanian dan kekerabatan. Dalam tata kekerabatan maka setiap orang Toba adalah raja yang disebut raja ni Hulahula, raja ni Dongan Tubu dan raja ni Boru. Dalam posisi raja tersebut, baik sebagai dongan tubu, sebagai hula-hula atau sebagai boru, seorang Batak Toba

akan berperilaku MSE. Ketika sebagai penyelenggara horja akan manat kepada semarganya somba kepada hula-hulanya dan elek kepada borunya, ketika sebagai hula-hula akan berperilaku elek terhadap borunya manat kepada semarganya dan somba kepada hulahulanya, ketika sebagai boru akan berperilaku somba kepada hula-hulanya manat kepada semarganya dan elek kepada borunya.

MSE telah menjadi tritunggal dalam kehidupan sehari-hari dari orang Batak Toba. Karena itu MSE telah menjadi sikap dan perilaku antara birokrat dan warga dalam berpemerintahan dalam kerajaan tradisional Batak Toba (Bagan 4.5).

Bagan 4.5: Aktor dalam kerjaan dan perilaku yang ditampilkan



MSE dijadikan sebagai nilai atau norma dalam budaya birokrasi tradisional Batak Toba untuk mewujudkan *harajaan na gabe* yaitu kerajaan yang memiliki aparat dan warga yang sehat dan panjang umur, *harajaan na mora* yaitu kerajaan yang makmur, kaya raya dan sejahtera; dan *harajaan na sangap* yaitu kerajaan yang dihargai dan disegani oleh kerajaan lain.

Jadi, berdasarkan semangat budaya dan ideologi kerohanian dan kekerabatan yang MSE maka akan tercipta interaksi hubungan di antara mereka dalam suasana harmoni, keselarasan, keseimbangan, kerukunan menuju integrasi dalam birokrasi tradisional. Anggota komunitas memperlihatkan semangat kekerabatan terhadap raja sebagai pemimpin dan dengan sesama warga secara utuh dengan saling membantu pada berbagai kegiatan *horja*. Lebih dari itu, filosofi MSE dalam kehidupan berpemerintahan juga dapat bermakna mengutamakan suatu kehidupan demokratis, bukan otoriter, dengan membangun keseimbangan fungsional sesuai dengan kedudukan sosial masing-masing.

Spirit MSE terwujud dalam cinta kasih, solidaritas dan gotong royong yang termanifestasi dalam musyawarah dan mufakat. Dalam konteks birokrasi, *manat* berarti demokratis; *elek* berarti melakukan sesuatu untuk kepentingan publik dan mengayomi; dan *somba* berarti loyal, patuh. Jika kerajaan ingin dihormati, maka raja harus menjadi pengayom bagi warga, jika kerajaan ingin sejahtera maka warga harus loyal kepada kerajaan dan terhadap raja sebagai pemimpin. Jika kerajaan ingin berhasil menjalankan tugas dan mewujudkan tujuan maka harus ada kerjasama antara raja dan raja, raja dan rakyat, serta rakyat dan rakyat. Itulah harmoni dari satu kerajaan.

Berlandaskan falsafah MSE seluruh pilar birokrasi akan sadar pentingnya konsensus melalui saling konsultasi dalam suasana harmonis untuk membuat keputusan untuk kepentingan publik termasuk memilih para pemimpin atau raja, dan bukan sekedar suatu proses dengan suara mayoritas. Tidak ada dominasi mayoritas dan tirani minoritas antara dongan sabutuha, huluhula dan boru. raja dan warga yang terikat oleh nilai-nilai kekerabatan tidak hanya memperlihatkan loyalitas semu melainkan saling membantu dalam berbagai kegiatan *huta*, *horja* dan *bius*. Dengan semangat MSE, maka raja, aparat, dan rakyat menghindarkan TONA (*Talk Only No Action*). Itu merupakan manifestasi semangat solodartitas yang merupakan semangat dan nilai-nilai kerohanian dan kerabatan.

Birokrat dan warga yang berperilaku MSE tidak akan menonjolkan nilai komunalitas dan kebersamaan serta harmoni dan keseimbangan baik dalam hubungan sosial maupun hubungan pemerintahan. Norma dan nilai tradisional MSE dalam budaya kekerabatan menjadi ideologi total dalam budaya birokrasi lokal tradisional Batak Toba dan Dinasti Singamangaraja. Berlandaskan ideologi kerohanian dan kekerabatan, maka antara raja, aparat, dan rakyat merupakan totalitas kesatuan sebagaimana totalitas antara institusi-institusi kerohanian atau jagat raya dan pengaturnya dalam budaya kerohanian ataupun institusi-institusi sosial atau jagat masyarakat dan pengaturnya dalam budaya kekerabatan. Raja Singamangaraja XII selalu berkeyakinan, mengenal serta menghayati bahwa manusia dalam masyarakat tradisional, segala sesuatunya merupakan totalitas yang tak terpisah yang satu dari yang lain⁹¹ apakah dia hula-hula, dongan tubu atau boru, pun apakah dia raja, aparat dan rakyat.

Susunan kekerabatan masyarakat Batak dalam *marga* atau etnisitas (*ethnicity*) juga merupakan salah satu ciri khas dalam kebudayaan asli Batak Toba yang paling menonjol.⁹² Menstir kata-kata dari Joel S. Kahn,⁹³ marga adalah jelas satu bagian dari formasi ideologi birokrasi Batak Toba yang memotivasi perilaku berdasarkan solidaritas marga. Ikatan marga juga menjadi dimensi penting dalam praktek dan perilaku birokrasi pemerintahan di Harajaon Batak Toba bahkan hingga pada masa pemerintahan kolonialisme Belanda.

Sejak dahulu hingga sekarang *marga* memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Batak di mana *marga* menjadi landasan menentukan hubungan kekerabatan masyarakat Batak (atas dasar keturunan darah) dan *marga* juga menentukan arah perkawinan bagi masyarakat.⁹⁴ Oleh karena itu marga juga mewarnai praktek birokrasi dalam masyarakat Batak-Toba dalam Dinasti Singamangaraja. Marga merupakan identitas dari kelompok kerabat menurut garis keturunan patrilineal. Pada awalnya *marga*⁹⁵ adalah nama leluhur. Nama tersebut kemudian digunakan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai tambahan nama (nama kedua) oleh keturunannya, dan itulah yang disebut sebagai *marga* atau klen (*clan*) yang hingga sekarang ini tercatat kurang lebih 451 marga-marga.

Penggunaan *marga* bermula pada lima abad yang silam. Ketika itu (abad ke-16) terjadi kegawatan yang luar biasa di *Harajaon* Toba akibat agresi besar-besaran ke daerah *Harajaon* Toba dari berbagai pihak, seperti agresi kesultanan Aceh ke-I dari sebelah Utara, penetrasi kerajaan Pagaruyung (Minangkabau) dari sebelah Selatan bersamaan dengan kedatangan kolonialisme Portugis ke tanah Malaka (Melayu) yang menyebabkan suku bangsa Melayu banyak buyar menyeberang ke pesisir Timur kawasan Sumatera Utara. Agar kegawatan yang dapat menggoncang atau mencabik-cabik pola Kebudayaan DNT yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kemasyarakatan di *Harajaon* Toba dapat diatasi, maka Singamangaraja I yang bertugas antara lain menjaga keselamatan masyarakat dan *Harajaon* Toba berdasarkan kekuatan pola kebudayaan DNT melahirkan suatu ajaran (doktrin) yang mewajibkan dan mengharuskan agar tiap-tiap warga DNT membuat "*marga-marga*" secara genealogis teritorial tanpa kecuali. Sebab dalam pandangan Singamangaraja I, ikatan *marga-marga* dari turunan leluhur Si raja Batak merupakan satu kekuatan pemersatu untuk membangun solidaritas kelompok (*group solidarity*).⁹⁶

Formasi dan struktur sosial masyarakat Batak Toba yang tersusun dalam kekerabatan DNT dan ikatan *marga-marga*, demikian juga budaya kerohanian, menjadi ideologi dasar birokrasi dalam Dinasti Singamangaraja. Sistem ideologi ini justru tidak menjadi apa yang disebut Friedman sebagai *a hierarchy of constraints* dari kompatibilitas fungsional antara struktur yang berbeda.⁹⁷ Kekuatan spirit ideologi kekerabatan dan kerohanian ini yang menjadi perekat birokrasi Batak Toba-tua dan yang membuat Dinasti Singamangaraja XII, misalnya, sanggup melawan tentara Belanda secara gerilya selama 30 tahun. Demikian juga faktor kepemimpinan Singamangaraja XII merupakan faktor penting dalam perang Batak, dan belum adanya penindasan negara (feodal) terhadap rakyat juga merupakan soal penting yang memungkinkan masyarakat bersatu dengan pemimpin atau rajanya melawan Belanda.⁹⁸

Si Singamangaraja dapat bertahan hingga 30 tahun secara terus-menerus karena salah satu rahasianya menurut Sidjabat ialah adanya kemanunggalan pimpinan dengan penduduk (rakyat) yang memanfaatkan budaya kekerabatan berdasarkan prinsip dan spirit DNT⁹⁹. Solidaritas *marga* dan kekerabatan yang sangat kuat dalam masyarakat Batak Toba menjadi faktor penting dalam kelanggengan birokrasi Dinasti Singa Mangaraja¹⁰⁰. Budaya kekerabatan berdasarkan prinsip dan spirit DNT sebagai perekat birokrasi *harajaon* Batak Toba Tua tampak juga dalam penjelasan Batara Sangti sebagai berikut:

Untuk menghadapi penetrasi dan infiltrasi dari luar, sejak kedatangan ekspedisi *Mojopit* dan kebangkitan kerajaan kesultanan *Aceh*, terutama pada zaman Sultan Iskandar Muda yang perkasa; *pertahanan harajaon* Toba-tua, telah diperkuat sedemikian rupa, mulai dari Tuktuk Tarabunga Balige,

Parporean Porsea, Sigaol, Sibisa, Ajibata-Parapat, Sipolha, Tigaras, Harang Gaol, Tongging dan Silalahi-Paropo berdasarkan kekuatan gotongroyong marga-marga Dalihan Natolu. Sampai pada agresi tentara Padri/Bonjol sekitar tahun 1820-an pusat *harajaon* Toba (Toba-Holbung), sebenarnya tidak sempat ditaboras oleh agresi tentara Padri/Bonjol, karena tidak dapat menembus benteng pertahanan Dalihan Natolu di Pariksabungan dan Pintu Bosi Sianjur dan Tanggabatu (Tampahan). Begitu pula di benteng Tutupan (Pintu Pohan) dan Tangga di kawasan air terjun Siguragura dan Siarimo yang berbatasan dengan daerah kesultanan Asahan dan Kualu.¹⁰¹

Batara Sangti mencatat bahwa sepanjang sejarah hingga dewasa ini empat zamanlah kekuatan persatuan dan kesatuan marga-marga Batak dikerahkan secara massal dan frontal menghadapi peperangan dahsyat: Pertama dalam perang melawan Sultan Aceh pada abad-16 yang dipimpin oleh Tuan Singamangaraja I. Kedua, dalam perang Padri melawan tentara Padri/Bonjol sekitar tahun 1816-1830 yang dipimpin oleh raja Singamangaraja X. Ketiga, dalam peperangan melawan kolonialisme Belanda 1877-1907 dipimpin oleh raja Singamangaraja XII. Dan keempat, dalam perang kemerdekaan tahun 1945 yang dipimpin oleh Dr. Ferdinand L. Tobing (17-81945 s/d 31 Desember 1949). Semangat sistem marga dan DNT merupakan salah satu sebab mengapa suku bangsa Batak tetap eksis dan tidak lenyap/hilang ditelan oleh arus zaman¹⁰².

Jadi, budaya kekerabatan dalam solidaritas marga dan budaya kerohanian dalam solidaritas tonggo-tonggo yang sangat kuat dalam masyarakat Batak Toba menjadi faktor penting dalam kelanggengan birokrasi Dinasti Singamangaraja. Masyarakat Batak Toba yang susunan kemasyarakatannya dan hubungan sosialnya berdasarkan DNT adalah satu masyarakat yang utuh yang diikat dan terikat oleh serta patuh terhadap “aturan” yang rapi sesuai tatanan sosial berdasarkan budaya kekerabatan. Oleh karena itu sistem kekerabatan DNT digunakan sebagai landasan dalam membina hubungan antara birokrasi dan masyarakat. Seperti dikemukakan oleh W.B. Sidjabat,

justru penduduk daerah Si Onom Hudon inilah yang memberikan dukungannya yang terus-menerus dalam perlawanan terhadap Belanda, kurang lebih 17 tahun sejak tibanya rombongan Si Singamangaraja di Si Onom Hudon.... Salah satu faktor yang turut membantu timbulnya dukungan penduduk Si Onom Hudon ialah kenyataan bahwa *Boru* Nadeak pada waktu itu isteri kedua Si Singamangaraja XII adalah *boru* dari penduduk Si Onom Hudon, jadi *boru* dari keenam marga keturunan Ompu raja *Na Bolon* (PARNA) yang tinggal dan *mengatur* daerah itu. Tetapi juga karena Si Singamangaraja XII, maupun penduduk Si Onom Hudon sama-sama keturunan Sorimangaraja. Dengan kata lain, mereka adalah keturunan satu nenek moyang. Di samping itu, kekompakan penduduk Dairi mendukung Si Singamangaraja XII ialah karena di daerah Si Onom Hudon itu banyak juga penduduk dari keturunan Si raja Oloan, seperti halnya di Bakara dan

Sihotang. Tetapi di samping semua itu dalam arti *power politics* Si Singamangaraja, “raja-Imam”..., cukup menimbulkan rasa hormat dari penduduk terhadap “pemimpin mesiani” mereka untuk mengadakan perlawanan terhadap pihak penjajah.¹⁰³

Catatan Akhir

- ¹ M. Mas'ud Said. 2010. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press, h. 63-65.
- ² Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan. 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar, h. 134.
- ³ Budaya kerohanian (agama) dan budaya kekerabatan (adat) juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Batak Toba tradisional modern seperti tampak dalam berbagai upacara seperti perkawinan dan kematian dan lainnya. Dalam upacara perkawinan dan kematian bagi yang menganut gama Kristen, misalnya, selalu dilakukan upacara keagamaan (budaya kerohanian) yang dilaksanakan di dalam gereja dan upacara adat (budaya kekerabatan) yang berlangsung di pekarangan atau gedung pertemuan.
- ⁴ Budaya kerohanian (agama) dan budaya kekerabatan (adat) juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Batak Toba tradisional modern seperti tampak dalam berbagai upacara seperti perkawinan dan kematian dan lainnya. Dalam upacara perkawinan dan kematian bagi yang menganut gama Kristen, misalnya, selalu dilakukan upacara keagamaan (budaya kerohanian) yang dilaksanakan di dalam gereja dan upacara adat (budaya kekerabatan) yang berlangsung di pekarangan atau gedung pertemuan.
- ⁵ Agama Malim dianut oleh suku Batak Toba di Provinsi Sumatra Utara. Ada beberapa kelompok Parmalim namun kelompok terbesar adalah kelompok Malim yang berpusat di Huta Tinggi, Kecamatan Lagu Boti, Kab. Toba Samosir. Hari Raya utama Parmalim disebut Si Pahasada (Bulan Pertama) serta Si Pahalima (bulan Kelima) menurut Kalender Batak yang secara meriah dirayakan di kompleks Parmalim di Huta Tinggi sehingga disebut Parmalim Huta Tinggi. Agama ini beribadah setiap hari sabtu. Di desa ini ada rumah ibadah orang Parmalim yang disebut Bale Pasogit. Di Temok dan Pematang Siantar juga ditemukan agam ini. Agama Malim lahir di dan merupakan agama Batak Toba pada akhir abad 19. Agama asli Batak sebelum akhir abad 19 tidak memiliki nama sendiri. Tetapi pada penghujung abad 19 muncul sebuah gerakan anti kolonial bernuansa religi yaitu agama Malim. Agama ini dipengaruhi oleh agama Kristen dan agama Islam. Kitab-Kitab Dalam Agama Parmalim adalah Kitab Bataru Guru, Kitab Debata Sorisohaliapan, Kitab Mangala Bulan, Debata Asi-Asi, Kitab Boru Debata, Kitab Pengobatan, Kitab Falsafah Batak, Kitab Pane *Na Bolon*, Kitab Raja Uhum Manisia. Pendiri sekaligus sebagai pemimpin utama mereka adalah Guru Somalaing Pardede. Saat ini, pimpinan pusat adalah Raja Marnangkok Naipospos.
- ⁶ Raja Patik Tampubolon. 2002. *Pustaha Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama, h. 38.
- ⁷ Raja Patik Tampubolon. 2002 : 30.
- ⁸ Raja Patik Tampubolon, 2002. h. 38-39.
- ⁹ Ibrahim Gultom. 2010. *Agama Malim di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 117-119.
- ¹⁰ Torsa-torsa tentang *mula ni tano* dan *mula ni jolma*, lihat S.A. Niessen, *op cit*, chapter 1; W.M. Hutagalung. 1991. *Pustaha Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak*. Balige: Tulus Jaya, bab 2 dan bab 3.
- ¹¹ W.M. Hutagalung. 1991. *Pustaha Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak*. Tulus Jaya, h. 13.
- ¹² *Ibid*, h. 40.
- ¹³ *Ibid*, h. 40.
- ¹⁴ *Ibid*, h. 41.

-
- ¹⁵ Menurut Batara Sangti, peranan penting ada pada dunia tengah yaitu dunia yang didiami oleh manusia yang mempertahankan tugasnya sebagai jembatan dan pengatur antara *banua ginjang* dan *banua toru*. Batara Sangti. 1977. *Sejarah Batak*, Balige: Karl Sianipar, h. 249.
- ¹⁶ *Ibid*, h. 41.
- ¹⁷ Anecetus B. Sinaga.1981. The Toba Batak High God. St. Augustin, h. 68-76.
- ¹⁸ PH.O. Lumban Tobing. 1963. The Structure of the Toba-Batak Belief in the High God. Amsterdam: Jacob Van Campen, h. 27.
- ¹⁹ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 66.
- ²⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak. *Ibid*, h. 152.
- ²¹ Bandingkan dengan Batara Sangti, *ibid*, h. 326.
- ²² PH.O. Lumban Tobing. 1963. The Structure of the Toba-Batak Belief in the High God. Amsterdam: Jacob Van Campen, h. 27.
- ²³ Batara Guru berasal dari bahasa Sanskrit dari kata ‘Batara’ atau Lord atau Tuhan dan ‘Guru’ atau Teacher. Batara Guru mempunyai ciri yang sama dengan kelahiran Singamangaraja I yaitu dengan tanda disertai gempa bumi, gemuruh halilintar, hujan abu dan hal ini menjadi tanda bahwa Raja Singamangaraja dipercaya sebagai inkarnasi dari Batara Guru..
- ²⁴ WM. Hutagalung, 1991: 10.
- ²⁵ Sinaga, *ibid*, h.58.
- ²⁶ Ibrahim Gultom, *ibid*, h. 99.
- ²⁷ Agama Malim bukanlah agama Batak, melainkan agama yang ada di dan dianut oleh sebagian suku Batak. Agama ini resmi lahir setelah Raja Singamangaraja XII wafat dan pengikutnya membentuk satu agama yang disebut agama Malim. Raja Patik Tampubolon mengatakannya sebagai berikut: Taringot tu Ugamo Malim, na tubu sandiri do i di tano Batak dung monding Raja Singamangaraja XII (patuan Bosar gelar Ompu Pulo Batu – 1907). Asa boi dohonon na tubu sian Hamalimon ni Raja Singamangaraja do i. Raja Patik Tampubolon, *inid*. H, 388. Pembahasan tentang agama Malim antara lain baca Ibrahim Gultom. 2010. *Ibid*.
- ²⁸ *Ibid*, h. 39, 67.
- ²⁹ WM. Hutagalung, 1991: 10.
- ³⁰ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 283.
- ³¹ WM. Hutagalung, 1991: 10.
- ³² Ibrahim Gultom, *ibid*, h. 99.
- ³³ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 284.
- ³⁴ Panurirangon adalah suatu bentuk kuasa yang diberikan oleh Debata melalui Balabulan kepada manusia tertentu. Kuasa ini adalah semacam kemampuan untuk memberikan nasehat dan pengobatan jiwa kepada manusia, termasuk dalam hal meramal keadaan manusia. Lihat Ibahim Gultom, *ibid*, h. 121.
- ³⁵ Ibrahim Gultom, *ibid*, h. 99.
- ³⁶ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 284-285..
- ³⁷ Niels Mulder. 1985. *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan, h. 26.
- ³⁸ J.C. Vergowen. 1986. *ibid*, h. 80.
- ³⁹ Sistem kekerabatan di semua etnik yang masuk rumpun Batak – Toba, Simalungun, Karo, Angkola-Mandailing, Pakpak-Dairi – pada hakekatnya memiliki dasar sistem kekerabatan yang sama juga, yaitu DALIHAN NA TOLU.
- ⁴⁰ Tambun Siahaan, *Prinsip DNT dan Gotong Royong Pada Masyarakat Batak Toba tradisional*, dalam Koentjaraningrat. 1981. *Masalah-masalah Pembangunan*. Jakarta: Rajawali, h. 128.
- ⁴¹ Penjelasan lebih lanjut lihat J.C. Vergouwen. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet, h. 44-47.
- ⁴² *Ibid*, h. 52-64.
- ⁴³ Motif kekerabatan (*the kinship motif*) secara menarik diuraikan oleh S.A. Niessen, *ibid*, p. 72-107.

- ⁴⁴ Perkawinan dalam adat masyarakat Batak Toba tradisional adalah eksogami marga yang asimetrik. Artinya, di samping perkawinan hanya dimungkinkan terjadi dengan kelompok yang bukan semarga, tetapi juga tidak dibenarkan kawin antara saudara laki-laki dari marga pihak isteri dengan saudara perempuan dari marga pihak suami dan antara adik perempuan dari pihak isteri dengan kakak laki-laki dari pihak suami, antara kakak perempuan pihak isteri dengan adik laki-laki dari pihak suami. Hubungan antara *Boru* dan Hulahula yang disebut *mamungka partondongon* tidak saja melibatkan ayah, ibu dan anak yang kawin, melainkan juga menjalin hubungan yang kekal abadi antara anak dan keturunannya maupun antara anak tersebut dan keturunannya dengan keturunan dari ayah sang ibu. Untuk marga Silahisabungan, misalnya, tetap menjadi kelompok *boru* bagi marga Batangari maupun Manurung dan sebaliknya marga Batangari dan Manurung tetap menjadi Hulahula bagi marga Silahisabungan.
- ⁴⁵ Kata “*manat*” juga dapat berarti: Lehon sangap tu sipasangapon. Dok “amang” molo tu “siparamaon”, “hahang” tu siparhahaon, “anggia” tu siparanggion. Unang bahen juguhanmu tumimbo sian juguhan ni siparhahaonmu, nangpe tumimbo pangkatmu manang ummora ho. Unang pajolojolohon ho mandok hata manang manjalo parjamberon., ianggo disi dope siparamaonmu (udam rupani) nangpe ho do nian haha di partubu. Angka ima sijagaon di namardongan *sabutuha*. Jala molo tinurut poda i, marsangap ma iba di tongatonga ni *dongan sabutuha* jala “dengan sendirinya” di tongatonga ni masarakat. (Beri kemuliaan kepada yang patut dimuliakan. Panggil “bapak” kepada orangtua, abang kepada yang patut sebagai abang, adik kepada yang patut adik. Jangan perbuat kelasmu lebih tinggi dari kelas yang pantas sebagai abangmu biarpun pangkatmu lebih tinggi atau engkau lebih kaya. Jangan engkau mendahului mengucapkan perkataan atau meminta jambar jika di sana masih ada yang pantas sebagai orangtuamu (adik bapak misalnya) biarpun engkau lebih tinggi berdasarkan urutan kelahiran. Itulah yang harus dijaga di antara kerabat semarga. Dan jika kita ikuti perintah itu, kita akan mulia di antara kerabat semarga dan dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat). Lihat Sihombing. 1989. *Jambar Hata Dongan tu Ulaon Adat*. Jakarta: Tulus Jaya, h. 275-276.
- ⁴⁶ Ulbert Silalahi, 1989, *op cit*, h. 160.
- ⁴⁷ Kata *elek* menurut Sihombing juga dapat berarti (diIndonesiakan) sebagai berikut: Jangan perlakukan anak perempuanmu (menantu laki-laki) seperti anak kecil, yang dapat asal disuruh/diperintah, dan dipaksa di segala waktu dan segala hal, yang dapat dibentak dan dapat ditolak menurut keinginan kita. Tidak dapat seperti itu. Harus sayang juga kampung kita kepada mereka. Lembut dan sopan kita ucapkan kata-kata kalau ingin memerintah; lembut pembicaraan jika kita meminta. Kalau terpaksa kita menolak permintaan mereka karena kita tidak sanggup, jangan marah-marah kita mengatakan-nya, tetapi harus cara halus atau lembut kita sampaikan. *Amanat* ini sesuai dengan Alkitab yang mengatakan: hai orang tua, jangan buat marah anak-anak kalian”. Jadi kalau *elek* kita terhadap anak perempuan kita, tidak mungkin anak perempuan dan menantu kita tidak hormat kepada kita, mereka akan hirau kepada kita, dan tidak membiarkan kita susah payah. Itulah kekayaan sesungguhnya). Lihat, Sihombing, *ibid*, h. 276.
- ⁴⁸ Perumpamaan lain lihat Ulbert Silalahi. 1989. *op cit*, h. 166-169.
- ⁴⁹ Tentang makna *somba marhulahula*, Sihombing mengatakan: Ia na pasangap hulahula na manggohi patik palimahon i do i, ima patik na manjanjihon tua di tano on tu angka na mangulahonsa, jala hagabeon do antong dietong hita Batak tua nomor sada di tano on (kalau hormat kepada *hula-hula* itu lebih pada memenuhi hukum yang kelima, ialah hukum yang menjanjikan berkat di dunia ini bagi orang yang melaksanakannya, dan hagabeon merupakan berkat nomro satu bagi masyarakat Batak di dunia ini). Lihat Sihombing, *op cit*, h. 276.
- ⁵⁰ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 74.
- ⁵¹ Ulber Silalahi. 1989. *Kepemimpinan Lokal dan Pembangunan*. Jakarta: Tesis, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- ⁵² Lance Castles, *ibid*, h. 154.
- ⁵³ Lihat Paul B. Pedersen. 1975. *Darah Batak dan Jiwa Protestan: Perkembangan Gereja Batak di Sumatera Utara* (terjemahan), Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- ⁵⁴ Uraian tentang *spiritual dimensions of the kinship system*, lihat S.A. Niessen, *op cit*, p. 121.

- ⁵⁵ Seluruh sistem kekerabatan dan hubungan sosial berdasarkan DNT ini berkaitan dengan kepercayaan asli masyarakat Batak, yaitu kepercayaan yang sudah dianut sebelum masuknya agama Nasrani maupun Islam, dan yang sampai sekarang di sana sini masih terlihat peninggalannya. Lihat Jamaludin Hasibuan, *op cit*, h. 245.
- ⁵⁶ Togar Nainggolan. 2012. *Ibid*, h. 220-221.
- ⁵⁷ Raja Patik Tampubolon. 2002. h. 130-131.
- ⁵⁸ Dalam upacara adat, setiap orang Batak memiliki status raja. Kadang-kadang ia berstatus raja ni boru yang melayani hula-hulanya, kadang-kadang ia berstatus raja ni hula-hula yang memberkati pesta borunya, dan kadang-kadang berstatus sebagai raja ni dongan tubu/dongan sabutuha. Itru tergantung pada status kekerabatannya dalam suatu upacara adat apakah ia boru, huluhula, atau dongan sabutuha.
- ⁵⁹ Pemikiran ini berbeda dengan Ph.L. Tobing yang menunjukkan secara meyakinkan, bahwa Batara Guru dihadirkan oleh *hulahula*, Soripada oleh *dongan sabutuha*, dan Mangalabulan oleh *boru*. Jadi, *hulahula*, *dongan sabutuha* dan *boru* tidak dapat dipisahkan hubungan-pergantungannya dengan *Debata Na Tolu*. Lihat Batara Sangti. *ibid*. h. 64.
- ⁶⁰ Ulbert Silalahi. 1998. *Raja Silahisabungan*. Bandung: Bina Bidhaya, h. 149-150.
- ⁶¹ Bungaran Antonius Simanjuntak. *Ibid*, h. 152.
- ⁶² Ulbert Silalahi. 1989. *Kepemimpinan Lokal dan Pembangunan*. Jakarta: Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia.
- ⁶³ Lihat Vergowen, 1964; Hutagalung, 1963; Bungaran Antonius Simanjuntak, 2009.
- ⁶⁴ Lihat Susan Rodgers Siregar, *Advice to the Newlyweds: Sipirok Batak wedding speeches Adat or art*, dalam Edward M. Bruner and Judith O. Becker, 1979, *Art, Ritual and Society in Indonesia*, Papers in International studies Southeast Asia Series, No. 53, Ohio University Center for International studies.
- ⁶⁵ Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan. 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak: Suatu pendekatan terhadap perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar, h. 65.
- ⁶⁶ Anak Agung Gde Putra Agung, 2001, *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 8.
- ⁶⁷ Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan, *ibid*, h. 67.
- ⁶⁸ *Ibid*, h. 33-34.
- ⁶⁹ Joel S. Kahn, Ideology and Social Structure in Indonesia, dalam Benedict Anderson and Audrey Kahin. 1982. *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, Cornel Modern Indonesian Project Southeast Asia Program: New York: Cornell University Othaca, p. 92.
- ⁷⁰ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. hlm. 69.
- ⁷¹ Lihat Bungaran Antonius Simanjuntak, *ibid*, h. 33-36.
- ⁷² Budaya ini dipengaruhi oleh budaya Hindu antara abad kedua dan abad limabelas sesudah Masehi. Itu tampak antara lain dalam kepercayaan asli masyarakat Batak Toba, baik mengenai susunan alam semesta, ceritera mengenai penciptaan dunia, adanya jiwa dan kehidupan sesudah mati, maupun penyajian kurban, ramalan dan juga kepercayaan mengenai para datu. Lihat S.A. Niessen. 1985. *Motif of Life in Toba Batak Texts and Textiles*. Dordrecht, The Netherlands: Foris Publications; Jamaludin Hasibuan. 1985. *Art et culture/Seni Budaya Batak*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset. Rita Smith Kipp, The Thread of Three Colors: The ideology of kinship in Karo Batak Funerals, dalam Edward M. Bruner and Judith O. Becker. 1979. *Art, Ritual and Society in Indonesia*, Papers in International studies Southeast Asia Series, No. 53, Ohio University Center for International studies.
- ⁷³ Menggunakan istilah Rita Smith Kipp, The Thread of Three Colors: The ideology of kinship in Karo Batak Funerals. Dalam Edward M. Bruner and Judith O. Becker. 1979. *Art, Ritual and Society in Indonesia*, Papers in International studies Southeast Asia Series, No. 53, Ohio University Center for International studies.
- ⁷⁴ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *ibid*, h. 70.

- ⁷⁵ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *ibid*, h. 70-71.
- ⁷⁶ *Ibid*, h. 32.
- ⁷⁷ Penjelasan lebih lanjut lihat Andrew Heywood, chapter 10: tentang Religious Fundamentalism. Andrew Heywood, *op cit*, h. 291-298.
- ⁷⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak. 2009. Konflik Status dan Kekuasaan Masyarakat Batak Toba. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, h. 32.
- ⁷⁹ *Ibid*, h. 32.
- ⁸⁰ Priyo Budi Santoso. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: Rajawali Press, h. 4.
- ⁸¹ *Tonggo* tersusun secara puitis dengan gaya bahasa yang indah tetapi sulit dipahami. *Tonggo* diucapkan waktu sajian besar atau kecil, isinya bisa panjang bisa pendek. *Tonggo* hanya dapat diucapkan dalam suatu upacara *horja* santi atau karya adat dan keagamaan khas, di tempat terbuka bagi umum atau dalam Ruma Santi (rumah sakti). Umumnya *tonggo* yang diucapkan dalam masyarakat Batak Toba tradisional dilakukan pada upacara *somba-yang* kepada dewa dan roh leluhur.⁸¹ *Somba-yang* kepada dewa alam tertinggi pada suatu *bius* yang bertahta di atas bukit/gunung yang tinggi. Upacara ini dipimpin oleh Raja parbaringin dengan ujud untuk meminta berkah, petunjuk, perlindungan, dsbnya, yang bertalian dengan cita-cita terhadap kemakmuran dan keselamatan bagi penduduk atau klan masyarakat DNT yang bersangkutan. *Somba-yang* kepada *tondi* atau simangot (roh) para leluhur (atau ompu parsadaan) dan kepada Mulajadi *Na Bolon*. *Somba-yang* ini dipimpin oleh Raja *Bius* (atau Raja Parbaringin yang merangkap Raja *Bius* atau *Horja* yang umumnya terdiri dari datu/guru) dengan ujud meminta berkah, petunjuk, perlindungan, dll, di samping kemakmuran dan keselamatan terutama sekali adalah meminta kebahagiaan dan kejayaan. Ada tiga *tonggo-tonggo* yang sangat terkenal dalam masyarakat Batak Toba tradisional: *Tonggo-tonggo Siboru* Deak Parujar, *Tonggo-tonggo Dolok Pusuk Buhit*, dan *Tonggo-tonggo Sianjurmula*. Dalam *Tonggo-tonggo Sianjur Mulana* mengakui bahwa kerajaan Batak Toba-tua pada masa kerajaan teokrasi Dianasti Tuan Sorimangaraja dan Tuan Singamangaraja adalah kerajaan *Saniang Naga Tunggal*, artinya, kerajaan tunggal yang mengatur pemerintahan dengan keadilan dan kekuatan roh/jiwa (toba: *tondi na badia jala na marsahala*) dan bukan berdasarkan kekuatan senjata dan/atau kekuasaan duniawi semata-mata. Dalam *Tonggo-tonggo Dolok Pusuk Buhit* dinyatakan pengakuan bahwa Mulajadi *Na Bolon (Debata)* adalah "*mula ni patik dohot uhum*". Maksudnya, segala aturan dan hukum bersumber dari *Debata*. Demikian juga *Tonggo-tonggo Siboru* Deak Parujar merupakan *mula ni harajaon*, awal dari kerajaan, antara lain mengamanatkan: *gana na so boi tolonon, bulan na so boi oseon*, (sumpah tidak boleh ditelan, bulan tidak boleh diubah; jangan makan sumpah, jangan ingkar janji). Lihat Batara Sangit, *op cit*, h. 268. Ada banyak ragam *tonggo-tonggo* yang dianggap sebagai *Tonggo-tonggo* na hasaktian: 1. *Tonggo-tonggo* tu Mulajadi *Na Bolon*, 2. *Tonggo-tonggotu Debata Natolu*, 3. *Tonggo-tonggo* tu sahala na marhasaktian, 4. *Tonggo-tonggo* tohongan tu Debata Batara Guru, 5. *Tonggo-tonggo* tohongan tu Debata Balasori, 6. *Tonggo-tonggo* tohongan tu Debata Balabulan, 7. *Tonggo-tonggo* tohongan tu Debata. Ada juga *Tonggo-tonggo* di Banua Tonga: 1. *Tonggo-tonggo* tohongan ni Tuan Sorimangaraja, 2. *Tonggo-tonggo* tohongan ni Raja Singamangaraja, 2. *Tonggo-tonggo* tohongan ni Tuan Sariburaja, 3. *Tonggo-tonggo* tohongan ni Raja Uti, 4. *Tonggo-tonggo* tohongan ni Jonggi Manaor, 5. *Tonggo-tonggo* tohongan ni Ompu Paltiraja, 6. *Tonggo-tonggo* tohongan ni Sahala ni Raja Pandapotan, 7. *Tonggo-tonggo* tohongan ni pangidoan ni gondang, 8. *Tonggo-tonggo* tohongan Parbue Sakti, *Tonggo-tonggo* tohongan ni Pangurason, 9. *Tonggo-tonggo* tohongan ni Pardaupaan, 10. *Tonggo-tonggo* Horbo *Bius* (sakti rea). Tentang isi dan penjelasan lebih lanjut dari masing-masing *tonggo* ini lihat Raja Patik Tampubolon. 2002. *Pustaha Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama, hal. 279-304.
- ⁸² Bungaran Antonius Simanjuntak. 2009. Konflik Status dan Kekuasaan Masyarakat Batak Toba. Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 299.
- ⁸³ Meminjam istilah Rita Smith Kipp, *op cit*.
- ⁸⁴ Joel S. Kahn, dalam Benedict Anderson and Audrey Kahin, *op cit*, p. 93.
- ⁸⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak. *Ibid*, h. 31.

-
- ⁸⁶ Togar Nainggolan. 2012. *Batak Toba Sejarah dan Transformasi Religi*. Medan: Bina Media Perintis, h. 226.
- ⁸⁷ Bandingkan dengan ideologi sosialisme dalam Andrew Heywood., *op cit*, p. 103-113.
- ⁸⁸ Ida Basaria. “Ungkapan Metafora Pada Etnis Batak Toba”. Makalah Seminar Nasional Budaya Etnik III edisi 11. 01 Mei 2009. Diposkan oleh Departemen Sastra Daerah - FIB USU. Diunduh dari <http://sastradaerahusu.blogspot.com/2009/05/ungkapan-metafora-pada-etnis-batak-toba.html>, h. 7.
- ⁸⁹ *Ibid*.
- ⁹⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak. 2009. *Konflik Status dan Kekuasaan Masyarakat Batak Toba*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, h. 32.
- ⁹¹ W.B. Sidjabat, 1982, *ibid*, h. 408.
- ⁹² Jamaludin S. Hasibuan, *op cit*, h. 244.
- ⁹³ Ketika membahas aspek-aspek dari Ideologi petani Indonesia, Joel S. Kahn menyimpulkan: *Ethnicity, then, is clearly a part of the Indonesian ideological formation*. Lihat Joel S. Kahn, dalam Benedict Anderson and Audrey Kahin, *op cit*, p. 98.
- ⁹⁴ Ulbert Silalahi. 1989, *op cit*, h. 161; Jamaludin S. Hasibuan, *ibid*.
- ⁹⁵ Terdapat lebih 300 cabang *marga* yang membentuk satu masyarakat Batak. Lihat N. Siahaan dan H. Pardede, tanpa tahun, *Sedjarah Perkembangan Marga-marga Batak*, cetakan kedua, Indra, Balige, h. 84-91; Batara Sangti, *op cit*.
- ⁹⁶ Lihat Batara Sangti, *op cit*, h. 334.
- ⁹⁷ Lihat Joel S. Kahn, dalam Benedict Anderson and Audrey Kahin, *op cit*, p. 93.
- ⁹⁸ Batara sangti, *op cit*, h. 336.
- ⁹⁹ *Ibid*, h. 419.
- ¹⁰⁰ Batara Sangti, *op cit*, h. 335.
- ¹⁰¹ *Ibid*, h. 342.
- ¹⁰² *Ibid*, h. 337.
- ¹⁰³ W.B. Sidjabat, *op cit*, h. 232.

Bab 5

Rancangan Struktur Organisasi Birokrasi Kerajaan Tradisional: Struktur Teritorial

Pendahuluan

Struktur merupakan karakteristik utama untuk dapat disebut sebagai organisasi. Tidak satupun organisasi yang tidak berstruktur. Birokrasi adalah organisasi sehingga birokrasi memiliki struktur. Struktur utama organisasi adalah struktur fungsional dan struktur teritorial. Disebut struktur fungsional karena merupakan satu rancangan yang mengelompokkan orang atau tugas-tugas berdasarkan pada kesamaan keahlian dan keterampilan umum mereka atau sebab mereka menggunakan sumber-sumber yang sama. Sementara disebut struktur teritorial atau geographis karena merupakan satu rancangan di mana divisi-divisi diorganisasi berdasarkan pada keperluan dari lokasi yang berbeda dimana suatu organisasi beroperasi.

Berdasarkan rancangan teritorial atau geographis ada tiga tipe organisasi *harajaan* tradisional dalam masyarakat Batak Toba yaitu *huta*, *horja*, *bius*, *dinasti*. Selan tiga unit teritori *harajaan* tradisional dalam masyarakat Batak Toba, ada satu “kerajaan” yang mencakup atau menaungi sejumlah *harajaan bius* yaitu Kerajaan Dinasti Singamangaraja. Kerajaan Singamangaraja merupakan konfederasi dari sejumlah *harajaan bius*.

Masing-masing *harajaan huta*, *horja* dan *bius* merupakan satu teritori atau wilayah yang otonom dan merdeka. Masing-masing *harajaan* menjalankan kedaulatannya di atas wilayah dan penduduknya sendiri meskipun mereka telah mengkonfederasikan *harajaonnya* kepada *harajaan* yang lebih besar. *Harajaan huta* tidak dipaksa untuk berkonfederasi dengan *horja*, *harajaan horja* tidak dipaksa untuk berkonfederasi dengan *bius* dan *harajaan bius* juga tidak dipaksa untuk berkonfederasi dengan *Harajaan Singamangaraja*. Tetapi karena mereka telah berkonfederasi dengan *harajaan* yang lebih besar, maka otoritas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban setiap *harajaan* yang lebih kecil diserahkan kepada *harajaan* yang lebih besar. Dengan kata lain, ada urusan *huta* yang tidak boleh diintervensi oleh *harajaan horja*, tetapi juga ada urusan *huta* yang diserahkan kepada *harajaan horja* utamanya urusan yang menyangkut lintas *huta*. Hal yang sama juga terjadi pada *harajaan horja* dan *bius*.

Harajaon Huta

Harajaon huta merupakan harajaon atau pemerintahan terkecil dalam masyarakat Batak Toba tradisional¹. Pada tahun 1930-an, diperkirakan ada sekitar 8000 jumlah *huta* di Tapanuli Utara². Vergouwen, menggambarkan *huta* sebagai berikut:

Wilayah *huta* adalah suatu lapangan kecil berbentuk empat persegi dengan halaman bagus, keras dan kosong ditengah–tengahnya. Di satu sisi empat bidang persegi itu berdiri sekelompok kecil rumah-rumah (*ruma*) berbaris; masing-masing rumah memiliki pekarangan dapur sendiri di bagian belakang. Di depan barisan rumah ada lumbung padi (*sopo*), dan biasanya ada satu dua kubangan lumpur. Keseluruhannya dikelilingi pohon bambu yang tinggi; kadang-kadang ada juga sebuah *huta* dengan parit mengelilingi. Kita akan jumpai babi menggerus-gerus tanah dibawah kolong rumah, anjing mengendus-endus disekitar, ayam yang mengais-ngais tanah, dan kucing yang tidur dibawah sinar matahari. Seorang perempuan duduk menghadapi alat tenunnya didepan salah satu rumah, sementara seorang gadis muda menumbuk padi dalam losung, dan beberapa anak bermain-main dibawah rumpun kecil pohon buah-buahan³.

Secara teritorial, *huta* merupakan daerah otonom paling kecil dalam susunan pemerintahan tradisional dalam masyarakat Batak Toba-Tua, juga pemerintahan Dinasti Singamangaraja. *Huta* merupakan instansi pemerintahan terbawah yang mengatur seluruh kehidupan dalam satu *huta* termasuk mengatur hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah bagi keluarga marga pendiri *huta*, termasuk marga boru, marga penumpang dan tanah garapan bagi tiap keluarga batih/penggarap.

Dalam *huta* itu pulalah kita dapat mengamati sistem pemerintahan dan Adat sebagai hukum in action, dan arti raja dan warga serta relasi tanggungjawab timbalbalik “antara yang memerintah” dan yang “diperintah”, pencerminan mikrokosmos Toba yang dijiwai oleh ideologi Parbaringin. ..., yang bertindak sebagai kuasa Adat dalam *huta* ialah kepala *huta*, suatu jabatan dengan berbagai sebutan. Sebutan raja-*huta* adalah yang paling lajim (*tunggane huta*, sebutan lainnya, *siboan bunti*)⁴.

Huta merupakan satu wilayah atau tempat yang pertama kali dihuni oleh satu leluhur marga *Huta* yang pertama kali ada dalam masyarakat Toba adalah Sianjur Mulamula atau Sianjur Mulana. *Huta* ini diakui merupakan bekas *huta* atau Perdesaan Si Raja Batak, asal mula etnik Batak Toba. Kemudian didirikan *huta* yang baru yaitu *huta* Parik Sabungan yang diakui sebagai bekas *huta* atau perdesaan Guru Tatea Bulan anak pertama dari Siraja Batak yang terletak pada pertengahan lereng Dolok Pusuk Buhit sebelah Barat; dan *huta* Sijambur yang

diakui sebagai bekas *huta* atau perdesaan Raja Isumbaon anak kedua Siraja Batak yang terletak pada pertengahan lereng Dolok Pusuk Buhit sebelah Timur.

Umumnya, *huta* dikelilingi oleh tembok tanah atau parit dengan pagar bambu atau dari batu sebagai perlindungan. Di bagian dalam *huta* terdapat rumah-rumah dengan dua deretan atau lebih dari Timur ke Barat diantara halaman yang luas yang biasanya digunakan untuk menjemur padi atau hasil pertanian lain atau untuk berbagai kegiatan *horja* atau upacara pesta persembahan kurban. Biasanya di luar *huta* dekat pintu gerbang *huta* terdapat satu bidang tanah tempat orang berkumpul untuk bercakap-cakap setelah habis kerja dan dijadikan sebagai tempat bersidang atau bermusyawarah serta tempat pembicaraan yang mungkin akan menjurus ke suatu transaksi. Tempat ini disebut sebagai *partungkoan* (suatu tempat pelataran di bawah naungan pohon beringin atau pohon ara tua).

Foto 5.1 Perkampungan Tradisional dari Marga Sitio di Simanindo (atap seng)



Sumber: Foto dari Penulis pada 12 Mei 2012

Dahulu kala satu *huta* biasanya berisi enam sampai dengan duabelas rumah yang beberapa di antaranya dihuni beberapa keluarga. Hampir di setiap *huta* terdapat satu kelompok marga yang dominan yaitu marga *sipungka huta* atau pendiri desa. Tetapi lama kelamaan ada kecenderungan satu *huta* dihuni oleh marga dengan komposisi marga *sipungka huta* menjadi lebih kecil sementara marga penumpang atau marga pendatang menjadi lebih dominan. Di dataran tinggi Humbang pada tahun 1878 terdapat paling banyak 16 rumah, sedangkan di Samosir pada tahun 1912 masing-masing *huta* rata-rata berpenduduk 35 orang.⁵ *Huta* dengan jumlah lebih dari duapuluh rumah adalah jarang.

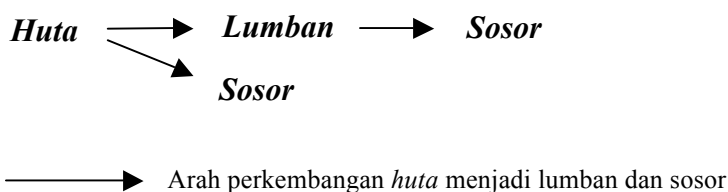
Awalnya satu *huta* merupakan tempat tinggal dari satu *marga (clan)* ialah keluarga dari satu galur keturunan yang sama.⁶ Dengan kata lain *huta* merupakan kesatuan teritorial yang berasal dari satu klen atau marga sehingga menjadi satu komunitas terkecil untuk mengadakan upacara kurban bersama. Menurut adat Batak, marga adalah pemilik tanah dan *huta* sehingga hak untuk memberikan

tanah dari wilayah tertentu dari *huta* kepada pihak lain berada pada cabang marga yang menempati *huta*. Marga yang pertamakali mendirikan *huta* disebut *marga sipungka huta* ialah keturunan langsung dari marga yang pertamakali mendirikan *huta*. Dengan demikian yang menjadi komunitas *huta* adalah para pria dan keluarganya yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, keturunan mana diperhitungkan menurut garis bapak saja.⁷ Mereka itu dengan sendirinya mempunyai pertalian darah, dan tentunya adalah juga mempunyai marga atau nama klen yang sama. Mereka masih dapat saling mengenal, dan masih dapat menelusuri hubungan kerabat.⁸ Jadi antara *marga* dan *huta* bagi masyarakat Batak Toba memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain, dan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan.⁹

Penghuni *huta* kemudian berkembang sehingga tidak lagi dihuni hanya oleh keturunan marga sipungka *huta* melainkan sudah ada marga pendatang. Dengan demikian dalam suatu *huta* atau desa berdiam juga anggota marga lain selain anggota marga penguasa atau keturunan pendiri dan pemilik desa. Mereka digolongkan sebagai kelompok *marga boru* jika mengawini anak perempuan keturunan pendiri desa dan kelompok *marga panombang* (marga pendatang atau penumpang) jika tidak ada kaitan dengan perkawinan atau keturunan dengan marga pemilik desa. Karena itu penghuni *huta* pada akhirnya dapat dikelompokkan atas: *sipungka huta*, boru dan pendatang.

Satu *huta* kemudian berkembang dan semakin banyak penghuninya sehingga sebagian dari mereka membuka satu perkampungan baru dan biasanya dekat dengan *huta*. Tempat tinggal yang baru ini disebut *lumban* atau sosor. *Lumban* adalah suatu wilayah yang dihuni oleh keluarga-keluarga yang merupakan warga dari satu bagian klen. Jika *lumban* ini penuh maka sebagian dari penghuni *lumban* ini kemudian mendirikan tempat tinggal baru yang lebih kecil di dekat *lumban* dan lebih jauh dari *huta*. Tempat tinggal yang baru disebut *sosor* (Bagan 5.1). *Sosor* adalah suatu perdesaan baru yang biasanya kecil di luar

Bagan 5.1: Perkembangan *huta* menjadi *lumban* dan *sosor*



lumban dan biasanya dihuni oleh keluarga-keluarga yang merupakan warga dari satu bagian klen penghuni *huta* atau *lumban*. Umumnya, *lumban* dan *sosor* didirikan karena *huta* induk dan atau *lumban* sudah penuh, baik sebagai tempat untuk kediaman maupun untuk sumber pencaharian.

Selain disebabkan oleh kepadatan penghuni atau kekurangan tanah karena penambahan penduduk, mendirikan *huta* atau terbentuknya *huta* yang baru sebagai tempat tinggal baru juga disebabkan oleh motif seperti motif perluasan ruang hidup bagi galur keturunan yang disebut *pabidanghon panggagatan* (pemekaran perumpunan atau memperluas tanah sebagai sumber nafkah). Pembentukan desa yang baru juga karena motif memperbesar daya galur terhadap musuh di sekitar karena kehormatan seorang pemimpin akan makin meningkat apabila putra dan puterinya mendirikan *huta* yang baru. Motif membelah galur pendiri jika sudah terlalu besar, karena perselisihan, keinginan seorang bapak yang berpengaruh untuk menempatkan anak-anaknya dalam *harajaon* masing-masing, dan keinginan untuk mandiri juga mendorong terbentuknya *huta* yang baru.

Pendirian suatu desa baru bersumber pada kecenderungan orang Batak untuk menyediakan ruang baru bagi suatu kelompok silsilah yang bertumbuh dalam jumlah dan martabat. Ini menjurus kepada masyarakat yang dibentuk khusus menurut garis silsilah, karena sejak dulu naluri lestari-diri dari kelompok yang sekaum mendorong mereka untuk hidup bersama di dalam wilayah yang terbatas.¹⁰

Karena semakin berkembang dan makin banyak penghuninya, maka lama kelamaan sebuah *lumban* atau *sosor* bisa berubah menjadi satu *huta*. Kadang-kadang tetap bernama *lumban* atau *sosor* tetapi statusnya sama dengan status *huta*. Tetapi untuk dapat menjadi *huta*, maka kepala *huta* yang baru harus meminta restu dari kepala *huta* yang lama supaya mereka mandiri untuk mengurus rumahtangga sendiri. Permintaan ini umumnya tidak boleh ditolak dan sejak saat itu semua urusan dan permasalahan *huta* tidak perlu lagi diintervensi oleh atau dikonsultasikan dengan *huta* induk. *Huta* tidak harus dari *lumban* atau *sosor* melainkan bisa langsung didirikan menjadi *huta*. Jika *lumban* atau *sosor* berubah status menjadi *huta*, maka ia terikat dengan *huta* yang menjadi induk dari *lumban* atau *sosor* tersebut. Induk dari *huta* dinamakan *huta sabungan*. Mendirikan *huta* yang mandiri dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk menjadi komunitas sendiri dengan kepribadian sendiri sudah terpenuhi dan dilakukan melalui upacara mendirikan *huta*¹¹.

Satu *huta* yang baru hanya bisa diakui sebagai *huta* sejajar dengan *huta* yang sudah ada apabila ada pengakuan dari *huta* yang lama atau kampung induk. *Huta* yang pertamakali didirikan oleh seorang kakek-moyang dari satu galur keturunan menjadi desa induk dari keturunan marga pendiri *huta* tersebut. Marga pendiri kampung tersebut menjadi *marga raja* di *huta* yang didirikannya. Karena penghuni *huta* makin banyak dan makin besar maka beberapa keturunan penghuni *huta* mendirikan *parhutaon* (perdesaan) yang baru dengan sistem pengaturan yang baru. *Huta* yang terletak di sekitar desa induk atau *huta parserahan*, baik masih

didiami maupun sudah ditinggalkan, dan yang terpecah daripadanya biasanya berasal dari satu galur keturunan yang sama dari *saompu* (satu kakek bersama).¹²

Pada masa Dinasti Singamangaraja, misalnya, di wilayah Bakara atau *Bius Sionom Ompu* terdapat enam *huta* yaitu: *Huta* Siunongunong Julu, sebagai *huta* dari marga Purba, Manalu dan Simamora; *Huta* Lumban Raja, sebagai *huta* tempat tinggal dari marga Sinambela dan Bakara dan di *huta* ini terdapat “istana” Raja Singamangaraja; *Huta* Sionggang, sebagai *huta* yang ditempati marga Sihite dan Simamora; *Huta* Sinambela Simanullang, sebagai *huta* yang ditempati oleh marga Sinambela dan Simanullang; *Huta* Simangulampe, sebagai *huta* dari marga Simanullang dan Sinambela; *Huta* Marbun, ditempati oleh marga Marbun Dolok (Lumban Batu), Marbun Tonga (Lumban Gaol), dan Marbun Toruan (Banjar Nahor). Kemudian *huta* ini berkembang menjadi delapan, di mana *Huta* Marbun menjadi tiga sehingga masing-masing submarga Marbun telah memiliki *huta* sendiri-sendiri.

Satu marga dapat mendirikan *huta* didalam *huta* atau dalam satu wilayah *horja*. Untuk mendirikan *huta* di Bakara sebagai wilayah *Bius Sionom Ompu* pada masa Dinasti Singamangaraja, misalnya, ada *Patik* (ketentuan, aturan). Pertama, satu marga dari *Sionom Ompu* tidak diperkenankan membuka *huta* di *huta* kelima marga lain. Tetapi marga di luar dari marga *Sionom Ompu* dapat mendirikan *huta/lumban* di *huta* dari masing-masing marga *Sionom Ompu*. Misalnya, marga Sinaga membuka *huta/lumban* di *huta* Sionggang, yaitu *huta* dari marga Sihite dan Simamora. Kedua, Untuk mendirikan *huta* atau menjadikan lumban menjadi *huta* biasanya dilakukan melalui upacara adat dengan memotong kerbau. Ini dilakukan agar *huta* tersebut memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan *huta* yang telah ada sebelumnya. Ini bisa melibatkan semua atau satu *horja* di *Bius Sionom Ompu*.

Melibatkan semua atau hanya satu *horja* dalam satu *bius* memiliki implikasi tertentu terhadap kedudukan, hak dan kewajiban. Jika melibatkan semua *horja* di *Bius Sionom Ompu* berarti kedudukan, hak dan kewajiban *huta* yang baru didirikan sama dengan *huta* lain yang sudah ada sebelumnya.¹³ Misalnya, hak mendapat *jambar* dalam suatu upacara *bius* di *Bius Sionom Ompu*. Sebaliknya, jika melibatkan hanya satu *horja* saja berarti kedudukan, hak dan kewajiban dari *huta* yang baru didirikan hanya sama dengan *huta* yang ada di lingkungan *horja* di mana *huta* tersebut didirikan, sehingga tidak mendapat legitimasi atau pengakuan dari *huta* dan *horja* lain yang ada di *Bius Sionom Ompu* atau *bius* Bakara.

Cara mendirikan *huta* mendukung kekukuhan matarantai yang menghubungkannya dengan pendirinya. Mereka membawa *bunti* (sesajen) untuk dipersembahkan kepada *Mulajadi Nabolon* (Tuhan yang tertinggi) dan *Boraspati ni tano* (dewa tanah, roh bumi) untuk mendapat berkat mereka dan untuk menjauhkan mereka dari segala bahaya dan untuk memohonkan roh pengawal

yang baik bagi *huta*, dengan mengucapkan *tonggo-tonggo* (doa, mantera) oleh *datu* (dukun). Juga sekaligus melakukan jamuan makan untuk mendapat pengakuan dari *huta* yang sudah ada sebelumnya, *horja* dan *bius*. Yang terakhir ini penting karena suatu *huta* yang baru hanya bisa diresmikan kalau sudah ada ijin dari *huta* yang lama (disebut kampung induk) dan telah menjalankan suatu upacara tertentu yang bersifat membayar utang kepada *huta* induk. Ini menunjukkan matarantai spiritual dan religius dan hubungan hukum antara orang yang mempersembahkan di satu sisi, dan *huta* di sisi lainnya.¹⁴

Dalam upacara mendirikan *huta* biasanya telah dipilih tiga orang dari dan oleh kelompok marga yang bermaksud mendirikan *huta* untuk memimpin: satu orang *parsinabul* (juru bicara), satu orang *sihatahon bunti* (yang memberitahukan apa yang dibawa untuk dipersembahkan, sipembawa persembahan), dan satu orang *sibolakhon amak* (yang mengembangkan tikar untuk duduk). Jika *huta* sudah resmi berdiri, ada kebiasaan yang menjadi *raja huta* untuk *huta* yang baru berdiri tersebut adalah satu dari tiga orang tersebut. Parsinabul diangkat menjadi *raja huta*.¹⁵ Meskipun *huta* yang baru telah mandiri, namun ia tetap terikat atau memiliki ikatan yang kuat dengan kampung induknya. Itu karena di antara mereka ada ikatan kekerabatan dan adat. Ini sangat jelas tampak ketika ada upacara yang dilakukan oleh kampung induk atau *huta* parserahan (kampung tempat berpencar).

Bagi orang Toba, *huta* memiliki watak persekutuan masyarakat yang menonjol dan jelas. Ia memiliki batas-batas teritorial yang pasti walaupun bukan dalam ukuran panjang atau luas. *Huta* dalam arti sempit yaitu kompleks perumahan umumnya dikelilingi oleh suatu parit, suatu dinding tanah yang tinggi berupa tembok yang ditumbuhi oleh rumpun-rumpun bambu yang rapat. Fungsinya adalah sebagai pertahanan dari serangan musuh, baik dari *huta* lain atau dari binatang-binatang buas. Jadi *huta* merupakan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah dengan tembok dan pariknya.

Dalam arti luas, *huta* tidak hanya satu perkampungan yang dikelilingi tembok atau parik atau bambu, tetapi seluruh tanah yang menjadi bagian dari *huta*. Jika *huta* didirikan di atas tanah tak diduduki, maka di kebanyakan kawasan hukum adat, menambahkan lahan ke sekitar *huta* itu kira-kira 30 kaki atau lebih. Di beberapa tempat tanah ini merupakan cadangan kalau-kalau *huta* bertambah besar. Daerah ini disebut tamba-tamba ni *huta*, atau pangeahan ni *huta*. Tanah ini pun menjadi bagian dari teritorial dari *huta*. *Huta* tetangga hanya boleh membangun tembok dan menggarap tanah sampai titik ini sebagai titik demarkasi antar *huta*, dan ia pun dinamai *nilinggom ni bulu* (yang berada di bawah naungan bambu), atau *parhaisan ni manuk* (tempat ayam mengais mencari makan). Lain tempat, lain cara mengukurnya, tetapi bagi setiap *huta* jelas batas-batasnya dan selalu diperhitungkan sebagai bagian dari *huta* yang bersangkutan.¹⁶ Dengan demikian pengertian *huta* jauh lebih luas dari tempat tinggal yang dikelilingi oleh

tembok tanah atau parit dan pagar bambu sebagai perlindungan atau wilayah atau tempat yang pertama kali dihuni oleh satu leluhur marga atau seperti yang digambarkan oleh banyak penulis.

Sebagai pusat-pusat politik dalam masyarakat Batak Toba, *huta* terkait dengan batas wilayah yang jelas, atau batas wilayah tidak dapat diabaikan¹⁷ *Huta* adalah sel dari suatu organisme politik yang dibentuk oleh marga dan kelompok suku,¹⁸ sebuah sel dengan kehidupan persekutuan untuk pengaturan bersama atas dasar ikatan marga dan kekerabatan untuk memenuhi kebutuhan materi dan rohani. Di samping itu *huta* mempunyai ciri yang menandainya sebagai suatu persekutuan masyarakat, yaitu otoritasnya sendiri. Karena itu *huta* merupakan satu *harajaon* (kerajaan, pemerintahan) yang otonom, dan sering disebut sebagai republik kecil yang merdeka. Itu sebabnya tiap-tiap *huta* berhak membuat perjanjian dengan satu atau beberapa *huta* lain; membuat kerjasama dalam urusan pertahanan dan pangan. Birokrasi tradisional Toba tidak mengenal kekuasaan yang terpusat secara teritorial, kecuali kekuasaan terpusat secara institusional di tingkat *huta* yang di tangan raja *huta*. Vergouwen menulis:

Di zaman *Pidari*, Toba lebih suka berdiam di unit kecil yang menyenangkan, terdiri dari beberapa ratus orang, atau paling-paling seribu, dan yang kepentingannya hanya terbatas pada urusan sendiri. Mereka belum sampai kepada tingkat seni pemerintahan yang mampu mencakup suatu daerah luas di bawah satu pemerintahan yang mantap. Tidak ada orang atau orang-orang yang memangku kekuasaan sentral. Tidak ada penyelenggaraan peradilan bersama yang menangani perselisihan atau pelanggaran kecil yang cakupannya melebihi suatu wilayah yang kecil (penulis: *huta*); juga tidak ada pengadilan untuk naik banding guna melawan keputusan yang diambil di wilayah-wilayah kecil tersebut. Perselisihan yang timbul di antara persekutuan-persekutuan masyarakat diselesaikan dengan jalan damai atau angkat senjata. Dan jika urusan intern di dalam satu wilayah sudah kacau sama sekali, sering-sering campur tangan raja (kepala), dari pihak kelompok afina sebagai penengah lebih manjur ketimbang raja dari kelompok keturunan sedarah.¹⁹

Jadi perasaan memiliki *huta* dan kemandirian dari masing-masing *huta* di pusat *Harajaon* Toba sangat kuat. *Huta* yang didirikannya atau yang didirikan oleh orangtua atau leluhurnya dianggapnya miliknya sendiri yang tak boleh dikuasai oleh orang lain. Oleh perasaan pemilikan yang kuat ini, kata W.B. Sidjabat,²⁰ maka *hutanya* dikelilingi dengan *bulu duri* (bambu berduri), parik (tembok) dari tanah yang tinggi seperti di Tomok Bolon, atau dengan parik dari ongokan batu-batu besar seperti di Sihotang, Tamba, Bakara, Harianboho, Batu-batu, Sangkal, Ambarita, Limbong dan lain-lain. Keturunan dari *marga* yang pertamakali membuka *huta* tersebut dinamakan kelompok *marga sipungka huta*. Begitu eratnya hubungan antara marga dan *huta* hingga orang Toba selalu mengatakan:

marga do nampuna tano (margalah pemilik tanah). Ini menjadi prinsip yang diterima sebagai prinsip dasar hukum adat tanah dalam masyarakat Batak Toba.²¹

Di Toba, perbedaan intern di antara orang penghuni desa berasal dan tergantung dari bagaimana *huta* didirikan. Sekali orang sudah *mamungka huta* (mendirikan desa), apakah sendirian melakukannya atau bersama-sama dengan orang lain, berarti ia telah menciptakan buat dirinya dan buat keturunannya (laki-laki) suatu masyarakat sendiri, dan dengan berbuat demikian dia dan keturunannya lelaki telah memperoleh hak untuk menjadi tuan di sana, dan bebas menentukan boleh tidaknya orang lain tinggal di sana.²² Jadi dalam masyarakat Batak Toba, tanah itu adalah hak ulayat dari *marga sipungka huta* yaitu suku yang pertama kali membuka dan menetap mendiami tanah itu, dan diwakili oleh kepala suku yang merangkap kepala daerah atau kepala *huta*.²³

Sebaliknya, *huta* bukan hak ulayat marga penumpang, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai marga (klen) yang lain yang tinggal di desa itu, atau suami dari seorang anak wanita yang tinggal sebagai penumpang pada mertuanya.²⁴ Jika seseorang *manombang tano* (mencari tempat tinggal baru di satu wilayah *marga* lain) maka ia dan keturunannya menjadi kelompok *marga penumpang* dan menjadi *boru gomgoman* (kerabat boru yang diperintah) bagi keturunan *marga sipungka huta* sebagai *marga* yang memerintah. Mereka (anggota *marga penumpang*) juga disebut *parripe* atau *anak ripe* atau *nahinomit* (orang yang diperintah) atau *marga boru*²⁵ tidak banyak sangkutan dengan urusan desa kalau mereka belum lama datang ke desa itu. Ini berarti pusat-pusat politik dalam masyarakat Batak Toba terkait dengan penguasaan rakyat ialah penguasaan *marga sipungka huta* atas penghuni *huta* dan terkait pula dengan wilayah.

Dalam hukum adat Batak-Toba, kelompok *marga penumpang* tidak memiliki “hak” yang sama dengan *marga sipungka huta*. “Hak” atas *huta* itulah faktor pembeda posisi hukum di antara *pangisi ni huta* (penghuni *huta*).²⁶ Hak atas tanah, hak menjadi raja, itu adalah hak *sipungka huta* (pendiri *huta*), dan hak itu selamanya berada di tangan keturunannya selama mereka terus bertempat tinggal di *huta* itu. Hak itu baru tidak berlaku hanya jika *huta* dengan sengaja ditinggalkan dan menjadi *huta na niulang, lobu*,²⁷ atau desa yang sudah tidak ada penghuninya. Di Bakara, misalnya, ada enam *marga* dan masing-masing *marga* memiliki *huta*. Sementara *huta/Lumban Sinaga* yang terdapat di *huta Simamora* dan *huta Sibaganding* dan *huta marga Simbolon* di *huta Sinambela Simanullang* tidak dapat diklaim sebagai “milik” *marga Sinaga* atau *Simbolon*. Kedua *marga* ini tidak dapat menjadi *marga raja* di *huta* tersebut, melainkan diakui dan mengaku sebagai *marga penumpang* di daerah Bakara.²⁸

Jadi, hak atas *huta* adalah faktor pembeda di antara *isi ni huta* (penghuni desa). Ada perbedaan hak penguasaan tanah antara *marga sipungka huta*, atau *marga raja*, atau *marga nampuna huta* (*marga pemilik desa*) dan *marga*

penumpang. Hak atas tanah yang diperoleh oleh marga boru lebih terbatas daripada hak anggota marga yang berkuasa. Lebih terbatas lagi hak marga pendatang dari pada marga boru. Jika meninggalkan desa, mereka kehilangan hak atas tanah tersebut. Makin lama keturunan *boru* berdiam di sebuah desa, semakin kokoh hak-hak mereka atas tanah dan mereka disebut *boru na gojong*. Hak seseorang yang tidak termasuk ke dalam *marga sipungka huta* atau marga yang memerintah jauh lebih lemah dari yang termasuk pargolat, tetapi lebih kuat dari hak sekedar hak *parripean* (memungut hasil). Marga penumpang pada awalnya hanya memiliki hak pakai, tetapi hak ini bertambah kuat dengan bertambah lamanya *marga* penumpang tinggal bersama karena pada umumnya perkawinan yang terjadi antara *marga* yang memerintah dan *marga* penumpang melahirkan hubungan kekeluargaan yang bersegi banyak.²⁹

Jika hal ini yang terjadi maka marga penumpang yaitu marga penumpang tertua berhak mendirikan *huta* sendiri dan hidup bersama di atas tanah yang diberikan kepadanya; dia boleh menerima marga lain sebagai penumpang dan dapat memberikan kepada mereka ini hak guna tanah; dia berhak untuk memberikan tanah yang digarapnya sebagai suatu pemberian di dalam suatu perkawinan, *pauseang*, kepada anak-anak puteri darinya; hak melakukan fungsi penting dalam kurban komunal dan dalam pelaksanaan peradilan; dan mengambil bagian dalam musyawarah-musyawarah umum. Hak-hak istimewa tersebut terutama dijalankan oleh wakil tertua dari *raja ni boru* (tetua dari pihak pengambil isteri) dari *marga* penumpang pertama.³⁰

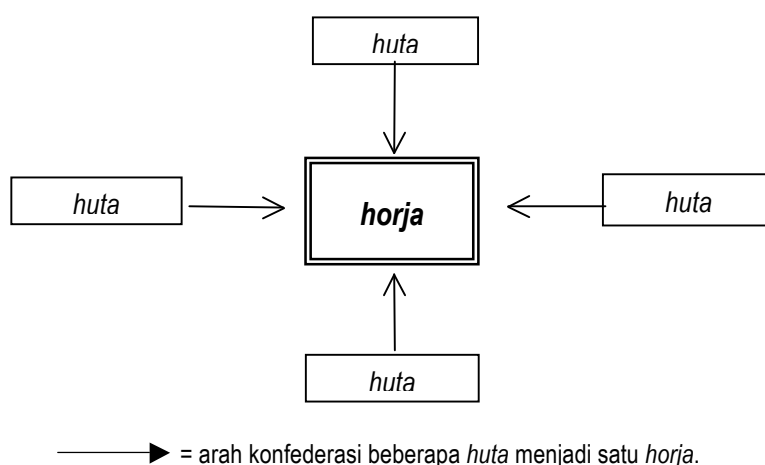
Harajaon Horja

Setiap *huta* adalah unit otonom dan mengatur kepentingan sendiri. Tetapi seringkali ada kepentingan yang sama dari banyak *huta* yang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan secara bersama-sama oleh sejumlah *huta* tersebut. Untuk mengatur kepentingan bersama tersebut, dan karena umumnya mereka masih berasal dari satu *ompu*, maka beberapa *huta* bersepakat atau bersekutu untuk membentuk pemerintahan atau pengaturan bersama dalam bentuk sebuah konfederasi yang disebut *harajaon horja*.

Setelah kelompok penduduk mencapai jumlah tertentu, ia menghendaki semacam organisasi dan berdirinya aturan-aturan yang tepat serta peranan-peranan yang ditunjang oleh suatu sistem kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan materi dan rohaninya. Sekali tersusun demikian, tanggungjawab untuk kehidupan bersama diteruskan bukan pada semua, tetapi hanya pada sebagian anggota, terutama pada kepala-kepalanya, dewa-dewanya dan penguasa-penguasa, yaitu elit-elit istimewa.³¹

Awalnya, *horja* (*horja* dapat juga berarti sebagai pesta, wilayah, komunitas silsilah) merupakan persekutuan masyarakat kurban. Tetapi kemudian berubah menjadi persekutuan yang mengatur kepentingan bersama dari sejumlah *huta* bukan saja urusan rohani atau persembahan kurban melainkan juga urusan duniawi, seperti halnya peperangan, perdamaian, keamanan, pelanggaran atas hak kepemilikan tanah, perselisihan karena penguasaan lahan, danau atau irigasi di antara anggota *horja* atau dengan *huta* dari *horja* lain. dalam. Bahwa urusan duniawi menjadi urusan *harajaon horja* karena satu *huta* tertentu yang mengalami tekanan dari *huta* lain yang tidak sesama *horja* dalam perang antara *huta* (masa tersebut dikenal dengan jaman *Pidari*) akan minta bantuan dari *huta* lain terutama dari *huta* yang memiliki kaitan genealogis atau satu marga yang masih dalam satu *horja*. Dengan budaya komunalitas yang kuat di antara semarga atau satu *horja* membuat *horja* ikut terlibat. Jadi satu pemerintahan atau *harajaon horja* merupakan persekutuan atau konfederasi dari beberapa pemerintahan atau *harajaon huta*. Umumnya 3-10 *huta* atau 15 sampai 20 *huta* (Bagan 5.2).

Bagan 5.2: Struktur teritorial/konfederasi *horja*



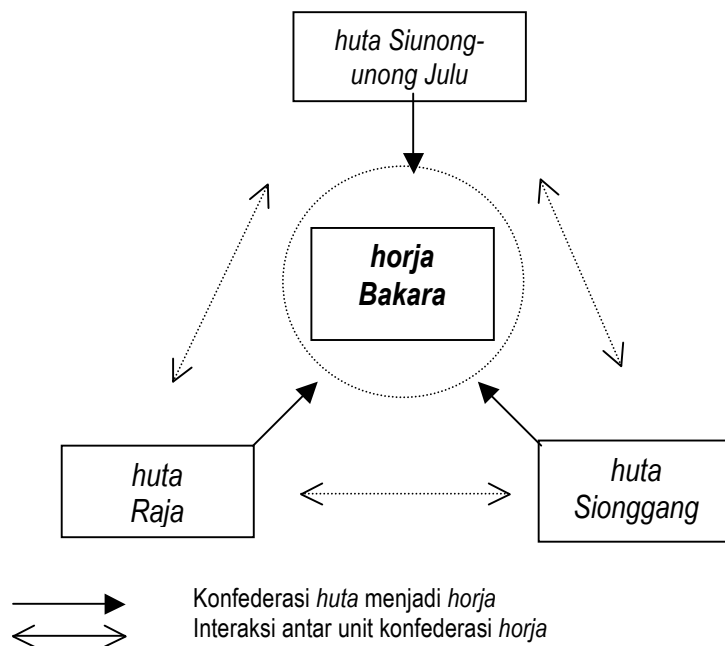
Horja merupakan persekutuan yang masih terikat dengan ikatan hubungan kekerabatan marga, baik hula-hula, dongan sabutuha dan boru. Meskipun ada marga lain dalam satu *horja* (dan juga *huta*) mereka memiliki hubungan kekerabatan atau sudah dianggap sebagai anggota keluarga. Keterikatan dan hubungan antar *huta* dalam satu *horja* ditentukan oleh ikatan genealogis, adat, religi, teritorial. Di Bakara, misalnya, berawal dari dua *horja* yaitu: *horja* Bakara Sihite Simamora, dan *horja* Sinambela Simanullang Marbun. Kemudian pada masa Dinasti Singamangaraja ke XII berkembang menjadi tiga *horja*. Pertama adalah *horja* Sinambela Simanullang yang terbentuk dari *huta* Simangulampe dan *huta* Sinambela Simanullang. Kedua adalah *horja* Bakara, Sihite, Simamora yang terdiri atas *huta* Sionggang, *huta* Raja, dan *huta* Siunongunong Julu. Ketiga

adalah *Horja* Marbun terdiri atas *Huta* Marbun Toruan, Marbun Tonga, dan Marbun Dolok. Selanjutnya *horja* ini berkembang menjadi enam *horja* yang terdiri dari *Horja* (dari marga) Bakara, *Horja* (dari marga) Sinambela, *Horja* (dari marga) Sihite, *Horja* (dari marga) Manullang, *Horja* (dari marga) Marbun, *Horja* (dari marga) Simamora (Bagan 5.3).

Menurut Vergowen, untuk dapat disebut sebagai *horja*, harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut.³²

1. Sada *onan* (satu pasar).
2. Sada *homban* (satu mata air suci yang didiami roh air, biasaya ada diladang atau sawah).
3. Sada *pangulubalang* (satu pusat kuasa, adi kodrati).
4. Sada *ruma parsantian* (satu rumah untuk roh leluhur dan sekaligus menjadi rumah tempat mempersembahkan sesajen).
5. Sada *huta parserahan* (satu kampung induk).

Bagan 5.3: Persekutuan *horja* Bakara di *bius* Si Onom Ompu



6. Sada *marga boru*, sada *marga hula-hula* (satu *marga* pengambil isteri, satu *marga* pemberi isteri).
7. Sada *pargomgom* dan *nanigomgom* (satu pelindung dan yang dilindungi).
8. Sada *padan* (satu janji).

Dalam hal ciri yang terakhir menunjukkan bahwa *horja* telah berhak untuk mengikat atau membuat perjanjian dengan *horja* lain untuk kepentingan bersama atau kepentingan semua *huta* yang bersekutu dalam *horja*, misalnya dalam hal

irigasi. Bahkan sekalipun itu untuk kepentingan dari beberapa *huta* yang bersekutu dalam *horja*, maka janji tersebut tetap menjadi janji atau padan bersama. Di Toba Holbung, *horja* yang agak besar itu merupakan unit yang secara kesilsilahan murni adanya, dan yang sekaligus merupakan satu masyarakat kurban dan persekutuan masyarakat. Memang benar bahwa *horja* yang mempunyai pertalian keluarga berada di sampingnya tetapi tidak selalu begitu rupa sehingga kerabat yang paling dekat juga menjadi tetangga yang paling karib.³³ Ini terungkap dalam pepatah orang Toba berikut: “*Jonok pe partubu jumonok dope parhundul*” (dekat atau penting hubungan darah masih lebih dekat atau lebih penting hubungan domisili). Artinya, tiap orang atau marga yang tinggal dalam satu teritori tempat tinggal terikat mutlak sekalipun mereka bukan berasal dari satu leluhur. Tentang makna *horja*³⁴ tampak dalam penjelasan berikut:

Jika kepala-kepala desa pergi menghadiri pertemuan kepala-kepala wilayah, mereka pergi menurut galur keturunan, *marsuhu-suhu* atau *marompu-ompu*: di Humbang kita dapat menjumpai beberapa kepala yang diberi nama *raja suhu-suhu*; mereka adalah tetua dari galur keturunan. Maka itu, istilah *horja* dapat pula digunakan untuk menunjukkan satu wilayah dengan komposisi yang tidak ada campuran. Namun, ada juga sejumlah istilah yang mengandung makna geografis, umpamanya *ladang* (himpunan ladang-ladang untuk pertanian) dan *laut* (daerah darat). Arti lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan dan pemerintahan, seperti *saharungguan* (mereka yang bertemu pada suatu tempat berkumpul, atau menunjuk kepada suatu persidangan yang terdiri dari komposisi campuran), dan *sapartahian* (mereka yang berunding). Yang lainnya berkaitan dengan upacara persembahan umum, yaitu *bius*³⁵.

Harajaon *horja* menjadi satu bentuk pemerintahan yang otonom dalam *Harajaon* Toba yang mengatur kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan dari seluruh warganya. Walaupun *huta* nampak sebagai republik kecil yang merdeka dan otonom, dalam perkembangannya ia bukanlah sebuah unit organisasi kemasyarakatan dan politik yang lepas dari yang lain. Bagaimanapun juga sekarang ini, lingkup hidup penduduk *huta* sudah cukup meluas melalui pergaulan yang bertambah banyak, sehingga banyak dari kepentingannya, dan bagi sejumlah lainnya bagian terbesar dari kepentingan itu berada di luar lingkup langsung *huta*. Karena itu *huta* selalu merupakan bagian dari satu persekutuan masyarakat yang lebih tinggi yaitu *horja* dan atau *bius*.

Pembentukan *horja* dilakukan karena penghuni dari satu *horja* cenderung berasal dari satu marga induk, meskipun ada anggota marga lain yang tinggal sebagai penghuni peserta, sehingga di antara mereka terjadi hubungan yang intensif dengan secara bersama-sama melaksanakan kegiatan kemasyarakatan (upacara adat) dan kerohanian (upacara religius). Tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa penduduk dari satu *huta* di wilayah Toba merasa berbeda dari penduduk *huta* lain, apalagi jika di antara mereka tidak ada ikatan marga dan

kekerabatan. Karena itu diantara mereka sering terjadi persaingan antar *huta*. Untuk meminimasi persaingan tersebut dan sekaligus untuk melakukan kegiatan dan kepentingan bersama seperti upacara adat dan upacara religius, maka mereka merasa perlu bersekutu dalam apa yang disebut persekutuan *horja*. Mereka menjadi satu wilayah harajaon (pemerintahan) yang cakupan wilayahnya terdiri dari beberapa *huta* yang disebut *horja*.

Sebagai satu wilayah pemerintahan, maka ada dua fungsi penting dilakukan oleh *horja*, yaitu fungsi kerohanian agama dan fungsi administrasi dan hukum. Pada mulanya pemerintahan konfederasi *horja* merupakan persekutuan masyarakat kurban, akan tetapi lama kelamaan berubah menjadi masyarakat hukum yang mengatur kepentingan duniawi warganya³⁶. Dalam hal yang pertama, konfederasi *horja* merupakan masyarakat kurban. Dala kontek ini ditemukan arti dari *horja* sebagai pesta atau ulaon marga. *Horja* dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan terkait dengan upacara pesta adat, atau ulaon adat dari marga. *Horja* dalam arti inilah yang masih mungkin dapat kita dengar sekarang dan bahkan yang dipahami oleh banyak orang. Seperti diketahui, upacara adat dapat dibedakan kedalam tiga kategori berdasarkan partisipan dalam penyelenggaraan upacara dan jenis serta tujuan upacara yaitu: *ulaoan huta*, *ulaon horja*, *ulaon bius*. Sebagai satu pesta,

In general, *horja* are associated with ceremonial feasts performed at the clan (marga) level. At a *horja*, participants consist of the male descendants of a clan (dongan sabutuha) as well as those who 'give' their daughters or sisters in marriage (hula-hula) and those who 'receive' wives in marriage (boru). In Toba Batak the relationship between these three parties is known as the dalihan na tolu ['three hearth stones']. The central purpose of the *horja* is the strengthening of social relationships and the worship of ancestral spirits³⁷.

Selanjutnya,

horja menggelar upacara pemujaan leluhur marga. Pesta marga juga memerlukan restu dari *bius* dalam suatu acara musyawarah yang disebut 'tonggo raja'. Dewan *bius* diundang dan menentukan hari yang tepat untuk pesta. Tidak boleh harinya bersamaan dengan pesta lain. Dalam pesta diselenggarakan tarian 'tunggal panaluan', tongkat sakti simbol milik marga, untuk mengundang roh leluhur yang disebut 'horja santi'. Untuk mengundang roh leluhur maka diundang seorang datu yang sudah menjadi keahliannya, dengan membayar upah. Datu adalah seorang profesional yang dibayar. Selain pesta *horja* pemujaan leluhur ada lagi pesta *horja* rea (pesta besar) yang dipimpin oleh parbaringin³⁸.

Dalam fungsi yang kedua yaitu urusan administrasi pemerintahan, maka *harajaon horja* merupakan masyarakat hukum. Sebagai masyarakat hukum, maka *horja*,

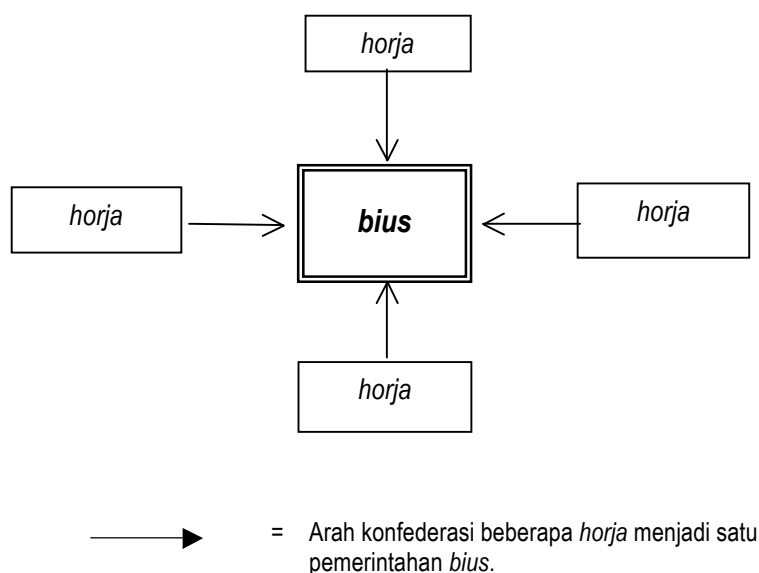
secara langsung mengurus kepentingan duniawi warganya. Misalnya jika ada orang luar yang melanggar hak *horja*, seperti menggarap tanah yang bukan *golatnya* atau menangkap ikan di danau yang bukan daerah tangkapannya, mereka secara bersama-sama melawan dan menuntut haknya. Campurtangan *horja* tidak terbatas hanya terhadap pihak luar, tetapi juga terhadap anggota sendiri. Bila terjadi perselisihan antara anggota *horja*, atas inisiatif *horja* diadakan upaya perdamaian dengan jalan menyelenggarakan pertemuan di parfungkoan, disebut *parriaan*. Secara teratur *horja* mengadakan sidang untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dan kerjasama antar *huta*. Unsur yang paling menonjol dalam urusan *horja* ialah golat atau pembagian tanah³⁹.

Harajaon Bius

Di sebagian besar daerah Batak Toba, penduduk dari satu wilayah tertentu dapat bersekutu atau membentuk suatu komunitas yang bersepakat secara bersama-sama melaksanakan berbagai kegiatan untuk kepentingan bersama seperti upacara pemberian kurban kepada dewa untuk menghindari malapetaka dan menyuburkan tanah. Komunitas ini disebut *sacrificial community* dan wilayah pemerintahan komunitas ini disebut *Harajaon bius*⁴⁰. *Bius* biasanya dibentuk berdasarkan kedekatan teritori atau geografis⁴¹, bukan berdasarkan stelsel marga atau genealogis. Meskipun demikian, ada *bius* yang terikat oleh genealogis, seperti *bius Parsanggaran* yang merupakan *bius* dari marga induk Silahisabungan di wilayah Silalahi Nabolak Dairi. Apapun dasar pembentukan dan pengikat *bius*, apakah berdasarkan kedekatan geografis atau ikatan kekerabatan dan genealogis, *bius* merupakan satu wilayah pemerintahan dari sekelompok penduduk dari berbagai *horja* dan dari berbagai *huta* menjadi satu kesatuan pemerintahan berdasarkan territorial. Setelah meneliti marga-marga dan *bius* diseluruh Toba, Ypes, mantan residen Tapanuli dan peminat etnologi/antropologi yang berjasa mendokumentasikan peta marga. Berdasarkan peta marga tersebut ada 86 *bius* di wilayah Toba yaitu 4 *bius* di Silindung, 19 *bius* di Humbang, 40 *bius* di Toba Holbung, dan 23 *bius* di Samosir⁴².

Bius terdiri dari beberapa *horja*. Itu berarti bahwa harajaon *horja* dapat berposisi sebagai suatu organisasi persekutuan yaitu persekutuan konfederasi *huta* tetapi juga menjadi bagian dari organisasi *harajaon bius*. Sementara organisasi *bius* menjadi lembaga tertinggi dalam organisasi kemasyarakatan dan pengaturan dalam masyarakat Batak Toba tradisional. *Bius* adalah konfederasi dari sejumlah *horja* (lebih kurang 2-7 *horja*) (lihat Bagan 5.4). Diperkirakan pada abad 19 di seluruh Toba yang tersebar dalam empat distrik (Silindung, Humbang, Holbung, Samosir) terdapat kira-kira 150 *bius*⁴³. Sebagai contoh, *bius* Harianboho di Samosir Utara terdiri dari empat *horja* yaitu *horja* (marga) Malau, *horja* (marga) Limbong, *horja* (marga) Sagala dan *horja* (marga) Sihotang. *Bius* dimana marga

Bagan 5.4: Struktur teritorial *bius*: konfederasi sejumlah *horja*



Simatupang sebagai marga raja dengan cabang marga: Togatorop, Sianturi, Siburian terdiri dari dua *bius* yaitu *bius* Unte Mungkur di Muara dan *bius* Onan Raja di Paranginan, Humbang*Bius* Unte Mungkur terdiri dari *horja* Unte Mungkur, *horja* Sitio-tio dan *horja* Sibuntuon (semuanya marga Sianturi) di Unte Mungkur Muara*Bius* Onan Raja terdiri dari *horja* Paranginan dan *horja* Lumbanbarat (keduanya marga Siburian), *horja* Togatorop dan Sisahorja (marga Togatorop dan Sianturi), *horja* Lobutolong, Sisakae, Sisahorja dan Pea Arung (semuanya marga Sianturi)⁴⁴.

Bius adalah suatu organisasi birokrasi harajaon berdasarkan kesatuan teritori dan dikat oleh aspek religi. Karena itu *bius* merupakan suatu masyarakat kurban yang dikemudian hari oleh berbagai urusan non religi atau bersifat duniawi yang mesti dlakukannya karena tidak lagi dapat diselesaikan oleh *horja*, maka ia juga menjadi masyarakat hukum dan pemerintahan*Bius* merupakan suatu kesatuan teritorial dari beberapa teritori *horja* dan lebih menonjol sebagai suatu kesatuan teritorial keagamaan.⁴⁵ *bius* terbentuk karena ada kepentingan yang dianggap lebih efektif, jika dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah *horja*. Dengan kata lain, pemerintahan *bius* dibentuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul yang tidak mungkin ditangani oleh *horja*, melainkan oleh lintas *horja* atau antar *horja* secara bersama-sama. Ada kepentingan bersama, misalnya, mengelola pertanian dan irigasi, musim kering yang berkepanjangan, paceklik dan musim panen yang gagal (*sega partaonan*), wabah penyakit (disebut *pararathu begu*), gangguan tanaman. Masyarakat percaya bahwa musibah yang

menimpa penduduk atau *huta* akan dapat dihindari dengan memohon belaskasihan dan perlindungan dewata dan leluhur yang tinggal di kayangan. Sasaran pemujaan dalam upacara *bius* adalah *Mulajadi Na Bolon* atau *Debata Na Tolu* dan *sumangot* leluhur.

Walaupun *horja* telah menjadi bagian dari *bius* dan wajib untuk mengikuti setiap upacara *bius*, namun masing-masing *horja* yang terhimpun dalam satu *bius* tetap dapat melakukan pesta upacara *horja* sendiri sebagaimana yang dituntut oleh wilayah *horja* atau beberapa *huta*. Sebab jika mereka bersatu, mereka masih tetap merupakan satu kelompok kerabat yang dipersatukan tali temali patrilineal di satu daerah pada tingkatan yang lebih tinggi. Hanya, menurut Vergouwen⁴⁶, jika umpamanya suatu wabah membinasakan seluruh wilayah leluhur, atau jika musim kering berkepanjangan mengancam ladang penduduk, barulah orang mencari perlindungan. Mereka akan mengadakan pertemuan umum penduduk dari wilayah yang sangat luas yang mencakup tidak hanya kelompok suku tetapi juga kelompok-kelompok penumpang dan kantung-kantung. Dalam arti politik, penduduk terorganisasi secara memadai melalui titik-temu garis-garis pembagi utama – dalam arti silsilah dan geografi – sebagaimana ia terdapat di dalam daerah besar suatu *bius*.

Integritas dari satu *bius* dan wilayah yurisdiksinya juga dihormati oleh *bius* lain. Menurut Sitor Situmorang, konsep *bius* sebagai Negara-mini lahir dari sistem pertanian (sawah) dan faktor irigasi. Desa Toba memiliki ciri lembah. Tiap lembah disepanjang pantai Danau Toba seolah dengan sendirinya memaksakan sebetuk “organisasi sosial” berporos satu sistem irigasi, yaitu *bius*. Sistem irigasi yang dikelola secara tunggal, meliputi seluruh lahan persawahan lembah⁴⁷. Selanjutnya dia mengatakan:

Penciptaan dan manajemen/pengelolaan irigasi sebagai sistem tunggal, demi kebutuhan pertanian bersawah, merupakan tuntutan alam yang memaksa penduduk lembah menciptakan organisasi *bius* dan Hukum *bius*. Organisasi unit politik teritorial yang menertibkan kecenderungan tribal (bermarga-marga) untuk mencapai kerjasama politik (hubungan teritorial) antar warga, mengatasi primordialisme berdasar “hubungan darah” sistem seketurunan/marga, lalu mewujudkan kewargaan dan kerjasama teritorial, mengatasi faktor hubungan darah, faktor genealogis⁴⁸.

Ada dua tipe *bius*. Pertama, *bius* yang dihuni oleh keturunan dari satu marga induk. Kedua, *bius* yang dihuni oleh komunitas di mana faktor klen relatif terabaikan. *bius* yang dihuni oleh keturunan dari satu marga induk merupakan persekutuan masyarakat hukum adat tertinggi yang merupakan persekutuan dari satu marga *huta* sebagai marga induk dan marga penumpangnya.⁴⁹ Marga induk Silahisabungan, misalnya, memiliki desa induk di Silalahi Nabolak. Seluruh wilayah dan penghuninya terhimpun dalam satu *bius* yang disebut *bius*

Parsanggaran Bius Parsanggaran terdiri dari tiga *horja* yaitu *horja* siopat turpuik, *horja* sitolu turpuik, dan *horja* Tambun. Ketiganya membentuk persekutuan *sitolu sada harajaon bius*.⁵⁰

Jika *bius* dihuni oleh komunitas maka faktor klen relatif terabaikan *Bius* seperti ini hampir selalu terdiri dari sejumlah pecahan marga berlainan *Bius* seperti ini banyak ditemukan di Samosir. Sebagai contoh adalah *bius Si Tolu Hae* di Pangururan sebagai persekutuan marga Naibaho, Simbolon dan Sitanggang), *bius Siualu Tali* (*bius* yang delapan tali) di Rianiate Simbolon sebagai *bius* persekutuan empat marga Simbolon keturunan Suli Raja yang disebut Simbolon Purba yang terdiri dari Altong, Tuan, Pande, Panihai dan empat *marga* lain yaitu Sitanggang, Sigalingging, Naibaho dan Malau. Di daerah Tomok disebut *bius Siualu Ompu* di Tomok sebagai *bius* persekutuan marga Sidabutar, Sijabat, Siadari, Sidabalok, Manik, Harianja, Sigiro, Sitindaon. Mereka disebut sebagai *Raja Na Ualu* yang mengatur seluruh daerah *bius* Tomok. Yang menjadi Raja *bius* adalah pemuka marga. Marga-marga ini adalah marga pendatang. Sidabutar dan Sijabat dari Ambarita, Siadari dari Unjur, Sidabalok dari Sangkal, Manik sebagai marga yang pertama ada di Tomok, Harianja dari daerah Onan Runggu, Sigiro dari daerah Buhit/huta Gintang/Tolping?, Sitindaon dari daerah Sosor Tolong. Empat marga pertama adalah marga dominan dan menjadi pengatur adat di *Bius* Tomok. Sementara marga Manik merupakan marga yang pertama tinggal di Tomok dan disebut Manik Tomok⁵¹.

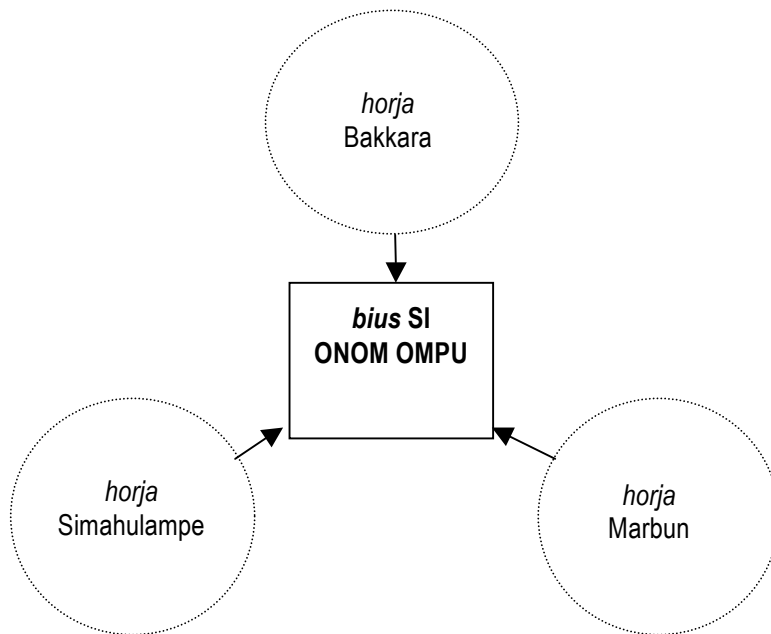
Dalam konteks *bius* sebagai kesatuan komunitas di mana faktor klen yang sama diabaikan, ia lebih mirip dengan suatu konfederasi dengan penekanan pada pemilikan atau penguasaan bersama atas wilayah dan masyarakat berdasarkan dimensi-dimensi budaya kerohanian. Mereka merasa perlu bekerjasama terutama jika *mago partaonan* (panen gagal), *pararathu begu* (terlalu banyak begu menyebarkan penyakit). Vergowen memberi penjelasan:

Jika dirasakan perlu untuk memohonkan belas kasihan dan berkat dari roh dan *Debata*, orang pun berusaha berserikat dengan kelompok-kelompok dari marga yang tinggal di sekitar dan termasuk ke dalam kelompok suku yang sama atau yang terdiri dari sahabat atau *affina*. Jadi, terbentuklah *bius* yang mempunyai corak campuran religius dan sekuler. Masing-masing *bius* biasanya terdiri dari daerah-daerah geografis yang tidak terlalu besar dan merupakan satu komunitas politik dari beberapa ribu orang yang mempunyai rasa solidaritas yang sama dan berkembang di luar lingkungan pesta-pesta kurban yang sebenarnya. Sasaran pemujaan di dalam *bius* ini biasanya leluhur bersama dari semua, yaitu *sombaon*, dan juga para dewa dan roh-roh alam, dan semua nenek moyang yang hidup dulu, *ompu sijolo-jolo tubu*. Ada kecenderungan untuk mengumpulkan semua *bius* yang kecil-kecil ini menjadi satu yang besar sekali, mencakup seluruh kelompok suku, atau bagian yang sangat besar daripadanya dan dengan tujuan tunggal, yaitu merayakan upacara-upacara bersama yang sangat besar, umpamanya *bius* “*Hariara maranak*” untuk seluruh Samosir

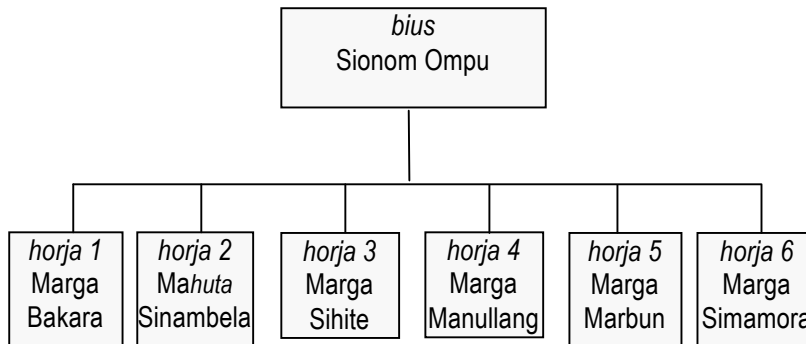
Selatan atau *bius* “*Onan na godang*” untuk seluruh Uluan Selatan, dan “*Pansur na pitu*” untuk Uluan Utara.⁵²

Jadi *bius* dapat hanya satu kelompok agnata murni tetapi juga suatu daerah geografis yang di dalamnya ada kerabat affina. Dalam hal yang terakhir, *bius* bisa tidak mencakup kelompok-kelompok agnata murni dalam arti silsilah, tetapi suatu daerah geografis yang lebih besar atau kecil serta semua penghuninya. Meskipun demikian pengelompokan puak-puak kesilsilahan yang bermukim di daerah itu bukannya tidak diperhatikan. Puak-puak ini sudah tentu memegang pelayanan dalam *bius*.⁵³ *Bius* Bakara, misalnya, merupakan persekutuan dari enam *ompu* (kakek bersama) yang juga menjadi marga inti atau *marga sipungka huta* di daerah Bakara. Keenam kakek atau marga yang dimaksud ialah: Bakara, Sinambela, Sihite, Simanullang, Simamora, dan Marbun. Bakara, Sinambela, Sihite, dan Simanullang merupakan keturunan dari satu kakek bersama bernama Raja Oloan, sedangkan Simamora dan Marbun masing-masing memiliki kakek yang berbeda. Mereka menjadi marga boru di wilayah sionom ompu. Keenam marga tersebut bersekutu dalam satu *bius* yang disebut *Bius Sionom Ompu* (Bagan 5.5 menunjukkan *bius* Bakara ketika masih terdiri dari tiga *horja* atau konfederasi dari tiga *horja*. Bagan 5.6 menunjukkan *Bius* Bakara setelah ada enam *horja* berkonfederasi).

Bagan 5.5: Paguyuban/Persekutuan *bius* Bakara: *bius Si Onom Ompu*



Bagan 5.6. Struktur *bius* Bakara/*Bius Sionom Ompu*



Di Pangururan ada *bius* yang disebut *Bius Pangururan* yang dikenal sebagai *Bius Sitolu Hae*. *Bius Si Tolu Hae* ini merupakan persekutuan dari keturunan kelompok suku Siraja Oloan marga Nai Baho dan kelompok suku Nai Ambaton yang terdiri dari marga Simbolon (mereka adalah Raja Dapoton dengan tetap menggunakan Suhut Ni Huta, Sirimbang, Hapotan dari keturunan Tuan Suhut Ni Huta atau *Martua Raja* putra kedua Tuan Simbolon) dan Sitanggang. Sementara itu *Bius Si Ualu Tali* di wilayah Rianiate dekat Pangururan di Samosir merupakan persekutuan dari delapan cabang marga induk yaitu Simbolon Altong atau Altong Nabegu, Simbolon Tuan atau Nahoda Raja, Simbolon Pande atau Pande Sahata, Simbolon Panihai atau Juara Bulan (mereka adalah empat marga dari marga induk Simbolon keturunan dari Tunggul Sibisa atau Suliraja) dan Sitanggang, Sigalingging, Nai Baho dan Malau. Tiap marga ikut di dalam pesta *bius* sebagai kelompok tersendiri dalam arti mereka adalah pemegang pelayanan di *bius* masing-masing. *Bius Silalahi* yang disebut *Bius Parsanggaran* terletak di Silalahi Nabolok dan merupakan persekutuan *bius* dari keturunan Raja Silahisabungan yang terdiri dari tiga horja, dua horja di Silalahi dan satu horja yaitu Horja marga Tambun ada di Sibisa Porsea.

Ciri-ciri yang menonjol untuk satu *bius* ada kaitannya dengan dimensi-dimensi budaya kemasyarakatan atau sekuler dan budaya kerohanian Toba. Dalam hal yang terakhir ini, syarat untuk suatu organisasi *bius* adalah adanya: dolok, homban, pangulubalang, ruma parsantian, sombaon.⁵⁴ *bius* Bakara atau *Bius Sionom Ompu* di Bakara sebagai pusat *Harajaon* Toba, misalnya, memiliki Tombak Hatuanan dan Tombak Sulu-sulu, di tempat mana boru Pasaribu isteri Ompu Raja Bona Ni Onan dihinggapi oleh tondi dan kemudian ia mengandung; tiap marga di *Bius Sionom Ompu* memiliki homban, dan pangulubalang; ruma parsantian diakui oleh *Sionom Ompu*; sombaon, seperti Namartua Sibual, Namartua Siborboran, Sombaon Lombang Sitangko Asu, Namartua Na Gara Membang, Namartua Hatuanan, Namartua Sulu-sulu, Namartua Rahot Bosi, Namartua Tingko, Namartua Solotan, Namartua Sitihal, Namartua Simanuk-

manuk. Upacara *bius* untuk *Sionom Ompu*, misalnya, dilaksanakan untuk Namartua Sulusulu, terutama untuk *mangelek simangot ni ompu* (memohon roh leluhur).⁵⁵

Kegiatan *bius* lebih menonjol dalam kegiatan religi, terutama untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada *Debata*. Karena itu, seperti halnya *horja*, maka *bius* juga dapat berarti suatu upacara yang diselenggarakan yang basis partisipan berbeda dengan *horja*:

The people usually refer to the pesta *bius* as a communal sacrificial ceremony (mamele or pamelean) in which the participants worship gods. A pesta *bius* is organised by an indigenous religious council (parbaringin) and led by the *pande bolon*, the leader of the *parbaringin*. It is attended by members of several different villages, the federation of which is known in Toba Batak as *bius*. At a pesta *bius*, various communal religious ceremonies such as *mangase taon* (an annual sacrificial ceremony celebrating the year of rice-growing season) and *mamele sombaon* (a ceremony invoking ancestral spirits that are believed to become gods) are performed and the role of the three kinship parties (*dalihan na tolu*) is ignored. At present the Toba Batak people still perform *horja*, but no longer practise pesta *bius*.⁵⁶

Pesta *bius* dipimpin oleh raja *bius*. Akan tetapi para *Parbaringin* biasanya tampil sebagai pelaksana upacara. Pesta *bius* mempunyai sifat religius dan juga sekulerdilaksanakan antara lain untuk memohon tutun hujan, menghentikan pemnyakit, dan ketika mengadakan pesta tahunan yang bersifat kurban *Bius Bakara*, misalnya, melaksanakan pesta *bius* minimal sekali setahun untuk kesejahteraan warga *Sionom Ompu*. Upacara *bius* yang dimaksud ialah *mangallang horbo bius*⁵⁷ (makan kerbau *bius*) untuk menghindarkan bala atau gangguan bagi warga. Tentang upacara *bius* dan tujuan diselenggarakan, Harahap dan Siahaan berpendapat:

Dalam pelaksanaannya, upacara *bius* merupakan suatu upacara religious yang sesungguhnya usaha untuk mengembalikan harmoni atau keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Suatu bencana yang terjadi di dalam kehidupan desa, apakah karena epidemic, panen yang gagal, gempa bumi dan lain-lain, pada dasarnya diinterpretasikan sebagai rusaknya keseimbangan antara mikrokosmos, manusia dengan makrokosmos, para dewa. Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut di dalam tatatertibnya dibutuhkan upacara-upacara *bius*. Itulah sebabnya di dalam upacara *bius* selalu dilakukan oleh suatu organisasi yang dinamakan *parbaringin*.⁵⁸

Pesta *bius* di *Bakkara* dipimpin oleh *Raja-raja bius* (*Dewan bius*) yang mewakili *sionom ompu* dan didampingi oleh *Parbaringin* sebagai pelaksana upacara⁵⁹. Umumnya pesta *bius* di *bius Bakkara*, dilakukan atas dasar *tona* (pesan) dari Si Singamangaraja. Kegiatan-kegiatan *bius* lainnya yang dilakukan di *Bius Sionom Ompu* atau *bius Bakara* adalah *mangongkal holi* (mengangkat tulang

belulang kakek bersama), *mamungka huta* (membuka *huta*), *ulaon sarimatua* (upacara untuk kakek bersama yang meninggal yang putera dan puterinya sudah menikah dan punya anak), *horja bius* (upacara untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama).⁶⁰

Dalam upacara *Bius Si Onom Ompu* diberlakukan aturan-aturan sebagai berikut. Pertama, jika marga Bakara sebagai tuan rumah, maka yang pertama diberi kesempatan berbicara adalah marga Sihite, kemudian berturut-turut marga Simamora, Sinambela, Simanullang, dan Marbun. Kedua, jika marga Sinambela sebagai tuan rumah, maka yang pertama diberi kesempatan bicara adalah marga Bakara, kemudian berturut-turut Sihite, Simanullang, Simamora, dan terakhir marga Marbun. Ketiga, jika marga Sihite sebagai tuan rumah, maka yang pertama diberi kesempatan berbicara ialah marga Bakara, kemudian berturut-turut oleh marga Simamora, Sinambela Simanullang, dan Marbun. Keempat, jika marga Simanullang sebagai tuan rumah, maka yang pertama diberi kesempatan berbicara ialah marga Bakara, kemudian berturut-turut oleh marga Sihite, Sinambela, Simamora, dan terakhir Marbun. Kelima, jika marga Simamora sebagai tuan rumah, maka yang pertama diberi kesempatan berbicara ialah marga Sihite, kemudian berturut-turut oleh marga Bakara, Sinambela, Simanullang, dan terakhir Marbun. Keenam, jika marga Marbun sebagai tuan rumah, maka yang pertama diberi kesempatan berbicara ialah marga Bakara, kemudian berturut-turut oleh marga Sihite, Simamora, Sinambela, dan terakhir Simanullang.⁶¹

Salah satu upacara *bius* di *Bius Sionom Ompu* adalah upacara *mangase taon*⁶². Dalam upacara ini dipotong seekor kerbau yang disebut *horbo bius*⁶³ untuk maksud agar musim tanam terhindar dari *amporik tano* (tikus) dan *amporik langit* (burung) yang dapat merusak tanaman. *Horbo bius* ditarik oleh dua orang mengelilingi *huta* menuju *Hatopangan* (pertemuan dari dua sungai) dan melalui sungai terus ke *Tao*, danau. Tiba di danau, semua masyarakat melempari kerbau dan dua orang penarik kerbau sambil mengucapkan: *pamuli silasang, pamuli silasang, pamuli silasang* yang berarti usir dan jauhkan pengganggu tanaman bernama silasang. Sesudah itu kerbau ditarik ke Onan Bakara kemudian diikat di sebuah kayu setinggi kira-kira 2 meter di tengah lapangan yang disebut *hau borotan*. *Hau borotan* ini biasanya adalah kayu istimewa diambil dari *hutan* belantara. *Hau borotan* ini kemudian dihias dengan daun-daun tertentu yang diikat dengan tali injuk. Dengan ritual tertentu di *hau borotan* ini di akhir acara kemudian kerbau ditombak dan disembelih⁶⁴ dan kemudian daging kerbau dibagi-bagi kepada semua warga *bius* oleh masing-masing Raja *huta*. Jika pesta atau *horja bius* dimaksudkan untuk menjauhkan penyakit karena gangguan *begu*, roh jahat, maka yang dipotong adalah seekor kerbau yang dinamakan *horbo pangeak*.⁶⁵

Ada juga upacara *bius* yang dilaksanakan pada awal musim tanam yang disebut *maname*. Upacara ini dipimpin oleh Raja Singamangaraja sebagai raja dari segala *Raja bius* dan dilaksanakan di satu tempat yang disebut *Pardebataan* yang terdapat di lingkungan istana Raja. Yang dipotong adalah seekor kuda yang dinamakan *Hoda Silintong*. Kuda dipotong di batu *pardebataan* dan darahnya dimasukkan di atas tanah di bawah batu *pardebataan*. Ternyata tanah tersebut tidak merah meskipun tanah tidak berlubang. Setelah kira-kira 10 sampai dengan 15 menit ditunggu, datanglah semut-semut besar dari bawah tanah membawa telur. Telur yang dibawa ada kemungkinan seluruhnya merah, seluruhnya putih atau kemungkinan sebagian ada yang merah dan sebagian lagi yang putih. Kemudian semut-semut tersebut menghilang dan sesudah itu *batu pardebataan* tersebut ditutup kembali. Jika telur yang dibawa berwarna merah berarti bibit padi yang ditanam harus padi merah; jika telur yang dibawa berwarna putih berarti bibit padi yang ditanam harus padi putih; dan jika semut-semut membawa telur merah dan telur putih berarti bibit padi yang ditanam bebas, bisa padi merah dan bisa padi putih. Jika dilanggar maka padi yang ditanam akan rusak.⁶⁶

Tiap pesta *bius* mempunyai sifat religius, tetapi sekaligus mempunyai segi sekuler. Karena ikatan persekutuan dalam organisasi *bius* dominan oleh ikatan nilai budaya kerohaian (sifat religius) dan disertai oleh ikatan kemasyarakatan atau kekerabatan (sifat sekuler), maka organisasi *bius* besar pengaruhnya dalam hidup masyarakat Batak Toba dan dapat menjadi sarana dinamika masyarakat penting.⁶⁷

Jadi, *bius* pada awalnya adalah suatu masyarakat kurban atau satu persembahan kurban. Tetapi kemudian kedudukan bus bergeser ke arah dunawi atau masyarakat hukum. Perubahan kedudukan tersebut mengubah tugas *bius* yang sebelumnya sebagai penyelenggara persembahan kurban (religi) berambah menjadi penyelenggara kehidupan bermasyarakat. Itu karena semakin banyak masalah-masalah duniawi atau kehidupan bersama bermasyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh *horja*. Agar tidak terjadi konflik maka dibutuhkan satu sistem atau tata pemerintahan yang baru yang disebut *bius* untuk menyelesaikan masalah bersama dari tiap *horja* yang membentuknya. Yang menjadi tugas dan kewajiban *bius* antara lain:

1. Menentukan pembagian tanah berdasarkan partalian antara *bius* lama dengan *bius* yang baru berdiri karena memisahkan diri dari *bius* lama.
2. Mengupayakan agar orang yang melakukan kejahatan seperti membunuh, membakar, meracun yang merugikan anggota *bius* tetapi dilakukan oleh orang bukan anggota *bius* diserahkan oleh *bius* yang membawahnya untuk diadili. Jika tidak bersedia menyerahkan, maka atas persetujuan raja-raja menyatakan perang kepada *bius* yang bersalah.
3. Melaksanakan pemilihan kepala duniawi *bius*.

4. Mengatur pembagian air irigasi untuk kepentingan seluruh warga *bius*.
5. Mendamaikan perselisihan lintas *bius* dan antar anggota *bius* yang tidak dapat diselesaikan oleh *horja* atau *huta*..
6. Menyetujui mendirikan onan untuk digunakan secara bersama oleh sejumlah *bius*

Harajaon Dinasti Singa Mangaraja: Struktur Konfederatif-Territorial

Sistem kerajaan tradisional dalam bentuk *horja*, *bius* maupun Dinasti Singa Mangaraja adalah sebuah sistem kerajaan konfederasi-teritorial. Bicara tentang konfederasi berarti bicara mengenai bentuk-bentuk negara atau pemerintahan. Konfederasi dalam sebuah pemerintahan atau negara adalah suatu bentuk pemerintahan di mana subdivisi geografis utama juga merupakan organisasi yang berdiri sendiri. Bicara tentang bentuk negara berarti membicarakan bagaimana sifat hubungan antara kekuasaan “pemerintah pusat” dan “pemerintah daerah”.

Biasanya “pusat” diasumsikan untuk berbagai hal berada di atas “daerah”, tetapi dalam hal lain “daerah” tidak tergantung pada “pusat”. Karena itu pemerintah konfederasi mempertahankan hak-hak independen dari setiap unit yang berkonfederasi dalam berbagai pengaturan dan pembuatan keputusan kebijakan yang tidak bisa interensi oleh pemerintah konfederasi, dan hak-hak pemerintah konfederasi dalam pengaturan dan pembuatan keputusan kebijakan sangat terbatas.

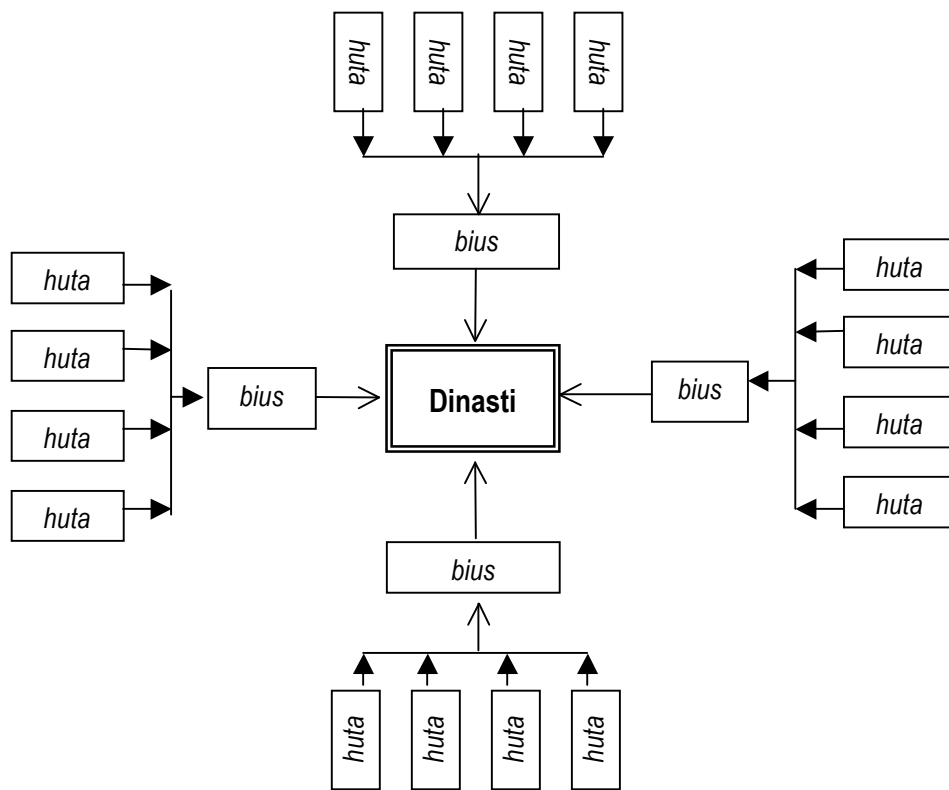
Berbeda dengan federasi, konfederasi menetapkan kekuasaan “pusat” jauh lebih terbatas daripada federasi. Satu kriteria praktis sebagai kunci yang sering digunakan untuk membedakan federasi dari konfederasi adalah bahwa “pemerintah pusat” tidak memiliki otoritas penegakan hukum terhadap warga negara tetapi tergantung pada pemerintah unit konfederatif untuk memberikan efek kepada hukum-hukumnya dalam mengatur individu yang menjadi warganya. Itu berarti Konfederasi tidak dapat memaksakan kekuasaannya kepada warga.

Sebagian besar dari harajaon *bius* di daerah Batak Toba merasakan penting untuk bersekutu dengan satu harajaon *bius* yang ada di Bakkara atau Harajaon *Bius* Bakkara, yaitu Dinasti Singa Mangaraja. Meskipun *bius* merupakan konfederasi dari *horja* dan Dinasti merupakan konfederasi dari *bius*, tetapi konfederasi *bius* berbeda dengan konfederasi Dinasti. Jika harajaon *bius* dibentuk oleh sejumlah *horja*, maka Harajaon Dinasti Singamangaraja terbentuk karena ada sejumlah *bius* yang menyatakan ingin bersekutu dengan *Harajaon Bius* Bakkara. Tentu tiap *bius* dan warganya yang telah berkonfederasi dengan Dinasti Singamangaraja wajib mengikuti Patik dohot Uhum yang dibuat oleh Raja

Singamangaraja yang berpusat di Bakkara. Dalam konteks ini maka Bius Bakkara memiliki dua status, yaitu sebagai pusat Harajaon *Bius* Bakkara dan sebagai pusat Harajaon Dinasti Singamangaraja.

Seperti telah dikemukakan bahwa pemerintahan terkecil dan otonom berada pada tingkat *huta*. Sejumlah *huta* kemudian membentuk konfederasi yang dinamakan “pemerintahan” *horja*. Kemudian sejumlah pemerintahan *horja* membentuk konfederasi yang dinamakan pemerintahan *bius*. Akhirnya, pemerintahan *bius* yang satu dengan *bius* lainnya berkonfederasi dengan Dinasti Singa Mangaraja (Bagan 5.7; 5.8). Karena itu sistem masyarakat Batak-Toba lama

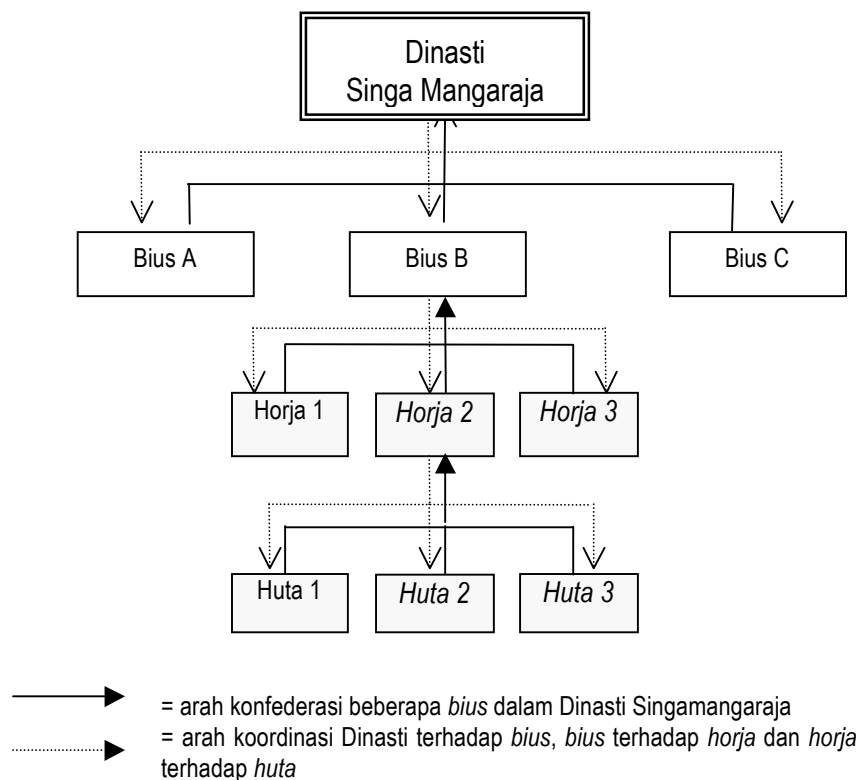
Bagan 5.7: Sistem Konfederasi dalam Dinasti Singamangaraja



→ = arah konfederasi beberapa *huta* menjadi satu *horja*, beberapa *horja* menjadi satu *bius*, dan beberapa *bius* dalam satu Dinasti.

adalah sebuah sistem yang merupakan konfederasi dari banyak *bius*. *Bius* adalah paguyuban yang otonom dalam bentuk Dewan *bius* (paguyuban desa-adat) dan jajaran pemerintahan. Pemerintah Dewan *bius* terdiri dari kepala-kepala adat dari keturunan langsung pendiri (pionir) atas persetujuan warga. Merujuk pada pengertian modern, sistem ini adalah sebuah negara mini yang demokratis, di mana hukum dan kepemimpinan dipegang secara kolektif. Dewan *bius* merupakan

Bagan 5.8 Struktur Territorial Birokrasi Dinasti Singamangaraja



pengayom hukum adat yang berdiri diatas masyarakat, namun dalam prakteknya mereka tetap tunduk pada hukum adat yang berlaku. Mereka juga dapat dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran⁶⁸.

Jadi, harajaon atau pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional, tidak terkecuali Dinasti Singa Mangaraja, merupakan pemerintahan konfederasi dari sejumlah *bius*, pemerintahan *bius* merupakan konfederasi dari sejumlah *horja*, dan pemerintahan *horja* merupakan konfederasi dari sejumlah *huta*. *Huta*, *horja* dan *bius* sebagai “pemerintahan atau negara” yang menjadi anggota Konfederasi sepenuhnya tetap merdeka atau berdaulat. Dengan kata lain, pemerintahan *huta*, *horja* dan *bius* yang tergabung ke dalam Konfederasi Dinasti Singa Mangaraja tidak kehilangan kedaulatannya. Kedaulatan tidak ada di tangan pemerintahan Konfederasi Dinasti Singa Mangaraja. Dinasti Singa Mangaraja tidak memiliki kedaulatan atas *bius*, *bius* tidak memiliki kedaulatan atas *horja*, dan *horja* tidak memiliki kedaulatan atas *huta*. Singkatnya, keanggotaan suatu pemerintah atau negara ke dalam suatu Konfederasi tidak menghilangkan pun mengurangi kedaulatan dari setiap pemerintah atau negara yang menjadi anggota Konfederasi.

Garis “komando” atau “koordinasi” hanya dari Konfederasi menuju pemerintah *bius* A, B, dan C, tidak pada warga. Warga akan taat dan melakukan

sesuatu jika *bius* sudah menyetujui. Karena itu Konfederasi tidak memiliki otoritas perintah langsung kepada warga *bius* di masing-masing *bius* melainkan oleh pemerintah *bius* masing-masing. Kesediaan pemerintah *bius* berdaulat untuk bergabung menjadi bagian dari konfederasi bersifat sukarela, bukan kewajiban selama *bius* melihat ada keuntungan berkonfederasi dengan Dinasti Singa Mangaraja.

Jadi, Sesuai dengan bentuk pemerintahan konfederasi yang terdiri dari beberapa “negara” berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kedaulatan eksternal dan internal bersatu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang relatif menguntungkan jika dilakukan secara bersama, maka negara dan pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional dan Dinasti Singa Mangaraja, adalah negara dan pemerintahan Konfederasi. Dalam Konfederasi Dinasti Singa Mangaraja, aturan-aturan yang ada di dalamnya hanya berefek kepada masing-masing pemerintah *bius*, tidak langsung mempengaruhi warga. Meskipun terikat dalam Konfederasi, tetapi tiap *bius* atau *horja* atau *huta* tetap berdaulat dan berdiri sendiri tanpa intervensi yang satu terhadap lainnya di dalam Konfederasi. Masing-masing tetap memiliki otonomi. Datuk Endang menulis:

Dasar kerajaan di tanah Batak adalah bersifat otonom, berazaskan adat dan hukum Batak. Masing-masing badan tersebut mempunyai kemerdekaan yang penuh untuk mengatur dan memerintah lingkungannya sendiri. Baginda SiSinga Mangaraja mengatakan: "masing-masing menjunjung kemerdekaannya), yaitu tiap-tiap *huta*, *horja*, dan *bius* merdeka sendiri-sendiri. Kekuasaan baginda adalah menyelesaikan persengkataan, menghentikan peperangan atau membuat perdamaian, membebaskan orang-orang terpasung, dan sebagainya⁶⁹.

Dalam konteks konfederasi dalam pemerintahan tradisional Batak Toba maka Raja Singa Mangaraja tidak menguasai birokrasi harajaon *bius*, *horja* dan *huta*, karena kekuasaan mereka tidak berasal dari Raja Dinasti. Tetapi karena pemerintahan *bius* telah berkonfederasi dalam Dinasti, maka kekuasaan birokrasi Dinasti Singa Mangaraja dapat menyelesaikan hal-hal yang bersifat lintas harajaon *bius*, baik dalam hal urusan pertanian atau tali air, agama atau upacara-upacara ritual bersama. Di samping itu Raja Singamangaraja sebagai raja dari Dinasti Singa Mangaraja juga berwewenang antara lain untuk menyelesaikan persengkataan, menghentikan peperangan atau membuat perdamaian antar *bius*, dan membebaskan orang-orang terpasung dalam *bius* yang menyatakan diri bergabung dengan Dinasti Singamangaraja. Demikian juga raja *bius* tidak menguasai birokrasi Harajaon *horja* karena kekuasaan birokrasi *horja* tidak berasal dari *bius*, kecuali kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lintas *horja*. Raja *horja* pun tidak menguasai birokrasi harajaon *huta* karena kekuasaan birokrasi *huta* tidak berasal dari *horja* kecuali kekuasaan

yang diberikan untuk menyelesaikan berbagai hal lintas *huta*. Jadi, masing-masing *bius*, *horja*, *huta* tetap memiliki otonomi berdasarkan hukum adat dan kekerabatan. *Huta*, *horja* dan *bius*, masing-masing mempunyai otonomi dan otoritas untuk mengatur daerahnya dalam batas-batas dan kegiatan-kegiatan yang ditentukan berdasarkan atas kesepakatan bersama. Karena itu tiap teritorial *huta*, *horja* dan *bius* memiliki “hukum dan aturan” tersendiri.

Jadi, meskipun masyarakat Batak Toba tradisional lebih suka berdiam di unit kecil atau *huta* yang menyenangkan, terdiri dari beberapa ratus dan ribu orang dengan kepentingannya tidak hanya terbatas pada urusan sendiri, melainkan sudah lintas batas *huta*, *horja* dan *bius*, mereka telah sampai kepada tingkat seni pemerintahan yang mampu mencakup beberapa daerah menjadi suatu daerah luas di bawah satu pemerintahan yang mantap ialah pemerintahan Dinasti Singamangaraja Raja dengan Raja Singa Mangaraja.

Memang tidak semua pemerintahan *bius* yang ada di tanah Batak berkonfederasi dengan Dinasti Singa Mangaraja. Belum ada data yang pasti tentang berapa jumlah Harajaon *bius* di daerah Batak Toba yang berkonfederasi dengan Dinasti Singamangaraja. Tetapi dapat dipastikan bahwa hampir seluruh *bius* yang masyarakatnya adalah keturunan Raja Isumbaon menyatakan ikut serta berkonfederasi dengan Dinasti Singamangaraja, sedangkan Harajaon *bius* yang merupakan keturunan Ilontungon hampir tidak ikutserta berkonfederasi dengan Dinasti Singamangaraja.

Peta politik lokal sampai dengan abad ke-19 meunjukkan bahwa *bius* di Wilayah Limbong-Sagala mengakui Singa Mangaraja, walau bukan pengakuan “tanpa reserve.” Sementara *bius* di wilayah Urat atau Lontung yang merupakan daerah marga-marga belahan Lontung tidak mengakui Lembaga Singamangaraja dan tidak mengakui Singa Mangaraja sebagai Raja dalam Harajaon Batak Toba, kecuali marga Situmorang. Ompu Babi Situmorang sebagai tokoh organisasi Parbaringin secara implisit mengakui Singa Mangaraja sebagai Raja Batak Toba. Adapun *bius* yang ada di wilayah Toba Holbung dimana penduduknya adalah marga-marga belahan Sumba dengan Baligeraja sebagai pusatnya, wilayah terluas dan terbesar penduduknya, termakmur karena memiliki potensi ekonomi yang baik, secara bulat mengakui dan mendukung Lembaga Dinasti Singa Mangaraja. Pengakuan itu dilakukan dengan memperkenalkan Singa Mangaraja dan lembaganya di seluruh *bius* dan Onan-onan Besar, atau *Onan Na Marpatik*, yang ada di wilayah Sumba. Pendeta-Raja yang merupakan Pendeta-Raja kelompok Sumba yang berkedudukan di Balige Raja diperkenalkan dan diakui sebagai wakil Singa Mangaraja. Demikian juga Pendeta-Raja wilayah yang ada di seluruh *bius* wilayah Sumba adalah wakil Singa Mangaraja. Sitor Situmorang menulis:

Dari tradisi diketahui bahwa upacara “Singa Mangaraja baru memperkenalkan diri” setelah dinobatkan di Bakkara, berlangsung di Onan Raja/Baligeraja

disusul dengan upacara serupa di Onan-onan besar yang terdapat di seluruh wilayah Sumba, seperti Onan Sibaruang (daerah Uluan), Onan Sitorang (daerah Sitorang), Onan Sitaharu (daerah Silindung Selatan), dan Onan Martiti (daerah Humbang) semuanya di wilayah Sumba. Dilihat dari Bakkara tiap Pendeta-Raja wilayah adalah “wakil” Singa Mangaraja. Hal ini berlaku penuh untuk wilayah Sumba saja dalam hal diri tokoh (Pendeta-Raja) yang bergelar Baligeraja, dan toko-toko Sumba lainnya yang mengklaim fungsi “wakil Singa Mangaraja” di daerah pengaruhnya masing-masing (sub divisi Sumba) yang paling terkenal di antaranya ialah Raja Sitorang (Daerah Sitorang)⁷⁰.

Oleh karena itu wilayah pengaruh kekuasaan birokrasi Dinasti Singa Mangaraja hanya meliputi sejumlah *bius* yang berkonfederasi dengan Dinasti Singa Mangaraja yang terbentuk oleh ikatan keagamaan, ikatan kemasyarakatan dan ikatan teritorial. Dalam konteks ini, hubungan antara “pusat” dan “daerah” tidak bersifat dekonsentrasi atau sentralisasi. Raja tidak menguasai “birokrasi” dan “pejabat-pejabat daerah” melalui pengangkatan para keluarga kerajaan seperti dalam kerajaan Mataram di Jawa⁷¹. Hubungan dinasti sebagai “pusat” dan “daerah-daerah” dalam birokrasi tradisional masyarakat Batak Toba, khususnya Dinasti Singa Mangaraja lebih merupakan suatu konfederasi atau suatu persekutuan masyarakat dan kesatuan teritorial, sehingga “daerah-daerah” yang masuk di dalamnya memiliki otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri. Oleh karena itu,

Struktur pemerintahan Si Singa Mangaraja memang tidak sampai pada bentuk pemerintahan monarkhi yang sentralistis dan piramidal, seperti di tempat-tempat lain di Indonesia, justru karena faktor tarombo dan sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu masih kuat sekali dipertahankan oleh masyarakat Batak, merintanginya terwujudnya sistem sentralistis dan piramidal dalam masyarakat. Selaku Maharaja memang kekuasaan Si Singa Mangaraja diakui, namun hal ini dituang dalam suasana kekeluargaan.⁷²

Pengikat Birokrasi Kerajaan

Ideologi kerohanian dan kekerabatan meresap dalam prinsip teritorial dalam “birokrasi tradisional” dalam masyarakat Batak Toba. Ada kaitan antara nilai-nilai budaya kerohanian dan kekerabatan dengan struktur birokrasi teritorial. Susunan pemerintahan dan birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional yang terbagi atas tiga teritori atau wilayah yaitu *bius*, *horja* dan *huta* ada kaitan dengan struktur banua menurut kepercayaan Batak Toba tradisional yang terdiri dari Banua Ginjang, Banua Tonga dan Banua Toru (Tabel 5.5). Karena itu, banua ginjang, banua tonga dan banua toru sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam jagat raya, serta huluhula, dongan tubu dan boru sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam

Tabel 5.5: Representasi makrokosmos (Banua) dalam mikrokosmos (masyarakat dan pemerintahan)

Unsur	Tipe Struktur		
	Makrokosmos	Masyarakat	Pemerintahan
	Banua Gintang	Hula-hula	<i>bius</i>
	Banua Tonga	Dongan Tubu	<i>horja</i>
	Banua Toru	Boru	<i>huta</i>

jagat kemasyarakatan, maka *bius*, *horja* dan *huta* sebagai teritorial birokrasi juga menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan hubungan-pergantungannya satu dengan lainnya dalam jagat pemerintahan⁷³.

Seperti telah dijelaskan bahwa struktur teritorial terbentuk karena *huta* sebagai unit pemerintahan terkecil mengikatkan diri mengikatkan diri dalam satu pemerintahan *horja*, *horja* mengikatkan diri dalam satu pemerintahan *bius* dan *bius* mengikatkan diri dalam satu pemerintahan Dinasti Singamangaraja. Paling sedikit ada tiga motif yang saling berkaitan mengapa masyarakat bersatu dalam satu persekutuan: motif kekerabatan (adat dan kesilsilahan/marga), motif keagamaan atau religi, dan motif kewilayahan. Yang pertama dan paling utama dari ketiganya ialah aspek kesilsilahan. Motif kesilsilahan paling banyak dan paling kuat sebagai dasar dalam pembentukan wilayah persekutuan. Karena itu ciri khas masyarakat Batak Toba seperti hubungan kekerabatan yang dekat, asal mula yang sama dari satu desa induk, ikatan wajar antara desa *boru* dan desa *hula-hula*, antara desa induk dan anak desa, lumban dan sosor, dan faktor lain yang serupa itu semuanya merupakan unsur yang begitu penting dalam struktur sosio-politik Batak Toba tradisional. Singkatnya, hubungan kesilsilahan dan struktur sosial yang berwatak organis, sepenuhnya atau setidaknya untuk sebagian besar, menjadi kekuatan utama dalam sistem birokrasi tradisional Batak Toba. Kadang-kadang ia menguasai semua lapisan, dan kadang-kadang hanya menyangkut satu atau dua di antaranya, tetapi ia tidak pernah absen sama sekali.

Ikatan atas dasar kekerabatan disebut juga identitas ikatan *partubu*. Menunjukkan identitas kelompok berdasarkan ikatan partubu tergantung pada cakupan kelompok dan generasi. Kelompok kerabat terkecil dikategorikan sebagai kerabat *saripe* (satu rumah tangga yaitu suami isteri dan anak-anaknya). Kaang-kadang disebut *saama* (satu generasi). Kedua, disebut kerabat *sasuhu* atau *saompung* (satu kakek bersama untuk dua generasi). Kelompok kerabat ketiga dan lebih besar disebut kerabat *saompu* (berasal dari satu leluhur bersama dan biasanya dapat mempunyai galur keturunan dari 3 hingga 15 generasi atau lebih).

Tiap kelompok dianggap sebagai *sapanganon* (satu tempat makan bersama) dalam suatu penyelenggaraan upacara persembahan. Tetapi tiap ikatan

kelompok akan menentukan jenis penyelenggaraan upacara persembahan dan jenis persembahan yang dipersembahkan. Jika persembahan adalah ayam atau *manuk*, maka kerabat yang ambil bagian dalam persembahan tersebut dinamakan *sapanganon manuk* dan mereka berasal dari satu keluarga. Jika persembahan adalah *babi* maka kerabat yang ambil bagian dalam persembahan tersebut dinamakan *sapanganon babi* dan mereka berasal dari satu kakek bersama (2 generasi). Jika yang dipersembahkan adalah seekor sapi atau *lombu*, maka kerabat yang ambil bagian dalam persembahan tersebut dinamakan *sapanganon lombu* ialah mereka yang berasal dari satu kakek bersama (3 hingga 15 generasi). Jika kerabat yang diundang dan ambil bagian dalam satu persembahan adalah mencakup satu cabang marga kecil maka yang dipersembahkan adalah *horbo* dan mereka disebut *sapanganon horbo*. Jika kerabat yang diundang dan ambil bagian dalam satu persembahan adalah mencakup seluruh marga induk yang terdiri dari seluruh kelompok galur keturunan yang lebih besar maka yang dipersembahkan adalah *horbo sombaon* dan mereka disebut *sapanganon horbo sombaon*.

Motif kedua yang mempersatukan lintas desa menjadi satu masyarakat kurban yang kemudian menjadi kelompok persekutuan ialah motif religius. Tetapi di beberapa daerah motif religius tidak banyak artinya jika dilihat dari sudut pandang politik, karena dia tidak melahirkan kelompok persekutuan. Di daerah ini masyarakat yang mengadakan persembahan sinkron dengan kelompok suku atau dengan badan persekutuan yang lebih rendah yang dibangun menurut kesilsilahan.

Motif ketiga sebagai faktor pengikat yang independen ialah motif kewilayahan atau teritorial. Ikatan ini disebut juga ikatan *parhundul* atau daerah tempat tinggal. Pengaruhnya tidak banyak dalam memutuskan garis kesilsilahan di kawasan dengan daerah keleluhan yang menonjol tanda-tandanya.⁷⁴ Sering dalam masyarakat Batak Toba tradisional, *partubu* (karena berasal dari satu galur), lebih penting dari *parhundul* (lokasi wilayah).⁷⁵ Tetapi jika aspek persatuan wilayah yang menjadi wajah utama, *parhundul* (satu tempat tinggal) menjadi lebih penting dari *partubu* (berasal dari satu galur). Karena itu ada peribahasa dalam masyarakat Batak Toba tradisional mengatakan: *jonok partubu, jumonokan parhundul*, atau dekat/penting kawan hubungan darah, lebih dekat/penting kawan bertetangga. Ini berarti solidaritas yang timbul dari tempat domisili lebih utama daripada hubungan darah (marga) kalau domisilinya berjauhan⁷⁶. Untuk itu, sistem pengaturan atas dasar teritori pun diorganisirilah dengan bentuk yang lebih tajam dan lebih mantap. Vergouwen memberi contoh berikut:

Di Uluan yang tidak selamanya mempunyai kepala *bius* bersama untuk peningkatan urusan duniawi yang menyangkut seluruh *bius*, di sanalah hal itu paling tidak kentara. Di sana, unsur pokok adalah kepala dari bagian yang

paling utama *bius*, yaitu *horja*. Sepanjang *horja* terdiri dari komposisi silsilah campuran, maka ia pada gilirannya berwatak persatuan dan keputusan tentang siapa yang harus menduduki posisi kepala, *horja* biasanya tunduk kepada ketentuan persetujuan setempat, kalau tidak wataknya pun akan sama dengan yang ada di Toba Holbung.⁷⁷

Terkait dengan prinsip teritorial dalam birokrasi masyarakat Toba tradisional, maka sistem politik Toba didasari oleh kedaulatan teritorial. Oleh karena itu ikatan kerohanian dan ikatan kekerabatan pada struktur yang lebih besar tunduk pada prinsip teritorial. Pada level birokrasi dengan teritorial yang lebih luas, maka ikatan kekerabatan marga semakin menipis atau lemah. Tetapi sebaliknya, ikatan kerohanian dan kewilayahan menjadi semakin menebal atau menguat.

Ikatan *huta* sangat kuat didasarkan oleh ikatan kekerabatan keturunan dan adat. Ini disebut ikatan partubu*Horja* terbentuk melalui konfederasi dari beberapa *huta* atas dasar motif kesilsilahan dan kerohanian*Bius* terbentuk melalui konfederasi *horja* di mana mereka memiliki tali-temali lokal yang diperkuat oleh hubungan affina di antara marga yang bersekutu, dan kepala-kepala utama marga tersebut atas dasar religiusitas. Sementara Dinasti terbentuk melalui konfederasi sejumlah *bius* sehingga lebih dominan oleh ikatan teritorial. Ini disebut parhundul. Jadi, ikatan atas dasar keturunan, religi, dan teritorial menentukan atau mengatur hubungan dalam *huta* dan antar *huta* baik dalam *horja* maupun dalam *bius*. Ideologi kekerabatan adat dan marga menjadi daya pengikat yang paling kuat dalam birokrasi *harajaon huta*, ideologi kerohanian agama dengan adat dan marga menjadi daya pengikat yang kuat dalam birokrasi *harajaon horja*, dan ideologi kerohanian agama dengan faktor kewilayahan menjadi daya pengikat dalam birokrasi *harajaon bius* maupun *harajaon Singamangaraja*. Daya pengikat yang paling menonjol ialah kekerabatan, kemudian kemudian kerohanian, sedangkan kewilayahan dianggap lebih longgar atau tidak sekuat agama dan ada kekerabatan (Tabel 5.6).

Jadi birokrasi tradisional dalam masyarakat Batak Toba telah tersusun dalam susunan teritorial. Mereka telah sampai kepada tingkat seni “pemerintahan konfederasi” yang mencakup daerah luas di bawah satu pemerintahan yang mantap dan yang tertinggi ialah Dinasti Singamangaraja. Terbentuknya *horja* melalui persekutuan *huta*, dan *bius* melalui persekutuan *horja*, serta Dinasti melalui persekutuan *bius* semakin meminimasi heterogentitas struktur kewilayahan masyarakat Batak Toba – banyaknya *huta-huta* kecil – yang sangat rentan dengan persaingan dan konflik ialah persaingan dan konflik antar *huta*, antar marga, dan antarlaut. Tindakan-tindakan politis untuk memperbaiki struktur kewilayahan dan organisasi masyarakat Batak Toba untuk memperkuat persatuan dan kesatuan teritorial dan kemasyarakatan – dengan anggapan bahwa

Tabel 5.6: Daya pengikat birokrasi harajaon tradisioanal Batak Toba

Tipe Birokrasi	Daya Pengikat		
	Kerohanian (religi)	Kekerabatan (adat dan marga)	Kewilayahan (kepentingan)
Huta	Kuat	Sangat kuat	Lemah
Horja	Kuat	Sangat kuat	Agak Kuat
Bius	Sangat Kuat	Agak Kuat	Kuat
Dinasti	Kuat	Lemah	Sangat Kuat

heterogenitas struktur wilayah akan menghasilkan perpecahan – sangat inten dilakukan terutama pada masa Dinasti Singamangaraja XII.

Catatan

- ¹ Setara dengan *huta* di daerah Batak Toba, di Indonesia dikenal banyak istilah, yaitu Kelurahan, Desa, Nagari, Kampung (Lampung), Kampung (Papua), Gampong, Nagori, Pekon, Dusun (Bungo), Lembang (Toraja).
- ² Castles, Lance. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940*. Diterjemahkan oleh Maurits Simatupang. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, h. 28.
- ³ J.C. Vedrgowen, *ibid*.
- ⁴ Sitor Situmorang,. 2004. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*. Jakarta: Komunitas Bambu, h. 212.
- ⁵ Lance Castles. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940*. Diterjemahkan oleh Maurits Simatupang. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, h. 6.
- ⁶ Menurut *hutagalung*, ada tiga kemungkinan permulaan dari marga bangsa Toba: ada yang berasal dari nama (*goar*) pembuka *huta*, yang lain berasal dari nama *huta* (*goar ni hutana*) dan yang lain lagi dari kebiasaan (*bangko*). Lihat W.MHutagalung, 1991, *Pustaha Toba: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Toba*, Tulus Jaya, h. 370.
- ⁷ Menurut Vergowen, sering kita menjumpai suatu komunitas wilayah mendapat nama yang sebetulnya adalah nama kelompok suku, *marga*, atau kelompok kekerabatan yang lebih kecil tetapi mengungguli di sana. Sebaliknya, sejumlah marga atau cabang marga menyandang nama dari desa (*huta*, lumban) yang didirikan oleh salah seorang nenek-moyangnya atau didiami olehnya dan yang daripadanya kemudian lahir desa-desa lain. Lihat J.C. Vergouwen. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Toba* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Azet, h. 44.
- ⁸ Semua hubungan kerabat serta nama kakek dan ibu serta keturunan dicatat dengan jelimet, dahulu pada kulit kayu dengan tulisan asli, akhir-akhir ini dalam kitab catatan dengan huruf. Bahkan hubungan kerabat itu masih dapat disampaikan secara lisan. T.O. Ihromi, 1977, *Antropologi Sosial Budaya II*, FIS Universitas Indonesia, Jakarta, h. 3.
- ⁹ Lihat Ulbert Silalahi, 1998, *Raja Silahisabungan*, Bina Budhaya, Bandung, h. 66-77.
- ¹⁰ J.C. Vergouwen, *op cit*. h. 136.
- ¹¹ Tentang adat dan upacara mendirikan *huta*, lihat I. Tampubolon. 1935. Adat mendirikan Hoeta di Bataklanden. Siantar: Philemon Siregar; Bisuk Siahaan. 2005. *Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. Jakarta: Kempala Foundations. Bab 4.
- ¹² J.C. Vergouwen, *Ibid*, h. 43.

-
- ¹³ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora. Bandingkan dengan Payung Bangun, *Kebudayaan Batak*, dalam Koentjaraningrat, 1976, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 99.
- ¹⁴ Lihat J.C. Vergouwen, h. 125; Payung Bangun dalam Koentjaraningrat, 1976, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 99.
- ¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.
- ¹⁶ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 122-123.
- ¹⁷ Ini berbeda dengan pusat-pusat politik di Asia Tenggara, yang lebih terkait dengan penguasaan rakyat dan bukannya terkait dengan wilayah. Batas wilayah, khususnya, merupakan suatu masalah yang agak diabaikan. Bahwa suatu kelompok politik tradisional di Asia Tenggara, bukan ditentukan atau tidak dibatasi oleh atau pada sebidang atau sepeinggal wilayah yang menjadi basis kekuasaannya. Lihat Lorraine Gesick., (penyunting). 1989. *Pusat, Simbol, dan Hirarki Kekuasaan: Esei-essi tentang Negara-negara Klasik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 109-110.
- ¹⁸ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 129.
- ¹⁹ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 121.
- ²⁰ W.B. Sidjabat. 1982. *Ahu Si Singamangaraja*. Jakarta: Sinar Harapan, h. 75.
- ²¹ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 133.
- ²² J.C. Vergouwen *Ibid*, h. 125.
- ²³ Batara Sangti, *op cit*, h. 225.
- ²⁴ T.O. Ihromi, *op cit*, h. 3.
- ²⁵ Jika penumpang membuka hubungan kerabat berdasarkan perkawinan (affina) dengan leluhur seluruh *marga* raja, maka ia menjadi *boru parsadaan* (boru persatuan) atau *boru hatopan*. Adapun *marga* dari penumpang dan keturunannya dinamakan *marga boru*. Marga penumpang yang paling tua mempunyai nama yang berbeda-beda di daerah yang berbeda-beda dan masing-masing menonjol dengan salah satu cirinya. Di Silindung dan Humbang ia disebut *boru nagojong* (kelompok boru yang paling tua); di Samosir orang menyeburnya *boru silaon* yang mempunyai arti yang sama; di Toba ia dipanggil boru sihabolonan (kelompok boru bersama yang besar); di Barus dialah *boru ni ladang* (kelompok boru dari himpunan tanah yang digarap = wilayah); di Tanah Dairi kelompok ini disebut *boru tano* (kelompok boru yang diberi hak tanah). Sering juga cabang *marga* tertua disebut *raja boru* yang memiliki hak-hak istimewa mirip dengan *marga* hula-hula mereka. Tentang marga boru yang menumpang, lebih lanjut lihat J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 58-60.
- ²⁶ Perbedaan posisi hukum, misalnya, antara marga Naibaho, Simbolon, Sitanggung di satu pihak dan marga Silalahi di pihak lain di Pangururan, misalnya, tampak dalam hukum penguasaan tanah. Naibaho, Simbolon dan Sitanggung adalah *pargolat* atau *partano* di Pangururan, sedangkan Silalahi tidak. Ketika leluhur mereka membuka *huta* tersebut, maka *huta* tersebut menjadi kepunyaan keturunannya, menjadi *golatnya*, menjadi pemegang hak atas tanah yang dududukinya. Itu adalah tanah yang dengan bebas dapat diberikannya kepada keturunannya, lelaki maupun perempuan. Sebaliknya jika marga tertentu tidak termasuk ke dalam marga Naibaho, Simbolon dan Sitanggung sebagai marga yang memerintah di Pangururan, seperti halnya marga Silalahi, maka setiap hak yang mungkin diperolehnya atas suatu tanah garapan adalah hak hak yang berasal dari marga yang memerintah atau *pargolat/partano* dan bukan hak yang secara otomatis jatuh ketangannya. Pembahasan lebih mendalam, lihat Ulbert Silalahi. 1998. *Raja Silahisabungan*. Bandung: Bina Budhaya.
- ²⁷ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 125.
- ²⁸ Desa Banjar Toruan di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara, misalnya, telah turun-temurun selama ratusan tahun ditempati oleh *marga* Silaban. Tetapi *huta* tersebut tidak dapat diklaim sebagai “milik” *marga* Silaban dan mereka tidak dapat menjadi “*marga* raja” di *huta* tersebut; dan mereka tetap diakui dan mengaku sebagai *marga* penumpang di Simamora

- Nabolak, tempat dari *marga* Simamora. Lihat Ulbert Silalahi. 1989. *Kepemimpinan Lokal dan Pembangunan*. Tesis. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, h. 86.
- ²⁹ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 128.
- ³⁰ J.C. Vergouwen, *Ibid*, h. 59.
- ³¹ Suzanne Keller, 1984, *Penguasa dan Kelompok Elit* (terjemahan), Jakarta: Rajawali, h. 3.
- ³² J.C. Vergouwen, *Ibid*, h. 134-141.
- ³³ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 133.
- ³⁴ Kelompok masyarakat yang terhimpun dalam satu *horja* dicirikan oleh (ciri-ciri ini ada kaitan dengan kepercayaan/ keagamaan, kemasyarakatan dan pemerintahan Toba): satu *onan* (pasar); satu *homban* (mata air suci), satu *pangulubalang* (pusat kuasa), dan satu *ruma parsantian* (rumah suci untuk tempat beribadah dan roh leluhur); *satu huta parserahan* (desa induk); satu *marga hula-hula* (marga pemberi isteri); satu *marga boru* (marga penerima isteri); satu *pargomgom* dan *na ginonggom* (pelindung dan yang dilindungi); dan satu *padan* (perjanjian), dan juga satu *sombaon* (yang disembah), dan *batu somong* (batu penyempahan). Lihat Vergowen, *op cit*, h. 134-141; Ulbert Silalahi, 1998, *op cit*, h. 76-78; 187-199.
- ³⁵ J.C. Vergouwen, *Ibid*, h. 43.
- ³⁶ Bisuk Siahaan. 2005. *Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. Jakarta: Kempala Foundation, h.154.
- ³⁷ Mauly Purba. 2005. From conflict to reconciliation: the case of the gondang sabangunan in the Order of Discipline of the Toba Batak Protestant Church. *Journal of Southeast Asian Studies*. June 1, 2005. Diunduh dari <http://www.highbeam.com/doc/1G1-135214796.html> pada tanggal 22 mei 2012
- ³⁸ Diunduh dari <http://mandosi.wordpress.com/2007/10/page/2/> pada tanggal 22 Mei 2012.
- ³⁹ Bisuk Siahaan, 2005, *ibid*, h 154-155.
- ⁴⁰ Sejak tahun 1900-an dalam pemerintahan Kolonialisme Belanda, “Negeri Toba” dibuat menjadi satu *Onderafdeeling Toba* dalam susunan: *onderafdeeling*, *bius*, *Negeri*, dan *horja*. Satu *onderafdeeling* terdiri dari beberapa *bius*, satu *bius* terdiri dari beberapa *Negeri*, dan satu *Negeri* terdiri dari beberapa *horja*. Tentang jumlah dan nama *bius*, *Negeri*, *horja* dan *marga* penghuninya pada masa pemerintahan Kolonialisme Belanda, lihat Batara Sangti, 1977. *Sejarah Batak*, Karl Sianipar, Balige, h. 401-420.
- ⁴¹ Lance Castles, *op cit*, h. 9.
- ⁴² Bisuk Siahaan, 2005. *Ibid*, h. 158.
- ⁴³ Ketika Belanda ingin mengganti pemerintahan *bius* yang pemerintahan aslinya berbentuk Dewan *bius* menjadi negeri (nagari) sebagai unit pemerintahan terbawah maka Belanda menggunakan *bius* lama sebagai titik tolak. Karena itu setiap *bius* lama , dengan beberapa penecualian, menjelma menjadi negeri yang dikepalai oleh seorang Kepala Negeri (Nagari) yang pada mula-mula diberi gelar *Jaihutan* (berarti dipatuhi/diikuti). Mereka diangkat oleh Belanda untuk menggantikan Raja *bius* (Dewan *bius*) dan dari kebijakan itu lahirlah 142 negeri. Lihat Situmorang, h 19.
- ⁴⁴ Diunduh dari <http://mandosi.wordpress.com/2007/10/page/2/> pada tanggal 22 Mei 2012.
- ⁴⁵ Harahap, Basyral Hamidy dan Hotman M. Siahaan. 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Toba dan Angkola-Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar, h. 108.
- ⁴⁶ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 86.
- ⁴⁷ Sitor Situmorang, *Ibid*, h. 20-21.
- ⁴⁸ Sitor Situmorang, *Ibid*, h. 21.
- ⁴⁹ Menurut Jamaludin S. Hasibuan, *bius* merupakan sebutan untuk kesatuan desa-desa yang dihuni oleh marga satu keturunan. Lihat Jamaludin S. Hasibuan. 1985. *Art Et Culture/Seni Budaya Toba*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, h. 244. J.C. Vergowen mengatakan, adakalanya marga telah memiliki *bius* (*bius* kecil), atau satu atau beberapa komponen *bius* membentuk *bius* sendiri-sendiri dengan ukuran yang lebih kecil, tetapi dalam berbagai

- kegiatannya tetap tergantung pada *bius* yang lebih besar atau *bius* yang ada di atasnya. Mereka ini menyembelih seekor sapi atau seekor babi, bukan kerbau. Jika mereka sudah berhak untuk memiliki sistem jabatan sendiri, maka mereka pun disebut telah *manjae* (berdiri di atas kaki sendiri). Komposisi *bius* yang kecil seperti ini dan hubungannya dengan *bius* wilayah, sepenuhnya tergantung dari hubungan lokal. Hal yang sama berlaku pula bagi yang disebut terakhir ini dalam hal hubungannya dengan *bius* yang terbesar di atasnya. J.C. Vergowen, *op cit*, h. 90. Sementara tentang berdirinya hubungan affina dan pengkonsolidasiannya, lihat J.C. Vergowen, *op cit*, h. 52-58.
- ⁵⁰ *Bius* Parsanggaran terdiri atas tiga *horja* yaitu *Horja Siopat Turpuk* terdiri atas *horja* Sihaloho, Rumasondi, Sidabariba, Pitu Batu di Silalahi Nabolak; *Horja Sitolu Turpuk* terdiri dari Situngkir, Sidabutar, Sidebang di Silalahi Nabolak; dan *Horja Tambun* yang berada di Sibisa Uluan. Masing-masing *horja* terdiri dari sejumlah *huta* atau lumban atau sosor. Lebih lanjut lihat Ulbert Silalahi. 1998. *op cit*, h. 117.
- ⁵¹ Wawancara dengan MT. Sidabutar (op Aropan) pada tanggal ..., 2012.
- ⁵² *Ibid*, h. 87.
- ⁵³ Vergowen, *Ibid*, h. 85.
- ⁵⁴ Di samping itu *bius* memiliki satu pekan/pasar, *onan*, dan memiliki satu gunung sakti ialah gunung yang disembah, *dolok sombaon*, sebagai tempat *Debata* yang menjadi milik bersama dari sejumlah *horja-horja* atau *bius-bius*. Dalam *onan* tersebut didirikan satu rumah *Joro* atau *Patane* (sama dengan Baitullah, Gereja bagi orang Kristen atau Mesjid bagi orang Islam) atau juga disebut *Bale Pasogit* (berbentuk rumah Toba asli) sebagai tempat upacara keagamaan dan kerapatan. Dalam *onan* tersebut dekat dengan *Bale Pasogit* ditanam pohon “Hariara” sebagai perlambang keperkasaan dan kejayaan. Di sinilah tiap tahun dilaksanakan berbagai upacara yang dinamakan: *Pata Simangot*, *Asean taon*, *Rube*, dsbnya. Lihat Ulbert Silalahi, 1989, *ibid*, h. 139. Bandingkan dengan, Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan, *op cit*, h. 108.
- ⁵⁵ Lihat Vergowen, *op cit*, h. 85 *Bius* dari keturunan marga induk Silahisabungan di Silalahi Nabolak Kabupaten Dairi, juga memiliki ciri-ciri tersebut. Uraian lebih lanjut lihat Ulbert Silalahi, 1998, *op cit*, h. 115-131.
- ⁵⁶ Maully Purba, *Ibid*.
- ⁵⁷ Ketika dilaksanakan upacara *bius* makan horbo *bius*, diawali dengan pengucapan “tonggo-tonggo Horbo *bius*”, sebagai berikut: Hutonggo, Hupio, Hupangalualui ma hamu Ompung. Mulajadi Nabolon, mulani nasa na adong, na manjadihon saluhut. Dohot hamu ompung, Namartua Debata, Debata na tolu ... dst. Selengkapnya lihat Tampubolon, Raja Patik. 2002. *Pustaka Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama, h.302-304.
- ⁵⁸ Harahap, Basyral Hamidy dan Hotman M. Siahaan. 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar, h. 109.
- ⁵⁹ Kedudukan Raja-raja *Parbaringin* mulai merosot setelah impasse perang Padri/Bonjol. Sejak saat itu berangsur-angsur terjadilah pemisahan urusan keagamaan dan pemerintahan. Urusan keagamaan di tangan Raja *Parbaringin* sedangkan urusan pemerintahan di tangan *Raja bius*.
- ⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.
- ⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.
- ⁶² Tentang jalannya upacara mangase taon di Limbong dan Samosir lihat Bisuk Siahaan, *ibid*, h. 166-179.
- ⁶³ Ulaon *bius* ini berbeda ketika *bius* Bakara masih terdiri atas dua *horja*, yaitu: *horja* Bakara Sihite Simamora dan Sinambela Simanullang Marbun. Dalam ulaon *bius* ini kerbau yang dipotong ada dua ekor dari masing-masing *horja*. Kerbau dari pihak *suhut* (tuan rumah) disebut “*bariba horbo siamun*” (kerbau sebelah kanan), sedangkan dari *horja* lain sebagai *panamboli* disebut “*bariba horbo siambirang*”. Kedua kerbau ini oleh kedua *horja* berlomba menarik hingga ke *borotan* (tiang penyembelihan).

-
- ⁶⁴ Kotoran kerbau yang dibuang beberapa hari kemudian hilang. Dan alkisah kotoran tersebut sudah berpindah ke Namartua Simanukmanuk dekat aek Sipangolu *huta* Simaulampe. Disebut Simanuk-manuk, karena rumput dan pohon-pohonan yang tumbuh dibatu membentuk seperti ayam).
- ⁶⁵ Di Silalahi Nabolok di *bius* Parsanggaran sebagai *bius* warga Silahisabungan juga dikenal dengan *horja* mangan horbo mariam jika ada gangguan pertanian, dan *horja* mangan horbo suhung apabila penyakit merajelela. Lihat, Ulbert Silalahi, 1998, *op cit*, h. 120-121.
- ⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.
- ⁶⁷ Karena itu Belanda takut kalau struktur organisasi sosial-religius ini diteruskan eksistensinya. Bahkan sadar akan cakupan religius dan sekuler dari pesta *bius*, apalagi karena adanya kaitan dengan Si Singamangaraja, maka pemerintah Kolonial Belanda kemudian melarang pesta *bius*. Lihat W.B. Sidjabat, *op cit*, h. 73-74.
- ⁶⁸ Sitor Situmorang. 2004. Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX. Jakarta: Komunitas Bambu, h. xiii.
- ⁶⁹ Diunduh dari <http://www.mail-archive.com/palanta@minang.rantaunet.org/msg16727.html> pada tanggal 22 mei 2012
- ⁷⁰ Sitor Situmorang, *ibid*, h. 199.
- ⁷¹ Dwiyanto, dkk, 2002: 11.
- ⁷² W.B. Sidjabat. *Ibid*, h. 428.
- ⁷³ Setelah pemerintah kolonialisme Belanda berkuasa di Tapanuli, maka struktur *huta*, *horja* dan *bius* tradisional dirombak. Adakalanya *huta* tetap disebut *huta* tetapi maknanya sudah lain. Sementara beberapa *huta* kecil digabung dengan seorang kepala yang sering menimbulkan masalah diantara sesama warga. Raja *huta* tradisional diganti menjadi Raja *Ihutan* atau *Jaihutan* atau kepala negeri yang diangkat oleh pemerintah Belanda dan tunduk pada administrasi kolonial. Kemudian beberapa *huta* kecil digabung dengan seorang kepala yang sering menimbulkan masalah diantara sesama warga semarga.
- ⁷⁴ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 131.
- ⁷⁵ *Ibid*, h. 136.
- ⁷⁶ Sitor Situmorang, *ibid*, h.258
- ⁷⁷ *Ibid*, h. 139-140.

Bab 6

Raja dalam Birokrasi Kerajaan Tradisional

Pendahuluan

Bagi masyarakat Batak Toba, Raja memiliki beberapa makna. Pertama, sebagai pemimpin seperti pimpinan agama, pimpinan adat dan pimpinan pemerintahan. Pimpinan agama disebut raja parbaringin, pimpinan adat disebut raja adat, pimpinan pemerintahan disebut *raja huta*, *raja horja* atau *raja bius*. Kedua, sebagai panggilan kehormatan bagi kelompok dalihan na tolu pada upacara adat seperti raja ni hula-hula yaitu siapa yang menjadi pemberi mempelai wanita, raja ni dongan tubu yaitu siapa yang menjadi kelompok semarga dari yang sedang menyelenggarakan upacara, raja ni boru yaitu mereka yang termasuk kelompok penerima mempelai wanita. Ketiga, sebagai kehormatan untuk jabatan atau status sosial bagi yang menjadi juru bicara dalam hal apapun seperti raja parhata. Keempat, sebagai sebutan kehormatan untuk marga atau nama seperti Raja Silahisabungan. Yang dibahas adalah raja sebagai pimpinan dari satu pemerintahan atau harajaon. Dialah yang mengatur kehidupan bersama dari sekelompok orang atau yang menata kelola pemerintahan terkait dengan adat, religi dan ekonomi untuk mencapai tujuan bersama ialah kedamaian dan kesejahteraan.

Berdasarkan teritori, ada tiga tipe harajaon masyarakat Batak Toba tradisional, yaitu Harajaon Huta, Harajaon Horja dan Harajaon Bius. Untuk menjalankan fungsi atau tugas pokok dari tiap kerajaan tradisional Batak Toba maka di tiap *harajaon* diangkat raja¹. Di harajaon *huta* diangkat raja yang disebut *raja huta*. *Raja huta* adalah marga *sipungka huta* atau marga pendiri huta atau keturunannya. Dalam harajaon *horja* diangkat raja yang disebut *raja horja*. Mereka adalah *raja huta* sebagai wakil huta menjadi *raja horja* dari harajaon horja yang menjadi konfederasi mereka. Akhirnya, dalam harajaon *bius* diangkat raja yang disebut *raja bius*. Mereka dipilih dari *raja horja* untuk menjadi wakil mereka sebagai *raja bius*² yang menjadi konfederasi mereka.

Raja huta mengatur dinamika kehidupan untuk mencapai tujuan harajaon huta, *raja horja* mengatur dinamika kehidupan untuk mencapai tujuan harajaon horja, dan *raja bius* mengatur dinamika kehidupan untuk mencapai tujuan harajaon bius. Sebagai pimpinan tertinggi dalam satu harajaon maka seorang raja adalah *pargomgom*, pengayom di wilayah kerajaannya. Ia mengatur wilayah kerajaannya berdasarkan kekuasaan tradisional yang dimiliki. Masing-masing raja

dan kerajaan memiliki otonomi penuh untuk mengurus urusan kerajaan yang menjadi kekuasaannya. Mengatur dinamika kehidupan harajaon huta, harajaon horja maupun harajaon bius yang disebut *marharajaon na tolu* (kerajaan yang tiga) bersendikan pada budaya kerohanian yaitu *mardebata na tolu* (berdewata tiga) dan budaya kekerabatan yaitu *mardalihan na tolu* (bertungku tiga).

Kedudukan Raja dalam Perspektif Kosmos-Religius

Raja dalam birokrasi kerajaan tradisional memiliki kedudukan yang sangat penting dan bahkan sentral dalam perspektif kosmologi. Kedudukan dan status seorang raja dalam masyarakat Batak Toba tradisional demikian tinggi hingga ada ucapan: *raja so joloan, raja so tindion* atau raja tidak didahului, raja tidak diungguli. Dalam masyarakat tradisional seperti halnya masyarakat Batak Toba, raja merupakan primus inter pares³. Dalam perspektif kosmologi, tentu ada kaitan antara kedudukan raja dengan religi⁴. Kaitan itu tampak dengan jelas dalam budaya kerohanian masyarakat Batak Toba tradisional seperti dalam deskripsi Panggading, seorang Raja Paindua di Sisoding di *Harajaon Manalu Dolok* (sekarang menjadi dusun di Desa Banjar Toruan Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara. Ia mengatakan⁵:

Ditompa Debata jolma mangarajai uhum.

Ditompa Debata uhum mangarajai adat.

Ditompa Debata raja mangarajai luat.

Asa raja ima nampuna adat dohot uhum, mangarajai angka na met-met dohot na magodang, lahi-lahi dohot boru-boru.

Terjemahan bebas:

Tuhan menciptakan manusia mengatur hukum,

Tuhan menciptakan hukum mengatur adat,

Tuhan menciptakan raja mengatur negeri.

Supaya raja itu yang punya adat dan hukum, memerintah pihak yang kecil dan yang besar, laki-laki dan perempuan.

Ungkapan metafora di atas menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba tradisional yang kosmos-religius memosisikan raja sebagai ciptaan Tuhan untuk mengatur atau memerintah suatu wilayah pemerintahan, memerintah manusia ciptaan Tuhan berdasarkan adat dan hukum yang berasal dari Tuhan.

Dalam kepercayaan kosmos-magis atau kosmos-religius Batak Toba-tua, kedudukan raja dalam mikrokosmos merepresentasi kedudukan *Debata* dalam makrokosmos. *Debata* yang mengatur makrokosmos dalam budaya kerohanian Batak Toba direpresentasikan oleh kehadiran raja yang juga berfungsi mengatur mikrokosmos atau dunia manusia dalam budaya kekerabatan. Jika *Debata* menjaga keseimbangan makrokosmos, maka raja menjadi wakil *Debata* menjaga

keseimbangan mikrokosmos. Jadi, kedudukan raja sangat tinggi, bahkan ia dianggap sebagai “wakil” Tuhan untuk mengatur dan memelihara kehidupan masyarakat, baik kehidupan keagamaan, kemasyarakatan termasuk kehidupan ekonomi dan kesejahteraan dari yang dipimpinnya. Kedudukan raja sangat tinggi karena raja dianggap sebagai utusan Tuhan seperti dikemukakan oleh Raja Patik Tampu Bolon,

Ala raja ido singkat ni Debata dohot wakil ni Debata, jala na mangalualu tu Raja i, na mangalualu tu Debata dohot wakil ni Debata do i. Songoni ma adat ni harajaon Singamangaraja na turun-temurun sian sijolo-jolo tubu.

Karena raja adalah pengganti Tuhan dan wakil dari Tuhan, kemudian memohon kepada raja, berarti memohon kepada Tuhan dan wakil dari Tuhan. Begitulah adat dalam kerajaan Singamangaraja yang turun-temurun dari dulu.

Karena itu bagi masyarakat Batak Toba tradisional *di jolo raja sipareahan, di pudi raja sipaimaon*, atau didepan raja dikerja, dibelakang raja ditunggu. Masyarakat Batak Toba tradisional memosisikan seorang raja sebagai,

Tanduk so suharon,

Mataniari so dompakon,

Hatana so laoson,

Tonana so juaon

Tanduk tidak dibalikkan

Matahari tidak pandang

Ucapannya tidak diacuhkan

Pesannya tidak ditolak.

Bahkan bagi masyarakat Batak Toba tradisional wajib taat kepada raja. Dengan taat kepada raja akan mendapatkan imbalan ialah keberuntungan seperti dinyatakan dalam ungkapan metafora berikut:

Baris-baris ni gaja, di rura pangaloan

Marsuru raja, ingkon do oloan

Nioloan dapot pangomoan

So nioloan dapot hamagoan.

Barisan gaja di lembah pengangonan

Memerintah raja, harus dituruti

Dituruti mendapat keberuntungan

Tidak dituruti mendapat kerugian

Kedudukan seorang raja semakin jelas dilihat dalam Patik dohot Uhum yang ditemukan dalam Tumbaga Holing, torsani harajaon dari Tuan Sorimangaraja. Ada dua Patik dohot Uhum yang mengatur tentang kedudukan raja yaitu Patik dohot Uhum di pesta Harajaon dan Patik dohot Uhum Sahala/Tondi ni Raja. Dalam *Patik dohot Uhum di pesta Harajaon* disebutkan⁶:

1. Raja do wakil dohot singkat ni Debata. Na Mangalualu tu raja, na mangalualu tu Debata
2. Raja do sitiop tampuk ni adat patik dohot uhum
3. Raja do sijaga pintu jae dohot pintu julu
4. Raja do sangkotan uhum ni anak, sangkotan uhum ni boru
5. Raja do sitiop hatian na sora monggal dohot ampang si sampulu lima solup siopat bale
6. Raja do sibalum amak na bolak, siduduk na ganjang
7. Raja do sipatio na litok dohot sipatiur na rundut
8. Raja do ianggo parbahulbahul na bolon
9. Raja do ianggo paruhum na tigor jala na sintong
10. Raja do ianggo sipaima punggur madabu
11. Dohot lan na asing

Terjemahan bebas:

1. Raja adalah wakil dari Debata. Yang menyampaikan keluhan kepada raja berarti menyampaikan keluhan kepada Debata.
2. Raja adalah pimpinan dari adat aturan dan hukum
3. Raja adalah penjaga pintu utara dan pintu selatan.
4. Raja adalah kaitan hukum dari anak laki-laki, kaitan hukum dari anak perempuan.
5. Raja adalah pemegang timbangan hatian yang tidak akan berubah monggal dan ampang yang lima belas solup yang empat bale
6. Raja adalah yang menggulung tikar yang lebar, melipat yang panjang.
7. Raja adalah pembersih yang kotor dan sipatiur na rundut
8. Raja merupakan pemilik bahulbahul yang besar
9. Raja merupakan hakim yang lurus atau jujur dan yang benar.
10. Raja merupakan penunggu punggur jatuh madabu
11. Dan sebagainya.

Dalam *Patik dohot Uhum sahala/tondi ni Raja* disebutkan⁷:

1. Raja na tundal hataon, na dompak pujion
2. Babiati di pintu, gompul di alaman
3. Raja do ihot ni uhum, na mora urat ni hosa
4. Ginjang ni dolok hinasangapanna, bagas ni holbung hinabadiana
5. Manginjam gogo tu gaja, manginjam tongam tu babiati
6. Rap tubu do bagot dohot pangkona
7. Tondi ni raja hinabiaran
8. Sahala ni raja: basta tu pardalanan, tugo tu pangallungan
9. Sahala ni raja: manumpak do di jolo, mangkorasi dipudi
10. Tanduk so suharon, mata ni ari so dompahon
11. Dohot lan na asing.

Memilih dan Mengangkat Raja

Menurut adat Batak, umumnya putera tertua dari suatu keluarga yang diutamakan melanjutkan tugas dan fungsi orang-tuanya, terutama di bidang adat dan pemerintahan atau harajaon. Untuk menjadi raja dalam harajaon Batak Toba harus berdasarkan keturunan langsung dari raja yang sedang memerintah tetapi tidak otomatis anak pertama. Karena itu pengangkatan dan penggantian seorang raja tidak ditentukan oleh raja yang sedang berkuasa. Raja yang berkuasa tidak dapat menentukan sendiri penggantinya, misalnya, berdasarkan atas status yang didapat berdasarkan keturunan atau ia harus diganti oleh anak sulungnya. Sebab nilai-nilai yang terdapat dalam budaya Batak Toba tradisional adalah:

Ndang simanuk-manuk sibontar andora, ndang sitodo di turpuh siahut lomo ni roha, sae do guru di Debata, di adat Patik/Uhum, hatigoran dohot hasintongan; ise na miniahanna ido bangkit raja singkat ni amana. Asa ndada ala torop, bisuk dohot gogo umbahen gabe raja, ianggo sahala harajaon I do na manontuhon dohot mangalehon hasangapon, asa marsahala raja⁸.

Berbeda dengan kerajaan Jawa dan Bali di mana status dan kekuasaan raja diperoleh semata-mata berdasarkan prinsip keturunan⁹. Dalam masyarakat dan kerajaan Batak Toba tradisional untuk menjadi raja selain berdasarkan keturunan juga harus memiliki *sahala harajaon* (kualitas pemerintahan) dan mendapat legitimasi dari para raja adat. Sebagai bukti bahwa seseorang memiliki *sahala harajaon* tampak dalam rekam jejak yang bersangkutan seperti dapat mendatangkan hujan, menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat atau lolos dari uji kelayakan untuk melakukan berbagai hal yang disyaratkan pada saat pemilihan. Hanya seseorang yang memiliki atau yang dalam dirinya melekat atau terpancar *sahala harajaon*. Berdasarkan kepercayaan Batak Toba tradisional, raja dianggap sebagai titisan *Debata*. Penitisan *Debata* dalam diri seseorang untuk menjadi raja dapat melalui *sahala harajaon* yang diberikan oleh Debata. *Sahala* adalah roh kekuatan yang dimiliki atau berada dalam diri seseorang. *Sahala* sama dengan sumanta, tuah atau kesaktian yang dimiliki atau melekat pada diri seorang untuk menjadi raja. *Sahala* merupakan kualitas tertentu dari roh. Kuat, kaya, subur, sehat, makmur, berhasil, dll, berarti memiliki *sahala*; sedangkan kekeringan, kemandulan, penyakit, kelaparan dan kegagalan, dll, merupakan pertanda bahwa *sahala* telah pergi karena dilukai.

Sahala harajaon diperlukan untuk memerintah. Raja atau seseorang sukses dan dihormati karena memiliki *sahala harajaon*. Jika seorang raja memiliki *sahala harajaon*, maka kedudukan raja yang magis-religius itu membuat raja dihormati dan dipatuhi oleh rakyat. Itu karena apa yang dikatakan oleh raja dianggap sebagai “titah *Debata*”, suara raja adalah suara Tuhan. Jika *sahala*

harajaon meninggalkan raja, maka ia tidak akan dapat berbuat banyak, ia tidak dihormati lagi.. Perintah tidak dituruti, kelaparan dan penyakit menimpa masyarakat yang diperintah serta kalah perang merupakan pertanda bahwa *sahala* telah meninggalkan raja.

Selain memiliki *sahala jarajaon*, maka karakteristik atau sifat-sifat lain yang perlu dimiliki oleh seorang untuk layak menjadi raja ialah:

1. Hagabeon/habolonon atau banyak keluarga.
2. Hamoraon (kekayaan), yaitu memiliki banyak harta.
3. Habisuhon (kebijaksanaan), yaitu arif, cerdas, cendekia.
4. Habeguon yaitu perkasa karena memiliki kemampuan gaib untuk digunakan dalam perang.
5. Hadatuon yaitu memiliki kemampuan gaib untuk pengobatan.
6. Parpollung yang berarti pintar berpicara, berdiplomasi dan bernegosiasi.
7. Menguasai Patik dohot Uhum (aturan dan hukum) berkenaan dengan kekerabatan adat, kerohanian agama, ekonomi dan aturan hukum lain.
8. Secara fisik berwibawa serta ramah dan dipercaya
9. Keturunan raja (marga raja untuk raja huta, raja huta untuk raja horja, raja horja untuk raja bius).

Tugas dan Fungsi Raja

Tugas dan fungsi Raja dalam masyarakat Batak Toba tampak dengan jelas secara implisit dan eksplisit serta tersurat dan tersirat yang dikemukakan oleh Panggading, seorang Raja Paindua di Sisoding di *Harajaon* Manalu Dolok (sekarang menjadi salah satu dusun di Desa Banjar Toruan Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara), dalam beberapa penggalan sebagai berikut:¹⁰

Asa raja ima nampuna adat dohot uhum,
Mangarajai angka na met-met dohot na magodang.
Mangaramothon saluhut na di gomgomanna,
Manguhumi siuhumon
Manogihon halak tu panggagatan na lomak,
Manarihon hangoluan ni angka ginomgomana.
Manarihon uhum dohot adat di angka ginomgomna
Pasari-sari panganonna asa adong hangoluanna.
Diterjemahkan menjadi:
Karena raja pemilik adat dan hukum
Mengatur yang kecil dan yang besar
Melindungi seluruh yang ada dalam kekuasaannya
Menghukum yang harus di hukum
Membawa setiap orang ke tempat yang subur
Mengurus kehidupan dari setiap yang ada dalam kekuasaannya

Mengurus hukum dan adat di setiap yang ada dalam kekuasaannya
Mencari makanannya agar ada kehidupannya

Raja Huta

Huta merupakan satuan administratif kecil yang terdiri atas satu atau beberapa lumban atau sosor yang umumnya didirikan oleh satu kakek bersama. Pimpinan tertinggi dalam satu harajaon *huta* disebut *raja hutu*. Meskipun demikian hak mengatur atau memerintah *huta* dalam masyarakat Batak Toba pada hakekatnya adalah *hatopan* (hak bersama) dari keturunan patrilineal langsung pendiri *huta*. Tetapi menurut peraturan hukum hak itu dipangku oleh satu orang penguasa yang berasal dari antara keturunan patrilineal pendiri *huta* atau *raja hutu*. Ini menunjukkan ada perbedaan hak memimpin antara *marga sipungka hutu* atau marga pendiri dan pemilik *huta* dan marga penumpang, baik marga boru dan marga pendatang.

Memilih dan Mengangkat Raja Huta

Status *raja hutu* turun-temurun kepada anak sulung. Tetapi kadang-kadang, karena faktor tertentu, pengangkatan *raja hutu* dilakukan melalui pemilihan langsung oleh komunitas *huta*. Yang dipilih harus dari keturunan patrilineal langsung dari marga pendiri *huta* yang memenuhi persyaratan tertentu. Jabatan *raja hutu*, jika mungkin atau tidak menjadi keharusan, diturunkan ke anak atau kepada uaris sesuai dengan tuntutan pemilikan kualitas istimewa yang disebut *sahala*. Jadi *huta* adalah satu *harajaon* yang dipimpin oleh seorang raja yang disebut *raja hutu*.

Untuk menjadi *raja hutu*, di Bakara misalnya, di samping ia adalah keturunan dari marga sipungka *huta*, ia harus memahami atau menguasai hukum dan adat dan rajin mengikuti kegiatan adat, *parpollung* (pintar bicara), *parbahul-bahul na bolon* (berhati lapang, tidak cepat marah). Hanya orang yang berwibawa, yang lebih unggul dari penduduk *huta* dan kata-katanya tidak dianggap enteng yang bisa menjadi *raja hutu* yang sukses, dan yang otoritasnya dirasakan. Di *huta* Simangulampe di *bius* Bakara, misalnya, yang dapat diangkat menjadi *raja hutu* adalah marga pemilik *huta*, *nampuna bona pasogit* ialah marga Simanullang atau Sinambela¹¹.

Untuk terpilih menjadi *raja hutu* di antara keturunan langsung marga pendiri *huta*, di antara mereka terjadi saling mempertahankan kelanjutan kedudukan masing-masing sebagai “*sihahaan*” (marga paling sulung) karena merekalah yang berhak menjadi *raja hutu* atau *tunggane hutu* (tetua desa).¹² Dalam situasi seperti ini, persatuan yang kuat antara satu marga dibarengi dengan jumlah bilangan yang banyak, ialah sebagai syarat mutlak menimbulkan

kekuasaan sesuatu marga menjadi raja (penguasa) di lingkungan suatu *huta*.¹³ Ini berarti perilaku politik dalam birokrasi tradisional Batak Toba-tua tidak lepas dari ikatan dan semangat marga dan kekerabatan).¹⁴ Akhirnya, *raja huta* terpilih diberitahukan kepada semua *horja* dan *bius* agar hal-hal yang penting untuk *huta* disampaikan kepada *raja huta* terpilih. Sementara jabatan *raja huta* berakhir kalau ia sakit, meninggal atau menyatakan diri mundur¹⁵.

Otoritas dan Tanggungjawab Raja Huta

Keturunan *marga sipungka huta* menjadi *pargomgom ni huta* (pelindung dari *huta*) sedangkan marga penumpang menjadi kelompok *ginonggom ni huta* (dilindungi oleh *huta*). Jadi pemimpin tertinggi dalam birokrasi *huta* disebut *raja huta* ialah pendiri *huta* atau para keturunannya. Pada masa Kolonialisme Belanda disebut *tunggane huta* (tetua *huta*). Mereka menganggap diri mereka sebagai penguasa *huta* dan tidak tunduk secara politis dan administratif kepada otoritas lain. “Bahwa para raja-*huta* inilah pemangku sistem pemerintahan tradisional yang berurusan langsung dengan setiap warga, penjamin tertib hukum dan kesinambungan tradisi”¹⁶.

Masing-masing *raja huta* memiliki harga diri yang tinggi serta tidak mau kalah terhadap *huta* yang lain. Penghuni tiap *huta* sadar bahwa merekalah yang merupakan *raja huta* di desanya. Artinya, mereka yang berhak mengatur serta memiliki wewenang menentukan segala hal yang berlaku di *hutanya*. Hak ini tidak berlaku bagi golongan *hatoban* (budak) dan *tabantaban* (tawanan).¹⁷ Karena itu perasaan kemandirian, otonomi dan demokrasi di tiap *huta* sangat kuat di *Harajaon* Batak Toba dibandingkan dengan *huta* di Tapanuli Selatan, Karo, Simalungun dan Dairi. *Huta* yang didirikannya atau didirikan oleh orang tua atau leluhurnya dianggapnya sebagai miliknya sendiri yang tidak boleh dikuasai oleh orang lain. *Raja huta* yang lain memang dihormati oleh penduduk *huta*, tetapi tidak melebihi penghormatan atas kekuasaan *raja huta* sendiri.¹⁸

Sebagai satu republik atau pemerintahan kecil *raja huta* berfungsi untuk *manggomgom huta*, mengatur dan melindungi *huta* atau *mangaradoti huta*, mengurus *huta* yang banyak macamnya¹⁹. Umumnya *raja huta* tidak mau mentoleransi campurtangan pihak luar ke dalam daerah kekuasaannya. Setiap urusan yang semata-mata menyangkut *huta* dan penghuninya ditangani oleh *raja huta* sebagai penguasa *huta*. Urusan *huta* ditangani oleh otoritas *huta*, dan tidak ada campurtangan orang luar dalam hal itu. Fungsi dan tugas serta kewajiban seorang *raja huta* sangat banyak sama aneka ragamnya dengan banyaknya aspek kehidupan *huta*. Menurut Vergowen, tugas *raja huta* adalah:

1. Dia memikul tugas manajemen *huta* dan penegak hukum adat, ketertiban dan disiplin.

2. Dia mengawasi pemeliharaan dan tembok benteng; dia mengatur lokasi bangunan-bangunan dan melakukan kontrol atas sawah-ladang yang termasuk tanah *huta*.
3. Dia memutuskan apakah kebun kecil harus dibebaskan untuk keperluan pembangunan rumah atau dibiarkan saja;
4. Dia membimbing perilaku hukum warganya dan mendampingi-nya apabila warga memajukan suatu tuntutan hukum pada pihak lain.
5. Dia memberikan bimbingan dalam rundingan antara warga yang hendak mengikat pertunangan.
6. Dia bertindak sebagai kuasa mengurus kepentingan *huta* dan kelompoknya seketurunan dalam persoalan dengan dunia luar.
7. Di masa lalu ia juga bertanggungjawab dalam pengadilan.
8. Dia pemerintah dan polisi sekaligus, dan di masa lalu di dekat rumahnya terkadang tersedia pasung untuk memasung warga yang menentang perintahnya (melanggar hukum)²⁰.

Sementara itu, Bisuk Siahaan mengatakan:

Dalam kehidupan sehari-hari *raja huta* bertugas dan bertanggungjawab mengenai pengaturan kampung, keamanan penghuni, memelihara kampung beserta temboknya, mengatur baris-baris rumah, mengawasi tanah yang termasuk lingkup kampung, penengah apabila terjadi perselisihan di antara penghuni kampung (atau mendampingi jika terjadi perselisihan antara penghuni *huta* dengan penghuni *huta* lain, tambahan dari penulis), merawat bambu yang ditanam di atas tembok, mengatur balai pertemuan sopo, mengatur pembuangan air, turut memimpin upacara adat atau kurban dan lain sebagainya²¹.

Di samping itu, *raja huta* juga bertugas mengelola *huta* dan menegakkan hukum yang terkait dengan adat, ketertiban dan disiplin. Dia bertanggungjawab atas pemeliharaan pelataran *huta* dan temboknya; ia mengatur agar baris rumah-rumah lurus sambil menjalankan pengawasan atas tanah *huta*. *Raja huta* menyelesaikan masalah-masalah (kecil) antar keluarga warga *huta*, membagi lahan garapan bagi keluarga-keluarga, menyelenggarakan perkawinan dengan warga dari *huta* lain, mewakili *huta* keluar dsb. Ia adalah pengayom adat, hak ulayat (golat) dan pemimpin sekuler (soal-soal duniawi).

raja huta juga dapat memutuskan apakah sebuah kebun kecil mesti ditiadakan untuk memberi tempat kepada rumah baru, ataukah tetap saja begitu; ia membimbing perilaku hukum warga, dan membantunya jika ada tuntutan terhadap siapa pun juga, atau dalam hal si peminjam uang membikin terlalu banyak kesulitan buat dia. *Raja huta* membimbing perundingan pertunangan jika putra-putri mereka akan kawin, mewakili kepentingan *huta* dan kerabat seketurunan jika terlibat urusan dengan dunia luar, bertanggungjawab atas penyelenggaraan

peradilan, dan bahkan dia adalah pemerintah dan polisi sekaligus,²² bertanggungjawab atas penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum dan adat dan juga menyelesaikan sengketa-sengketa. Singkatnya, *raja huta* adalah pemerintah dan polisi sekaligus²³. Di samping itu, *raja huta* berkewajiban secara terus menerus mengawasi agar *adat parhutaan* tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat, mengatur *huta* agar terwujud keamanan dan ketertiban. Ia juga bertanggungjawab atas keamanan *huta* jika ada serangan dari luar, baik dari desa lain, alam, dan penyakit, yang mengganggu kesejahteraan umum masyarakat *huta*. Dia dan anggota masyarakat *huta* bertanggungjawab bila ada penghuni *huta* yang bersalah kepada orang lain di luar wilayahnya.

Raja huta berkewajiban mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh *horja* maupun *bius*. *Raja huta* bertugas sebagai penghubung dan menyampaikan *ting-ting* (pengumuman) dari raja Singamangaraja, maupun keputusan di tingkat *horja* dan tingkat *bius* kepada warga *huta* tentang berbagai hal untuk kepentingan *huta* yang dipimpinnya. Tetapi sebaliknya, ketika *raja huta* mengambil keputusan setelah bermusyawarah dengan warga *huta*, maka keputusan tersebut harus selalu dapat dipertanggung jawabkan kepada *raja horja* dan juga kepada Dewan *bius* sekuler. Misalnya, mengumumkan kepada warganya untuk memakan *babi ambat*²⁴ agar terhindar dari berbagai gangguan. *Raja huta* mengatur kegiatan di *huta*, baik kegiatan adat, memungut dana untuk berbagai kegiatan dan kepentingan masyarakat *huta*, bahkan ia menjadi *raja paruhum*, hakim (mereka yang memberikan pertimbangan), jika ada pihak-pihak warga yang berselisih.²⁵

Dalam berbagai urusan seperti perkawinan, transaksi dagang, jual-beli tanah, misalnya, harus disaksikan oleh *raja huta* dan untuk itu dia memperoleh imbalan yang disebut *upa* raja, imbalan yang menunjukkan bahwa dialah yang merupakan raja. Imbalan dalam praktek birokrasi Dinasti Singamangaraja tidak ditentukan berapa jumlahnya, melainkan menurut kerelaan dan kemampuan dari pemberi imbalan. Artinya, apa yang dibawa dan diberikan oleh warga, itu yang diterima oleh raja tidak terkecuali raja Singamangaraja. Bahkan imbalan tidak wajib atau tidak merupakan keharusan. Kalaupun raja menerima “upeti”, baik berupa uang maupun padi atau beras, itu disimpan untuk kepentingan masyarakat, misalnya, untuk dipinjamkan tanpa bunga kepada rakyat yang membutuhkan. Dalam perumpamaan disebut: *ina do nampunasa dalan* (ibu yang mempunyai jalan), artinya, mendahulukan atau membantu yang lemah.

Dalam pelaksanaan urusan *harajaon huta*, baik sosial, adat, ekonomi, keamanan dan keagamaan, *raja huta* meminta pendapat “aparatur” *huta* yang disebut *pangituai* atau *natua-tua ni huta*. Biasanya mereka adalah anggota galur keturunan patrilineal dari *marga sipungka huta* maupun dari *marga boru*. Dalam membuat satu keputusan menyelesaikan suatu permasalahan *huta*, misalnya, *raja*

huta memperoleh nasehat dari mereka. Sementara dari kelompok marga penumpang, secara teratur ia meminta nasehat dan dukungan dari *na mora boru* atau marga *boru* tertua terutama jika soalnya menyangkut perbedaan pendapat antara dia dan anggota galur seketurunan. Ia juga meminta nasehat dari *Parbaringin* dan para *datu* yang tinggal di *huta* yang dilindungannya. Sedangkan nasehat dari *datu* diminta jika banyak orang sakit, pertanian buruk (*sega na niula*), atau warga *huta* meninggal secara mencurigakan.

Raja Horja

Horja merupakan komunitas yang lebih besar dari komunitas *huta* tetapi lebih kecil dari *bius* untuk mengadakan upacara kurban secara bersama. Harajaon atau pemerintahan *horja* merupakan satu komunitas atau paguyuban yang otonom yang terdiri dari sejumlah *huta* yang juga otonom. Seperti halnya dengan *huta* yang memiliki *raja huta*, maka tiap-tiap *horja* juga dipimpin oleh raja yang disebut *raja horja*. *Raja horja* adalah *raja huta* yang diusulkan oleh komunitas *huta* yang menjadi konfederasi dari *horja* tersebut. Di daerah Balige dan sekitarnya, *raja horja* dinamakan *raja jolo*, di daerah lain disebut *raja jungjungan*²⁶ dan lainnya disebut *raja partahi*.

Memilih dan Mengangkat Raja Horja

Tiap *huta* berhak mengusulkan satu orang menjadi *raja horja* yang dipilih melalui pemilihan oleh masing-masing masyarakat *huta*. Ini berarti bahwa *raja horja* adalah juga merangkap sebagai *raja huta*. Kemudian atas prakarsa dari raja-raja *horja* yang berasal dari *raja huta*, diselenggarakan musyawarah untuk memilih pemimpin *horja* yang disebut Raja Jolo atau Raja *Jungjungan*. Musyawarah dilakukan di tempat yang disebut *partungkoan* dan *raja horja* yang dipilih adalah seorang dari antara raja-raja *horja*. Oleh karena itu pimpinan Harajaon *Horja* adalah pimpinan kolegiat dari sejumlah *raja horja* yang sekaligus juga adalah *raja huta*. Tetapi dari antara mereka diangkat seorang menjadi *Raja Jolo*.

Otoritas dan Tanggungjawab Raja Horja

Raja Horja atau *Raja Jolo* merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan atau Harajaon Batak Toba tradisional. *Raja horja* memimpin tiap kegiatan yang dilakukan oleh *horja* termasuk upacara persembahan kurban. Dalam hal mengatur atau melaksanakan kegiatan *horja*, terutama untuk memimpin upacara kerohanian, *raja horja* didampingi oleh 1-2 orang raja *Parbaringin*. Tetapi di *Horja* tertentu, misalnya karena terpencil, *raja horja* atau

Raja Jolo atau *Raja Jungjungan* adakalanya sekaligus merangkap sebagai raja *Parbaringin*.

Selain bertanggungjawab atas penyelenggaraan upacara persembahan kurban di tingkat horja, *raja horja* berhak menyatakan perang atau damai, mengatur pekerjaan-pekerjaan besar yang ada kaitannya dengan kepentingan horja maupun kepentingan huta yang menjadi bagian dari horja dan warganya. Tetapi jika berkenaan dengan urusan intern huta tertentu, kecuai huta dimana dia juga menjadi *raja huta*, biasanya *raja horja* tidak ikut campur kecuali diminta pandangannya. Dia hanya mengurus urusan huta lain hanya sebagai penengah. Tetapi jika menyangkut atau melibatkan antar huta, maka *raja horja* akan bertindak untuk memberikan solusi terbaik. Dalam kegiatan kerohanian, *raja horja* mengatur persiapan upacara horja santi rea sebagai upacara persembahan yang besar serta membawakan tonggo-tonggo atau doa-doa ritual meskipun yang memimpin upacara tetap *Parbaringin*.

Tiap *ulaon horja* (kegiatan pesta) dapat dilaksanakan oleh masing-masing horja, atau secara bersama-sama oleh beberapa horja. Jika *ulaon horja* dilaksanakan oleh satu horja, maka pada hari yang sama tidak diperbolehkan ada *ulaon horja* (pesta horja) lain dalam satu *bius*. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh satu horja, *sahorja*, antara lain: *mangongkal holi* (menggali tulang belulang satu kakek bersama), *parohon sahala ni ompu* (mendatangkan roh kakek), *mangaku sala na mardongan tubu* (mengaku kesalahan di antara kelompok semarga atau satu kakek), dan juga upacara kurban untuk arwah leluhur dari komunitas cabang marga kecil atau besar atau bahkan marga itu sendiri yang berkumpul bersama dengan menyembelih kerbau. Ini disebut *sahorja horbo*. Atau upacara kurban untuk arwah leluhur tertinggi dan termulia, yaitu *sombaon* yang dilakukan oleh seluruh marga induk atau kelompok suku. Ini disebut *horja rea*, atau *santi rea*, atau *sapanganan horbo sombaon*.

Di *Bius Bakara*, ada dua tipe pelaksanaan *ulaon horja*. Jika *ulaon na met-met* (pesta kecil) dapat dilaksanakan oleh horja atau hanya diberitahukan kepada satu horja. Sebaliknya, jika *ulaon na balga* (pesta besar) harus diberitahukan kepada semua horja di *Si Onom Ompu* sehingga perlu melaksanakan *tonggo raja* yang melibatkan seluruh horja di *Si Onom Ompu*. Dalam upacara mendirikan huta, misalnya, jika diberitahukan kepada satu horja berarti huta yang didirikan tersebut hanya diakui oleh dan memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan huta lain di horja yang sama. Sebaliknya, jika diberitahukan kepada *bius* berarti huta yang baru didirikan tersebut diakui oleh semua horja dan mempunyai hak yang sama dengan huta lain yang ada di *bius Si Onom Ompu*.

Berdasarkan tata cara dan makna pelaksanaannya, ada dua jenis *ulaon horja* di *Bius Sionom Ompu* yaitu: *horja hundul* (pesta duduk) dan *horja tindang* (pesta berdiri). Disebut *horja hundul* jika upacara hanya makan bersama tetapi

dang mangkuling ogung atau tidak ada gendang tradisional. Upacara *horja hundul* dapat dilaksanakan oleh hanya satu *horja* tanpa melibatkan masyarakat *Si Onom Ompu*. Sebaliknya, disebut *horja tindang* jika pelaksanaan upacara *horja*, selain makan bersama juga disertai oleh *ogung* atau gendang sambil *manortor* atau menari. Pelaksanaan *horja tindang* harus melibatkan semua *horja* di Bius *Si Onom Ompu*. Biasanya pelaksanaan dimulai dengan *tonggo* raja (doa para raja). Dalam konteks ini kegiatan *horja* menjadi kegiatan *bius*, tetapi dalam kegiatan tersebut ada *horja* yang menjadi tuan rumah.

Raja Bius

Harajaon atau pemerintahan *bius* adalah satu komunitas atau paguyuban yang otonom yang terdiri dari sejumlah *horja*. Pimpinan tertingginya disebut *raja bius*. Karena *raja bius* lebih dari satu orang maka disebut Dewan Bius meskipun dari mereka diangkat satu orang sebagai pimpinan *raja bius* atau pimpinan Dewan Bius yang sering disebut Raja Doli. Dia adalah pimpinan duniawi. Pada awalnya persekutuan ini dibentuk untuk melaksanakan upacara kurban secara bersama. Tetapi karena semakin banyak urusan di luar persembahan kurban yaitu urusan hukum dan masalah duniawi yang melibatkan *bius* maka *bius* juga menjadi masyarakat hukum harajaon.

Satu *bius* dipimpin oleh *raja bius*. Walaupun disebut *raja bius*, tetapi mereka adalah sekumpulan orang yaitu *raja horja* yang berasal dari *raja huta*. *Raja bius* merupakan wakil dari tiap *raja horja* dan mereka adalah juga *raja huta*. Ini berarti bahwa *raja bius* merupakan hak istimewa galur keturunan *marga sipungka huta*. Karena merupakan wakil dari tiap *raja horja* yang berkonfederasi dengan *bius* maka *raja bius* merupakan satu Dewan *Bius*. Ini berarti *bius* bukanlah satu unit kerajaan atau pemerintahan yang berada di bawah satu kekuasaan tunggal. Dari antara mereka dipilih seorang sebagai pemimpin yang disebut sebagai *raja bius*, kadang-kadang disebut Raja Doli.

Memilih dan Mengangkat Raja Bius

Warga tiap *horja*, melalui pemilihan ataupun penunjukan secara spontanitas menempatkan sejumlah *raja horja* sebagai wakilnya menjadi *raja bius* atau anggota Dewan *Bius*. Dari antara mereka kemudian mereka pilih sebagai pimpinan Dewan *bius*. Dewan *bius* juga menentukan pendeta-pendeta dalam kelompok Parbaringin dalam *bius* yang bersangkutan.

Di *Bius Bakkara*, *raja bius* ditentukan oleh berapa jumlah marga inti atau *marga sipungka huta* yang ada di *bius* tersebut. Oleh karena itu *bius* Bakara terdapat minimal 6 *raja bius* yang mewakili enam marga raja di *bius* Bakara. Bisa sampai 18 *raja bius* dimana tiap marga inti diwakili oleh tiga orang sesuai dengan

jumlah keturunan dari tiap marga inti. Karena ada enam marga inti di *bius* Bakara dan tiap marga inti memiliki tiga anak, maka *raja bius* berjumlah 18 orang. Mereka secara bersama-sama memimpin *bius Si Onom Ompu* dan mereka secara federatif dan kolektif mewakili *bius* ke dalam maupun ke luar *bius*. Untuk suatu rapat besar atau rapat antar *bius* di *Harajaon Toba*, maka tiap *Bus* akan mengirim wakilnya. Wakil dari *bius* diserahkan kepada *bius* itu sendiri, sementara khusus wakil *bius Si Onom Ompu* atau *bius* Bakara dipilih langsung oleh raja Singamangaraja.

Pengangkatan *raja bius* di *bius* Bakara dilakukan oleh masing-masing marga inti yang ada di *bius* Bakara yaitu Bakara, Sinambela, Sihite, Simanullang, Simamora dan Marbun. Jadi, *raja bius* di *bius Si Onom Ompu* mewakili keenam marga tersebut. *Raja bius* yang terpilih dianggap sebagai “*anak mata*” (yang terbaik) dari marga tersebut. Mereka dianggap memiliki kualitas seperti *parhata* atau pandai bicara, *paradat* atau menguasai adat istiadat serta tekun dan patuh melaksanakannya, dan *parbinoto* atau memiliki pengetahuan adikodrati atau indra keenam.

Otoritas dan Tanggungjawab Raja Bius

Raja *bius* disebut juga Raja Doli. Dia adalah pimpinan tertinggi dalam *harajaon bius*. Tugasnya adalah mengatur berbagai kepentingan warga yaitu kepentingan bersama dari huta dan horja yang menjadi konfederasi *bius* seperti mengelola tali air atau irigasi ataupun mendamaikan perselisihan antar warga yang tidak dapat diselesaikan oleh huta atau horja atau perselisihan antar huta yang tidak dapat diselesaikan oleh horja atau perselisihan antar horja yang terjadi dalam *bius*. *Raja-raja Bius* atau Dewan *Bius* bertugas untuk memimpin berbagai kegiatan *bius* untuk kesejahteraan warga *bius* secara bersama-sama. Tiap *bius* misalnya, melaksanakan upacara kurban untuk kesejahteraan warga *bius*. Upacara kurban dilaksanakan di suatu tempat yang disebut *parbiusan*. Tiap huta induk dari mana suatu marga induk berasal selalu memiliki *parbiusan* sebagai tempat melaksanakan upacara *bius*. Upacara kurban *bius* merupakan suatu upacara untuk memberi persembahan kepada *sombaon* (yang disembah), atau roh leluhur dalam rangka memohon kesejahteraan, keselamatan dan agar terhindar dari suatu malapetaka yang diramalkan oleh datu atau guru. Hewan yang disembelih biasanya seekor kerbau sehingga upacara ini disebut *mangan horbo bius*, makan kerbau *bius*. Upacara makan kurban *bius* merupakan upacara kurban untuk *sumangot ni ompu*²⁷, roh leluhur yang dipuja atau *sombaon*, dia yang disembah, yang dilaksanakan *molo mago partaonan*, jika rusak atau gagal musim tanam, *molo mararathu begu*, terlalu banyak gangguan setan, musim kering berkepanjangan, dan kecemasan akan pakeklik, wabah terutama cacar dan kolera serta motif dari *mamele taon* atau *mangase taon* (menyembah tahun, dilakukan

tiap tahun dan disebut *horja santi rea*. Tentang *horja santi rea* dapat dijelaskan sebagai berikut:

sahorja rea atau *santi rea* (suatu upacara kurban yang sangat besar) atau *sapanganon horbo sombaon* (komunitas atau kelompok yang menghidangkan seekor kerbau pada waktu arwah leluhur tertinggi dan termulia, yaitu sombaon akan disembah untuk menerima bakti persembahan. *Horja rea* dan *sapanganon horbo sombaon* mencakup seluruh *marga* induk atau kelompok suku yang titik pusat pertemuannya adalah raga-raga dari himpunan-himpunan kekerabatan itu. Satu komunitas dalam satu galur keturunan juga menjadi *sapanganan* (satu komunitas yang mengambil bagian dalam makan bersama ialah para anggota dari kelompok agnata yang berkumpul untuk suatu upacara). Kelompok agnata yang mencakup beberapa galur keturunan yang dilahirkan dari satu leluhur disebut "*sapanganan lembu*". Wilayah kecil dari raja Silahisabungan di Tolping, Samosir Utara, sudah sejak zaman purba, bersama-sama dengan kerabatnya yang seketurunan darah di wilayah , maka Silalahi di pantai barat laut Danau Toba, merupakan sapangan lembu dan anggota yang sekarang dari kelompok itu sudah 12-15 sundut terpisah dari leluhur bersama²⁸.

Pada waktu penyelenggaraan upacara kurban, misalnya untuk memohon kepada dewata terhindar dari musim kering, terhindar dari musim paceklik, terhindar dari wabah untuk tanaman maupun untuk manusia, upacara dipimpin oleh Parbaringin. Sebagai contoh, upacara mangase taon yang diselenggarakan setiap tahun dimaksudkan agar Debata Mulajadi Nabolon dan Debata Natolu serta Boraspati ni Tano dan Boru Saniang Naga memberikan hasil tanaman yang melimpah dipimpin oleh Parbaringin.

Selain menjadi pengatur upacara bius yang bersifat keagamaan, maka *raja bius* atau Dewan *Bius* juga bertugas untuk memimpin berbagai kegiatan duniawi untuk kesejahteraan *bius* dan menyelesaikan masalah- masalah duniawi. Beberapa tugas yang harus dilakukan oleh *raja bius* antara lain:

1. melakukan dan mengawasi pembagian tanah kepada masing-masing marga yang berada di dalam dan menjadi bagian dari bius.
2. mengadili anggota bius yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain seperti membunuh, membakar, meracun, memperkosa di bius lain atau anggota bius lain yang dilakukan hal yang sama di bius yang dipimpinnya.
3. mendamaikan perselisihan yang timbul dalam bius, khususnya perselisihan antar horja, atau antar huta yang tidak dapat diselesaikan horja.
4. menjalankan dan melestarikan patik dohot uhum (peraturan dan hukum). untuk kepentingan bersama.
5. mengatur pembagian air irigasi.
6. mengatur pengamanan bersama.

7. memaklumkan perang dan damai dengan.
8. membuat perjanjian dengan bius lain, misalnya, dalam pelaksanaan upacara kurban.
9. memilih pimpinan raja-raja *bius* atau dewan bisu dan parbaringin.

Raja Singa Mangaraja

Dinasti Singa Mangaraja dipimpin oleh seorang raja dengan gelar Raja Singa Mangaraja. Raja Singa Mangaraja yang pertama ialah Raja Mangkuntal anak dari Raja Bona Ni Onan anak dari Raja Sinambela anak dari Raja Oloan.

Memilih dan Mengangkat Raja Singamangaraja

Untuk menjadi raja dalam Dinasti Singa Mangaraja selain atas dasar keturunan juga harus dilegitimasi oleh para raja adat²⁹ serta memenuhi ciri-ciri kharismatik yang disebut *sahala harajaon*. Hanya seseorang yang memiliki atau yang dalam dirinya melekat atau terpancar *sahala harajaon* dan yang dilegitimasi oleh adat yang *legitimate* menjadi raja. Itu terjadi dalam pengangkatan Raja Singa Mangaraja XII. Raja Singa Mangaraja XII yang bernama Patuan Bosar gelar Raja Ompu Pulo Batu diangkat, *ditabalkan*, menjadi Raja Singa Mangaraja XII di Bakara pada tahun 1875. Semestinya yang menggantikan Raja Singa Mangaraja XI (Ompu Sohahuaon) menurut adat Batak Toba adalah putera tertua Singa Mangaraja XI bernama Ompu Parlopuk.³⁰ Tetapi karena ia tidak memenuhi ciri-ciri karismatik, *sahala harajaon*, tidak memiliki kemampuan adikodrati menurut kepercayaan Batak Toba pada masa itu dan tidak mampu memenuhi persyaratan khusus, maka ia tidak jadi ditabalkan. Persyaratan khusus yang dimaksud ialah mampu memberi tanda-tanda dari pusaka kesaktian kerajaan Singa Mangaraja.

Setelah diselenggarakan upacara gondang³¹, maka Raja Pallopuk sebagai anak tertua lebih dahulu untuk diuji menggunakan barang pusaka kerajaan. Dia memegang hujur sane-siringis sambil berdoa (Toba: martonggo) untuk meminta hujan, hujan tidak datang. Dia mencabut Piso Gaja Dompok dari sarungnya, tetapi tidak tercabut. Dipanggilnya hoda hundangan sihapus pili, kuda tidak datang. Ditabaskan piso pangabas, tetapi tidak berwibawa. Kemudian tibalah giliran Ompu Pulo Batu. mencabut keris pusaka yang disebut dari sarungnya, termasuk mendatangkan hujan, Sebaliknya, Patuan Bosar dapat memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus tersebut dan akhirnya dialah yang ditabalkan menjadi Raja Singa Mangaraja XII. Tentang bagaimana prosesi pengangkatan Raja SiSinga Mangaraja XII, Raja Napatar, cucu Raja SiSinga Mangaraja XII menjelaskan, bahwa untuk menjadi pengemban Raja SiSinga Mangaraja ada prosesinya. Saat Raja SiSinga Mangaraja XI wafat, Raja Parlopuk anak sulung

yang harus menjalankan tampuk pemerintahan. Namun semuanya harus batal karena kesepakatan Si Onom Ompu. Sebab sudah tiga kali dilaksanakan pesta margondang, namun Raja Parlopuk tidak bisa membuktikan syarat-syarat yang diminta. Seperti memanggil hujan. Sementara Patuan Bosar bisa memenuhinya. Waktu itu ia masih ke Aceh, dari sanalah ia bisa mengerti bahasa Arab. Dan bergaul dengan orang-orang Aceh. Ia pulang dari Aceh saat ayahnya sudah meninggal. Sebenarnya Ia tidak mau menjadi Raja, hanya karena masyarakat setempat memaksa ia harus mau menerimanya³².

Sidjabat juga mengatakan bahwa menurut adat Batak, putera tertua dari suatu keluarga yang diutamakan melanjutkan pekerjaan dan fungsi orangtuanya, khususnya di bidang adat dan pemerintahan. Karena itulah maka penduduk di Bakara dan sekitarnya ingin menabalkan Ompu Parlopuk menjadi Raja Singa Mangaraja XII. Tetapi karena untuk dapat menjadi Si Singa Mangaraja, seseorang harus mempunyai ciri-ciri kharismatis pula. Persyaratan itu harus dapat dipenuhi oleh orang yang akan ditabalkan menjadi penerus pimpinan kerajaan dan keimanan Si Singa Mangaraja. *Kepemimpinan kharismatis* harus ada pada setiap Si Singa Mangaraja, yang pada masa lampau diyakini selaku syarat mutlak daripada kepemimpinan dalam kerajaan, oleh penduduk yang masih dipengaruhi oleh suasana magis dan mistis. Calon Si Singa Mangaraja harus dapat mencabut piso gadja dompak dari sarungnya, menurunkan hujan dan membuat tanda-tanda luar biasa (mukjizat). Persyaratan ini nyatanya tidak dapat dipenuhi oleh Ompu Parlopuk tetapi dapat dipenuhi oleh adiknya, yaitu Patuan Bosar.

Demikianlah setelah melalui suatu proses yang berliku-liku, Patuan Bosar pun, yang sebenarnya masih muda belia (sekitar 17 tahun) ditabalkan pada tahun 1875 menjadi Si Singa Mangaraja XII³³. Jadi, walaupun budaya Batak mengakui *sahala sihahaan* atau *siabangan* (sifat khusus seorang anak tertua atau cabang marga tertua dari satu marga induk), anak tertua tidak serta merta mewarisi kepemimpinan atau kerajaan. Bisa juga *sahala harajaon* melekat pada anak lelaki bungsu atau anak lelaki tengah dan bahkan lebih kuat. Mereka dapat juga menuntut hak mereka untuk menjadi raja jika ada petunjuk bahwa mereka memiliki *sahala* untuk menjadi raja. Pada umumnya *sahala harajaon*, kualitas kekuasaan atau kualitas memerintah, yang diperlukan untuk memerintah dianggap merupakan sesuatu yang diwarisi atau sebagai karunia yang berasal dari Debata.

Kelahiran dari Raja Manguntal atau Tuan Singa Mangaraja I dianggap sebagai awal dari Dinasti Singa Mangaraja (1515 M) dan wafatnya Patuan Bosar Ompu Pulo Batu (Tuan Singa Mangaraja XII) pada tahun 1907 dianggap sebagai akhir dari Dinasti ini (Bagan 3.1). Oleh karena itu sebagai Maharajadiraja Batak Toba, Dinasti Singa Mangaraja telah berlangsung selama 392 tahun yaitu dari tahun 1515 sampai dengan 1907. Dinasti ini dapat berlangsung selama itu antara lain karena setiap raja dari Dinasti Singa Mangaraja memiliki *sahala harajaon*

(syarat untuk diakui sebagai Raja) dan sebagai wakil *Debata* (syarat untuk menjadi pimpinan kerohanian), sesuai dengan kepercayaan masyarakat Batak Toba tradisional. Lebih dari itu Raja-raja dalam Dinasti dapat melaksanakan

Tabel 3.1: Silsilah para raja di Kerajaan Dinasti Singa Mangaraja

Nama Raja	Gelar dan Dinasti	Ditabalkan sebagai Raja
1. Raja Manghuntal	Singa Mangaraja I	
2. Raja Mangatur	Singa Mangaraja II	
3. Raja Tinaruan	Singa Mangaraja III	
4. Raja Itubungna	Singa Mangaraja IV	
5. Raja Pallongos	Singa Mangaraja V	
6. Tuan Sori Mangaraja	Singa Mangaraja VI	
7. Ompu Sotaronggal (Raja Manubung Langit)	Singa Mangaraja VII	
8. Raja Pangulbuk	Singa Mangaraja VIII	
9. Ompu Sohalompoan	Singa Mangaraja IX	
10. Ompu Tuan Nabolon	Singa Mangaraja X	
11. Ompu Sohahuaon (Raja Pansom)	Singa Mangaraja XI	
12. Ompu Pulo Batu (Raja Patuan Bosar)	Singa Mangaraja XII	

Sumber: Batara Sangti. 1977: 2; W.B. Sidjabat. 1982: 455; Raja Patik Tampu Bolon. 2002:142.

fungsi dan perannya sebagai Raja, Guru/Datu, dan pemimpin masyarakat DNT sehingga tidak pernah terjadi pemberontakan dari masyarakat Bius, Horja maupun Huta.

Tugas dan Fungsi Raja Singamangaraja

Tugas dan fungsi setiap raja dalam Dinasti Singamangaraja dapat diketahui dari tindakan-tindakan yang dilakukannya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Raja Singamangaraja antara lain tersirat dan tersurat dengan jelas dalam tonggo-tonggo atau doa-doa para Parbaringin yang ditujukan kepada Raja Singamangaraja. Dalam tonggo-tonggo yang diucapkan oleh Parbaringin kepada Raja Singamangaraja tersurat dan tersirat dengan jelas tentang tugas pokok dan fungsi serta otoritas dan tanggungjawab Raja Singamangaraja. Beberapa diantaranya ialah³⁴:

1. Pangidoan gabe, pangidoan parhorasan (permohonan keturunan yang sehat, permohonan kesejahteraan).
2. Pangidoan ni anak na martua dohot boru na marharatan (permohonan untuk anak laki yang makmur dan anak perempuan yang kaya raya).
3. Pangahitan ni sangap, pangahitan ni badia,
4. Sirungrungi na dapot bubu, siharhari na dapot sambil (membebaskan ikan yang ditangkap bubu, memebaskan burung yang dapat sambil)
5. Sipalua na tarbeang, sitanggali na tartali (melepaskan yang dipasung, membuka ikatan yang terikat)
6. Sirimbasa na geduk, sininggala sibolatali (meratakan yang berliku-liku, tukang luku memiliki cambuk belah dua).
7. Sipatuat na bosur, sipanangkok na male (Yang menurunkan yang kenyang, yang mengangkat yang lapar).
8. Sihorus na gurgur, siambai na longa (mengurangi yang lebih, penambah yang tidak penuh).
9. Mangabas begu jau mangabas begu toba (mengusir pengganggu dari jauh atau luar kerajaan, mengusir pengganggu dari dalam kerajaan).
10. Patiurhon di jolo patiurhon di pudi (Membuat terang di depan, membuat terang di belakang).

Catatan

¹ Raja digunakan dalam berbagai versi: pertama, raja sebagai gelar yang lazimnya digunakan sebagai sapaan penghormatan kepada seorang pemimpin adat sekuler dalam tatakrama pergaulan sehari-hari, sebagai orang yang dituakan (sesepuh). Ini adalah raja dalam lingkup adat yang disebut raja adat. Kedua, raja dikaitkan dengan harajaon atau kerajaan. Ini adalah raja dalam lingkup politik dan administratif atau raja pemerintahan. Ketiga, raja bertugas sebagai pemimpin upacara keagamaan atau pimpinan agama yang disebut sebagai *priest king*.

² Pada era pemerintahan Kolonialisme Belanda tahun 1900an, sistem ini kemudian berubah. Pada masa ini di tiap-tiap *huta* mula-mula diangkat seorang kepala *huta* yang berasal dari *raja huta*, dan di tiap-tiap *horja* diangkat seorang *Jaihutan* yang dipilih dari antara raja-raja *huta* yang dianggap paling berpengaruh dan cakap menurut pandangan Belanda. Pengangkatan kepala Negeri atau Nagari dan kepala *huta* didasarkan pada sejarah dan pertalian *tarombo* (tambo, silsilah), sehingga timbul pergolakan mengenai *sipungka huta* (marga pendiri desa) yang berhak menjadi *raja huta* (kepala desa) dalam masyarakat DNT. Terjadi pergolakan dalam suatu kelompok kekerabatan satu marga. Pergolakan terjadi mengenai siapa yang berhak menjadi *raja huta* dan kepala *negeri*. Pergolakan mengenai masalah "*sipungka huta*" dalam masyarakat Batak Toba, misalnya, pernah terjadi pada tahun 1930-an ketika Pemerintah Hindia Belanda menukar "*verkizing*" untuk mengangkat kepala-kepala *negeri* dan kepala-kepala *huta* berdasarkan sejarah dan pertalian *tarombo*, dan lain sebagainya. Waktu itu kelompok satu kerabat dari keluarga *saama*, satu bapak, atau *saompu*, satu kakek bersama, bersaing mempertahankan kelanjutan "kedudukan" dan "derajat" masing-masing untuk merebut hak *sihahaan*, anak sulung, terutama antara pihak *sibolon partubu*, keluarga besar dan maju/kaya, dengan pihak *sietek partubu*, keluarga kecil dan kurang maju. Sebab dalam masyarakat Batak Toba, yang berhak menjadi *raja huta* atau kepala *huta* dan kepala *negeri* adalah dari kerabat "*sihahaan*" dan "*marga sipungka huta*" sesuai dengan pertalian kesilsilahan? Lihat Batara Sangti, 1977. *Sejarah Batak*, Karl Sianipar, Balige, h. 401-420.

- ³ Berdasarkan wawancara dengan Dr. Togar Nainggolan di Pangurusan pada tanggal 2012.
- ⁴ Pembahasan tentang hal ini lihat George Balandier. 1986. *Antropologi Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- ⁵ Dikutip dari J.C. Vergouwen. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Azet, h. 147-149.
- ⁶ Raja Patik Tampubolon. 2002. *Pustaka Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama, h. 313. Ketika Tuan Sihubil meninggal maka putranya Apalatua Tampukbolon menjadi penggantinya. Dia adalah anak tunggal. Pada Ketika itu mereka meneliti Tumbaga Holing tentang *torsa ni harajaon*. Tumbaga Holing yang mereka miliki adalah Tumbaga Holing warisan dari Tuan Sorimangaraja, kekek moyang mereka. Dalam Tumbaga Holing tersebut mereka temukan Patik dohot Uhum di pesta Harajaon.
- ⁷ Ibid.h. 313
- ⁸ Radja Patik Tampubolon, ibid, h.312.
- ⁹ Anak Agung Gde Putra Agung. 2001. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 122.
- ¹⁰ Dikutip dari J.C. Vergouwen. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Azet, h. 147-149.
- ¹¹ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.
- ¹² Dalam masyarakat Batak Toba ada yang disebut “*haha di partubu, anggi di harajaon*”, “*haha di harajaon, anggi di partubu*”. Ini menjadi sumber konflik untuk merebut kedudukan *raja huta*. Ada sebagian *huta* atau marga yang mengangkat raja dari kelompok “*haha di partubu*”, sedangkan untuk kelompok marga lain dari kelompok “*haha di harajaon*” atau “*haha di parhundul*”.
- ¹³ Batara Sangti., 1977. *Sejarah Batak*, Balige: Karl Sianipar, h. 197.
- ¹⁴ Lihat R. William Liddle, *Ethnicity and Political Organization: Three east Sumatran Cases*, dalam Claire Holt, et al, 1972, *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, Cornell University Press, p. 174.
- ¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.
- ¹⁶ Sitor Situmorang. 2004. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*. Jakarta: Komunitas Bambu, h. 214.
- ¹⁷ W.B. Sidjabat. 1982. *Ahu Si Singamangaraja*, Jakarta: Sinar Harapan, h. 68.
- ¹⁸ Ibid, h. 75.
- ¹⁹ Rincian berbagai urusan *huta* lebih lanjut lihat J.C. Vergouwen. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (terjemahan), Jakarta: Pustaka Azet, h. 123-124.
- ²⁰ Sitor Situmorang. Ibid. h. 213.
- ²¹ Bisuk Siahaan. 2005. *Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. Jakarta: Kempala Foundation, h. 227.
- ²² J.C. Vergouwen, *ibid*, h. 129-130.
- ²³ Ibid, h. 130.
- ²⁴ *Babi ambat* harus betina yang masih muda (toba: *boru-boru bajar*) atau perawan alias belum pernah kawin.
- ²⁵ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.
- ²⁶ Dalam pemerintahan kolonialisme Belanda disebut *Jaihtutan*
- ²⁷ *Sumangot ni ompu* yang diangkat ke peringkat yang tertinggi di dalam dunia roh, mendekati kedudukan *Debata*, dia menjadi sombaon. Dahulu kala, peningkatan seperti ini dilangsungkan oleh seluruh keturunan dan affina dengan upacara kurban besar yang khusus diselenggarakan untuk tujuan itu. Upacara ini dinamakan *santi rea*. Seterusnya sombaon akan tinggal di suatu tempat yang disucikan dan dinggap menjadi tempat keramat, seperti di puncak gunung, di *huta*

belantara, di sungai besar atau di danau. Dalam kepercayaan Batak Toba Tua, baik *sombaon* maupun *sumangot ni ompu* perlu dihormati dan disembah melalui upacara kurban atau dengan *tibal-tibal*, sesajen, dalam suatu pesta *bius* agar roh leluhur terus bergiat dalam memajukan kesejahteraan keturunan leluhur itu. Dengan demikian panen akan berlimpah, kekayaan bertambah, ternak berkembang biak, lahir banyak anak, dan akan terhindar dari bencana. Sebaliknya jika roh itu dilalaikan, anak-anak akan mati, panen gagal, ternak jatuh sakit dan berbagai malapetaka lainnya datang menimpa. Jadi motif mengadakan upacara kurban adalah musim kering yang berkepanjangan, kecemasan akan musim paceklik, wabah, terutama cacar dan kolera, serta motif dari persembahan-persembahan atau *mangase taon* yang dilakukan setiap tahun. Juga motif memohon kepada leluhur agar dilimpahkan tabung penyimpanan anak panah yang penuh dengan anak-anak. Itu semua datang dari *sumangot na tarrimas* (roh leluhur yang murka) dan *sombaon* akan tampak melalui penglihatan gaib datu. Kemudian datu menentukan macam kurban yang mesti dilakukan. Kadang-kadang roh mengungkapkan kehendak dan keinginannya melalui perantara *sibaso* yang kerasukan oleh roh pada suatu peristiwa khusus. J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 88-89.

- ²⁸ Komunitas silsilah yang lebih besar merupakan *sahorja horbo* ialah cabang *marga* kecil atau besar atau bahkan *marga* itu sendiri yang berkumpul bersama dengan menyembelih kerbau. Lebih luas lagi komunitas silsilah adalah Lihat J.C. Vergouwen, *ibid*, h. 84.
- ²⁹ Di Jawa dan juga di Bali, status dan kekuasaan raja diperoleh semata-mata berdasarkan prinsip keturunan. Lihat Anak Agung Gde Putra Agung. 2001. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 122.
- ³⁰ Tentang Singa Mangaraja XI atau Ompu Parlopuk dan perjuangannya, lihat tulisan Raja Gomal Sinambela (Cicit R.S.M. XI). Tanpa tahun.
- ³¹ Lihat Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 155-158
- ³² Diunduh dari http://batak.blogspot.com/2009/01/siSinga_Mangaraja-menurut-cucunya.html pada tanggal 20 April 2012.
- ³³ W.B. Sidjabat. 1982. *Ahu Si Singa Mangaraja*, Jakarta: Sinar Harapan, h. 151-152.
- ³⁴ Berdasarkan WB. Sidjabat, *ibid*, h. 442; Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 143-145.

Bab 7

Rancangan Struktur Organisasi Birokrasi Kerajaan Tradisional: Struktur Fungsional

Pendahuluan

Satu struktur fungsional adalah satu rancangan yang mengelompokkan atau mendepartmentalisasi tugas-tugas (fungsi-fungsi) dan orang-orang berbasiskan pada keterampilan, keahlian, atau sumberdaya yang sama yang mereka gunakan untuk meningkatkan keefektifan pencapaian tujuannya. Struktur fungsional dari birokrasi dalam masyarakat tradisional berhubungan dengan fungsi dan tugas pokok dari satu birokrasi kerajaan tradisional. Fungsi dan tugas pokok harajaon atau pemerintahan dijalankan oleh Raja.

Tetapi fungsi dan tugas tersebut tidak langsung dilakukan sendiri oleh raja. Sebagai administrator, ia dibantu oleh orang lain melalui siapa dia mencapai tujuan. Seorang raja dalam masyarakat Batak Toba tradisional dibantu oleh sejumlah aparatur atau pejabat birokrasi. Seperti diketahui, keberadaan aparatur atau pejabat merupakan dasar bagi konsep tentang birokrasi¹.

Aparatur yang menjalankan fungsi dan tugas pokok harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang diemban. Mereka juga berasal dari orang-orang yang dianggap memiliki *sahala harajaon* yang diberikan oleh Debata kepadanya. Karena dianggap telah memiliki kompetensi, maka jabatan tersebut menawarkan kepada pejabatnya banyak kebebasan untuk membuat kebijakan di dalam pekerjaan mereka tentang apa yang harus dikerjakan, bilamana mengerjakannya dan bagaimana ia harus mengerjakannya.

Fungsi-fungsi dari Kerajaan dalam Masyarakat Tradisional

Fungsi pokok dari *harajaon* atau pemerintahan atau persekutuan masyarakat administratif yang otonom dalam masyarakat Batak Toba tradisional sebagai masyarakat agraris meliputi fungsi:

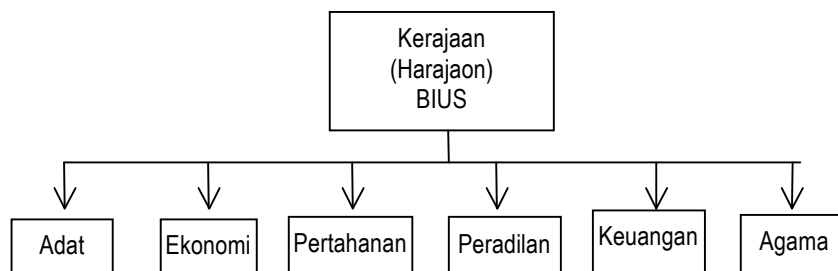
1. Adat.
2. Perekonomian.
3. Pertahanan dan keamanan.

4. Peradilan.
5. Keuangan.
6. Keagamaan.

Bidang adat, ekonomi, pertahanan dan keamanan, peradilan dan keuangan dikategorikan sebagai urusan duniawi. Bidang ini menjadi urusan dari pemimpin sekuler. Sementara bidang keagamaan atau religi dikategorikan sebagai urusan spiritual atau rohani. Bidang ini menjadi urusan dari pemimpin religi. Tetapi kedua bidang ini dapat melekat dalam diri seorang raja: ia menjadi pemimpin sekuler merangkap sebagai pemimpin rohani karena ia *sahala* untuk keduanya atau karena tidak ada pemimpin rohani.

Fungsi pokok dari *harajaon* atau pemerintahan dalam masyarakat tradisional Batak Toba seperti dikemukakan di atas tampak dalam satu struktur organisasi dalam bagan 7.1. Oleh karena itu struktur birokrasi kerajaan tradisional

Bagan 7.1. Struktur fungsional dari birokrasi Bius



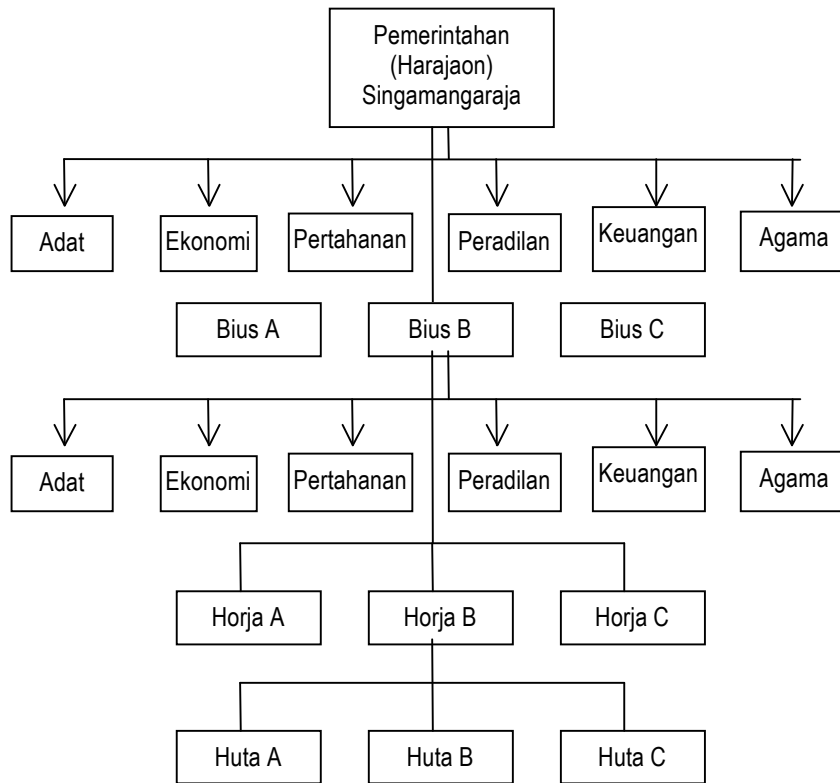
masyarakat Batak Toba, baik harajaon bius maupun Kerajaan Dinasti Singamangaraja adalah struktur territorial-fungsional. Adapun struktur territorial-fungsional birokrasi Kerajaan Dinasti Singamangaraja tampak dalam bagan 7.2

Aparatur Birokrasi Kerajaan Tradisional

Melaksanakan fungsi sosial adat, fungsi ekonomi, fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi peradilan, fungsi keuangan dan fungsi religi atau agama merupakan otoritas dan tanggungjawab serta kewajiban dari seorang raja. Di tingkat Huta menjadi otoritas dan tanggungjawab Raja Huta, di tingkat Horja menjadi otoritas dan tanggungjawab Raja Horja, di tingkat Bius menjadi otoritas dan tanggungjawab Raja Bius, dan di tingkat dinasti menjadi otoritas dan tanggungjawab Raja Si Singa Mangaraja.

Idealnya, dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, maka raja huta, raja horja dan raja bius dibantu oleh seperangkat aparatur. Tetapi adakalanya huta, horja bahkan bius belum tentu memiliki seluruh aparatur yang dibutuhkan. Karena itu tidak jarang seorang raja menjalankan seluruh fungsi dan tugas pokok dari satu

Bagan 7.2. Struktur fungsional-teritorial birokrasi Kerajaan Singamangaraja



harajaon. Berdasarkan kelengkapan perangkat atau aparat organisasi bius, Sitor Situmorang² menggolongkan bius kedalam tiga jenis yaitu Bius kecil/terbelakang, Bius sedang berkembang, dan Bius tua/lengkap.

Bius kecil/terbelakang tidak memiliki aparat lengkap dan bahkan kepemimpinan kadang kala hanya dijalankan seorang. Areal persawahan di Bius inipun sempit sehingga tidak memerlukan ritual-ritual pertanian seperti di Bius tua. Bius ini juga berbatasan dengan dunia luar Toba sehingga ikatan budaya kerohanian sudah tipis. Bius kecil/terbelakang dijumpai dipinggiran wilayah Toba.

Bius sedang berkembang memiliki kepemimpinan bius bersifat kolegal, tetapi parbaringin tidak selalu ditemukan. Kalaupun ada parbaringin tidak selengkap di bius tua. Di Bius ini, fungsi pekerjaan parbaringin dalam ritual-ritual dirangkap oleh pemimpin sekuler bius dan tidak bersifat tetap sebagai pendeta. Umumnya, sesudah menjalankan ritual maka tokoh sekuler itu kembali ke status semula. Ini terjadi karena masyarakat setempat tidak lagi melakukan banyak upacara bius seperti di daerah bius tua yang memiliki banyak lahan pertanian. Bius sedang berkembang merupakan bius yang dibentuk dari perkembangan migrasi dari daerah asal ke sekitar danau ke dataran tinggi selatan danau dan barat seperti Humbang, Silindung, Pahae.

Bius tua/lengkap memiliki dewan pemimpin (kolegial) bius yang membawahi beberapa horja sebagai bagian bius yang berwenang mengelola golat (hak ulayat), sementara horja membawahi puluhan *huta*. Struktur pemerintahan inilah bentuk ideal yang selalu diusahakan diwujudkan menurut model Sianjur Mula-mula. Kondisi disekitar tepi danau memungkinkan untuk itu. Seperti halnya model Sianjur Mula-mula bius tua mempunyai organisasi parbaringin yang sifatnya turun-temurun dan tetap. Parbaringin bertugas mengatur jadwal bercocok tanam, mengatur kegiatan pemeliharaan irigasi (bondar), pemekaran wilayah persawahan baru dll. Bius tua/lengkap dapat ditemukan di pantai barat, pantai selatan danau Toba dan di Samosir yang dipandang sebagai asal kebudayaan Toba.

Ketika Dinasti Sorimangaraja berdiri di Harajaon Bius Balige, sudah jelas pembagian kerja dan sudah jelas siapa yang bertanggungjawab. Berdasarkan pembagian pekerjaan maka kerajaan Dinasti Sorimangaraja dilaksanakan oleh 12 raja yang dibagi menjadi³:

1. Raja Naopat
2. Raja Naualu
3. Raja Nasampulu dua
4. Raja Parbaringin

Raja na opat atau raja yang empat menjadi junjungan marga dan masyarakat Batak dalam upacara partondion atau roh atau kedewataan atau berhubungan dengan Dewata. Raja Naopat terdiri dari:

1. Pande Bolon
2. Pande Raja
3. Pande Mulia
4. Pande Namora

Raja na ualu atau raja yang delapan mengatur seluruh kegiatan kemanusiaan, atau upacara pardagingon di tingkat Horja dan daerah. Raja Naualu terdiri dari:

5. Raja Saniang Naga , ialah orang kedua atau wakil dari Raja Pande Bolon.
6. Raja Parsinabul (Hinalang), ialah orang kedua atau wakil dari Pande Raja
7. Raja Parsirambe (Patuatgaja), ialah orang kedua atau wakil dari Pande Mulia.
8. Raja Mamburbulang (Raja Parjuguk), ialah orang kedua atau wakil dari Pande Namora.

Raja Nasampuludua atau raja yang duabelas mengatur di kegiatan gora atau perlawanan dan porang atau perang. Raja Nasampuludua terdiri dari:

9. Raja Laut (Undor Solu)
10. Ulu Raja (Ulu Porang).
11. Ulu Aek (Ulaon Ekonomi).
12. Ulu Dalu (Sitiop Puro).

Akhirnya, Raja Parbaringin, Datu dan Sibaso, mereka adalah petugas dari Raja Nasampulu dua, baik dalam kegiatan rohani maupun kegiatan duniawi:

- a. Mereka adalah malim parhalado dalam kegiatan atau upacara partondion
- b. Mereka adalah mengajari atau menasehati kegiatan atau upacara dunawi atau pardagingon.
- c. Mereka adalah sijuju ari atau menentukan hari keberangkatan untuk pergi berperang, memberikan pertahanan, penjaga badan atau parsimboraon, kekebalan atau parhobolon, pangomilon.

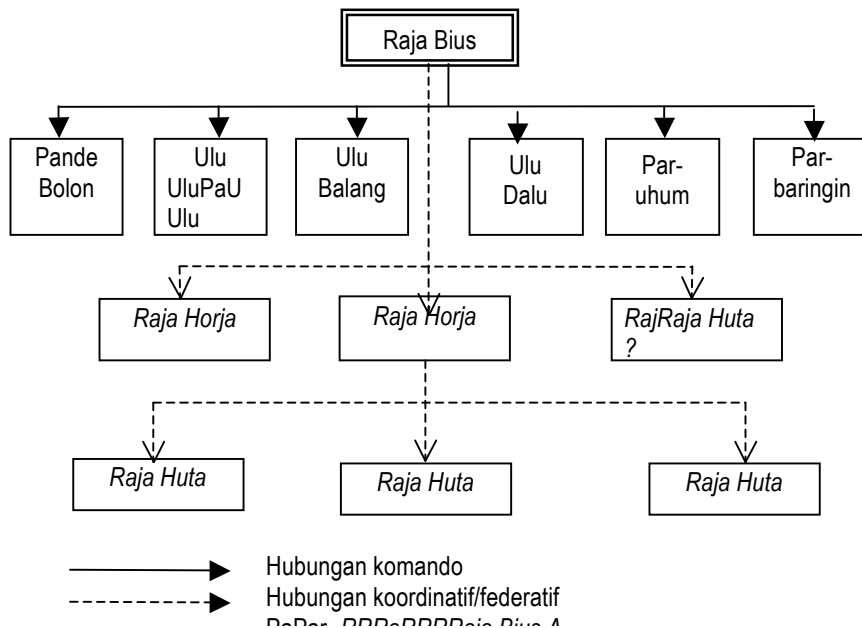
Demikianlah pembagian dan tataurutan dari Kerajaan di Bius Patane Bane Onan Balige. Mereka didoakan dan diberkati jabatan tersebut bagi setiap yang menjunjung kerajaan tersebut, mereka diperciki dengan air dan beri kekuatan dengan meletakkan beras di kepala masing-masing.

Pada masa Dinasti Singamangaraja, struktur ini kemudian berubah. Aparat birokrasi dalam Harajaon Bius dalam masyarakat Batak Toba dan juga Harajaon Dinasti Singamangaraja yang mengurus masing fungsi-fungsi harajaon atau kerajaan adalah sebagai berikut:

1. Pande Bolon melaksanakan fungsi di bidang sosial dan adat.
2. Ulu Taon melaksanakan fungsi di bidang ekonomi (pertanian dan perdagangan).
3. Ulu Balang melaksanakan fungsi di bidang pertahanan, keamanan dan ketertiban.
4. Paruhum melaksanakan fungsi di bidang peradilan, penegakan peraturan dan hukum dan penyelesaian perkara dan perselisihan.
5. Pangulu Dalu (Sitiop Puro) melaksanakan fungsi keuangan.
6. Parbaringin melaksanakan fungsi bidang keagamaan atau spiritual.

Masing-masing dari perangkat birokrasi secara otonom memiliki fungsi dan tugas pokok sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi pekerjaan di bawah koordinasi raja sebagai administrator tertinggi dalam satu harajaon (Bagan 7.3 dan Bagan 7.4). Dalam Dinasti Singamangaraja, jika ada urusan-urusan keamanan dan

Bagan 7.3. Struktur fungsional-teritorial Birokrasi Kerajaan Bius

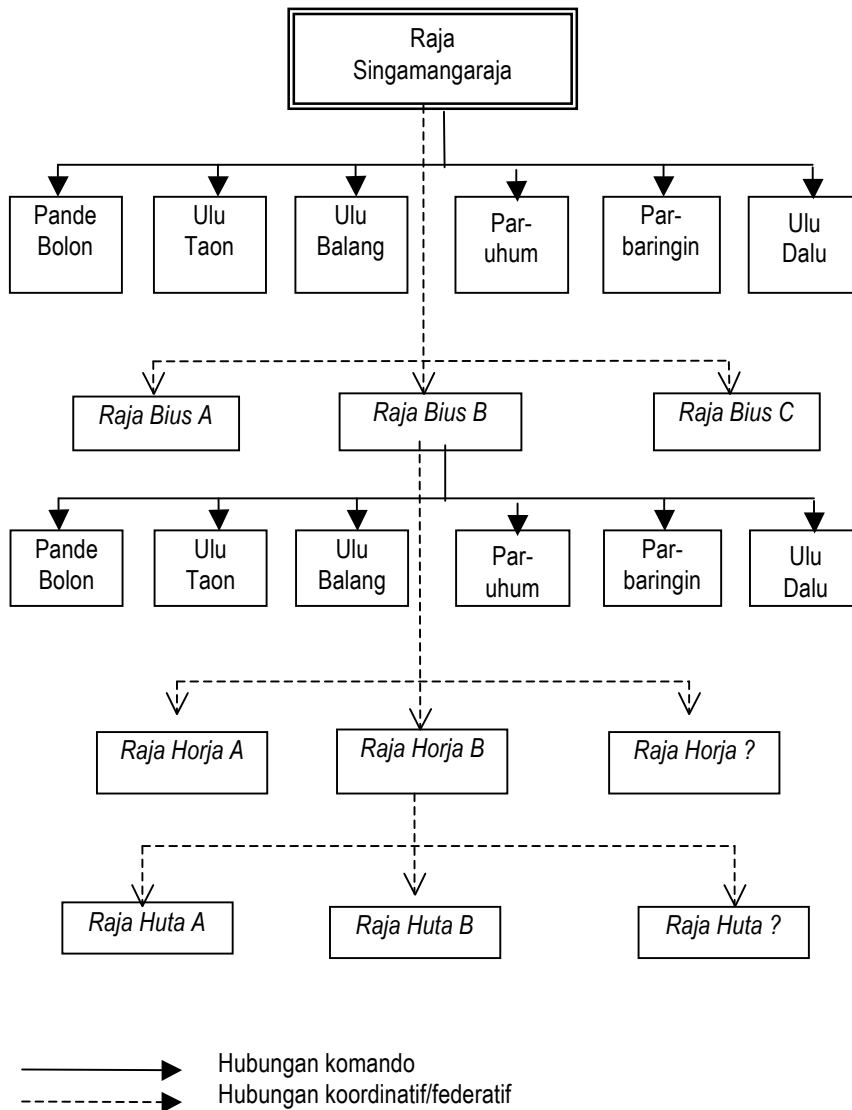


pertahanan yang berhubungan dengan kerajaan lain, maka Raja Singamangaraja biasanya mengutus *Ulu Balang*. Jika urusan-urusan berhubungan dengan agama maka yang diutus adalah Raja *Parbaringin*. Jika menyangkut urusan ekonomi yang diutus adalah *Ulu Taon*. Jika menyangkut urusan sosial dan adat-istiadat maka yang diutus adalah *Pande Bolon*. Ketika melaksanakan urusan tersebut selalu didampingi oleh oleh *Ulu Balang*⁴ sebagai pangajari, panuturi atau penasehat. Kadang-kadang beberapa dari jabatan tersebut juga ditemukan di tingkat horja dan huta. Tetapi untuk daerah tertentu tidak jarang dirangkap oleh Raja Huta. Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas harajaon maka koordinasi kegiatan keagamaan lintas *Bius* ada di bawah Raja Singamangaraja, koordinasi lintas *Horja* oleh Raja *Bius* dan koordinasi lintas *Huta* oleh Raja *Horja*.

Pande Bolon

Fungsi dan tugas pokok *Pande Bolon* adalah mengurus berbagai kehidupan sosial dan adat. Urusan sosial dan adat meliputi persoalan-persoalan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, warisan. Untuk itu pengetahuan yang mendalam tentang adat dan upacara-upacara *Horja* menjadi kompetensi untuk menjadi *Pande Bolon*. Oleh karena itu seorang *Pande Bolon* (kadang-kadang disebut raja patik) harus menguasai regulasi atau Patik dohot Uhum terkait dengan kehidupan adat dari masyarakat dan menjadi “ensiklopedi berjalan” di tengah-tengah komunitas dalam level *bius*. Dia menjadi pengarah moral dalam kehidupan sosial dan adat dalam masyarakat *bius*. Jika Raja Singamangaraja pergi ke daerah lain, *Pande Bolon*lah yang mewakilinya atau melaksanakan tugas-tugasnya do

Bagan 7.4: Struktur fungsional-teritorial Birokrasi Kerajaan Si Singamangaraja



Bakara. Ia menjadi pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas di *Bius* Bakara, termasuk mewakili dalam *martonggo* (berdoa) kepada *Debata*. Tetapi *Pande Bolon* tidak *martonggo* di *Bale Sogit*. Kadang-kadang *Pande Bolon* juga memimpin upacara-upacara *Bius* seperti mangase taon dan manglek sombaon. Dalam upacara-upacara ini *Pande Bolon* didampingi oleh Kelompok *Parbaringin* untuk memimpin pelaksanaan upacara.

Untuk *Bius* Bakara, *Pande Bolon* dipilih secara bertingkat. Pemilihan pertama dilakukan oleh masing-masing marga *Sionom Ompu* untuk memilih calon mewakili marga atau *Huta*. Karena di *Bius* Bakara atau *Bius Sionom Ompu* ada 6 marga berarti ada 6 bakal calon *Pande Bolon*. Meskipun demikian tidak harus tiap marga atau *Huta* mengusulkan calon sehingga calon boleh enam, boleh tiga jika

dari yang lain tidak memenuhi kompetensi. Selanjutnya bakal calon *Pande Bolon* yang diusulkan masing-masing *Huta* dipilih ditingkat *Bius*. Pemilihan dilakukan dalam satu rapat besar. Tiap orang dapat memberi komentar tentang calon dan berhak memberi usul.

Raja Bius Sionom Ompu akhirnya memilih yang terbaik dari enam calon yang memenuhi syarat: *malo martonggo-tonggo* atau pintar berdoa (religius), bermasyarakat (sosial), menguasai banyak hal seperti hukum dan adat, menurut penilaian dan kesepakatan *Sionom Ompu*. Karena itu calon yang diusulkan oleh *Huta* atau penduduk bisa gagal. Bahkan dapat dipilih langsung oleh *Sionom Ompu* jika calon dianggap tidak layak. Jika telah dipilih satu dari enam calon, maka hasil kesepakatan tersebut disahkan oleh Raja Singamangaraja. *Pande Bolon* bisa lebih dari satu orang tetapi di antara mereka tetap menunjuk satu orang sebagai *team leader* atau *coordinator team*. *Pande Bolon* terakhir di Bakara ialah marga Sinambela dan Sihite.

Ulu Balang

Ulu Balang disebut juga *Pangulu Raja* atau *Ulu Balang Porang*. Sering istilah *Ulu Balang* diartikan sama dengan *Pangulu Balang*, suatu pengertian yang menyimpang dari makna yang sebenarnya. *Ulu Balang* tidak sama dengan *Pangulubalang*⁵ *Pangulubalang* adalah roh atau begu dari seorang anak kecil atau tawanan yang sengaja dibunuh untuk dijadikan sebagai roh yang dapat disuruh untuk membunuh atau memusnahkan musuh atau sebagai penjaga. Jika anak yang diculik dan dijadikan sebagai *Pangulu Balang* adalah anak laki-laki diberi nama *Pangulu Balang Sanggapati na Bolon* atau *Siumpat Batar-batar*. Tetapi jika yang diculik dan dibunuh adalah anak perempuan untuk dijadikan sebagai *Pangulu Balang* maka diberi nama *Pangulu Balang Nai Boru Illa* atau *Nai boru Saragi*. *Pangulu Balang* menjadi parhalado dari *datu* (dukun).

Ada dua jenis *Pangulubalang* yaitu *Pangulubalang Surusuruon* (diperintah untuk melakukan sesuatu seperti membunuh atau mematikan) dan *Pangulubalang Suansuanon* (penjaga rumah, kampung dan ladang). *Pangulubalang Surusuruon* merupakan roh yang digunakan sebagai alat untuk memusnahkan musuh dan roh-roh jahat. *Pangulubalang* juga digunakan oleh *datu* dalam perang untuk melawan musuh dan dikirim ke kampung atau daerah musuh. *Pangulubalang suansuanon* digunakan sebagai penolak bala untuk menjaga kampung, rumah dan ladang. *Pangulubalang* ini dibuat dalam bentuk patung dari batu, tanah atau kayu yang telah dijiwai atau dimasuki oleh roh tersebut. Patung *pangulubalang* tersebut yang terbuat dari patung tersebut diletakkan di kampung sendiri, di ladang atau di rumah.

Fungsi dan tugas pokok *Ulu Balang* adalah mengurus masalah pertahanan, keamanan dan ketertiban *bius* (juga desa atau horja jika memiliki

ulubalang. Ulu Balang memberi keamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Ulu Balang menjadi pagar dari harajaon, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam harajaon.

Ulu Balang di *Bius* Bakara dipilih langsung oleh Singamangaraja dari *Bius* Bakkara⁶. Sedangkan *Ulu Balang* untuk Dinasti dipilih oleh Singamangaraja dari seluruh penjurur *Bius* di *Harajaon* Toba bahkan juga dapat berasal dari etnik lain di luar *Harajaon* Toba, seperti dari Aceh. *Ulu Balang* yang dipilih dari *Bius* tertentu biasanya ditempatkan di *Bius* dari mana ia terpilih dan ia mewakili Sisingamangaraja untuk urusan pertahanan dan keamanan di *Bius* tersebut. *Ulu Balang* Kerajaan ditempatkan di *Bius* Bakara di Lumban/*Huta* Raja di mana istana Raja Singamangaraja berada. Jadi di tiap-tiap *Bius* di *Harajaon* Batak Toba, seperti di Uluan juga ditempatkan *Ulu Balang* yang menjadi perantara Raja Singamangaraja. Ia menjadi orang yang menyambut Raja Singamangaraja jika berkunjung ketempat tersebut, atau menerima dan menyampaikan pesan dari Raja Singamangaraja untuk *Bius* tersebut. Jika ada hal penting yang ingin disampaikan, ia juga dapat datang ke istana di Bakara untuk menemui Raja Singamangaraja.

Ulu Balang dipimpin oleh seorang Panglima. Di sekitar istana raja, juga terdapat Ulu Balang yang disebut *Sijaga Raja* dan *Sijaga Harbangan*. *Sijaga Raja* (pengawal raja) adalah orang yang menjaga keselamatan raja dan yang mendampingi kemanapun Raja Singamangaraja pergi. Sedangkan *Sijaga Harbangan* (pengawal istana) merupakan orang yang menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal raja. Ia bertugas untuk selalu memonitor dan melaporkan siapa yang datang ke *Huta* dan ke istana Raja. Setiap tamu yang datang ke istana terlebih dahulu harus melapor kepada *Sijaga Harbangan* dan kemudian *Sijaga Harbangan* menyampaikan kepada *Sijaga Raja*.

Dalam dinasti Kerajaan Singamangaraja, menentukan sikap politik kerajaan oleh Raja Singamangaraja dipercayakan kepada *Ulu Balang*, para Raja *Bius*, dan *Pande Bolon*. Bahkan *Ulu Balang* juga berperan sebagai duta atau utusan dalam menyelesaikan masalah politik dengan kerajaan-kerajaan lainnya maupun masalah politik yang ada di dalam wilayah pemerintahan Dinasti Singamangaraja, misalnya, jika terjadi perselisihan antara Raja *Bius* dengan Raja *Bius*.⁷

Ulu Taon

Ulu Taon disebut juga *Pande Aek* (Pangulaon Ekonomi) Memilih *Ulu Taon* di Bakara dilakukan secara bertingkat. Pertama-tama masing-masing *Huta* memilih calon *Ulu Taon* untuk mewakili *Huta*. Di *Bius* Bakara, misalnya, karena ada 6 *Huta* berarti ada 6 bakal calon *Ulu Taon*. Keenam bakal calon *Ulu Taon* tersebut diusulkan ke tingkat *Bius* untuk dipilih oleh *Sionom Ompu*. Dari enam calon tersebut dipilih satu orang yang terbaik menurut penilaian dan kesepakatan

Sionom Ompu. Persyaratan yang harus dipenuhi ialah bermasyarakat, sopan, dan yang terpenting ialah ia memiliki pengetahuan adikodrati terutama untuk membaca tanda-tanda. Pemilihan dilakukan dalam suatu perdebatan secara demokratis. Jika *Sionom Ompu* telah memilih satu dari enam calon, maka hasil kesepakatan tersebut kemudian disahkan oleh Singamangaraja.

Fungsi dan tugas pokok *Ulu Taon* adalah mengatur pertanian sebagai soko guru ekonomi pedesaan pada saat itu. Dia yang menentukan musim tanam dan masa panen. Dalam musim tanam, *Ulu Taon* menentukan kapan pengolahan tanah dimulai, kapan pembibitan, *maname*, dilakukan termasuk jenis bibit yang digunakan, dan kapan musim tanam dimulai. “Dulu di banyak daerah, jika telah diberi tanda dimulainya pengolahan tanah pada penghujung musim kering, dan kalau sampai ada yang tidak mengacuhkannya, orang itu diwajibkan mempersembahkan makanan sebagai *panopotion*, pengakuan salah, kepada para pemimpin”.⁸

Untuk mengawali musim panen, misalnya, harus dimulai oleh *Ulu Taon*. Masyarakat tidak akan memanen padinya jika *Ulu Taon* juga belum memanen padinya. Jika ternyata padi *Ulu Taon* belum siap untuk dipanen, sementara padi masyarakat sudah siap untuk dipanen, maka masyarakat akan mengingatkan *Ulu Taon*. Dan meskipun padi *Ulu Taon* belum siap untuk dipanen, ia tetap harus memanen padinya (dipilih yang kira-kira bisa dipanen), dan batang padi yang dipanen disebar di jalan dan diinjak-injak. Setelah melihat bahwa *Ulu Taon* sudah “panen” barulah masyarakat mengikuti memanen padinya.

Paruhum

Paruhum, dalam birokrasi modern disebut Peradilan, merupakan satu elemen penting dalam birokrasi tradisional. Faktor penting dalam kehidupan peradilan dalam kerajaan tradisional Batak Toba – sebelum pemerintahan Belanda muncul – menurut Vergouwen adalah sebagai berikut:

Motif lestari-diri adalah sesuatu yang perkasa, dan keselamatannya anggota kelompok dijamin melalui kekuasaan kepala (masudnya: raja, penulis) dalam hal terjadi kejahatan. Dan jika ada anggota kelompok, atau hak miliknya, diserang oleh anggota masyarakat lain, kelompok sepakat bertindak atas namanya. Jika ada di antara anggotanya yang melakukan pelanggaran di luar kelompok, seluruh kelompok bertanggung jawab atasnya, dan si pelanggar harus diserahkan kepada masyarakat yang dirugikan, atau dia dihukum dengan yang bekerjasama dengannya.⁹

Biasanya, yang bertanggungjawab atas penegakan hukum dan ketertiban dengan cara yang disebut tadi adalah persekutuan masyarakat dari jenis paling tinggi yang hidup di wilayah kelompok suku. Cara penyelenggaraan hukum

seperti tadi adalah semacam persetujuan bersama yang harus dipatuhi oleh kedua pihak dalam arti bahwa tidak ada kekuasaan independen lain di atasnya dalam hal menangani pelanggaran dan perkara pengaduan. Namun, segala sesuatu bisa gagal dalam hal yang melibatkan lebih dari satu kampung.¹⁰

Setelah terbentuknya persekutuan *Horja*, *Bius*, dan Dinasti Singamangaraja, maka perselisihan atau konflik antara *Huta* dan *Huta*, *Horja* dan *Horja*, *Bius* dan *Bius*, *Huta* dan *Horja* atau *Horja* dan *Bius* dapat diminimasi karena telah ada pusat kekuasaan pada tiap tingkatan teritorial birokrasi. Telah ada orang atau orang-orang yang memangku kekuasaan sentral dan *legitimate* untuk bertindak menyelesaikan perselisihan. Telah ada penyelenggaraan peradilan bersama yang menangani perselisihan atau pelanggaran kecil yang cakupannya melebihi suatu wilayah yang kecil; juga ada peradilan untuk naik banding oleh *Huta* ke tingkat *Horja* dan kemudian oleh *Horja* atau *Huta* ke tingkat *Bius* dan pada akhirnya oleh *Huta*, *Horja* atau *Bius* ke tingkat pusat atau Dinasti guna melawan keputusan yang diambil di tingkat bawah yang dirasakan tidak adil.¹¹

Sebelum ada konfederasi Dinasti Singamangaraja, tidak ada orang atau orang-orang yang memangku kekuasaan sentral. Tidak ada penyelenggaraan peradilan bersama yang menangani perselisihan atau pelanggaran kecil yang cakupannya melebihi suatu wilayah yang kecil (penulis: *Huta*); juga tidak ada pengadilan untuk naik banding guna melawan keputusan yang diambil di wilayah-wilayah kecil tersebut. Perselisihan yang timbul di antara persekutuan-persekutuan masyarakat diselesaikan dengan jalan damai atau angkat senjata. Dan jika urusan intern di dalam satu wilayah sudah kacau sama sekali, sering-sering campur tangan raja (kepala), dari pihak kelompok afina sebagai penengah lebih manjur ketimbang raja dari kelompok keturunan sedarah.¹²

Wahana Penyelesaian Perkara

Suka berperkara sudah menjadi penyakit orang Batak (*pathological litigiousness*)¹³. Proses penyelesaian perkara atau perselisihan pada hakekatnya dilakukan dalam dua bentuk yaitu peradilan khusus dan peradilan umum. Peradilan khusus merupakan peradilan penyelesaian perselisihan oleh pihak keluarga. Bentuk penyelesaian perselisihan atau perkara yang dilakukan melalui peradilan khusus dimaksudkan untuk menangani perselisihan dalam kerabat DNT. Adapun peradilan umum merupakan peradilan penyelesaian konflik atau perselisihan yang dilakukan baik oleh raja dan melalui sumpah.

Lembaga DNT

Umumnya perselisihan di antara anggota kerabat DNT tidak langsung dibawa ke hadapan raja. Jika ada perselisihan yang timbul dari pergaulan sosial

yang umum sampai mengakibatkan perselisihan di antara anggota kelompok, jika diperlukan, maka penyelamatan persatuan, semangat marga atau klan, dan rasa senasib-sepenanggungan yang menjadi tali pengikat antara sesama kerabat, sedikit banyak akan memegang peranan penting. Kejadian apapun yang datang menyebarkan perselisihan, selalu ada kekuatan yang bergerak untuk memulihkan kerukunan. Seperti yang dengan tepat dikatakan dalam sebuah *umpama*: ‘*tampulon aek do bada ni na marsaripe*’ (bagaikan menetak air perbantahan dari sesama keluarga). Apalagi hubungan kekerabatan tidak dapat dihapus yang dalam bahasa setempat disebut: ‘*ndang targotap pusuk, ndang tartostos parsabutuhaon*’ (tak terputuskan pucuk, tak tersentak putus tali kekerabatan

Jika terjadi peselisihan antara *hula-hula* dan *boru* atau antara *namardongan sabutuha*, misalnya, ini ditangani dalam suasana persaudaraan dan sering ada kesempatan untuk meminta campur tangan sanak affina tertentu sebagai “hakim” agar sudi mengimbuai kedua belah pihak yang bertikai supaya saling menenggang rasa. Singkatnya, mengenai pertikaian antara sesama agnata, yang menjadi juru damai biasanya adalah pihak affina. Merekalah pada umumnya penengah yang paling sesuai antara pihak-pihak yang memang sama jauh-dekatnya dengan dia. Dalam suatu peribahasa yang cukup dikenal diungkapkan:

Sinabi laitua binahen tu harang ni hoda,

molo gulut boruna, amana do martola,

molo gulut amana, boruna do martola.

Disabit rumput laitua dimasukkan ke kandang kuda,

jika cekcok borunya, pihak bapaknya yang mendamaikan,

jika cekcok bapaknya, pihak borunya yang mendamaikan.

Tentang penyelesaian konflik atau perselisihan antara kerabat DNT dan oleh kerabat DNT itu sendiri, Vergouwen menulis sebagai berikut:

Tepatnya para affina untuk bertindak sebagai penengah langsung berkaitan dengan sifat-sifat yang menandai hubungan affina. Rasa takut dan hormat yang selalu melekat pada *parboruon* dalam menghadapi *hula-hula* melarangnya untuk mengabaikan nasihatnya atau menentang kehendaknya, dan sebaliknya, ia tidak akan mudah mendahulukan yang satu dari yang lainnya jika mereka harus menimbang-nimbang kepentingan dari *hula-hulanya* yang lagi berbantah. Peribahasa: *ndang hea naeng mago hula-hula di roha ni ianakhonna = ianakhon* tidak pernah menghendaki *hula-hulanya* dirugikan, mengandung inti moral dan juga arti praktis. Di mata *hula-hula*, *ianakhon* adalah *parhata siat* = orang yang kata-katanya diterima, dan seandainya *hula-hula* bersikeras menolak usul yang benar dari *borunya*, maka *tondi* dari yang terakhir ini bisa saja bertindak merugikannya. Kepercayaan kepada kejujuran dan keadilan *boru* diperkuat oleh pengetahuan bahwa ia sudah tentu tidak memihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi jika dihadapkan kepada soal-soal yang berkaitan dengan *hula-hulanya*, *boru* hanya berkepentingan untuk memulihkan keselarasan.¹⁴

Raja

Jika perselisihan kerabat DNT tidak dapat diselesaikan oleh pihak kerabat DNT yang bertikai melalui peradilan khusus, maka penyelesaiannya disampaikan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak kepada raja atau raja-raja. Raja-raja kemudian bertindak sebagai hakim yang adil dalam menyelesaikan perselisihan dalam satu pengadilan raja yang disebut *parriaan ni raja*. Penegakan hukum (*law inforcement*) oleh raja dilakukan dengan tetap berpegang pada peran hukum budaya (*law of culture*), baik hukum adat (*adat law*) dan kekerabatan (*kinship law*) yang ada dan telah sangat dipahami oleh sebagian besar orang Batak. Adapun konsepsi ideologi kultural dalam penegakan hukum dan keadilan menganut nilai-nilai budaya yang dianut dalam penegakan hukum diungkapkan dalam umpasa (peribahasa) atau *umpama* (perumpamaan atau maksim) berikut:

1. *Raja ima sipungka solup, sitiop batuan na sora teleng; hatian pamonaron, mulani hata na sintong.* (Raja pembuka sukat, pemegang timbangan yang tak akan miring; Neraca pembenaran, awal dari kata yang benar).
2. *Na ra di humbar na ra di parlanggean, na ra di uhum na ra di parlehetan* (Yang mau di humbar mau di parlanggean, Yang mau menegakkan hukum yang mau menegakkan kebenaran).
3. *Tobu tolong na so marlaok bota, na so lupa di uhum na so lolos di tona;*
4. *Sungkun mula hata, topot mula uhum;*
5. *Hariara na bolon pangunsandean sihor-sihor, raja na bolon sibahen uhum na tigor* (Beringin yang besar tempat bersandar sihor-sihor, Raja yang besar pembuat hukum yang benar)
6. *Sitiop gasing na sora teleng, sitiop hatian na sora miling* (Pemegang gasing yang tidak akan condong, pemegang neraca yang tidak akan miring).
7. *Sihingkit sinalanggam, mamilit tu na dumenggan*

Raja sebagai hakim berusaha untuk memutuskan penyelesaian melalui kompromi, dan kedua pihak akan segera reda. Keputusan para raja-raja diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih karena mereka dipercaya memiliki *sahala*. Mereka takut akan *sahala* yang dimiliki oleh raja yang dapat mendatangkan bencana bagi yang tidak mematuhi. Sebab bagi masyarakat, raja adalah:

Tanduk so suharon, mata ni ari so dompakon,

Hatana so jadi laosan, tonana na so tupa juaon.

Tanduk tidak boleh dibalik, matahari tidak boleh dipandang langsung

Apa yang dikatakan tidak boleh dilupakan, pesannya tidak boleh ditolak

Bahkan jika ada satu pihak yang tidak menerima keputusan raja, atau

orang-orang yang berselisih masih berkelahi atau bertengkar maka ia atau mereka akan dikucilkan oleh komunitas warga.

Sekali perselisihan sudah dibawa ke depan kepala, orang-orang yang berselisih tidak boleh lagi berkelahi atau bertengkar. Jika mereka melakukannya juga, mereka bersalah mengganggu gencatan senjata yang diupayakan oleh kepala, *mangalaosi pongpang ni raja*; ... Jika kepala dengan resmi memanggil seseorang, adalah tidak sah untuk tidak mengindahkan panggilan, manjua jou-jou ni raja. Istilah yang lebih umum berbunyi so mangoloi hata ni raja (tidak mematuhi panggilan kepala). Prinsip ini sudah tentu berlaku pula dalam hal sidang pengadilan, *parriaan ni raja*, yang dapat mengeluarkan perintah yang dianggap perlu bagi penyelenggaraan peradilan yang baik, seperti memerintahkan menghadirkan saksi, pihak-pihak yang harus tampil secara pribadi, dan sebagainya; perintah itu wajib dipenuhi.¹⁵

Jika perselisihan baik antara individu tidak dapat diselesaikan di tingkat huta oleh raja-raja huta dibawa ke tingkat horja untuk diselesaikan oleh raja-raja horja, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan di tingkat horja dibawa ke tingkat bius untuk diselesaikan oleh raja-raja bius, dan jika perselisihan tidak dapat diselesaikan di tingkat bius dibawa ke Raja Singamangaraja. Jadi sidang pengadilan disebut *parriaan ni raja* melibatkan raja-raja yang ikut memutuskan perkara.

Perselisihan juga bisa terjadi antar warga lintas huta, antar huta lintas horja dan antar horja lintas bius. Jika terjadi perselisihan warga lintas huta maka raja huta kedua belah pihak ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan. Jika terjadi perselisihan lintas huta maka raja horja kedua belah pihak ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan. Jika terjadi perselisihan lintas horja maka raja bius kedua belah pihak ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan. Jika terjadi perselisihan antar bius maka Raja Singamangaraja bertindak sebagai hakim dalam peradilan. Sebab *Dinasti Singamangaraja* merupakan pemangku kekuasaan sentral dalam birokrasi teritorial dan institusional Batak Toba tradisional. Peradilan Dinasti Singamangaraja dilaksanakan ditempat yang disebut *Bale Adat Paruhuman* yang ada di dalam istana raja.

Di *Bius* Bakara yang disebut *Bius Si Onom Ompu*, misalnya, jika terjadi perselisihan antar warga, maka keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pertama-tama dilakukan di tingkat *Huta* oleh Raja *Huta* sebagai hakim pendamai didampingi oleh para *tunggane Huta*. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan di tingkat *Huta*, maka naik banding ke tingkat *Horja*. Jika di tingkat *Horja* tidak dapat diselesaikan naik lagi ke tingkat *Bius* yang disebut *Si Onom Ompu*. Jika ternyata di tingkat *Bius* tidak bisa diselesaikan, maka pihak yang tidak bisa didamaikan tersebut kemudian “*dipaduru*” atau dikeluarkan dari adat dan menjadi *out group* bagi masyarakat *Bius*. Ia menjadi: *na so jouon* (tidak akan diundang oleh warga dalam kegiatan apapun), *na so pangkulingan* (tidak ditegur), *na so siseon* (tidak dihiraukan). Misal, A berutang kepada si B 10 kaleng beras. Kemudian si A di hadapan *Tunggane Huta* telah menyatakan bahwa ia hanya

mampu membayar 5 kaleng beras. Jika *Tunggane Huta* menilai bahwa si A memang hanya mampu membayar 5 kaleng beras, tetapi si B bersikeras agar si A tetap harus membayar 10 kaleng beras, maka dalam kasus ini si B dikenakan hukuman “*dipaduru*”.¹⁶

Jadi urusan sidang peradilan merupakan otoritas langsung dari raja, baik di tingkat pusat atau dinasti, tingkat *bius*, *horja* dan *huta*, dan dilaksanakan bersama-sama dengan atau melibatkan unsur DNT. Dengan kata lain, walaupun raja adalah pusat kekuasaan termasuk dalam penyelenggaraan peradilan, tetapi dalam pelaksanaan peradilan selalu melibatkan komunitas DNT dan dilaksanakan di suatu tempat yang disebut *partungkona* atau ditempat lain disebut *bale*. Ini berarti bahwa peradilan yang berlangsung lebih menunjukkan suatu “peradilan komunal”. Pada masa lampau raja adalah pendukung hukum adat, penjunjung hukum, karena itu ia disebut *siramoti adat*, *siramoti ugari*. Berdasarkan kepercayaan magis-religius masyarakat Batak Toba tradisional, raja adalah kebenaran. Karena itu upaya mencari kebenaran, kejujuran, keadilan kepada raja merupakan perbuatan yang sudah biasa dalam kehidupan orang Toba. Artinya, dalam kehidupan Batak Toba sudah ada kesadaran untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum.

Meskipun raja memiliki kekuasaan total, tetapi dalam penegakan hukum (*law enforcement*), raja merupakan tokoh yang jujur dan adil. Konsepsi ideologi kultural dalam menegakkan hukum dan keadilan menyebut raja sebagai:

Sipungka solup, sitiop batuan na sora teleng,

Hatian pamonaron, mulani hata na sintong.

Pembuka sukat, pemegang timbangan yang tak akan miring,

Neraca pembenaran, awal dari kata yang benar.

Raja dipercaya menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap penyelesaian perkara atau perselisihan tampak dari *umpama* berikut:

1. *Sitiop gasing na sora teleng, sitiop hatian na sora miling* (Pemegang gasing yang tidak akan condong, pemegang neraca yang tidak akan miring).
2. *Sipatiur na rundut, sipatio na litok* (Meluruskan yang kusut, membersihkan yang kotor).
3. *Hariara na bolon pangunsandean sihor-sihor, raja na bolon sibahen uhum na tigor* (Beringin yang besar tempat bersandar sihor-sihor, Raja yang besar pembuat hukum yang benar)
4. *Na ra di humbar na ra di parlanggean, na ra di uhum na ra di parlehetan* (Yang mau di humbar mau di parlanggean, Yang mau menegakkan hukum yang mau menegakkan kebenaran).

Raja Singamangaraja sebagai personifikasi dari institusi peradilan dalam Dinasti Singamangaraja sangat berdimensi magis-religius. Ia adalah:

1. Singa mangalompoi, singa na so halompoan; hatorusan ni Debata, hatorusan ni sombaon.

2. Tanduk so suharon, mataniari so dompakon, hatana na so jadi laosan, tona na so tupa juaon.
3. Pangaitan ni sangap, pangahitan ni badia, sihorus na gurgur, siambai na longa.
4. Paradat sijujung ni ninggor, paruhum sitingkos ni ari, sipalua na tarbeang, sitanggali na tartali,
5. Parbale paruhuman, mula ni solup siopat bale, parmasan sisampulu dua, ampang si sampulu lima, pargantang harajuan, parhatian pamonaran.
6. Sirungrungi na dapot bubu, sitanggali na dapot sambil, sirimbasi di na geduk, paningala si bola tali.
7. Parmahan so tumiop batahi, pamuro so tumiop sihor.
8. Parhatian pamonaran, hatian na sora muba, hatian na sora teleng.
9. Paradat sijujung ni ninggor, paruhum sitingkos ni ari.

Sumpah

Sumpah merupakan salah satu cara untuk penyelesaian perkara atau perselisihan. Jika perselisihan tetap tidak dapat diselesaikan, baik perkara umum maupun perkara khusus (perselisihan antara unsur DNT), oleh kerabat affina maupun oleh raja, maka satu bentuk peradilan atau penyelesaian perselisihan yang biasa digunakan dalam masyarakat Batak Toba ialah *gana* atau *tolon* (sumpah). Sumpah merupakan salah satu cara legal dalam hukum adat masyarakat Batak Toba untuk menyelesaikan perselisihan. *Margana* atau *manolon* (bersumpah) bagi orang Batak berarti mengutuk diri sendiri atau keluarganya atau leluhurnya. Keputusan yang diemban oleh sumpah itu adalah keputusan dari kuasa yang lebih tinggi, yaitu para *Debata* dan roh leluhur (*sumangot ni ompu*). Sumpah menyatakan bahwa kutuk datang menimpa jika apa yang dinyatakan itu bohong.¹⁷

Bersumpah dilakukan dengan bantuan suatu benda yang akan bertindak sebagai *panolonan* atau *parganaan* (wahana sumpah) dan dipimpin oleh pengambil sumpah yang disebut *parmangmang* dari pihak lawan dalam perselisihan, atau raja. Wahana atau sarana sumpah itu tunduk kepada kekuatan tertentu, gagasan yang mendasarinya ialah bahwa yang bersumpah sama dengan sarana itu, akan mengalami sesuatu jika ia menyatakan yang tidak benar. Misalnya, jika beras yang menjadi sarana, ia akan disebarkan sekitar; jika tembakau yang digunakan, dia akan dikerat-kerat; jika sumpah diambil di atas pematang kecil, dia akan diinjak-injak sampai rata; dan jika dipakai benda dari logam, dia akan dicampakkan ke tanah. Pikiran yang sama juga yang berlaku jika yang digunakan sebuah patung dari kayu atau batu dengan muka dan badan yang rusak. Muka dan badan yang bersumpah, jika yang diucapkannya palsu, akan menjadi rusak seperti patung itu.¹⁸

Umumnya tiap marga atau marga induk dalam masyarakat Batak Toba memiliki wahana penyumpahan. Salah satu wahana atau sarana sumpah dalam kepercayaan Batak Toba-tua ialah sebuah batu yang disebut *batu somong* (batu penyumpahan).¹⁹ Di banyak daerah, *batu somong* terdapat di pekan pusat dalam kampung induk dari satu kelompok suku atau marga atau di kampung leluhur suatu galur besar. Vergouwen berpendapat:

Sebuah cara pengambilan sumpah yang khas ialah apa yang dilakukan pada *batu somong* (batu penyumpahan) yang dibanyak daerah terdapat di pekan pusat suatu kelompok suku atau marga atau di kampung leluhur suatu galur besar. Banyak sumpah penting dan janji dikukuhkan di batu ini. Ia merupakan sebuah batu besar yang diakui sebagai tempat bersemayam roh para leluhur yang dihimbau dengan cara memainkan gondang. Orang beranggapan bahwa batu itu dalam dirinya sendiri memiliki kuasa adikodrati yang besar.²⁰

Sebagai contoh, wahana penyumpahan bagi marga induk Silahisabungan disebut *batu gadap batu ojak* (batu tergeletak batu tegak) dan lebih sering hanya disebut sebagai *batu gadap*.²¹ Dahulu kala para utusan atau Raja *Bius* berkumpul dan bersidang di Silalahi Na Bolak di tempat Pengadilan Batu Sigadap Batu Sijongjong sebagai simbol kebenaran untuk membicarakan berbagai hal termasuk mengambil keputusan melalui musyawarah tentang berbagai masalah menyangkut urusan *Bius sitolu sada harajaon* atau *Bius Parsanggaran*. Itulah sebabnya tempat di mana *batu gadap* berada dinamakan juga *panungkunan* (tempat bertanya). Hingga sekarang belum ada peristiwa yang memanfaatkan *batu gadap* tersebut sebagai tempat pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan di antara warga Raja Silahisabungan.

Jika di antara keturunan marga induk Silahisabungan sedang berselisih dan masing-masing menyatakan bahwa dia yang benar, maka penyelesaian terakhir ialah datang ketempat tersebut untuk *manolon* (bersumpah) kepada *Debata* dan roh leluhur marga ialah Raja Silahisabungan agar kepadanya ditegakkan keadilan dan kebenaran. Ia datang sendiri atau bersama-sama dengan lawan selisihnya. *Batu gadap* sebagai peradilan marga atau mahkamah tertinggi sebagai tempat pengucapan sumpah untuk menyatakan kebenaran bagi masyarakat Silahisabungan dapat ditemukan di Silalahi Nabolak di *Huta* atau lumban Sidabariba. Batu gadap ini dipercaya memiliki roh dan kekuatan magis dan karenanya dianggap “keramat” oleh masyarakat Silahisabungan.

Makna dari *batu gadap* ialah orang yang benar akan tetap *ojak* (tegak berdiri) atau hidup atau kepadanya dan keturunannya diberikan kekayaan dan kemuliaan; sedangkan makna *batau ojak* ialah orang yang salah akan *gadap* (tergeletak) atau mati atau dari padanya atau keturunannya akan terlepas kekayaan dan kemuliaan. Jadi penghakiman yang terakhir untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara *Bius*, marga atau warga Silahisabungan yang

mempertahankan kebenaran masing-masing dalam suatu perselisihan dapat dilakukan di *Batu Gadap Batu Jongjong*. Pihak yang berselisih mengucapkan sumpah sebagai berikut²²:

“Songon batu gadap on ma ahu, dohot anakhonhu dohot borungku dohot pinomparhu, gadaphonon ni Ompunta Namartua Debata dohot sahala ni Ompunta Raja Silahisabungan, sirang ma hosangku sian daginghu, mabaor sibukhu sian holi-holinghu, molo so inda tutu sintong ahu. Jala songon batu ojak on ma ahu, dohot anakhu dohot borungku dohot pinomparhu, ojakhonon ni Ompunta Namartua Debata dohot sahala ni Ompunta Raja Silahisabungan, hot ma hosangku didaginghu, hot sibukhu diholi-holinghu, molo tutu sintong ahu”.

Seperti batu tergeletak inilah saya digeletakkan oleh kakek kita Allah yang bertuah dan roh kakek kita Raja Silahisabungan, dan anakku laki-laki dan anakku perempuan dan keturunanku, dan memisahkan nyawaku dari dagingku, melepaskan kulitku dari tulang-tulangku, kalau saya tidak benar. Dan seperti batu tegak inilah saya ditegakkan oleh kakek kita Tuhan yang bertuah dan roh kakek kita Raja Silahisabungan, dan anakku laki-laki dan anakku perempuan dan keturunanku, dan menyatukan nyawaku di dagingku, melekatkan kulitku di tulang-tulangku, kalau saya benar.

Orang yang mengatakan dia yang benar tetapi ternyata salah harus siap-siap menerima nasib sengsara saat itu atau dikemudian hari dialami oleh keturunannya. Seperti dikatakan dalam ungkapan berikut:

tinaba ni tangke martumbur

tinaba ni gana ndang martumbur

ditebang oleh kampak bertunas

ditebang oleh sumpah tidak bertunas.

Pangulu Dalu/Ulu Dalu

Tidak banyak informasi tentang *Pangulu Dalu* atau *Ulu Dalu*. Ia adalah *Sitiop Puro* yaitu orang yang bertanggungjawab dalam urusan keuangan dari bius atau Dinasti Singamangaraja. Dalam konsep modern ia dikategorikan sebagai bendahara.

Raja Parbaringin

Sangat sering Parbaringin²³ disetarakan dengan datu²⁴ atau sibaso. Anggapan ini adalah berbagai kegiatan Batak Toba tradisional, parbaringin sering dikelompokkan sama dengan Datu dan Sibaso yaitu keduanya sebagai *parhalado di ulaon partondion dohot pardagingon*, pelayan dalam upacara tidak terlalu benar. Meskipun demikian, dalam rohani dan duniawi. Datu adalah ahli yang menguasai pengobatan serta nujum, baik yang baik maupun yang buruk. Datu

adalah profesional karena kompetensinya ia mendapat upah. Bagi masyarakat Batak Toba datu diberi julukan *sigodang uti-utian*, *sitorop botobotoan*; *panjahajaha di bibir*, *parpustaha di tolonan* atau banyak perbuatan terkait dengan seni dan sihir, banyak pengetahuan; pembacabaca di bibir, pemilik pustaka di kerongkongan. Datu memiliki pengetahuan tentang banyak hal yang baik maupun yang buruk; pengetahuan masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Untuk menentukan hari yang baik dari suatu pesta, misalnya, dilakukan oleh datu. Untuk menentukan hari baik tersebut seorang datu dapat menggunakan dua cara: pertama, *maningkir parpeak ni Pane na Bolon* atau melihat tataletak Pane Na Bolon; dan kedua, *manjaha parhalaan* atau membaca parhalaan atau kalender Batak²⁵.

Sebaliknya, Parbaringin bukan ahli nجوم atau pengobatan atau tidak memiliki pengetahuan di bidang *magic* seperti datu. Profesi datu tidak ditunjuk atau dipilih oleh warga desa, sementara parbaringin merupakan hasil pilihan atau tunjukan warga. Seorang pendeta atau parbaringin dipilih oleh dewan bius dari marga-marga dalam horja dan sifatnya turun temurun. Dewan menunjuk seorang dari turunan parbaringin sebagai pewaris. Pemilihan dihadiri oleh kelompok parbaringin.

Kelompok *Parbaringin* (pendeta) dalam masyarakat Batak-Toba tradisional memiliki posisi yang penting bukan saja dalam kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang disebut *ulaon partondion* atau *hadebataon* atau sakral tetapi juga kegiatan kemasyarakatan adat istiadat dan pemerintahan yang disebut *ulaon pardagingon*, kegiatan duniawi atau sekuler. Seluruh bius di tanah Batak Toba memiliki Parbaringin kecuali untuk bius kecil dan terpencil. Di Bius ini, tugas-tugas parbaringin dirangkap oleh raja huta sebagai pemimpin sekuler. Di Uluan, misalnya, jabatan parbaringin dirangkap oleh tetua duniawi. Parbaringin adalah aparat fungsional dalam Bius dan juga Kerajaan Dinasti Singamangaraja. Raja Parbaringin bertugas menjaga tradisi kerohanian dan menjadi pimpinan dan panutan dalam menjalankan ritual yang bersifat religius²⁶. Tugas utama dari Parbaringin adalah sebagai rohaniwan yang memimpin penyelenggaraan upacara persembahan kurban kepada leluhur atau *sombaon* dan *debata*.

Satu contoh dari organisasi ini adalah wilayah kecil yang bernama Janjiraja, yang terletak ke arah selatan Sabulan. Delapan *marga* Lontung hidup bersama di sana. Setiap marga mempunyai seorang *raja na ualu* sebagai pemimpinnya; setiap pemimpin mempunyai empat pembantu, yaitu *raja na tolupuludua*, dan selain itu ada pula *raja parhara* yang jumlahnya lebih banyak lagi, dan yang tugasnya mengerahkan orang-orang untuk ikut serta. Sementara di wilayah Sihotang yang letaknya agak lebih ke Utara didiami oleh kelima *marga* tertua dari Sigodang Ulu. Yang tertua dan yang paling terkemuka di antara kelima

marga itu mempunyai seorang *Pande Bolon* sebagai *Parbaringin* kepala, dua lainnya masing-masing mempunyai seorang *Suhut Ni Huta* dan seorang *Pollung Na Bolon* sebagai pemimpin. Di bawah ketiga pemuka ini berada *raja na lima* yang terdiri dari lima orang pula, seorang untuk setiap marga yang bertindak sebagai pembantu mereka. Di bawah *raja na lima* berada *sijalo paningkiran* yang berfungsi untuk meneliti kerbau kurban. Di bawah para fungsionaris ini kita menjumpai *pangulu raja*, delapan atau sepuluh untuk setiap marga, yang bertugas menangani soal-soal yang bahkan lebih kecil lagi, dan ada *parhara*, pengundang, pemanggil: semuanya kira-kira seratus orang²⁷.

Pengangkatan dalam beberapa di antara jabatan itu adalah turun-temurun menurut alur agnata langsung, atau secara bergantian dari galur yang satu ke galur yang lain.²⁸ Tetapi jabatan atau kedudukan *Parbaringin*, yang hanya mempunyai arti dalam lingkup upacara religius atau *ulaon partondion manang hadebataan* dapat juga berganti-ganti antara dua galur atau lebih, diteruskan ke galur yang tertua, atau dialihkan secara bergiliran di antara dua galur atau lebih, atau menurut peraturan lain yang sudah ditetapkan yang berbeda menurut daerah.²⁹ Di *Bius* Bakara, misalnya, *Parbaringin* dipilih dari dan oleh masing-masing dari marga *Sionom Ompu*. Di daerah Sumba, banyak di antara *Parbaringin* yang ditunjuk oleh Singamangaraja, tetapi di daerah lain ditetapkan melalui pemilihan oleh para tetua atau penduduk. Di Uluan, jabatan *Parbaringin* bisa dipegang sekaligus oleh tetua sekuler, sebagaimana halnya di tempat lain: seorang kepala yang berpengaruh bisa menjadi datu yang berpengaruh pada waktu yang sama.³⁰

Begitu ia diangkat sebagai *parbaringin* maka ia lepas dari marganya dan bahkan terpisah dari *bius* yang mengangkatnya. *Parbaringin* mempunyai organisasi yang jelas. Mereka tidak mengurus masalah sehari-hari yang sudah menjadi kewenangan kepala-kepala sekuler *bius*, tetapi mereka bertugas memimpin upacara bercocok tanam, kegiatan pemeliharaan irigasi (*bondar*), pemekaran wilayah persawahan baru serta memimpin ritual-ritual pertanian *bius*. Mereka memelihara tradisi Sianjur Mula-mula, tonggo-tonggo Boru Deak Parujar kepada Mulajadi dan dewa-dewa lainnya. Kiblatnya adalah gunung keramat Pusuk Buhit. Pemimpin *parbaringin* disebut *Pande Bolon*. Ia adalah seorang yang betul-betul ahli atau ahli utama dalam bidang rohani. *Pande bolon* membuat pembagian kerja diantara pendeta-pendeta yang terkait dengan mengorganisasikan seluruh upacara/ritual pertanian dari mulai turun kesawah sampai masa panen, pemeliharaan sistem irigasi persawahan, menyertai dewan *bius* melakukan pembagian tanah, menjadi utusan *bius* sebagai pendamai ketika terjadi perselisihan antar *bius*, dan memberikan nasehat kepada dewan *bius*.

Jadi kewenangan *parbaringin* adalah mengurus soal-soal kerohanian atau hal-hal yang bersifat spiritual dihubungkan dengan kegiatan *pardagingon* atau sekuler atau duniawi. Itu karena masyarakat Batak Toba tradisional menganut

kepercayaan bahwa setiap upacara *pardagingon* atau duniawi (*hajolmaon*) harus didahului dengan upacara *partondion* atau rohani (*hadebataon*). Karena itu para Raja Parbaringin³¹,

1. Nasida ma malim parhalado di ulaon partondion (mereka imam pelayan dalam upacara pesta rohani)
2. Nasida ma pangajari – panuturi di ulaon pardagingon (mereka penasihat dalam upacara pesta duniawi).
3. Nasida ma sijujur ari parborhaton laho marporang, mangalehon partahanon, parsimboraon, parhobolon, pangombilon (mereka penentu hari keberangkatan untuk berperang, memberikan pertahanan, jimat untuk perlindungan dari roh jahat dan dibawa sebagai kalung pada leher, kekebalan, pelindung)

Fungsi dan tugas pokok *Parbaringin* berkaitan erat dengan fungsi dan kegiatan agama Batak Toba tradisional dan menjadi lembaga yang membantu Dinasti Singamangaraja. Kira-kira tahun 1890, muncul berbagai sekte³² agama tradisional baru (*neo-pagan*) dalam masyarakat Batak Toba di utara yang mengandung unsur-unsur sinkretisme seperti Parmalim, Parsiakbagi atau Parugamo, Parsitekka, Sidamdandam³³. Tapi Singamangaraja, seperti ditunjukkan oleh Ompu Pulo Batu lebih percaya kepada *Parbaringin*, yaitu para imam yang bertugas melakukan upacara korban, daripada kepada para pemimpin sekte pembaruan, sementara kaum *Parbaringin* hampir selalu berusaha menjauhkan diri dari Parmalim.³⁴ Sebelum sekte-sekte ini muncul, *Parbaringin* hampir sepenuhnya menguasai upacara kerohanian, termasuk upacara kurban pemujaan dalam pesta *Horja* atau *Bius*.

Dalam masyarakat Toba tradisional, *Parbaringin* (kelompok pendeta) memiliki posisi yang penting dalam masyarakat. Umumnya mereka merupakan keturunan langsung sipungka *huta* (membuka dan mendirikan kampung pemukiman). Kelompok *Parbaringin* bertugas menjaga adat tradisi dan menjadi panutan dalam menjalankan ritual yang bersifat religius. Oleh karena itu *Parbaringin* wajib berpenampilan santun dan anggun dan tidak melakukan tindakan tercela serta menjauhkan larangan-larangan. Upacara *bius* dipimpin oleh *parbaringin*.

A pesta *bius* is organised by an indigenous religious council (*parbaringin*) and led by the *pande bolon*, the leader of the *parbaringin*. It is attended by members of several different villages, the federation of which is known in Toba Batak as *bius*³⁵.

Di Samosir, misalnya, pada upacara *bius* pada waktu penyelenggaraan upacara kurban untuk memohon kepada dewata terhindar dari musim kering, terhindar dari musim paceklik, terhindar dari wabah untuk tanaman maupun untuk

manusia, dipimpin oleh Parbaringin. Sebagai contoh, upacara mangase taon yang diselenggarakan setiap tahun dimaksudkan agar Debata Mulajadi Nabolon dan Debata Natolu serta Boraspati ni Tano dan Boru Saniang Naga memberikan hasil tanaman yang melimpah dipimpin oleh Parbaringin. Keputusan untuk menyelenggarakan persembahan kurban seperti di Samosir, ditetapkan oleh Parbaringin, misalnya kapan mulai turun ke sawah, kapan menyamai, kapan menanam.

Organisasi Parbaringin hampir sepenuhnya menguasai tata cara upacara. Karena sifat dan banyak tindak ritual yang harus mereka lakukan selama seremoni pesta kurban, mereka pun dipandang sebagai orang yang menyandang kekuasaan religius magis yang besar. Tetapi adakalanya, keputusan untuk melaksanakan upacara *Bius*, seperti upacara kurban dengan motif musim kering yang berkepanjangan, kecemasan akan musim paceklik, wabah, serta motif dari persembahan pertanian, *mangase taon*, yang dilaksanakan setiap tahun terletak pada dan diambil oleh para tetua sekuler melalui suatu musyawarah, atau oleh *datu* sesudah mendapat wangsit, dan kadang-kadang diambil berdasarkan *tona*, perintah, dari Singamangaraja. Di berbagai daerah puak Sumba, kelompok *Parbaringin* yang melayani acara kurban di tingkat lokal sering mendapat izin yang diberikan oleh Raja Singamangaraja.

Sekali sudah diputuskan untuk menyelenggarakan upacara persembahan kurban, semua orang yang termasuk anggota *bius* wajib turut ambil bagian dan wajib memberikan sumbangan. Solidaritas anggota *bius* yang melakukan upacara persembahan sangat kuat. Orang yang tinggal di komunitas *bius*, tetapi tidak mau atau tidak bersedia turut ambil bagian sewaktu diselenggarakan acara persembahan kurban, akan dikeluarkan dari lingkungan, disebut *dipaduru* atau *dipabali*. Sebagai konsekuensinya tanah atau sawah milik horja yang mereka kerjakan, ditarik dan tidak boleh diusahakan³⁶.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam birokrasi tradisional dari masyarakat Batak Toba tradisional, termasuk birokrasi Dinasti Singamangaraja sudah ada pembagian kerja (*division of labor*) dengan otoritas yang jelas untuk urusan-urusan *harajaon*, seperti dalam birokrasi modern. Birokrasi tradisional telah melakukan pembagian kerja baik di tingkat "pusat" atau konfederasi maupun tingkat regional.³⁷

Untuk efisiensi kerja, tugas-tugas dibagi kedalam bagian-bagian yang lebih terpesialisasi. Pembagian kerja tersebut tentu dimaksudkan untuk membantu organisasi menggunakan aparat dan sumber-sumber lain agar tujuan tercapai secara efisien serta melaksanakan semua tugas-tugas agar tujuan tercapai secara efektif. Pembagian kerja yang jelas memungkinkan birokrasi untuk menggunakan para spesialis dalam setiap posisi tertentu dan membuat mereka bertanggungjawab

atas kinerja organisasi di mana mereka ditempatkan. Tetapi kespesialisasi dari orang-orang yang ditempatkan untuk setiap bidang pekerjaan tidak didasarkan atas pendidikan formal atau ditentukan atas pertimbangan rasionalitas. Setiap orang yang ditempatkan dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, selain ada hubungan kekerabatan dengan “raja” juga lebih didasarkan atas pertimbangan pemilikan kemampuan adikodrati dari seseorang. Untuk ditempatkan menjadi seorang *Ulu Taon* maka yang bersangkutan harus memiliki kemampuan adikodrati untuk membaca iklim seperti musim kemarau atau musim hujan agar dapat menentukan kapan pengolahan tanah dimulai, kapan pembibitan, kapan musim tanam dimulai dan kapan masa panen dilakukan.

Birokrasi tradisional tersusun dalam satu struktur hirarki (*hierarchical structure*). Struktur hirarki menentukan tingkatan jabatan menurut jumlah kekuasaan dan otoritas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk masing-masing jabatan. Struktur hirarki melahirkan struktur otoritas (*authority structure*) yang menentukan siapa yang memiliki hak membuat keputusan menurut kepentingan pada level berbeda di dalam organisasi. Makin tinggi level hirarki seseorang dalam satu struktur akan semakin meningkat otoritasnya.. Otoritas pada level bawah berada di bawah kontrol dan pengarahan dari otoritas level di atasnya. Otoritas yang lebih tinggi mempunyai hak untuk mengeluarkan petunjuk-petunjuk atau perintah, sementara otoritas yang lebih bawah berkewajiban mematuinya. Tetapi, hubungan kewenangan antar unit birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional menunjukkan kewenangan “patrimonial” yang membangun sistem tradisional yang sangat disucikan yang mengatur hubungan-hubungan langsung yang bersifat sub-ordinasi dan personal.

Kompetensi Aparatur

Seperti halnya dalam organisasi birokrasi modern, maka tiap jabatan menuntut kompetensi tertentu. Setiap jabatan tertentu pasti memiliki deskripsi jabatan yang mengidentifikasi apa tugas yang harus dikerjakan, apa tanggungjawab yang harus diemban, dan apa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban tersebut membutuhkan orang yang memiliki spesifikasi jabatan atau tuntutan jabatan tentang kualifikasi minimum dari orang yang dibutuhkan untuk memegang jabatan tersebut. Itu berkenaan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik lainnya yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melaksanakan satu jabatan. Pengetahuan adalah satu bidang informasi yang dapat diaplikasikan secara langsung kepada pelaksanaan tugas-tugas. Keterampilan menunjuk pada suatu kompetensi yang dapat diobservasi untuk bekerja dengan atau menerapkan pengetahuan untuk melaksanakan suatu tugas khusus.

Tetapi tiap jabatan menuntut pemilikan pengetahuan tentang fungsi dan tugas pokok dari jabatan tersebut. Jabatan Pande Bolon harus menguasai adat istiadat. Jabatan Ulu taon harus mampu membaca tanda-tanda alam kapan mulai menanam dan kapan harus dipanen, kapan hama datang dan kapan aman dari hama. Tentang hal ini ada ceritera. Suatu ketika Ulu Taon telah membaca dan merasakan ada tanda-tanda akan datang hama. Karena itu Ulu Taon memerintahkan agar padi yang ditanam agar dipanen meskipun belum belumlah waktunya. Sebagian penduduk mematuhi perintah Ulu Taon, sementara sebagian lagi penduduk tidak mematuhi karena menganggap padi masih terlalu muda sehingga jika dipanen maka hasilnya tidak sesuai harapan. Masih menurut ceritera, terjadilah apa yang tidak diharapkan oleh penduduk. Sehari setelah penduduk yang mematuhi Ulu Taon memanen padinya, maka besoknya semua padi yang tidak dipanen telah habis dimakan oleh hama seperti tikus³⁸. Jabatan Ulubalang atau Pangulu Raja harus menguasai pengetahuan menangkal perbuatan lawan. Jabatan Parbaringin harus menguasai pengetahuan dan upacara agama yang dianut pada masa itu dan tentu kemampuan martonggo kepada debata dan sombaon.

Berkenaan dengan tugas, tanggungjawab dan kewajiban dalam birokrasi tradisional, maka hal lain yang tidak kalah penting dan utama ialah bahwa mereka memiliki kompetensi dilihat dari *sahala harajaon* dan kemampuan adikodrati. Ini dapat diketahui dari rekam jejak mereka dari kehidupan sehari-hari.

Catatan

- ¹ Martin Albrow. 2005. *Birokrasi*. Tiara Wacana: Yogyakarta, h. 40.
- ² Sitor Situmorang. 2004. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- ³ Raja Patik Tampubolon. 2002. *Pustaka Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama, h. 275-276. Susunan ini pun berlaku dalam Harajaon Sibagotnipohan di Bius Godang di tano Baligeraja yang meneruskan tampuk pimpinan Dinasti Sorimangaraja. Tentang hal ini Simanjuntak mmengatakan: Di laon-laon ni ari, dijujur Sibagot ni Pohan ma ari laho mamantikkon Baringin Bius Godang di tano Baligeraja, asa di gurguri onan i na jadi Bius Godang di pinompar ni Sibagot ni Pohan manuan hau baringin, jabi-jabi dohot hariara. Asa gabe tuko na so sibutbuton gadu naso sisosaan ma angka hau sinuan na di Onan i, partanda ma i di paronan, harungguan dohot partungkoan di angka Raja Jungjungan, Raja Naopat, Raja Nauwalu, Raja Nasampuludua dohot angka Raja Parbaringin, Datu Bolon dohot Sibaso Bolon. <http://simanjuntak.or.id/2008/02/sibagot-ni-pohan/>, diunduh pada 29 Agustus 2012.
- ⁴ Tentang pangulubalang dan cara pembuatannya lihat antara lain Marbun dan *Hutapea*. 1987. *Kamus Budaya Batak Toba*. Jakarta: Balai Pustaka.
- ⁵ Penjelasan singkat tentang Pangulubalang lihat Bisuk Siahaan, *ibid*, h. 282-287 yang didasarkan pada buku J. Winkler yang berjudul *Die Toba Batak auf Sumatra in Gesunden und Kranken Tagen* (Orang Batak Toba dari Sumatera di Kala Sehat dan di Waktu Sakit yang diterbitkan pada tahun 1925 oleh Stuttgart).
- ⁶ Berdasarkan hasil wawancara di Bakkara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.

-
- ⁷ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.
- ⁸ J.C. Vergowen. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Azet, h. 417.
- ⁹ J.C. Vergouwen, *ibid*, h. 134.
- ¹⁰ J.C. Vergouwen, *Ibid*, h. 134.
- ¹¹ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.
- ¹² J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 121.
- ¹³ Lance Castles, *ibid*, h. 42.
- ¹⁴ J.C. Vergouwen, *Ibid*, h. 74.
- ¹⁵ J.C. Vergouwen, *Ibid*, h. 416.
- ¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara di Bakara dengan David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin), Sahala Manullang (St. Gading) dan Hampung Simamora.
- ¹⁷ J.C. Vergouwen, *op cit*, h. 450.
- ¹⁸ J.C. Vergouwen, *Ibid*, h. 450.
- ¹⁹ Selain batu somong, juga terdapat berbagai wahana penyumpahan. Tentang hal ini lihat J.C. Vergouwen, *ibid*, h. 451-152.
- ²⁰ J.C. Vergouwen, *Ibid*, h. 452.
- ²¹ Uraian lebih lanjut tentang peradilan bagi keturunan marga dan marga induk Silahisabungan, lihat Ulbert Silalahi, 1998. *op cit*, bab 5, h. 96-114.
- ²² *Ibid*.
- ²³ Disebut ‘parbaringin’ karena ketika memimpin suatu upacara, kepala dililit kain putih dan diselipkan ranting pohon beringin. Kadang kala destar (ikat kepala) nya berupa kain tiga warna (merah-putih-hitam), yang disebut bonang manalu menyematkan tangkai daun pohon beringin di kain yang melilit kepalanya.
- ²⁴ Pada abad-abad yang lalu terutama sebelum agama Kristen dan agama Islam masuk ke daerah Batak Toba atau ketika Batak Toba masih menganut agama Paganisme, hadatuon (perdukunan) masih arak di Daerah Toba dan menjadi bagian penting dari masyarakat Toba. Datu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Yang mampu dan mau melakukan hal-hal yang baik bagi kepentingan manusia disebut datu golongan ilmu putih, sedangkan datu yang mampu dan mau melakukan hal-hal yang buruk atau merugikan umat manusia disebut datu golongan ilmu hitam. Karena itu datu memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam masyarakat Batak Toba tradisional, bahkan juga hingga dewasa ini, terutama di pedalaman. Datu dapat melihat roh halus yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa yang mengganggu atau membuat orang sakit. Datu juga mampu mengatur cuaca, mendatangkan dan menghentikan hujan, menentukan hari baik, dll. Tetapi tidak ada datu yang memiliki semua kemampuan atau serba bisa. Keahliannya hanya terbatas untuk sejumlah bidang tertentu. Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki maka dalam masyarakat Batak Toba ditemukan sebutan gelar untuk datu seperti: 1. *Datu Panawar* (dukun yang dapat mengobati orang sakit), 2. *Datu Parmangmang* (mampu menggunakan kekuatan roh), 3. *Datu Partonggo* (sebagai pemuka agama), 4. *Datu Pangatiha* (peramal), 5. *Datu Parsisean* (sebagai guru), 6. *Datu Parmangsi* di Lopian (ahli tulisan buku pusaha), 7. *Datu Panusur di Bisara na Godang* (ahli mengalahkan musuh dengan kekuatan sihir), 8. *Datu Pangarambu* (ahli menafsirkan waktu perang), 9. *Datu Panuju* (mampu mengatur cuaca), 10. *Datu Parsipuspis* (menguasai ilmu hitam). Pembahasan lebih lanjut tentang datu dan hadatuon dan pengobatan lihat Bisuk Siahaan. 2005. *Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. Jakarta: Kempala Foundation dalam bab 5. Penjelasan Bisuk Siahaan mengenai hadatuon berdasarkan pada buku hasil penelitian dari J. Winkler dengan judul *Die Toba Batak auf Sumatra in Gesunden und Kranken Tagen* (Orang Batak Toba dari Sumatera di Kala Sehat dan di Waktu Sakit yang diterbitkan pada tahun 1925 oleh Stuttgart. Buku lain dari J. Winkler

-
- ialah *Poda ni Oelaon Hasibasoon* yang diterbitkan tahun 1937 di Lagoeboti oleh Zendingswerkplaatsen.
- ²⁵ Kalender Batak mengikuti hitungan bulan. Ia memiliki daftar penanggalan yang membagi 12 bulan, 30 hari dalam satu bulan. Di dalam parhalaan dapat ditemukan hari dan tanggal yang baik (suatu kegiatan dapat dilakukan) dan hari dan tanggal yang buruk (suatu kegiatan sebaiknya tidak dilakukan).
- ²⁶ Sitor Situmorang. *Opcit*, h. xiii.
- ²⁷ Sitor Situmorang. *Opcit*, h. 88.
- ²⁸ Sitor Situmorang. *Opcit*, h. 88.
- ²⁹ Sitor Situmorang. *Ibid*, h. 318.
- ³⁰ Sitor Situmorang. *Ibid*, h. 89.
- ³¹ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 276.
- ³² Tentang gerakan sekte dalam masyarakat Batak-Toba, lihat Lance Castles. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Bab III
- ³³ Ragam sekte ini pada dasarnya menentang penjajahan dan perlakuan tidak adil dari penjajah. Meskipun demikian, umumnya, sekte menghormati Raja Singamangaraja, yang dianggap akan menjadi penguasa negara Batak yang kelak mencapai kemerdekaan.
- ³⁴ Lance castles, *ibid*, h. 61-62. Selama Singamangaraja hidup, kurang kedengaran hal apapun seputar kegiatan Parmalim di daerah Sijamapolang (daerah sepanjang tepi barat tanah Batak-Toba dengan sumber pendapatan utama dari hasil mengumpulkan getah damar), dan sangat sedikit tentang Parmalim di Samosir, kecuali di Salaon dekat Pangururan. Permulaan abad ke-20, muncul ragam lain Parmalim, terutama di Uluan dan Habinsaran. Mereka sangat nativistik: berpakaian tradisional, menolak informasi Barat, dan menolak menyapa pejabat dengan gelar kepangkatan mereka. Jika pada awalnya hanya ada satu kumpulan agama Malim, maka dikemudian hari menjadi banyak macam seperti: Parmalim di Laguboti, Malim Sumomba Malim di Sigaol, Malim Putih di Balige, Malim Baringin Batak di Pulo Samosir. Ragam sekte Parmalim ini menempatkan Singamangaraja dalam posisi lebih sentral, bahkan mempersonifikasi Singamangaraja dalam berbagai upacara dan kegiatan Parmalim. Oleh karena itu antara Parmalim dan Singamangaraja sulit dipisahkan bahkan sebagian mengakui agama yang dianut oleh Singamangaraja adalah Parmalim. Pengikut Parmalim tak pernah lebih dari beberapa ribu orang yang terdiri dari berbagai kelompok kecil yang tersebar yang berada di bawah bimbingan seorang guru, pendeta atau datu.
- ³⁵ Mauly Purba. 2005. From conflict to reconciliation: the case of the gondang sabangunan in the Order of Discipline of the Toba Batak Protestant Church. *Journal of Southeast Asian Studies*. June 1, 2005. Diunduh dari <http://www.highbeam.com/doc/1G1-135214796.html> pada tanggal 22 mei 2012
- ³⁶ Bisuk Siahaan, 2005. *Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. Jakarta: Kempala Foundation, h.162-163.
- ³⁷ Ini berbeda dengan pendapat yang mengatakan ketidakpastian pembagian kerja sebagai salah satu ciri sistem birokrasi tradisional. Lihat Anak Agung Gde Putra Agung. 2001. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 115.
- ³⁸ Berdasarkan wawancara dengan A. Ruslan atau Ompu Merlin di Bakkara.

Bab 8

Aturan dan Hukum dalam Kerajaan Tradisional

Pendahuluan

Sebagai sebuah organisasi, maka birokrasi menyandarkan dirinya kepada aturan hukum yang mengatur perilaku dari para birokrat dan warga. Birokrasi modern sangat menekankan pada penggunaan aturan formal. Aturan formal (*formal rules*) adalah petunjuk formal bagi seluruh pegawai dalam bertindak dan berperilaku dalam pekerjaannya. Aturan ini menjadi standar yang dirancang untuk mempertahankan uniformitas yang terdapat dalam setiap tugas tanpa memandang jumlah personalia yang terlibat di dalamnya dan koordinasi dari tugas-tugas yang berlainan. Peraturan-peraturan yang eksplisit menentukan tanggungjawab anggota organisasi dan hubungan di antara mereka. Beberapa organisasi birokrasi beroperasi dengan pedoman yang telah distandarkan secara minimum, yang lainnya memiliki segala peraturan dan hukum yang memerintahkan kepada birokrasi dan warga mengenai apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan.

Sekalipun masih bersifat tradisional, birokrasi dalam masyarakat Batak Toba telah berjalan berdasarkan peraturan dan hukum. Peraturan dan hukum berkenaan dengan religi dan adat. Peraturan dan Hukum cenderung tidak tertulis. Meskipun demikian, tiap raja menguasai seluruh Patik dohot Uhum dan dapat menceriterakannya kepada semua anggota masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing. *Patik dohot Uhum* atau peraturan dan hukum dalam masyarakat Batak Toba tradisional berlandaskan pada budaya kekerabatan dan kerohanian. Nilai budaya kekerabatan adat dan budaya kerohanian agama dijabarkan dalam aturan dan hukum. Aturan dan hukum yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya tersebut disepakati menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan (berkerajaan) pada saat itu.

Patik berarti aturan atau kaidah, aturan larangan yang disepakati bersama, undang-undang. *Patik, ima handang manang ambat-ambat ni na uli unang laho tu na roa, mulai sian naunang tu na tongka sahat tu na so jadi angka pantang-pantang*¹. Atau *Patik*, ialah kandang penghalang atau penghambat dari yang baik agar tidak berubah menjadi buruk atau jahat). Sedangkan *uhum* adalah hukum. *Uhum ima na uli angka hatigoran dohot hasintongan-habonaran*², atau *uhum* ialah yang baik segala keadilan dan kejujuran- kebenaran. *Uhum* berkaitan dengan adat sehingga *uhum* diartikan juga adat. Kadang-kadang *uhum* dimaknakan

sebagai sanksi atau hukuman kepada warga dan raja tanpa pandang bulu apabila terjadi pelanggaran atas *Patik* termasuk pelanggaran atas adat istiadat yang ada³.

Patik dohot Uhum sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat

Masyarakat Batak Toba tradisional menghendaki “*asa marpatik-maruhum umboto na uli dohot na roa, manang asa diulahon na uli, dipasiding na roa*”⁴ atau agar melaksanakan peraturan dan hukum mengetahui yang baik dan yang buruk, atau agar dilakukan yang baik, di jauhi yang buruk). Ini berarti bahwa tujuan dari *Patik dohot Uhum* (PDU) tidak saja untuk mengetahui mana yang baik (*na uli*) dan mana yang buruk (*na roa*), tetapi juga agar mengerjakan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Ada tiga hal yang terkandung dalam *Patik* yaitu *na unang*, *na tongka* dan *na so jadi*.

Patik parjolo ialah *na unang*, atau jangan lakukan. Ini diperuntukkan kepada anak-anak, agar tidak melakukan yang menyakitkan. *Patik* ini, misalnya, menyatakan jangan bermain kotor, jangan nakal, jangan melawan orang tua, jangan jatuh, jangan terjerembab, jangan merusak, jangan berantam, jangan mencuri, dll. Dalam umpama disebut: “*unang bahen na so uhun, unang ulahon na so jadi*” (jangan lakukan yang tidak sesuai dengan hukum, jangan kerjakan yang sia-sia), *unang pajolo gogo, papudi Uhum* (jangan mendahulukan kekuatan, mengabaikan hukum).

Patik paduahon ialah *na tongka*, atau pantang, tabu. Ini diperuntukkan kepada orang dewasa yang sudah berpikir luas agar jangan dilakukan “*na tongka*” Tidak boleh menyebut nama paman, bapak, ibu, mertua, pantang melewati kelompok orang tanpa mengucapkan kata permissi, duduk tidak sopan, berduaan dengan adik atau kakak perempuan/laki-laki, mengambil tanaman orang lain tanpa ijin, duduk di tempat tertentu sebelum dipersilahkan, melangkahi orang tidur, berdusta, mengucapkan salah pada hal benar, berdusta, mengadu domba. Satu ungkapan yang sering dikatakan ialah “*sitongka do jumonok tu na so oroan niba*” (pantang dekat dengan yang bukan istri kita).

Patik patoluhon ima *na so jadi* atau tidak boleh atau larangan dilakukan. Ini, termasuk *na unang* dan *na tongka*, diperuntukkan bagi orang yang sudah tua dan raja agar tidak melakukan “*na so jadi*” seperti melarang membunuh, mencuri, mengambil isteri orang, mengucapkan kata yang tidak benar, dll.⁵ Contoh-contoh terkait dengan *poda na so jadi* mengatakan:

1. *Na so jadi tampulon gaol marsomba, na so jadi tulahon tangan marsomba* (tidak boleh menebang pisang yang baru mekar, tidak boleh menolak tangan orang yang menyembah minta maaf).

2. *Na so jadi paguguthon na so sira, na so jadi painumhon na so aek* (tidak boleh mengunyah yang bukan garam, meminumkan yang bukan air).
3. *Na so jadi lupa iring-iring ni adat, na so jadi ambaton tomu-tomu i adat, na so jadi mago indahan ragia, na so jadi muba sangsing ni onan* (tidak boleh lupa melihat orang meninggal, tidak boleh menghalangi usaha perdamaian, tidak boleh hilang nasi yang bermakna, tidak boleh mengubah peraturan pasar).
4. *Na so jadi laoson hata, na so jadi juaon tona* (tidak boleh dilupakan ucapan, tidak boleh ditolak pesan)
5. *Na so jadi ubaon bulan, na so jadi oseon padan* (tak boleh diubah bulan, tak boleh diingkari janji)
6. *Na so jadi mose patik na, na so jadi muba uhum* (tidak boleh ingkar aturan, tidak boleh ubah hukum).

Aturan hukum ini bersumber dari serta menyangkut tentang religi dan adat yang diwariskan turun temurun secara lisan berupa *umpama* dan *umpasa* atau pepatah petitih. Masyarakat yang primitif pada saat itu hafal berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus aturan yang harus dipatuhi atau tidak boleh dilanggar. Tetapi yang paling menguasai PDU dan juga sanksi atau hukuman yang diberikan jika dilanggar adalah kelompok Datu. Hanya datu yang mampu menceriterakan secara lisan maupun menuliskan aturan-aturan dan hukum-hukum. Kemungkinan besar sekali, karena merekalah yang banyak mengetahui tentang Adat dohot Uhum dan sekaligus menguasai tulisan Batak Toba⁶. Itu juga menjadi satu sebab mengapa mereka disebut “*parhata-hata di bibir, parpustaha di tolonan*”, atau banyak banyak, banyak pengetahuan. Mereka menguasai isi dari PDU termasuk sanksi yang didapat jika melanggarnya. Oleh karena itu ketika ahli-ahli dari eropa, terutama Belanda berkunjung ke Tanah Batak pada abad 19, mereka takjim melihat masyarakat Batak telah memiliki aturan dan hukum yang tidak kalah dengan Kitab Undang-undang di negara mereka⁷.

Tidak ada aturan dan hukum tertulis dalam birokrasi masyarakat Batak Toba tradisional. Yang ada adalah aturan hukum tidak tertulis. Walaupun Aturan dan Hukum dalam masyarakat Batak Toba tradisional tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan untuk mematuhi. Setiap orang wajib untuk mematuhi PDU atau aturan dan hukum yang sudah ditetapkan oleh Ompunta Narobi dan leluhur secara turun temurun. Mereka juga mematuhi orang yang dianggap menguasai aturan dan hukum yaitu Raja Ibadat, Raja Adat dan Raja Manusia. Orang yang menguasai PDU berkenaan dengan agama dan memimpin kegiatan agama disebut Raja Ibadat atau Raja Parbaringin, orang yang menguasai PDU berkenaan dengan adat dan memimpin kegiatan adat disebut Raja Adat, dan orang yang menguasai PDU berkaitan dengan masalah-masalah duniawi dan memimpin kegiatan berkaitan dengannya disebut Raja Manisia.

Tiap daerah memiliki PDU. Karena itu PDU yang berlaku di Silindung tidak sama dengan Pati dohot Uhum ni Toba⁸, PDU di Samosir tidak sama dengan di

Uluan. Meskipun demikian banyak kesamaan isi PDU di setiap daerah. Naipospos memiliki PDU yang tidak sama dengan daerah Batak Toba lain. Adat, Kebiasaan dan Peraturan Nai Pospos merupakan satu PDU yang sudah terkodifikasi yang dihimpun dari daerah Barus dan ditulis oleh van der Tuuk pada tahun 1852-1857. Naskah asli dari buku ini menggunakan bahasa Batak-Toba Kuno oleh para datu. Naskah ini lebih dikenal dengan “*Adat dohot Uhum ni Naipospos*”. Pada tahun 1899 juga terbit sebuah buku berjudul “*Patik dohot Uhum ni Halak Batak*” yang ditulis dalam bahasa Batak Toba sehari-hari oleh Jacob Lumbantobing dan dicetak oleh American Mission Press di Singapura. Kemudian pada tahun 1933, J.C. Vergouwen menulis buku dengan judul “*Het Rechtsleven der Toba-Bataks*” dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia tahun 1986 dengan judul “Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba oleh Pustaka Azet di Jakarta⁹”.

Adapun isi dari “*Adat dohot Uhum ni Naipospos*” memuat dua bagian yaitu peraturan yang tidak boleh dilanggar atau larangan dan petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari atau kebiasaan. Berikut sebagian tentang uhum larangan¹⁰:

1. Uhum ni na mangalangkup (hukuman bagi yang berzinah dengan seorang perempuan yang statusnya masih isteri yang sah dari pira lain).
2. Uhum ni na manggombangi (hukuman bagi yang berjinah dengan perempuan yang telah putus ikatan perkawinan dengan suaminya).
3. Uhum ni na mambahen roha-roha tu boru-boru (hukuman bagi yang menggauli seorang gadis di tempat tersembunyi dan memberi tanda bahwa ia bersedia menikahnya).
4. Uhum ni na mamunu jolma (hukuman bagi pembunuh manusia)
5. Uhum ni halak na marjehe (hukuman bagi penghianat).
6. Uhum ni halak na manurbu huta (hukuman bagi pembakar desa).
7. Uhum ni sitangko horbo (hukuman bagi pencuri kerbau).
8. Uhum ni sitangko biang (hukuman bagi pencuri anjing).

Adapun tentang petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari atau kebiasaan, beberapa di antaranya ialah:

1. Petunjuk untuk melahirkan kembar.
2. Petunjuk untuk memotong rambut.
3. Petunjuk untuk membawa bayi keluar rumah.
4. Petunjuk untuk memberi nama untuk bayi atau anak.
5. Petunjuk untuk orang yang akan menikah.
6. Petunjuk untuk memendekkan gigi.
7. Petunjuk untuk menanam bibit padi.
8. Petunjuk untuk pengumuman perang.
9. Petunjuk untuk melakukan perang.
10. Melakukan perambahan di sawah atau di ladang.

Subang sebagai Patik dohot Uhum

Masyarakat Batak Toba masih memiliki aturan hukum yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut “*Subang*”. Subang atau tabu merupakan larangan-larangan yang berlaku dalam hidup bermasyarakat Batak Toba. Jadi, subang saling mengisi atau saling melengkapi dengan PDU terkait dengan larang yang tidak boleh dilanggar atau “*na so jadi*”. Walaupun demikian ada perbedaan di antara keduanya yaitu dalam hal sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Perbedaan utama antara PDU dan Subang ialah bahwa pelanggaran atas PDU hampir semuanya berupa denda materi bahkan nyawa, sedangkan sanksi bagi pelanggar Subang pada umumnya adalah hukuman yang tidak nyata dan sering bersifat mistik seperti dihujat begu, kena murka leluhur, diserang penyakit, dikutuk oleh debata atau sombaon.

Adapun peraturan tentang subang dibagi atas empatbelas kategori sebagai berikut¹¹:

1. Subang atau pantang dalam mencari isteri (11 larangan).
2. Subang dalam rumah tangga (8 larangan).
3. Subang dalam hubungan keluarga (3 larangan).
4. Subang dalam penyakit (8 larangan).
5. Subang ketika ada meninggal (12 larangan).
6. Subang waktu bertenun (8 larangan).
7. Subang ketika memakai ulos atau pakaian (3 larangan).
8. Subang dalam mendirikan rumah (13 larangan).
9. Subang dalam mendirikan dan berdiam di kampung (4 larangan).
10. Subang sewaktu menyelenggarakan pesta (7 larangan).
11. Subang berkaitan dengan padi di sawah (5 larangan).
12. Subang ketika menangkap ikan (5 larangan).
13. Subang berkaitan dengan ternak piaraan (4 larangan).
14. Subang untuk berbagai hal (3 larangan)
15. Pertanda kurang baik (6 larangan).

Patik dohot Umum: dari Kehidupan Bermasyarakat ke Kehidupan Berpemerintahan

Hal pokok utama terkait dengan birokrasi pemerintahan baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional ialah aturan hukum atau *rules of laws*. Praktek-praktek birokrasi modern maupun tradisional pasti didasarkan atas aturan dan hukum. Kehidupan masyarakat dan birokrasi tradisional Batak Toba juga didasarkan atas aturan dan hukum yang disebut sebagai *Patik dohot Uhum*. Bagi masyarakat Batak Toba, Patik dohot Uhum harus diutamakan atau didahulukan. Oleh karena itu orang Batak-Toba mengatakan “*unang pajolo gogo,*

papudi uhum” (jangan mendahulukan kekuatan, mengebekangkan hukum). Dalam hukum modern disebut jangan main hakim sendiri.

Patik dohot Uhum dalam birokrasi tradisional dalam masyarakat Batak Toba terikat dengan norma-norma dan nilai-nilai tradisional pada saat itu. Oleh karena itu setiap operasi-operasi birokratis pasti ada campurtangan dari pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai kolektif dari budaya tradisional yang mereka anut. Lagi pula penerapan Patik dohot Uhum dalam berpemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional tidak sekegar menciptakan tertib hukum dan tertib administratif, melainkan juga untuk kegembiraan bersama. Peribahasa Batak Toba mengatakan: *Sinuan bulu sibahen na las; sinuan uhum sibahen na horas* yang berarti ditanam bambu agar tercipta kehangatan; dibuat hukum untuk menciptakan kedamaian bersama.

Patik dohot Umum ditransformasikan juga dalam kehidupan berpemerintahan dan birokrasi. Itu juga terjadi dalam pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Batak-Toba. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Patik dhot Uhum sebagai undang-undang yang sah atau sebagai “jurisprudensi Batak Toba”. Ketika Pemerintahan Kolonialisme Belanda di Tanah Batak Toba:

Para Jaihtan menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Patik dohot Uhum ni Halak Batak, yaitu peraturanyang dimengerti dan dihayati oleh masyarakat. Pada mulanya Pemerintah Belanda sangat khawatir, takutketenteraman tidak bisa diatur karen tidak menggunakan Undang-Undang Hindia Belanda. Ternyata setelah berjalan beberapa tahun kekhawatiran Belanda tidak beralasan; di bawah pemerintahan Jaihtan kehidupan sehari-hari berjalan dengan tertib, menggunakan hukum dan peraturan yang dimengerti oleh masyarakat. Ketika Pemerintah Hindia Belanda menginstruksikan supaya di daerah Angkola, Mandailing dan pesisir harus menggunakan “*Sumatra Ordonantie*” yang mengharuskan berlakunya jurisprudensi pemerintah yaitu Undang-undang Pidana HIndia Belanda, ternyata khusus untuk “PUsat Tanah Batak” Undang-undang tersebut tidak berlaku, yang dinyatakan sebagai undang-undang yang sah adalah jurisprudensi Batak-Toba yaitu Patik dohot Uhum”¹².

Jadi Pemerintahan atau *Harajaon* Batak Toba tradisional telah memiliki “*PDU*” tidak diragukan lagi. Bahkan *PDU* tersebut menjadi undang-undang yang sah oleh Pemerintahan Kolonialisme Belanda untuk mengatur kehidupan masyarakat Batak Toba saat itu. *PDU* diikuti oleh semua pihak dalam semua kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan, Raja Patik Tampubolon menulis:

Patik dohot Uhum ma na manoto manang hangoluan, manang hamagoan, na uli manang na roa, na jadi bahenon dohot na so jadi bahenon. Na manotari bonana dohot ujungna, asalna dohot usulna, dinasa rupa, pangalaho dohot ulaon.¹³

Patik dan hukumlah yang menjelaskan apakah kehidupan, apakah kerugian, yang baik maupun yang jelek, yang dapat diperbuat dan yang tidak dapat

diperbuat. Yang menjelaskan awalnya dan akhirnya, asalnya dan usulnya, dari semua bentuk wajah, kelakuan dan perbuatan.

PDU masyarakat Batak Toba tradisional juga sering diungkapkan dalam umpasa atau peribahasa dan umpama atau perumpamaan. Umpasa pasu-pasu dibuat untuk adat keDebataan (*hadebataon*), sedangkan umpama tudosan untuk adat kemanusiaan (*hajolmaon*). Ada *PDU* yang digunakan untuk mengatur seluruh kehidupan masyarakat dan birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional. Tetapi juga ada *PDU* yang secara khas dimiliki oleh dan mengatur birokrasi pemerintahan Dinasti Singamangaraja. Aturan dan hukum yang ada lahir dari dan didasari oleh ideologi kerohanian dan ideologi kekerabatan masyarakat Batak Toba tradisional. Aturan dan hukum yang jelas akan memungkinkan birokrasi dan tiap unitnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif. Aturan dan hukum menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Kadang-kadang *PDU* dikaitkan dengan “*Poda*” atau pengajaran, amanat, nasihat.

Aturan dan Hukum dalam Birokrasi Tradisional

PDU sangat penting dalam kehidupan berpemerintahan dalam kerajaan tradisional masyarakat Batak Toba. Menurut Sitor Situmorang *PDU* bersumber dari Adat *Bius* yang meliputi pengaturan tentang:

1. Hukum pertanahan (hak ulayat).
2. Hukum relasi bertetangga atau relasi kewilayahan antar *Bius*.
3. Hukum penguasaan tanah.
4. Hukum tali-air (irigasi) dan perairan (sungai, danau).
5. Hukum sumber daya komunal (*hutan*, padang rumput penggembalaan, tanah cadangan untuk persawahan dan pemukiman yang dikuasai secara kolektif oleh paguyuban).
6. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban penggarap atas sawah.
7. Hukum yang mengatur hak pendiri/pemilik *huta*.
8. Dan lain-lain¹⁴.

Vergowen berusaha mengumpulkan semua peraturan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba. Informasi lisan dia peroleh dengan mendatangi raja *huta* dan raja-raja atau penatua-penatua adat termasuk cara bagaimana menerapkan peraturan dan hukum berdasarkan adat dohot *Uhum*. Kemudian ia mengelompokkan jenis hukum menjadi:

1. Hukum tradisional dan hukum antar masyarakat.
2. Hukum perkawinan.
3. Hukum warisan.
4. Hukum pemilikan tanah.

5. Hukum utang piutang.
6. Hukum pelanggaran.
7. Hukum perselisihan.

PDU merupakan perangkat peraturan dan hukum yang dijadikan sebagai pegangan oleh orang Batak Toba dalam kehidupan bermasyarakat dan berkerajaan atau berpemerintahan. *PDU* mengatur banyak hal, bukan saja tentang adat dan agama, tetapi juga terkait dengan penggunaan air untuk persawahan, perkongsian, menangkap ikan di sungai dan di anau, bertenun dan cara berpakaian, onan atau pasar, peperangan baik pengumuman perang, peraturan perang, peraturan mengenai senjata, dsb¹⁵. Itu sudah ada sebelum terjadi perang Padri di Tapanuli pada tahun 1820-an dan berlangsung sebelum Indonesia memiliki aturan dan hukum. *PDU* bagi masyarakat dan kerajaan Batak Toba tradisional berfungsi menjadi *saong-saong sian ginjang, lombu-lombu sian lambung, lapik-lapik sian toru*¹⁶.

Patik dohot Uhum terkait dengan banyak peristiwa hidup. Dalam perkawinan, misalnya, *PDU* menegaskan perkawinan eksogami dan melarang perkawinan dengan marga sendiri atau marsumbang. Menurut Patik dohor Uhum yang berlaku pada saat itu, seseorang yang kawin dengan putri atau putra semarga dengannya, hukumannya dibakar hidup-hidup (*situtungon ni api*) atau ditenggelamkan ke dalam air (*sinongnongon tu aek*). Di daerah lain hukuman bisa lebih ringan, misalnya, hanya dikeluarkan dari huta (*dipaduru sian huta*) atau dari masyarakat marga (*dipaduru di ruar ni patik*). Juga dilarang kawin dengan putri dari ibu yang semarga dengannya, juga perkawinan antara dua lelaki bersaudara dengan dua perempuan bersaudara yang disebut dua punga sada ihotan. Dua perkawinan yang terakhir juga dikategorikan sebagai perkawinan sumbang.

Tentang hukuman karena melanggar *PDU* terkait dengan perkawinan diceriterakan oleh Situmorang sebagai berikut.

Padan

Padan merupakan janji atau ikrar yang diucapkan dan disepakati oleh orang yang membuat perjanjian. Jika dilakukan pelanggaran terhadap padan, akibatnya lebih daripada pelanggaran atas hukum. Karena itu, seperti halnya setia dan patuh kepada hukum, etnik Batak Toba lebih setia dan lebih takut lagi terhadap padan karena yang menanggung ganjaran atas pelanggaran atau pengingkaran terhadap padan tidak hanya yang mengucapkan, tetapi juga ikut serta orang lain yang diucapkan dalam padan tersebut termasuk keluarga dan keturunan yang membuat padan. Karena itu nilai budaya masyarakat Batak Toba tradisional sudah mengingatkan dalam umpasa:

1. *Habang ambaroba, paihutihut rura;*
padan naung ni dok, ndang jadi muba

Terbang burung ambaroba, mengikuti lembah;
padan yang sudah diucapkan, tidak boleh berubah.

2. *Bulan na so jadi ubaon;*

Padan na so jadi oseon

Bulan tak boleh diubah;

Janji tak boleh diingkari

Ada kaitan antara padan dengan religi terkait dengan ganjaran yang diterima. Dalam hal ini, ada unsur kepercayaan bahwa orang yang mengingkari atau melanggar padan akan dikutuk oleh Mulajadi Na Bolon dan roh nenek moyang sementara yang memelihara padan akan mendapat berkat. Dalam ungkapan tradisional disebut:

1. *Dengke sabulan tonggi jala tabo*

Jolma siose padan ripur jala mago

Ikan dari sabulan manis dan enak

Manusia pelanggar padan musnah dan lenyap

2. *Pat ni satua tu pat ni lote*

Mago ma panguba mamora ma niose

Kaki tikus ke kaki puyuh

Punahlah pengingkar kayalah yang diingkar

Ungkapan metafora 1 menunjukkan sikap dan perilaku kesetiaan etnik Batak Toba yang sangat tinggi terhadap padan yang dimetaforakan dengan *padan naso jadi oseon; bulan na so jadi ubaon*. Orang Batak Toba sangat memegang teguh terhadap padan yang sudah diikrarkan. Mustahil etnik Batak Toba mengingkari padan atau ikrarnya semustahil bulan yang tidak mungkin diubah.

Onan Na Marpatik

Masyarakat Batak Toba-Tua mengenal *onan* atau pasar sebagai tempat barter atau tukar-menukar barang dan jual beli dari penduduk sekitar atau pendatang. Ada dua jenis onan yaitu onan na metmet (pasar yang kecil) dan onan na balga (pasar yang besar). *Onan na metmet* atau pasar kecil hampir ditemukan di tiap *Bius* sebagai tempat jual beli di sebuah petak. *Onan* ini berlangsung pada setiap pagi hari selama kira-kira dua hingga tiga jam dan biasanya hanya dikunjungi oleh penduduk setempat. Karena itu dinamakan juga *onan manogot-nogot* (pasar pagi). Walaupun *onan na metmet* tetapi status hukumnya dijamin oleh *Bius*.

Untuk mendirikan onan, para tua-tua desa berkumpul bermusyawarah atau melakukan *harungguan bolon* (pertemuan besar) untuk memutuskan mendirikan satu onan atau pasar dan sekaligus menentukan dan menyediakan tanah untuk lokasi. Musyawarah besar ini dihadiri oleh para raja horja setempat dan raja huta

yang dekat atau bertetangga. Ketika meresmikan onan yang sudah disepakati, maka warga huta yang menjadi anggota onan diundang, bahkan warga dari kampung tetangga lain juga diundang dan mereka mengutus seorang wakil sebagai utusan. Saat peresmian, ditanam pohon hariara di tengah onan. Di bawah pohon inilah nantinya para raja duduk menerima permohonan, pengaduan atau melakukan perundingan untuk urusan huta.

Sementara *onan na balga* hanya terdapat di *Bius* tertentu dan biasanya dikunjungi oleh semua masyarakat *Bius* maupun dari masyarakat “Negeri” lainnya. Jadi, tidak di setiap *bius* ditemukan *onan na balga*. *Onan na balga*, jika dikelola secara teratur, dijaga dan dijamin keamanan dan perdamaian, memiliki status hukum yang disebut *Onan Na Marpatik* (Pasar yang Berperaturan). Jadi, tidak semua *Bius* memiliki *Onan Na Marpatik*. Tetapi jika *bius* memiliki *Onan na Marpatik* maka *Patik ni Onan* (Aturan dari Pasar) dibuat oleh *Bius* yang bersangkutan.

Onan na Marpatik berarti *onan* yang memiliki *Patik* dan *Uhum* sendiri yang dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dengan *onan*. *Patik ni onan* atau hukum pasar meliputi berbagai aspek Hukum yang terutama menjamin keamanan dan ketertiban serta kebebasan dan perlindungan lalu lintas perdagangan antar wilayah dan antara Toba dan dunia luar termasuk perlindungan bagi para pelaku pasar lokal ataupun pendatang. Selain itu Hukum *Onan* juga meliputi norma-norma moral dan sosial yang mengatur perilaku warga dalam *maronan*, atau menjual dan atau membeli.

Onan Na Balga (Pasar Besar) menjadi satu lembaga. Lembaga *Onan Na Balga* merupakan lembaga kewilayahan untuk beberapa *Bius*, atau supra *Bius*, karena memang didirikan atas kesepakatan beberapa *Bius* bertetangga. Lembaga ini dibentuk atau didirikan atas kesepakatan berdasarkan *padan*, atau perjanjian, yang dilakukan dengan *martolon*, atau bersumpah. *Sumpah, gana* atau *uari* bagi orang Batak berarti mengutuk diri sendiri atau keluarganya atau leluhurnya jika tidak mematuhi atau melanggar apa yang sudah disepakati. Keputusan yang diemban oleh sumpah itu adalah keputusan dari kuasa yang lebih tinggi, yaitu para debata dan roh leluhur (*sumangot ni ompu*).

Sumpah menyatakan bahwa kutuk datang menimpa yang bersumpah jika apa yang dinyatakan itu bohong. *Martolon* dilakukan dengan bantuan suatu benda yang akan bertindak sebagai *panolonan* (wahana sumpah) atau *gana*. Wahana atau sarana sumpah itu tunduk kepada kekuatan tertentu, gagasan yang mendasarinya ialah bahwa yang bersumpah sama dengan sarana itu, akan mengalami sesuatu jika ia menyatakan yang tidak benar¹⁷. Wahanan sumpah perjanjian diperlambangkan oleh *Batu Somong*. Di *Batu Somong*, atau Batu Penyumpahan inilah setiap pihak mengucapkan sumpah. Tentang *Batu Somong* dan sumpah, Vergouwen menulis sebagai berikut

Sebuah cara pengambilan sumpah yang khas ialah apa yang dilakukan pada batu somong (batu penyumpahan) yang dibanyak daerah terdapat terdapat di pekan pusat suatu kelompok suku atau *marga* atau di kampung leluhur suatu galur besar. Banyak sumpah penting dan janji dikukuhkan di batu ini. Ia merupakan sebuah batu besar yang diakui sebagai tempat bersemayam roh para leluhur yang diimbau dengan cara memainkan gonggong. Orang beranggapan bahwa batu itu dalam dirinya sendiri memiliki kuasa adikodrati yang besar¹⁸.

Onan Na Marpatik atau *Onan* yang Berperaturan atau berhukum antara lain dan tertua adalah *Onan* di Limbong yang disebut *Onan Simanggurui* (Pasar Tempat Upacara Puja). *Onan* ini diduga sudah ada sejak zaman Sianjurmulumula dan terletak di bukit yang memisahkan Lembah Limbong dan Sagala. *Onan* ini ini berperan penting sebagai pusat pertukaran barang antar pesisir dan pedalaman di jaman dulu. Bahkan *Onan Simanggurui* juga dikunjungi oleh pedagang dari pesisir (orang Melayu)¹⁹. *Bius Parsanggaran* di Silalahi Nabolak memiliki *Onan Na Marpatik* yang berlaku bagi masyarakat Si Lahisabungan dan bagi pendatang di *harajaan Bius Parsanggaran*. Sementara *Onan Na Marpatik* di *Bius Pangurusan* yang disebut *bius* Si Tolu Hae Horbo dibuat oleh *marga Naibaho*, Simbolon dan Sitanggung untuk dipatuhi oleh seluruh *harajaan bius Pangurusan*, baik masyarakat setempat atau masyarakat pendatang²⁰. Masih ada *Onan Na Marpatik* lain seperti di Urat Toba Samosir dan di Baligeraja Toba Holbung

Onan merupakan satu lembaga hukum. Bahkan Vergowen²¹ menyebut *Onan* sebagai institusi yang paling efektif di antara lembaga hukum Toba. *Onan Na Marpatik* merupakan lembaga penting dalam sistem hukum Negeri Toba. Fungsi lembaga *Onan Na Marpatik* sebagai prinsip *Bius* yang diterapkan untuk keperluan tertib hukum territorial. *Onan* merupakan lembaga nyata untuk urusan yang bersifat regional di bawah Pendeta-Raja di wilayah masing-masing dan di bawah Singamangaraja untuk urusan territori seluruh Toba dan dunia luar.

Dalam urusan yang menyangkut hal-hal yang umum dilakukan oleh Negara, *Onan*-lah yang pegang peranan mengatur lalulintas sosial dan perdagangan antar wilayah dan dunia luar, menjamin keamanan, mengatur hubungan dengan pusat (Singamangaraja). Singamangaraja sendiri pada prinsipnya tidak perlu dan jarang berhubungan langsung dengan *Bius* individual, juga tidak dengan urusan intern *Bius* Bakkara sendiri, tempat kedudukannya. Mengingat praktek ini realisasi kehidupan bernegara terjadi lewat institusi *Onan* dan peranan Singamangaraja dalam institusi tersebut²².

Onan merupakan dunia terbuka bagi masyarakat Toba tradisional dan bagi setiap orang yang datang ke *Onan* tersebut. Agar tercipta keamanan dan perdamaian di *onan*, dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pengunjung *onan*, maka setiap orang yang datang ke *onan* wajib mematuhi *patik ni onan* atau hukum *onan*. Hukum *Onan* meliputi berbagai aspek hukum yang

menjamin keamanan dan ketertiban serta kebebasan dan perlindungan lalu lintas perdagangan antar wilayah dan antara Toba dan dunia luar termasuk perlindungan bagi para pelaku pasar lokal ataupun pendatang. Selain itu Hukum *Onan* juga meliputi norma-norma moral dan sosial. Hukum *Onan* mengatur perilaku warga terkait dengan sistem pasar. Adapun patik ni onan atau hukum onan adalah:

1. Selama tiga hari yaitu sehari sebelum hari pasar, selama berada di pasar, dan sehari sesudah hari pasar, pengunjung pasar tidak boleh diganggu oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Dengan demikian masyarakat setempat dan “pendatang” (orang luar) menikmati perlindungan hukum pada hari pasar dan selama ia di pasar.
2. Ukuran atau sukatan yang berlaku di onan besar bersifat standar (baku) sesuai ketentuan. Pelanggaran (penipuan) dihukum.
3. Selama tiga hari yaitu sehari sebelum pasar, sehari selama pasar, dan sehari sesudah pasar, setiap bentuk pelanggaran atau penipuan dalam mekanisme pasar, setiap konflik yang menjurus pada kekerasan harus dihentikan.
4. Pantang melakukan tagihan piutang pada hari pasar. *Hutang* piutang harus diselesaikan di luar hari pasar²³. Tetapi jika utang terjadi di onan, penyelesaiannya harus ditagih di onan juga.
5. Orang yang merasa terancam oleh tindakan demena-mena atau di luar hukum, dapat mengadukan masalahnya kepada penguasa pasar dan ia berhak mendapat perlindungan atau tidak dapat diganggu sampai raja-raja atau dewan pasar mengeluarkan keputusan.
6. Tidak boleh mengadakan keributan atau perkelahian apalagi pembunuhan di onan.
7. Jika timbul konflik, harus disampaikan kepada penguasa Lembaga *Onan* atau Dewan Raja-raja Pasar yang bertindak sebagai juru damai. Pihak yang mengabaikan akan ditindak oleh Dewan Raja-raja Pasar yang bertindak sebagai “penegak hukum”.

Patik dohot Uhum dari Raja Si Singamangaraja

Apakah Kerajaan Dinasti Singamangaraja memiliki aturan dan hukum?. Jawabannya, ya. Ada dua PDU yang berlaku dalam Kerajaan Dinasti Singamangaraja. Pertama, Raja Singamangaraja mempertahankan dan melestarikan PDU yang sudah berlaku dalam masyarakat Batak Toba pada masa itu, yaitu PDU yang dimiliki dan dilaksanakan oleh masing-masing Huta, Horja, dan Bius. Sebagai contoh tentang hukum kepemilikan tanah atau huta atau golat tidak pernah diubah oleh Raja Singamangaraj.

Kedua, sebagai maharaja negara Batak Toba tua dan sebagai pemimpin adat dan Raja Imam, Kerajaan Dinasti Singamangaraja memiliki PDU yang dibuat

oleh Raja Singamangaraja. PDU yang dibuat oleh Raja Singamangaraja, meskipun disampaikan secara lisan, sangat dipatuhi oleh raja-raja, masyarakat dan semua perangkat birokrasi di kerajaan Dinasti Singamangaraja dan di semua harajaon bias yang menyatakan berkonfederasi dengannya. Raja dan masyarakat bias percaya jika mereka mematuhi PDU yang dibuat atau disampaikan secara lisan oleh Raja Singamangaraja, mereka akan mendapat keberuntungan dan kesejahteraan, sedangkan jika tidak mematuhinya akan mendapat kerugian besar dan malapetaka.

Berikut ini merupakan PDU di kerajaan Singamangaraja terkait dengan *hademahon*, atau keamanan dan ketenteraman, yang diungkapkan dalam metafora berikut:

Iring-iring na so jadi lupa
Tomutomu na so jadi ambaton
Indahan ragia na so jadi mago
Sangsing ni onan na so jadi muba.

Iring-iring ni adat: kalau ada yang meninggal dunia, harus dilihat, membawa ulos atau beras di dalam tandok.

Tomu-tomu ni adat: kalau ada pembicaraan raja, menebus yang tarbeang dan melepas yang tarihot, jangan menghambat pembicaraan raja dan adat raja.

Indahan ragia: nasi yang bermakna sehingga tidak boleh hilang ataupun dirampas.

Sangsing ni onan: ketentuan bahwa satu hari sebelum hari pasar dan satu hari sesudah hari pasar, tidak boleh diganggu siapapun juga yang datang ke pasar, harus aman dan tenteram setiap orang pergi dan pulang dari pasar, laki-laki atau perempuan dan juga anak-anak, siapapun tidak boleh melupakan aturan dari pasar tersebut.

Patik ni Harajaon Singamangaraja juga diungkapkan sebagai berikut²⁴:

1. Sisingamangaraja, sampuludua bortiana,
Sukup pelean Debata, baen parsinta-sintaanna.
2. Sisinga Mangaraja, hasaktian habonaran,
Anggi-anggi di partubu, haha di *harajaon*.
3. Sahala raja Batak, *harajaon* Singa Mangaraja,
Sisingahon *harajaon* di Batak sibirong mata;
4. Tanduk so suharon, mataniari so dompakon
Hatana na so jadi laoson, tonana na so jadi juaon
5. Pangaitan ni sangap, pangahitan ni badia,
Sihorus na gurgur, siambai na longa.
6. Singa mangalompoi, singa na so halompoan,
Hatorusan ni Debata, hatorusan ni sombaon,
7. Paradat sijujung ni ninggor, *paruhum* sitingkos ni ari.

Sipalua na tarbeang, sitanggali na tartali.

Ini menjadi *saong-saong sian ginjang, lombu-lombu sian lambung, lapik-lapik sian toru* dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan di Kerajaan Singamangaraja.

Raja pembuat *Patik* dan *Uhum*, dianggap sebagai pengganti debata dan wakil dari debata. Karena itu PDU yang dibuat oleh Raja berarti itu adalah perintah debata. Karena itu Melanggar PDU yang dibuat Raja berarti melanggar perintah Debata. Bahkan siapa yang mengadu kepada Raja berarti juga mengadu kepada debata.

Ada dua jenis PDU dalam Kerajaan Si Singamangaraja, yaitu PDU tertulis dan lisan. Menurut Sidjabat, *PDU* Kerajaan Dinasti Singamangaraja dalam tulisan terdapat dalam buku *Pustaka Laklak*. Buku ini sekaligus memuat sejarah Singamangaraja, filsafat Batak, sistem pemerintahan, peraturan-peraturan di bidang ekonomi dan lain sebagainya²⁵. Sebaliknya, "*PDU*" lisan didasarkan atas *parbinotoan* (pengetahuan adikodrati) yang ia miliki maupun melalui ilham yang diperoleh dari *Debata* dalam suatu tapa semedi dan kemudian *ditonahon* (disampaikan) secara lisan kepada masyarakat.

PDU atau aturan-aturan dan hukum yang digunakan oleh Raja Singamangaraja untuk memerintah *Harajaan* Toba dapat dalam bentuk lisan. PDU lisan berasal dari *ilham* yang diperoleh oleh Raja Singamangaraja dari *Debata*. PDU dalam bentuk lisan juga dipatuhi oleh masyarakat bius sebab masyarakat percaya bahwa Raja Singamangaraja dapat langsung "*marpangidoan*" (memohon) kepada *Debata* tentang berbagai hal untuk mengatur masyarakat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang *digomgom* (dilindungi). Ilham diperoleh ketika berdoa di Ruma Santi yang disebut *Sogit*. Yang dapat masuk ke *Sogit* hanya Raja Singamangaraja untuk berdoa kepada *Debata* Mulajadi Na Bolon. Di sini ia akan mendapatkan "*boa-boa sian Debata*" (pemberitahuan dari *Debata*). Tentang kemungkinan akan datang penyakit atau jika ada penyakit, misalnya, Raja Singamangaraja mendapatkan wangsit dari *Debata* tentang cara mengatasinya, mungkin dengan itak puti, hambing puti, atau babi ambat. Raja Singamangaraja memberitahukan wangsit ini kepada pengawal agar pengawal mengumumkannya kepada masyarakat bius.

PDU dalam Kerajaan Dinasti Singamangaraja, baik lisan maupun tulisan sudah dibuat dan berlaku dari sejak Raja Singamangaraja I hingga Raja Singamangaraja XII. *PDU* tertulis dapat dibaca dalam dua naskah yaitu Naskah Bakara/van der Tuuk dan naskah Raja Buntal putera Singamangaraja XII²⁶ yang mengatur bidang kemasyarakatan, perkawinan dan ekonomi. Naskah Raja Buntal memuat hukum Singamangaraja XII yang khusus disampaikan kepada masyarakat Si Onom Hudon di Kabupaten Dairi sekarang. Ketika ia berada di Sionom Hudon, penduduk menanyakan hukum apa yang harus mereka taati dan Raja

Singamangaraja mengatakan hukum itu ialah “hukum dari nenekku” yaitu hukum yang sudah dibuat oleh leluhur tetapi tidak dipraktekkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sidjabat, dalam naskah Raja Buntal, hukum yang diberikan oleh Si Singamangaraja mengatur soal:

1. soal pembunuhan;
2. soal hutang piutang;
3. soal pemerkosaan seorang wanita yang sudah berumahtangga;
4. soal pemerkosaan seorang wanita yang belum berumahtangga;
5. soal wanita yang mengambil inisiatif meninggalkan suaminya;
6. soal larangan meracun;
7. soal hewan piaraan yang terseruduk mati;
8. soal larangan mencuri;
9. hukuman tentang pencuri tanam-tanaman;
10. soal ganjaran bagi yang mengawini seorang wanita yang telah bertunangan;
11. soal ganjaran bagi pembakar rumah.²⁷

Setelah Raja Singamangaraja menyampaikan hukum yang harus ditaati, maka penduduk Si Onom Hudon menyatakan bersedia melaksanakan dan mentaati hukum tersebut dan diresmikan secara adat dengan dihadiri oleh para raja huta.

Meskipun Raja Singamangaraja ingin melestarikan PDU yang sudah berlaku di tiap bius, horja dan huta, tetapi ia juga mengubah hukum yang dianggap tidak manusiawi. Ganjaran bagi pencuri diwajibkan menyediakan seekor babi yang besar. Jika tidak sanggup membayar, maka kepadanya diwajibkan untuk membayar dengan tenaga. Tidak kalah pentingnya ialah bahwa dalam naskah Bakkara masih ada kemungkinan bagi seorang pencuri yang tertangkap untuk dijual bila ia misalnya tidak sanggup membayar denda yang ditentukan menurut hukum tersebut. Pencuri yang dihukum ialah apabila ia mencuri untuk *parbodarian* (kebutuhan hari esok) atau memperkaya diri. Ini disebut sebagai *tangko hatoban* (mencuri seperti budak). Jika mencuri karena terpaksa atau dimakan ditempat sampai kenyang, maka ia tidak dihukum. Ini disebut sebagai *tangko raja* atau mencuri seperti raja²⁸.

Manodos (membunuh) karena membela diri tidak dihukum. Tetapi jika ada unsur kesengajaan atau balas dendam atau karena *late* (iri hati) dan *elat* (dengki) akan dihukum. Soal hukum ganjaran bagi pembunuh, Naskah Bakkara merumuskannya sebagai berikut: *mata dipolsop do i mata pinolsop, jolma dibunu do jolma binunu, molo dapot di tangan*²⁹.

Hukuman paling berat dan memalukan ialah menjadi *hatoban* atau budak dalam batas waktu tertentu. Sistem perbudakan tidak ada tanpa batas waktu, melainkan hanya dalam batas waktu tertentu, misalnya untuk membayar utang. Sisingamangaraja sangat menentang perbudakan dan berusaha untuk

menghilangkan perbudakan. Dia selalu berkorban baik tenaga dan materi untuk menebus para budak³⁰. Pada kunjungan-kunjungan Raja Singamangaraja ke daerah, ia selalu mengutamakan tindakan melepaskan orang yang sedang dipasung dan budak-budak yang tertawan. Jika Raja Singa Mangaraja melintasi suatu daerah, “*Ai ingkon malua do jolo angka na tarbeang, ingkon ditanggali na tartali, na hona ihot dohot na hona bajo, manak dohot parmusuon*”³¹.

Kemana saja ia pergi dia menanyakan, “Adakah orang yang sedang dipasung?”. Dan kalau ada budak atau tawanan yang dipasung, maka dimintanya dengan sangat agar orang itu segera dilepaskan. Perbudakan dan pemasungan itu tidak sesuai dengan wibawa kerajaan yang dimilikinya. Karena itulah dianjurkannya agar ada hukum yang harus diikuti oleh penduduk, supaya mereka tidak memakai hukum rimba³².

Pemeriksaan atau yang berbuat jinah merupakan perbuatan yang paling hina dalam masyarakat Batak-Toba. Karena itu pemerkosa adalah *tu hau tabaon, tu aek arsihon, tu ramba tutungon* (ke pohon ditebang, ke air dikeringkan, ke rumput dibakar). Karena itu pemerkosa dikenakan hukuman *dipaduru* (dikucilkan) sebagai hukuman sosial. Ia diikat di pintu gerbang dan setiap orang yang melewati pintu tersebut wajib meludahinya.³³ Dalam hukum Si Singamangaraja ditentukan bahwa ia cukup membayar denda yang berat dan minta maaf di depan masyarakat dan pengetua di kalangan penduduk³⁴.

Di bidang ekonomi naskah Bakara sangat menekankan pada adanya sukatan yang tepat, *na so boi hurang na so boi lobi*, atau yang tak boleh kurang dan tak boleh lebih.

Jika ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum, maka tiap hukuman yang akan diberikan ditetapkan melalui musyawarah raja-raja dan keluarga dan dilaksanakan secara bersama-sama segera sesudah keputusan diambil.³⁵

Sikap dan Kepatuhan Masyarakat atas Patik dohot Uhum

Masyarakat Batak-Toba tradisional bersikap dan berperilaku setia, serta berpegang teguh dan menjunjung tinggi atas “*PDU*” yang mereka miliki. Itu karena ada kaitan antara aturan dan hukum dengan ideologi kerohanian (religi) dan ideologi kekerabatan (adat)³⁶. Secara khusus, itu terjadi karena *PDU* berkaitan dengan atau mengandung nilai agama dan adat. Kesadaran hukum tradisional mengandung makna religi. Hukum tradisional yang disebut *PDU* adalah aturan yang datang dari Debata Mulajadi Na Bolon melalui nenek moyang yang mengatur kehidupan manusia dalam interaksinya dengan Tuhan dan roh leluhur dan dengan sesama manusia. Bahwa etnik Batak Toba tradisional memiliki sikap dan perilaku kesetiaan yang tinggi dan menjunjung hukum tersirat dan tersurat dalam ungkapan berikut:

Habang sitapi-tapi, songgop siruba-ruba
Patik na so jadi mose, Uhum na so jadi muba
Terbang burung si Tapitapi, hinggap si Rubaruba
Aturan yang tidak bisa diingkari, hukum yang tidak boleh diubah.

Ungkapan metafora di atas menunjukkan masyarakat tradisional Batak Toba sangat taat pada *PDU*. Nilai dan perilaku ketaatan dan kesetiaan pada peraturan dan hukum juga terdapat pada ungkapan “*Patik naso jadi oseon*”, yang mengandung makna aturan yang tidak bisa dihilangkan dan “*Uhum na so jadi ubaon*” yang bermakna hukum yang tidak bisa diubah/dibelokkan mengandung nilai kesetiaan terhadap janji dan kepatuhan terhadap aturan dan hukum. Bagi masyarakat Batak Toba tradisional, janji, aturan dan hukum merupakan hal yang tidak mungkin untuk direkayasa dan tidak bisa dipermainkan³⁷. Oleh karena itu tidak benar bahwa negeri Batak Toba-Tua tidak mengenal hukum alias anarkhi sebagaimana laporan-laporan misionaris pada bagian kedua abad ke-19. Orang Batak sejak kecil sudah diajari dan diamanatkan supaya *marpatik-maruhum* (berpegang pada patgik dan *Uhum*) untuk mengetahui yang baik dan yang buruk, atau agar mengerjakan yang baik, menyingkirkan yang buruk.

Masyarakat Batak Toba tradisional percaya bahwa *PDU* berasal dari Debata. Oleh karena itu bagi masyarakat Batak Toba tradisional, *PDU* harus dipatuhi atau dilaksanakan dengan benar dan jujur. Sebab siapapun yang melaksanakan *PDU* dengan benar dan jujur, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Debata. Masyarakat Batak Toba tradisional percaya³⁸: *Patik sijunjung ni ninggor, Uhum sitingkos ni ari; Ido gurat panorusi tu Ompunta Mulajadi*. Raja Patik Tampubolon menjelaskan:

Natutu situtu do, togor ni ninggor do *Patik*, jala songon tingkos ni ari do *Uhum*. Laos songon i do sahala hasaktian ni Siraja Batak, tingkos jala togor mangulahon *Patik/Uhum* dampak Ompunta Mulajadi Nabolon, ndang mungkit, ndang monggal, umbahen na gabe gurat panorusi sahat tonggo-tonggona, tamiangna, pangidoanna tu Ompunta Mulajadi, ala na marsahala do *Patik dohot Uhum*, na sian Debata. Asa dibagasan hatigoran, hasintongan i do sahala/hasaktian i, na mambahen marsahala dohot marhasaktian³⁹.

Jadi, *PDU* juga bermakna mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Orang Batak-Toba selalu mengatakan “*Unang bahen na so Uhum, unang ulahon na so jadi*” (jangan perbuat yang tidak sesuai dengan hukum, jangan lakukan yang dilarang). Jika ada kegiatan atau pembicaraan apapun, orang Batak-Toba selalu berdasarkan: “*Sise mula hata, sungkun mula uhum*” (sapa awal bicara, tanya awal hukum). Tentang hal ini Raja Patik Tampubolon menulis sebagai berikut:

Asa sise do mula ni hata, sungkun-sungkun mula ni *Uhum*; molo so jumolo hata manise dohot hata manungkun, ima na unang, na tongka dohot na so jadi, sala ma i tu *Patik dohot Uhum*. Ai di hata manise dohot hata manungkun i do hatigoran dohot hasintongan-habonaran, na jadi hangoluan sian haDebataon.⁴⁰

Agar sapa awal pembicaraan, tanya awal hukum; kalau tidak terlebih dahulu kata menyapa dan kata bertanya, itu yang dilarang, yang pantang dan yang tidak boleh dilakukan, itu salah kepada *Patik* dohot *Uhum*. Karena pada kata menyapa dan kata bertanya itulah kejujuran-kebenaran, yang jadi kehidupan dari keDebataan.

Kepatuhan masyarakat Batak Toba-tua atas aturan dan keputusan menunjukkan kuatnya kesadaran kolektif dalam apa yang disebut solidaritas mekanis. Atas dasar solidaritas mekanis, tiap anggota masyarakat terikat langsung kepada masyarakat. Di dalam kondisi solidaritas mekanis, di mana individu-individu dianggap menyatu dengan tata moral, suatu pusat yang memberi pengarahan yang terdiri dari lambang-lambang moral kolektivitas adalah perlu. Karena itu masyarakat seperti ini hanya membutuhkan satu elit moral – para pendeta, kepala-kepala atau kaum kesatria – untuk berlaku sebagai fokus dan pusat dari kehidupan sosial yang terorganisasi.⁴¹

Masyarakat dengan solidaritas mekanis memiliki rasa kebersamaan kuat yang tampak dalam berbagai aktivitas seperti kepercayaan-kepercayaan upacara-upacara. Juga penduduk tidak hanya memperlihatkan semangat kemasyarakatan terhadap pemimpin dan masyarakat secara utuh, tetapi juga dengan saling membantu pada saat panen, mengadakan pesta atau dalam keadaan darurat. Ini merupakan etos sosio-kebudayaan yang mendasari sistem nilai, moral, dan cara berpikir masyarakat.⁴²

Catatan Akhir

-
- ¹ Raja Patik Tampubolon, 2002. *Pustaka Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama, h.50.
 - ² Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h.50.
 - ³ Raja Patik Tampubolon. *Ibid*, h. 50; Ibrahim Gultom. 2010. *Agama Malim di Tanah Batak*. Bumi Aksara, Jakarta, h. 208.
 - ⁴ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h.49.
 - ⁵ Raja Patik Tampubolon. *Ibid*, h.50.
 - ⁶ Bisuk Siahaan. 2005. *Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. Jakarta: Kempala Foundation, h. 304.
 - ⁷ Bisuk Siahaan, *ibid*, h. 303.
 - ⁸ Butir butir Patik dohot Uhum ni Toba baik tentang petunjuk dalam kehidupan sehari-hari dan peraturan yang tidak boleh dilanggar, liha Bisuk Siahaan, *ibid*, h. 322-324.
 - ⁹ Bisuk Siajaan, *ibid*, h. 304-308.
 - ¹⁰ Penjelasan lebih rinci tentang masing-masing uhum ini lihat Bisuk Siahaan, *ibid*, h. 321-322.
 - ¹¹ Penjelasan lebih lanjut tentang Subang serta butir-butir yang mengatur subang lihat Bisuk Siahaan, *ibid*, h. 327-347.
 - ¹² Bisuk Siahaan, *ibid*, h. 307-308.
 - ¹³ Raja Patik Tampubolon. *Ibid*, h. 50.
 - ¹⁴ Sitor Situmorang. 2004. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*. Jakarta: Komunitas Bambu, h. 14.

- ¹⁵ Bisuk Siahaan, *ibid*, h. 94-153.
- ¹⁶ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h.
- ¹⁷ *Ibid*.
- ¹⁸ *Ibid*.
- ¹⁹ Sitor Situmorang. *Ibid*. h, 192.
- ²⁰ Ulbert Silalahi. 1998. *Raja Silahisabungan*. Bandung: Bina Budhaya.
- ²¹ *Ibid*, h. 190.
- ²² *Ibid*, h. 199.
- ²³ *Ibid*, h. 192.
- ²⁴ Raja Patik Tampubolon, *Ibid*, h. 135-141.
- ²⁵ Menurut Sidjabat, Pustaka Si Singamangaraja yang cukup tebal tersimpan di Universitas Leiden. W.B. Sidjabat. 1982. *Ahu Si Singamangaraja*, Jakarta: Sinar Harapan, h. 197.
- ²⁶ Pembahasan tentang kedua sumber ini baca W.B. Sidjabat, *ibid*, h. 78, 235.
- ²⁷ *Ibid*, h. 235.
- ²⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Raja Gomal Sinambela di Bakara.
- ²⁹ W.B. Sidjabat, *ibid*, h. 235.
- ³⁰ *Ibid*.
- ³¹ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 148.
- ³² W.B. Sidjabat, *ibid*, h.87.
- ³³ Op Cit.
- ³⁴ W.B. Sidjabat, *ibid*, h.87.
- ³⁵ Loc cit.
- ³⁶ Pembahasan tentang hal ini lihat George Balandier. 1986. *Antropologi Politik*. Jakarta: CV. Rajawali..
- ³⁷ Basaria, *ibid*, Ida Basaria. “Ungkapan Metafora Pada Etnis Batak Toba”. Makalah Seminar Nasional Budaya Etnik III edisi 11. 01 Mei 2009. Diposkan oleh Departemen Sastra Daerah - FIB USU. Diunduh dari <http://sastradaerahu.blogspot.com/2009/05/ungkapan-metafora-pada-etnis-batak-toba.html>, h.10.
- ³⁸ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 92.
- ³⁹ Raja Patik Tampubolon, *ibid*, h. 92-93.
- ⁴⁰ *Ibid*.
- ⁴¹ Suzanne Keller. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit* (terjemahan), Jakarta: Rajawali, h. 189-190.
- ⁴² Joep Bijlmer dan Martin Reurink, *Kepemimpinan Lokal di Lingkungan Urban Jawa: Dari Ideologi ke Realitas*, dalam Philip Quarles van Ufford (ed). 1988. *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*, Jakarta: Gramedia, h. 156.

Bab 9

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam masyarakat Batak Toba tradisional telah ada organisasi pemerintahan yang disebut kerajaan (*harajaon*). Dalam berpemerintahan, masyarakat Batak Toba tradisional berdasarkan pada ideologi, struktur dan aparatur sebagai *the ruler of* Batak Toba, serta berdasarkan pada peraturan dan hukum yang disebut *patik dohot uhum* sebagai *rule of law*.

Ideologi birokrasi kerajaan tradisional dalam masyarakat tradisional Batak Toba disistematisasi dari budaya kerohanian agama dan budaya kekerabatan adat. Budaya kerohanian agama dan budaya kekerabatan adat ditransformasi menjadi ideologi birokrasi. Dua ideologi birokrasi, ideologi kerohanian dan ideologi kekerabatan, menjadi dasar dalam menstrukturisasi birokrasi baik secara teritorial maupun secara fungsional. Ideologi birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional membentuk ideologi komunalisme yang mengutamakan harmoni.

Harmoni menjadi roh dalam kehidupan jagat raya (harmoni antara banua ginjang, banua tonga dan banua toru dan harmoni antara Batara Guru atau Tuan Bubi Na Bolon, Soripada atau Tuan Silaon Na Bolon dan Mangalabulan atau Tuan Pane Na Bolon), harmoni antara makro kosmos (jagat raya) dan mikrokosmos (jagat manusia), dalam kehidupan masyarakat (harmoni antara dongan tubu, hula-hula dan boru dan harmoni antara manat, somba dan elek) dan dalam kehidupan birokrasi (harmoni antara huta, horja dan bius).

Ada kaitan antara budaya kerohanian, budaya kekerabatan dan budaya birokrasi. Kaitan antara budaya kerohanian dan budaya kekerabatan ialah Debata Batara Guru dihadirkan oleh rajani hula-hula, Debata Bala Bulan dihadirkan oleh raja ni dongan tubu, dan Debata Balabulan dihadirkan oleh raja ni dongan tubu. Dalam birokrasi, Debata Batara Guru dihadirkan oleh raja bius, Debata Bala Bulan dihadirkan oleh raja horja, dan

Debata Balabulan dihadirkan oleh raja huta. Kemudian Debata Batara Guru dan raja ni hula-hula dihadirkan oleh raja, Debata Bala Bulan dan raja ni dongan tubu dihadirkan oleh birokrat/aparatur, dan Debata Balabulan dan raja ni boru dihadirkan oleh warga. Karena itu manat, somba dan elek menjadi nilai-nilai dan norma-norma utama bukan saja dalam kehidupan kemasyarakatan melainkan juga kehidupan berpemerintahan. Nilai-nilai dan norma-norma manat, somba dan elek ditrasformasikan dalam kehidupan berpemerintahan.

Birokrasi tradisional dalam masyarakat Batak Toba bukan birokrasi legal-rasional yang hirarkhis dan impersonal (seperti dalam birokrasi weber), atau birokrasi patrimonial (seperti dalam kerajaan-kerajaan di Jawa). Birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional merupakan satu “birokrasi komunal”. Komunalitas oleh ikatan kekerabatan dan kerohanian sangat kental dalam kehidupan birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional. Birokrasi komunal memperlihatkan solidaritas yang kuat oleh ikatan kekerabatan dan kerohanian.

Birokrasi komunal dicirikan oleh harmoni antara pemerintah dan warga berdasarkan relasi sosial kultural, keputusan diambil secara bersama-sama, menghargai otonomi baik individual, institusional, dan teritorial berdasarkan wewenang yang sah secara tradisional. Pengakuan terhadap raja adalah pengakuan karena memiliki “kuasa” berdasarkan nilai-nilai kultural, ikatan antara raja dan masyarakat dan antara satu wilayah (kecil) dengan wilayah lain (yang lebih besar) didasarkan atas “kontrak sosial” dan “kontrak organisasional” baik oleh ikatan kerohanian maupun ikatan kekerabatan (genealogis dan perkawinan) sehingga tidak ada kepatuhan total atau paksaan terhadap otoritas raja. Birokrasi dalam masyarakat Batak Toba tradisional tidak menghasilkan kekakuan dan infleksibilitas struktural (seperti dalam birokrasi rasional atau organisasi formal) melainkan mengidealisasi hubungan-hubungan sosial yang mesra serta suatu gaya yang lebih alami sesuai dengan nilai-nilai kultural tradisional.

Spirit kerohanian agama dan kekerabatan adat sangat mengakar dalam dinamika birokrasi tradisional terutama dalam hubungan antara raja dan masyarakat. Sebagai administrator puncak dalam birokrasi tradisional Batak Toba maka raja mampu menampilkan, menjalankan dan memadukan kebudayaan kerohanian dan kebudayaan kemasyarakatan secara seimbang

dan bersamaan karena raja memiliki “*sahala harajaon*” atau kuasa dan wibawa yang dalam alam kepercayaan masyarakat Batak Toba tradisional merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang Raja. Nilai-nilai yang terdapat dalam budaya kerohanian dan budaya kemasyarakatan tidak membentuk seorang raja/pemerintah dalam birokrasi Batak Toba yang otoriter dan feodal. Nilai-nilai tersebut akan menuntun sang raja/pemerintah untuk tetap responsif dan mengutamakan kepentingan rakyat/publik. Nilai-nilai budaya kemasyarakatan dan susunan masyarakat hukum adat Batak Toba juga menuntun Raja untuk selalu menghargai otonomi lokal (*huta*, *horja*, dan *bius*), dan Raja lebih berperan sebagai pembimbing, sebagai “*enabler*” dan sebagai “*public servant*”.

Struktur birokrasi pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional adalah struktur teritorial-fungsional. Struktur teritorial membagi birokrasi kerajaan tradisional masyarakat Batak Toba dalam tipe harajaon *huta*, harajaon *horja* dan harajaon *bius*. Harajaon *huta* adalah pemerintahan terkecil tetapi memiliki otonomi untuk mengatur kepentingan *huta*. Kemudian sejumlah harajaon *huta* membentuk persekutuan (berkonfederasi) yang disebut harajaon *horja* yang berfungsi mengatur hal-hal yang bersifat kepentingan bersama lintas *huta*. Kemudian sejumlah harajaon *horja* membentuk persekutuan (berkonfederasi) yang disebut harajaon *bius* yang berfungsi untuk mengatur hal-hal yang bersifat kepentingan bersama lintas *Horja*. Oleh berbagai tuntutan pengaturan kepentingan yang lebih luas maka sejumlah harajaon *bius* menyatakan bersekutu (berkonfederasi) dengan Kerajaan Dinasti Singamangaraja untuk mengatur hal-hal yang bersifat kepentingan bersama lintas *Bius*. Tiap teritori memiliki otonomi (*toba: manjujung baringinna*). *Huta*, *Horja* dan *Bius*, masing-masing merupakan daerah otonom, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakatnya.

Ada tiga faktor yang menentukan keterikatan masyarakat dalam satu “harajaon” yaitu ikatan kekerabatan adat dan keturunan/marga, ikatan kepercayaan agama atau religi, dan ikatan teritorial atau wilayah tempat tinggal yang sama. Ikatan kekerabatan (adat dan keturunan/ marga) sangat kuat dan ikatan religi kuat dalam harajaon *huta*, ikatan kerohanian agama atau religi sangat kuat dan *huta* ikatan adat dan keturunan/marga kuat dalam

harajaon horja, dan akhirnya ikatan kewilayahan dan religi sangat kuat dalam harajaon bius termasuk harajaon Singamangaraja.

Struktur fungsional membagi fungsi birokrasi kerajaan tradisional masyarakat Batak Toba dalam lima fungsi yaitu fungsi social dan adat, fungsi kerohanian, fungsi ekonomi dan pertanian, fungsi hokum, fungsi keuangan. Raja sebagai administrator puncak. Sementara fungsi sosial dan adat dilaksanakan oleh Pande Bolon, fungsi kerohanian agama oleh Parbaringin, fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban oleh Ulu Balang; fungsi ekonomi dan pertanian oleh Ulu Taon; fungsi hukum oleh Paruhum, dan fungsi keuangan oleh Ulu Dalu. Pengangkatan mereka didasarkan atas “kompetensi” sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Sebagai contoh, seorang Ulubalang, harus ahli dalam bela diri dan penguasaan ilmu *hadatuan* (perdukunan), Ulu Taon harus menguasai pengetahuan tentang iklim. Tupoksi Raja menyangkut pada memberi rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat di setiap teritori. Tupoksi Pande Bolon mengurus masalah-masalah adat dan upacara. Tupoksi Ulu Balang mengurus masalah-masalah pertahanan dan keamanan. Tupoksi Ulu Taon mengurus masalah-masalah pertanian. Tupoksi Parbaringin mengurus masalah-masalah keagamaan. Dan Tupoksi pengadilan adalah menangani pelanggaran dan perkara pengaduan. Baik raja huta, raja horja dan raja bius, di samping kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi di wilayahnya, juga merangkap/berfungsi sebagai raja adat karena kedudukannya tidak dapat dipisahkan sebagai pemimpin komunitas dan adat. Fungsi raja adat senantiasa dibutuhkan untuk melestarikan kehidupan kemasyarakatan.

Ketatalaksanaan birokrasi tradisional dalam masyarakat Batak Toba didasarkan atas aturan hukum yang diturunkan berdasarkan nilai-nilai dahn norma-norma kebudayaan yang dimiliki. Aturan dan hukum sebagai dasar dalam bersikap dan berperilaku dalam hidup bermasyarakat dan berpemerintahan disebut *Patik dohot Uhum*. Aturan dan hukum ini tidak tertulis, tetapi telah menjadi kesepakatan bersama oleh raja-raja bersama-sama dengan masyarakat. Aturan dan hukum tersebut menjadi dasar dalam bersikap dan berperilaku dalam hidup bermasyarakat dan berpemerintahan, baik oleh birokrasi maupun dan warga. Masyarakat Batak Toba tradisional menunjukkan sikap sangat patuh kepada aturan dan hukum karena

mematuhi aturan dan hukum berarti mematuhi raja yang membuat dan mematuhi raja juga berarti mematuhi Debata.

Saran

1. Ideologi harmoni sebagai inti dari ideologi birokrasi dalam masyarakat tradisional perlu dilestarikan dan diinstitutionalisasi dalam praktek birokrasi lokal dalam masyarakat modern sebagai kearifan lokal.
2. Nilai-nilai positif dari birokrasi komunal dalam birokrasi tradisional masyarakat tradisional perlu diasimilasi agar kondusif bagi praktek birokrasi lokal dalam masyarakat modern khususnya pemerintahan yang mayoritas penduduknya adalah etnik Toba. Untuk itu perlu dikaji secara intensif dan ilmiah fundasi-fundasi dasar birokrasi dalam masyarakat tradisional yang kondusif bagi praktek birokrasi lokal dalam masyarakat modern untuk keberhasilan birokrasi dalam pelaksanaan otonomi pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.
3. Birokrasi yang bertuhan (*mardebata*) seperti dalam birokrasi tradisional penting dalam birokrasi modern. Artinya, segala tindakan dan perilaku birokrasi didasarkan atas kepercayaan yang kuat kepada Tuhan.
4. Agar birokrasi dan warga, masing-masing menunjukkan semangat *manat*, *somba* dan *elek* ketika melakukan interaksi, ketika birokrat melayani dan ketika warga melakukan kontak dengan birokrasi dan ketika birokrasi berinteraksi dengan birokrasi lain. Dengan demikian tercipta harmoni dan komunalitas dalam kehidupan birokrasi modern untuk mewujudkan pemerintahan modern yang *gabe*, *mora* dan *sangap*.

Pustaka

Buku, Jurnal, Dokumen

- Abercrombie, Nicholas; Stephen Hill and Bryan S. Turner. 1984. *Dictionary of Sociology*. Middlesex: Penguin.
- Agung, Anak Agung Gde Putra. 2001. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Bailey, Kenneth D. 1987. *Methods of Social Research*. London: Free Press.
- Balandier, George. 1986. *Antropologi Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Basaria, Ida. "Ungkapan Metafora Pada Etnis Batak Toba". Makalah Seminar Nasional Budaya Etnik III edisi 11. 01 Mei 2009. Diposkan oleh Departemen Sastra Daerah - FIB USU. Diunduh dari <http://sastradaerahu.blogspot.com/2009/05/ungkapan-metafora-pada-etnis-batak-toba.html>.
- Blau, Peter M dan Marshall W. Meyer. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern* (terjemahan). Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Bordens, Kenneth S. and Bruce B. Abbott. 2002. *Research Designs and Methods: A Process Approach*. Fifth Edition. Boston: McGraw-Hill Company.
- Bruner, Edward M and Judith O. Becker (ed). 1979. *Art, Ritual and Society in Indonesia*. Papers in International Studies Southeast Asia Series No. 53. Ohio: Ohio University Center for International Studies. Southeast Asia Program. Athens.
- Budiarjo, Miriam (ed). 1984. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana: Jakarta.
- Castles, Lance; Nurhadiantomo; dan Suyatmo, ed. 1986. *Birokrasi, Kepemimpinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Edisi Revisi. Surakarta: Hapsara.
- Castles, Lance. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940*. Diterjemahkan oleh Maurits Simatupang. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Cooper, Phillip J. 1998. *Public Administration for the Twenty-First Century*. Orlando: Harcourt Brace College Publishers.
- Cunningham, Clark E. 1958. *The Post-war Migration of the Toba Bataks to East Sumatra*. Cultural report Series, Southeast Asia Studies. New Haven: Yale University.
- Etzioni-Halevy, Eva. 2011. *Birokrasi dan Demokrasi: Sebuah Dilema Politik*. Yogyakarta: Total Media.
- Gay, L.R. and P.L. Diehl. 1992. *Research Methods for Business and Management*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Geertz, Clifford. 1963. *Agricultural Involution*. Berkley: University of California Press.

- Geldern, R. Heine. 1982. *Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara* (penerjemah Deliar Noer). Jakarta: Rajawali.
- George, Vic dan Paul Wilding. 1992. *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat* (terjemahan). Jakarta: Grafiti.
- Gesick, Lorraine (penyunting). 1989. *Pusat, Simbol, dan Hirarki Kekuasaan: Esei-esi tentang Negara-negara Klasik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gortner, Harold F., Kenneth L. Nichols dan Carolyn Ball. 2007. *Organization Theory*. Third Edition. Thomson Wadsworth: Belmont. USA.
- Gultom, Ibrahim. 2010. *Agama Malim di Tanah Batak*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Gultom, Rajamarpodang, DJ. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: CV. Armanda.
- Harahap, Basyral Hamidy dan Hotman M. Siahaan. 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar.
- Hasibuan, Jamaludin. S. 1985. *Art Et Culture/Seni Budaya Batak*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.
- Henemen III, Herbert G. and Timothy A. Judge. 2006. *Staffing Organizations*. Fifth Edition. Singapore: McGraw-Hill.
- Herusatoto, Budiono. 1991. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- Heywood, Andrew. 1988. *Political Ideologies: An Introduction*. London: MacMillan Press Ltd.
- Hoadley, Mason C. *Administrasi Indonesia Modern: Kolegial, Abdi-dalem, Birokratis-Rasional, atau Birokratis-Semu?*. Peper disampaikan dalam seminar "Administrasi Negara Indonesia Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Datang". Diselenggarakan oleh Fisip UNPAR Bandung pada tanggal 17 Mei 2000 di Hotel Bale Pakuan, Bandung.
- Holt, Claire, et al. 1972. *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hutagalung, W. M. 1991. *Pustaka Batak: Taronbo dohot Turiturian ni Bangso Batak*. Tulus Jaya.
- Ihromi, T.O. 1977. *Antropologi Sosial Budaya II*. Jakarta: Fakultas Ilmu Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Jhonson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Gramedia: Jakarta.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit* (terjemahan). Jakarta: Rajawali.
- Kerlinger, Fred N. 1995. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Diterjemahkan oleh Landung R. Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. 1981. *Masalah-masalah Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Koentjaraningrat. 1981. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Antropologi Budaya*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kozok, Uli. 2009. *Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak*. Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia.
- Krause, Donald G. 1997. *The Way of The Leader*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Lumban Tobing, Adniel. 1957. *Sedjarah Si Singamangaradja*. Medan.
- Mahar, Ari Indrayono. Elite dan Birokrasi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, Nopember 1998. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Magister Administrasi Publik.
- Milakovich, Micael E. dan George J. Gordon. 2003. *Public Administration in America*. Eight Edition. Wadsworth Pub Co: New York.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI-Press.
- Moedjanto, G. 1987. *Konsep Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Terntang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Morgeson III, Forrest Vern. 2005. *Reconciling Democracy and Bureaucracy: Towards a Deliberative-Democratic Model of Bureaucratic Accountability*. Submitted to the Graduate Faculty of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. University of Pittsburgh.
- Mulder, Niels. 1985. *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nachmias, David and Chava Nachmias. 1987. *Research Methods in the Social Sciences*. Third Edition. New York: St. Martin's Press.
- Nainggolan, Togar. 2012. *Batak Toba Sejarah dan Transformasi Religi*. Medan: Bina Media Perintis,
- Neuman, W. Lawrence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Fifth Edition. Boston: Pearson Education. Inc
- Niessen, S.A. 1985. *Motif of Life in Toba Batak Texts and Textiles*. Dordrecht, The Netherlands: Foris Publications.
- O'Sullivan, Elizabethann dan Gary R. Rassel. 1989. *Research Methods for Public Administrators*. New York: Longman.
- Pabottingi, Mochtar. "Kaum Intelektual Pemimpin dan Aliran-aliran Ideologi di Indonesia sebelum Revolusi 1945". *Prisma*, Nomor 6, Juni 1982.
- Pasariboe, Salomo. 1938. *Memilih dan Mengangkat Radja di Tanah Batak Menoeroet Adat Asli*. Pedersen, Paul B. 1975. *Darah Batak dan Jiwa Protestan: Perkembangan Gereja Batak di Sumatera Utara (terjemahan)*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Peret, Daniel. 2010. *Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Terjemahan Saraswati Wardhany. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Purba, Maully. 2005. From conflict to reconciliation: the case of the gondang sabangunan in the Order of Discipline of the Toba Batak Protestant Church. *Journal of Southeast Asian Studies*. June 1, 2005. Diunduh dari <http://www.highbeam.com/doc/1G1-135214796.html> pada tanggal 22 mei 2012

- Purba, OHS dan Elvis E. Purba. 1997. *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*. Medan: Monora.
- Rita Smith Kipp, The Thread of Three Colors: The ideology of kinship in Karo Batak Funerals. Dalam Edward M. Bruner and Judith O. Becker. 1979. *Art, Ritual and Society in Indonesia*, Papers in International studies Southeast Asia Series, No. 53, Ohio University Center for International Studies.
- Said, M. Mas'ud. 2010. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press.
- Santoso, Priyo Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sangti, Batara. 1977. *Sejarah Batak*. Balige: Karl Sianipar.
- Seale, Clive (eds). 1998. *Researching Society and Culture*. London: SAGE Publications. Inc.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Second Edition. New York: John Wiley dan Sons.
- Siahaan, Bisuk. 2005. *Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. Jakarta: Kempala Foundation.
- Siahaan, Nalom. 1982. *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Grafina.
- Siahaan, N. 1964. *Sedjarah Kebudayaan Batak: Suatu Studi tentang Suku Batak*. Medan: CV. Napitupulu & Sons.
- Siahaan, N. dan H. Pardede. Tanpa Tahun. *Sejarah Perkembangan Marga-marga Batak Toba*. Balige: Indra.
- Sidjabat, W.B. 1982. *Ahu Si Singamangaraja*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sihombing, 1989. *Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat*. Jakarta: Tulus Jaya.
- Silalahi, Ulbert. 1989. *Kepemimpinan Lokal dan Pembangunan*, Jakarta: Tesis, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Silalahi, Ulbert. 1998. *Raja Silahisabungan*, Bandung: Bina Budhaya.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2009. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sinaga, Anicetus B. 2007. *Imamat: Batak Menyongsong Katolik*. Bina Media Perintis: Medan.
- Sinaga, Anicetus B. 2012. *Taman Monumen Dalihan Na Tolu Batak: Somba Marhulahula, Elek Marboru, Hormat Mardongan Tubu*. Bina Media Perintis: Medan.
- Sinambela, Raja Gomal (Cicit R.S.M. XI). *Mengenal Singamangaraja XI dan Perjuangannya*. Naskah Tulisan. Tanpa tahun.
- Situmorang, Sitor. 2004. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Smith, B.C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: George Allen & Unwin.

Kepustakaan

- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tampubolon, Raja Patik. 2002. *Pustaka Tumbaga Holing*. Cetakan Kedua. Jakarta: Dian Utama.
- Ufford, Philip Quarles van (ed). 1988. *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*. Jakarta: Gramedia.
- Vergouwen, J.C. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Azet.
- Vroom, C.W. "Pembangunan Organisasi: Sebuah Telaah Ulang tentang Tesis Birokrasi Patrimonial-Rasional di Asia". *Prisma* No. 6 Thn 1982. Jakarta: LP3ES.
- Warwick, Donald P. 1975. *A Theory of Public Bureaucracy*. Cambridge, Massachussets: Harvard University
- Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Free Press.
- Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Yin, Robert K. 1989. *Case Study Research Design and Methods*. Newbury Park. California: SAGE Publications. Inc.

Elektronik

<http://simanjuntak.or.id/2008/02/sibagot-ni-pohan/> diunduh pada 29 Agustus 2012.

Informan

- Amani Roma Sinambela
David Purba (A. Ruslan/Ompu Merlin).
Sahala Manullang (St. Gading).
Hampung Simamora.
Sidabutar.